SALINAN

BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

SALINAN

BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang:
a. bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis untuk menentukan arah, tujuan, dan langkah strategis pembangunan di tingkat daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kerangka pendanaan dan program Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran.
22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RPJM Desa.
(3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I pendahuluan;
b. bab II gambaran umum daerah;
c. bab III visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
d. bab IV program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
e. bab V penutup

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapperida.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

ttd.

IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 3 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SAFRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 147

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (3/45/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KONAWE UTARA

ENDI SAMRIN, SH., LLM
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19860715 201101 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daereah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe Utara,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 24

SALINAN

BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Narasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah / BAPPERIDA
Tahun 2025

Jl. Lintas Timur Sulawesi (Trans Sulawesi), Komp. Perkantoran Pemda Kab. Konawe Utara
Kel. Wanggudu - Kec. Asera 93353
bapperida.konaweutarakab.go.id – bapperida.konaweutarakab@gmail.com

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 , untuk memastikan keselarasan kinerja dan periodisasi dengan RPJMN Tahun 2025–2029 yang memuat 8 (Delapan) Asta Cita sebagai visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029 , sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*) yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD setelah mendapatkan masukan dari proses Musrenbang, pembahasan bersama Badan Legislasi DPRD Kabupaten Konawe Utara, serta masukan berdasarkan hasil evaluasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Harapan Kami semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara untuk lima tahun ke depan guna menjawab berbagai permasalahan daerah untuk mewujudkan Visi Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera.

Wanggudu, 3 September 2025
Bupati Konawe Utara,

ttd.

H. IKBAR, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 7
1.3.1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) 8
1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045..... 10
1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 11
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJMD Sulawesi Tenggara 13
1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJPD Kabupaten Konawe Utara..... 13
1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara ... 15
1.3.7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 16
1.3.8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 17
1.3.9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 17
1.3.10. RPJMD Daerah Sekitar 17
1.3.11. Dokumen Perencanaan Multi Sektor..... 17
1.3.12. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 17
1.3.13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)..... 18
1.3.14. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 18
1.4. Maksud dan Tujuan..... 18
1.5. Sistematika Penulisan..... 18
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 21
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi..... 21
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 21
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 21

2.1.1.2 Kondisi Topografi 22
2.1.1.3 Kondisi Geologi 22
2.1.1.4 Hidrologi dan Hidrogeologi 23
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi 24
2.1.1.6 Penggunaan Lahan 24
2.1.1.7 Kontribusi Ekonomi 25
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 26
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 30
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 31
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 32
2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 34
2.1.7 Demografi 36
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 39
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 39
2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 39
2.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 40
2.2.1.3 PDRB Perkapita 46
2.2.1.4 Laju Inflasi 47
2.2.1.5 Koefisien Gini 47
2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan 48
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua 50
2.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata 51
2.2.3.1 Angka Harapan Lama Sekolah 51
2.2.3.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 52
2.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi 52
2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 53
2.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif 54
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 55
2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama 55
2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan 56
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 57
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 58
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 58
2.3.1.1 Angka Ketergantungan 58

2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 58
2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan 58
2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum 59
2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 60
2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah 60
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 61
2.3.4 Transformasi Digital 62
2.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 62
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 63
2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto 63
2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa 63
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 64
2.3.6.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 64
2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 64
2.3.6.3 Indeks Desa Membangun 65
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 72
2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB 72
2.4 Aspek Layanan Umum 73
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 73
2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum 73
2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 73
2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik 74
2.4.2 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 75
2.4.3 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah 76
2.4.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 76
2.4.3.1.1 Pendidikan 76
2.4.3.1.2 Kesehatan 80
2.4.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92
2.4.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 98

2.4.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 104
2.4.3.1.6 Sosial..... 106
2.4.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... 108
2.4.3.2.1 Tenaga Kerja..... 108
2.4.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... 110
2.4.3.2.3 Pangan..... 112
2.4.3.2.4 Pertanahan..... 114
2.4.3.2.5 Lingkungan Hidup..... 114
2.4.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil..... 116
2.4.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa..... 117
2.4.3.2.8 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana..... 118
2.4.3.2.9 Perhubungan..... 121
2.4.3.2.10 Komunikasi Dan Informatika. 127
2.4.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..... 129
2.4.3.2.12 Penanaman Modal..... 131
2.4.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga.... 132
2.4.3.2.14 Statistik..... 132
2.4.3.2.15 Persandian..... 133
2.4.3.2.16 Kebudayaan..... 133
2.4.3.2.17 Perpustakaan..... 133
2.4.3.2.18 Kearsipan..... 134
2.4.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan..... 134
2.4.3.3.1 Kelautan dan Perikanan..... 134
2.4.3.3.2 Pariwisata..... 135
2.4.3.3.3 Pertanian..... 136
2.4.3.3.4 Perkebunan..... 138
2.4.3.3.5 Kehutanan..... 138
2.4.3.3.6 Energi dan Sumber Daya Mineral 139
2.4.3.3.7 Perdagangan..... 139
2.4.3.3.8 Perindustrian..... 140
2.4.3.3.9 Transmigrasi..... 141

2.4.3.4 Unsur Pendukung 142
2.4.3.4.1 Sekretariat Daerah 142
2.4.3.4.2 Sekretariat DPRD 143
2.4.3.5 Unsur Penunjang..... 143
2.4.3.5.1 Perencanaan..... 143
2.4.3.5.2 Keuangan 145
2.4.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan 148
2.4.3.6 Unsur Pengawasan 149
2.4.3.6.1 Pengawasan (Inspektorat Daerah) 149
2.4.3.7 Unsur Kewilayahan 152
2.5 Gambaran Keuangan Daerah..... 153
2.5.1 Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 154
2.5.1.1 Kinarja Pelaksanaan APBD 155
2.5.1.2 Ruang dan Kapasitas Fiskal Daerah 161
2.5.1.3 Neraca Daerah..... 165
2.5.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... 169
2.5.2.1 Kinerja Belanja Daerah..... 169
2.5.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran 175
2.5.2.3 Analisis Pembiayaan..... 175
2.5.3 Kerangka Pendanaan..... 181
2.5.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah 181
2.5.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan 184
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis..... 188
2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 188
2.6.2 Isu Strategis 195
2.6.2.1 Isu Global/Internasional..... 195
2.6.2.2 Isu Strategis Nasional 198
2.6.2.3 Isu Strategis Regional Wilayah Sulawesi . 201
2.6.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara 202
2.6.2.5 Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara... 208
BAB III VISI, MISI, PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH... 219
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 221
3.1.1 Visi dan Misi 221
3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.. 231
3.2 Strategis, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah 238
3.2.1 Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029 242

3.2.2 Pengembangan Wilayah..... 244
3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 250
3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 259
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... 313
4.1 Program Perangkat Daerah 314
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 370
BAB V PENUTUP 416
5.1. Kaidah Pelaksanaan..... 417
5.2. Pelakasanaan Pengendalian dan Evaluasi 418
5.3. Sinergi Pendanaan Pembangunan 419
5.4. Kesimpulan..... 419

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2030	9
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara	22
Tabel 2.2	Data Capaian Komoditas Sektor Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2023	27
Tabel 2.3	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2023	28
Tabel 2.4	Komoditas Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2023	29
Tabel 2.5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	38
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	41
Tabel 2.7	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	43
Tabel 2.8	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	44
Tabel 2.9	Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Konawe Utara tahun 2020–2024	45
Tabel 2.10	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	49
Tabel 2.11	Cakupan Kepesertaan Ketenagaerjaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	55
Tabel 2.12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	63
Tabel 2.13	Jumlah Rumah Berdasarkan Kelayakan di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	65
Tabel 2.14	Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024	66
Tabel 2.15	Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara	76
Tabel 2.16	Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara	77
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 - 2024	78
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2024	78

Tabel 2.19	Sekolah Terakreditasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024...	79
Tabel 2.20	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Utara.....	79
Tabel 2.21	Rasio Posyandu Per 1000 Balita di Kabupaten Konawe Utara	81
Tabel 2.22	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	81
Tabel 2.23	Penilaian Akreditas Puskesmas di Kabupaten Konawe Utara	82
Tabel 2.24	Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024.....	83
Tabel 2.25	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	83
Tabel 2.26	Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	84
Tabel 2.27	Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	84
Tabel 2.28	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	85
Tabel 2.29	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	86
Tabel 2.30	Angka Kesakitan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	86
Tabel 2.31	Persentase PHBS di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	87
Tabel 2.32	Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	88
Tabel 2.33	Prevalensi Stunting di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	91
Tabel 2.34	Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	92
Tabel 2.35	Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024....	93
Tabel 2.36	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	94
Tabel 2.37	Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	95
Tabel 2.38	Penyediaan Air Minum Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	97
Tabel 2.39	Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023	98

Tabel 2.40	Ketersediaan Sarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara	98
Tabel 2.41	Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara	99
Tabel 2.42	Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	100
Tabel 2.43	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021	101
Tabel 2.44	Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	104
Tabel 2.45	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	105
Tabel 2.46	Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	105
Tabel 2.47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2024	108
Tabel 2.48	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2024	109
Tabel 2.49	Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA di Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2024	110
Tabel 2.50	Jumlah korban berdasarkan jenisnya Tahun 2021-2023.....	110
Tabel 2.51	Perkembangan Status Hak Tanah di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	114
Tabel 2.52	Kinerja Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	114
Tabel 2.53	Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2024	116
Tabel 2.54	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	117
Tabel 2.55	Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024.....	118
Tabel 2.56	Kepersertaan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	118
Tabel 2.57	Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat Tahun 2019-2024	119
Tabel 2.58	Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 .	119
Tabel 2.59	Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2024	122
Tabel 2.60	Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	123

Tabel 2.61	Kondisi Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	124
Tabel 2.62	Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	125
Tabel 2.63	Jumlah Kecelakaan dan Korban Kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	126
Tabel 2.64	Jumlah Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	127
Tabel 2.65	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	127
Tabel 2.66	Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	128
Tabel 2.67	Perkembangan Koperasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	129
Tabel 2.68	Perkembangan Modal dan Aset Koperasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	129
Tabel 2.69	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	130
Tabel 2.70	Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	130
Tabel 2.71	Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	131
Tabel 2.72	Perkembangan Olahraga di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	132
Tabel 2.73	Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	133
Tabel 2.74	Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	134
Tabel 2.75	Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	135
Tabel 2.76	Kondisi Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	136
Tabel 2.77	Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	137
Tabel 2.78	Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024	138
Tabel 2.79	Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	139

Tabel 2.80	Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	140
Tabel 2.81	Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe Utara tahun 2023	141
Tabel 2.82	Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara	141
Tabel 2.83	Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara	142
Tabel 2.84	Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan di Kabupaten Konawe Utara	145
Tabel 2.85	Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2019-2024	146
Tabel 2.86	Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	148
Tabel 2.87	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	148
Tabel 2.88	Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara	149
Tabel 2.89	Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara	150
Tabel 2.90	Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP di Kabupaten Konawe Utara	151
Tabel 2.91	Realiasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024	156
Tabel 2.92	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Rupiah)	159
Tabel 2.93	Pendapatan dan Proporsi Unsur Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	161
Tabel 2.94	Uraian Pendapatan Yang Penggunaannya Telah Ditentukan dan Belanja Tertentu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	162
Tabel 2.95	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	166
Tabel 2.96	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	168
Tabel 2.97	Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	169
Tabel 2.98	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Rupiah)	173
Tabel 2.99	Analisis Proporsi Belanja Pegawai	175
Tabel 2.100	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Rupiah)	178

Tabel 2.101	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	180
Tabel 2.102	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	180
Tabel 2.103	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2030.....	183
Tabel 2.104	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2030	186
Tabel 2.105	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2030	187
Tabel 2.106	Teknik Perumusan Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029	209
Tabel 3.1	Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2030....	226
Tabel 3.2	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 , Misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045, Asta Cita RPJMN Tahun 2025–2029 , dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029	229
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029	232
Tabel 3.4	Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029	235
Tabel 3.5	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029	238
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029	251
Tabel 3.7	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029	260
Tabel 3.8	Dukungan Program Prioritas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara	292
Tabel 4.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2030	321
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2030	371
Tabel 4.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2030	374

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	8
Gambar 1.2	Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029	12
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara	21
Gambar 2.2	Jenis Tanah dan Luas (Ha) di Kabupaten Konawe Utara	23
Gambar 2.3	Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	24
Gambar 2.4	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	25
Gambar 2.5	Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	26
Gambar 2.6	Potensi Mineral Logam Kabupaten Konawe Utara.....	26
Gambar 2.7	Cadangan Nikel Kabupaten Konawe Utara	27
Gambar 2.8	Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2030	30
Gambar 2.9	Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2030	31
Gambar 2.10	Capaian Indikator Ketahanan Energi, Air dan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	32
Gambar 2.11	Capaian Indikator-Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas .	33
Gambar 2.12	Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	34
Gambar 2.13	Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023	35
Gambar 2.14	Stok Kabon CO2/Ha Kabupaten Konawe Utara.....	36
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	37
Gambar 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	37
Gambar 2.17	Piramida Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	38
Gambar 2.18	Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	39

Gambar 2.19	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2020–2024	40
Gambar 2.20	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	42
Gambar 2.21	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	46
Gambar 2.22	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	47
Gambar 2.23	Gini Rasio Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024	48
Gambar 2.24	Indikator-Indikator Kesehatan Untuk Semua	50
Gambar 2.25	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020–2024	51
Gambar 2.26	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020–2024	52
Gambar 2.27	Angka Melek Huruf Kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020–2024	53
Gambar 2.28	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	53
Gambar 2.29	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2020–2023	56
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020–2023	56
Gambar 2.31	Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	57
Gambar 2.32	Angka Ketergantungan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	58
Gambar 2.33	Rasio PDRB Pengolahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	59
Gambar 2.34	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	59
Gambar 2.35	TPAK Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	60
Gambar 2.36	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2024	61
Gambar 2.37	Capaian IP-TIK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023	62
Gambar 2.38	Nilai IDM Kabupaten se Sulawesi Tenggara Tahun 2024	71
Gambar 2.39	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	72

Gambar 2.40	Indeks SPBE Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	74
Gambar 2.41	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	74
Gambar 2.42	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	75
Gambar 2.43	Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024	94
Gambar 2.44	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024.....	103
Gambar 2.45	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	107
Gambar 2.46	Pelaksanaan SPM bidang sosial Kabupaten Konawe Utara tahun 2024	107
Gambar 2.47	Pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	109
Gambar 2.48	Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik Tahun 2020–2024 ..	112
Gambar 2.49	Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	113
Gambar 2.50	Analisis Faktor penyebab menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	115
Gambar 2.51	Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara.....	144
Gambar 2.52	Upaya Strategis Menuju Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan & Barang Daerah	147
Gambar 2.53	Fungsi Utama Camat dalam unsur Kewilayahan	152
Gambar 2.54	Ruang Lingkup Keuangan Daerah	153
Gambar 2.55	Gambaran Umum Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	155
Gambar 2.56	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Persen)	157
Gambar 2.57	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	157
Gambar 2.58	Perkembangan Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	158
Gambar 2.59	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	158

Gambar 2.60	Kerangka Strategis Peningkatan PAD Kabupaten Konawe Utara.....	160
Gambar 2.61	Fungsi Peta Kapasitas Fiskal Daerah	163
Gambar 2.62	Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024	165
Gambar 2.63	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	171
Gambar 2.64	Proporsi Unsur Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Persen)	171
Gambar 2.65	Realisasi Unsur Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	172
Gambar 2.66	Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah.....	176
Gambar 2.67	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	179
Gambar 2.68	Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	179
Gambar 2.69	Perkembangan SILPA Tahun Berjalan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliyar Rupiah)	181
Gambar 2.70	Asumsi proyeksi keuangan daerah tahun 2025–2030	182
Gambar 2.71	Variabel Isu 1 : Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara	213
Gambar 2.72	Variabel Isu 2 : Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman	214
Gambar 2.73	Variabel Isu 3 : Daya saing ekonomi daerah.....	216
Gambar 2.74	Variabel Isu 4 : Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	216
Gambar 2.75	Variabel Isu 5 : Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam	217
Gambar 3.1	Peta Arah Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	245
Gambar 3.2	Arah Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan RPJMN Tahun 2025 - 2029	246
Gambar 3.3	Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2029	247

Gambar 3.4 Program Unggulan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2029 290

Gambar 3.5 Program Strategis Nasional (ProSN) 292

Gambar 3.6 Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 295

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah pembangunan yang jelas melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kemampuan keuangan daerah. RPJMD juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun secara sistematis dan terukur dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 memiliki kekhasan tersendiri, mengingat pada tahun 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Konawe Utara. Pilkada ini menetapkan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025–2029 yang akan menjadi nahkoda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini sekaligus menjadi dokumen strategis yang menjembatani antara amanat visi-misi Kepala Daerah terpilih dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, sehingga pembangunan Kabupaten Konawe Utara dalam lima tahun ke depan dapat terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Konawe Utara Tahun 2025–2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Konawe Utara H. Ikbar, S.H., M.H dan Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, S.Sos, M.Si pada tanggal 20 Februari 2025 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 14 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 adalah “Konawe Utara sebagai rumah bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang akan dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1. Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif; 2. Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas; 3. Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing; 4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif; 5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana; dan 6. Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Upaya pencapaian visi dan misi jangka menengah Konawe Utara tersebut, diharapkan mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Konawe Utara, dalam rangka mencapai sasaran pokok visi pembangunan jangka panjang, yaitu : Peningkatan pendapatan per kapita, Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, Kepemimpinan daerah untuk mencapai visi daerah, Peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju Net Zero Emission.

Kaidah dan pendekatan penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: Pendekatan teknokratik; Pendekatan partisipatif; Pendekatan politis; dan Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Sedangkan secara substantif, Pasal 9 dan Pasal 10 peraturan menteri yang sama menyebutkan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sedangkan sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, untuk memastikan keselarasan kinerja dan periodisasi dengan RPJMN Tahun 2025–2029 yang memuat 8 (Delapan) Asta Cita sebagai visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 17 Program Prioritas dan 8 Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*) yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan dapat menjadikan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, serta memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah Konawe Utara sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan wilayah ke depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
36. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum PUG di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengggara Tahun 2024 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (5-241/2024));
49. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian dari rencana pembangunan provinsi, demikian juga rencana pembangunan provinsi merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJPN menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi dan RPJPD Provinsi menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota. Begitu juga RPJMN menjadi pedoman penyusunan RPJMD, termasuk RPJMD Kabupaten/Kota.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2029 disusun dengan berpedoman pada Rancangan RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032, dan mengacu pada RPJMN Tahun 2025 - 2029 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan dokumen perencanaan lainnya tercantum pada Gambar 1.1.

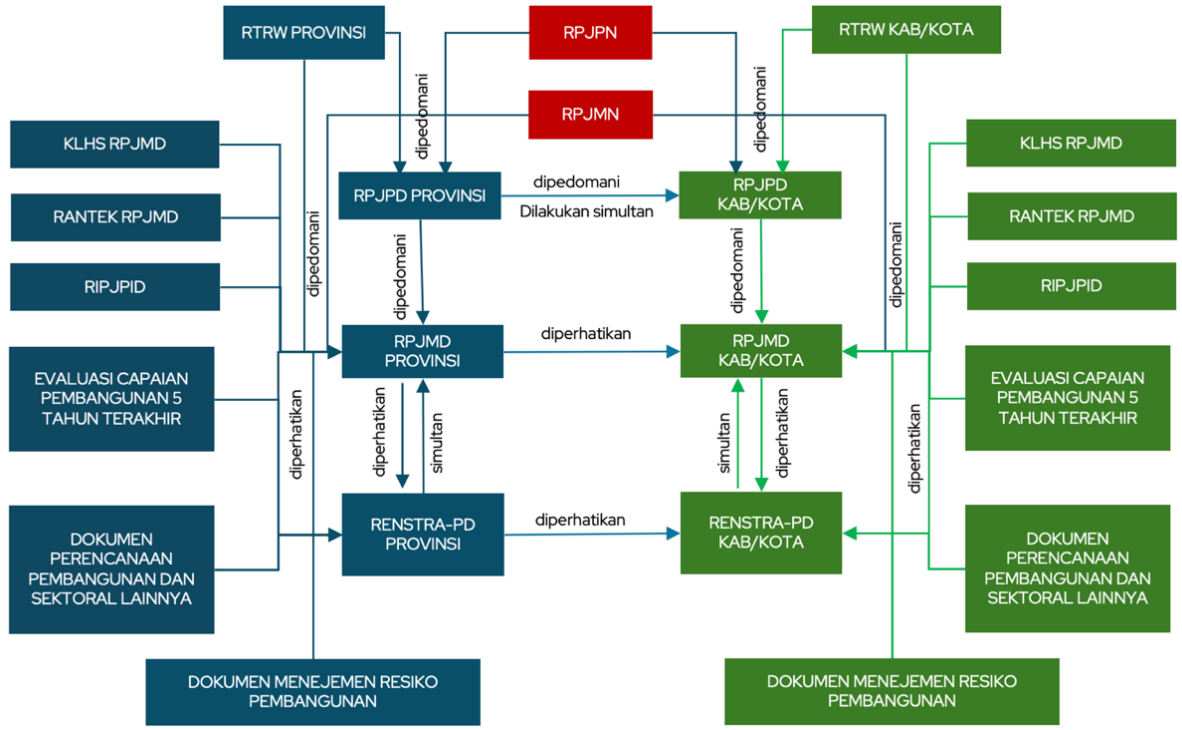

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Sektoral Lainnya

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

1.3.1 Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan sampai Tahun 2030. Sebagaimana tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 disebutkan bahwa TPB bertujuan untuk:

a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB ini merupakan pedoman bagi: (1) kementerian/lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi nasional TPB bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan (2) bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi daerah TPB bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dokumen ini merupakan kiblat pembangunan ekonomi global, dan Indonesia memiliki "batas akhir" pencapaian target-targetnya pada tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2030

No.	Tujuan Pembangunan	Jumlah Target
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	7 target
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan	8 target
3.	Menjamin kehidupan Indonesia sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia	13 target
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang	10 target
5.	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan	9 target
6.	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang	8 target
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang	5 target
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang	12 target
9.	Membangun infrastruktur Indonesia berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi	8 target
10.	Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara	10 target
11.	Menjadikan kota & permukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	10 target
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	11 target
13.	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	5 target
14.	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan	10 target
15.	Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati	12 target
16.	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan	12 target
17.	Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	19 target

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022

Terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu*: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.*

1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 akan berakhir. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyiapkan RPJPN Tahun 2025-2045. RPJPN Tahun 2025-2045 di bawah panji Indonesia Emas 2045 tersebut memiliki visi: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Filosofi RPJPN ibarat sebuah misi besar pendakian gunung, yang keberhasilannya ditandai dengan berkibarnya bendera merah-putih di puncaknya.

Untuk misi ini perlu perencanaan dan persiapan seksama agar tak banyak aral melintang. Rute dan waktu pendakian perlu direncanakan. Semua faktor penghambat harus dapat dieliminasi agar waktu jelajah, ketahanan, keutuhan, dan kesolidan tim dapat dipertahankan sampai di puncak pendakian. Demikian pula pencapaian RPJPN 2025-2045 dalam arus *megatrend* yang kuat dipengaruhi teknologi digital: teknologi informasi, teknologi robotika, teknologi industri, dan perubahannya yang demikian cepat. Ibarat cuaca, sulit diprediksi. Bisakah kita bayangkan situasi disrupsi teknologi 20 tahun mendatang? Para ahli pun sulit mengatakannya, kecuali memberi ciri-cirinya, bahwa teknologi robotika akan menggantikan tugas besar dan pekerjaan rutin manusia. Pada saat itu, manusia bekerja tetap berkeringat, tetapi kualitas pekerjaan mereka ibarat 10 banding 1. Jika sebuah pekerjaan saat ini perlu dikerjakan 10 tenaga manusia, nanti pekerjaan itu cukup dilakukan seorang saja. Jika penyelesaian satu pekerjaan saat ini butuh waktu sepuluh jam, kelak cukup dikerjakan satu jam saja. Gambaran modernitas 20 tahun ke depan, dunia dipenuhi orang-orang yang menguasai saintek dan keahlian- keahlian spesifik.

Pada sepuluh tahun mendatang, dunia juga diprediksi akan dipenuhi kelompok wirausaha (*entrepreneur*) yang jumlahnya sebanding dengan luasnya peluang yang diberikan dunia usaha global. Kelompok wirausaha global ini akan masuk juga ke Indonesia mencari celah bisnis dan berusaha melakukan transaksi yang menguntungkan. Akan saling menguntungkan jika kedua belah pihak memiliki keahlian kewirausahaan (*entrepreneurship*) seimbang, tetapi ketidakseimbangan keahlian dapat merugikan SDM Indonesia dalam banyak hal. Pertanyaannya, seberapa dipentingkannyakah pendidikan kewirausahaan dalam RPJPN 2025-2045? Tahun 2045 adalah puncak pendakian bagi RPJPN 2025-2045. Pencapaian 100 tahun kemerdekaan, yang akan merupakan tahun emas Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia diproyeksikan telah menjadi negara maju dan cita-citanya masuk lima besar negara di dunia dengan ekonomi terkuat. Sebuah usaha mulia, tetapi perlu disikapi dengan serius dan kerja keras.

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa:

> ”Cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya Indonesia telah keluar dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah. Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk lima besar negara ekonomi terkuat di 2045”.

Jadi, di tahun 2045 bukan saja sudah keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah, melainkan juga bisa termasuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat.

Oleh karenanya, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, reformasi saja tidak cukup. Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berdasarkan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Dengan semangat transformasi itu, dibentuklah Visi RPJPN Tahun 2025-2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, yang penjabarannya, sebagai berikut:

- Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/ peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.
- Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. ”Maju” juga dimaknai sebagai negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil.
- Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Konsepsi RPJPN Tahun 2025-2045 tampaknya lebih meyakini bahwa pembangunan manusia akan berjalan seimbang dengan pencapaian kemajuan ekonomi (lihat pengertian ”berkelanjutan”: seimbang dengan pembangunan sosial). Jadi, kemajuan pendidikan mengikuti kemajuan ekonomi. Ada kesan kurang diyakininya peran pendidikan sebagai landasan utama pembangunan. Hal ini juga tampak dari pengelompokan bidang pendidikan dengan bidang kesehatan dan penuntasan kemiskinan. Ketiganya dikelompokkan dalam tajuk bernama ”modal sosial”, ”pembangunan sosial”, dan ”transformasi sosial”. Lalu dimunculkanlah tujuan/misi bidang kesehatan: sehat; misi bidang pendidikan: cerdas dan terpelajar; dan misi penuntasan kemiskinan: terlindungi dan sejahtera. Kita dapat menganalisa bahwa, tujuan/misi ”cerdas dan terpelajar” menunjukkan level semangat yang masih normatif. Transformasinya belum tampak. Kita dapat melihat, transformasi bidang pendidikan menghadapi arus globalisasi, perlu mengemban misi SDM Berakhlak Mulia, Berkarakter Unggul, Berdaya Saing. Misi ini akan mengarahkan bangsa dan negara Indonesia jadi bermartabat. Cerdas dan terpelajar tanpa akhlak mulia tidaklah cukup untuk membangun martabat.

1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 3
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 1.2 Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029
Sumber: Lampiran 1 Perpres 25 Tahun 2025, hal. 46-49

RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, namun tetap selaras dengan arah kebijakan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Keselarasan ini terlihat pada integrasi visi daerah dengan agenda nasional, seperti transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan hilirisasi industri; peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan; serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berorientasi pada kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian target pembangunan nasional.

Hubungan kedua dokumen ini juga tercermin pada sinkronisasi indikator kinerja, kebijakan, program, dan pendanaan. Target daerah, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penguatan ketahanan pangan, diatur agar sejalan dengan sasaran nasional. Pendanaan pembangunan memanfaatkan dana pusat seperti DAK dan Dana Desa sesuai prioritas RPJMN, sehingga terjadi sinergi antara pusat dan daerah. Dengan hubungan yang hierarkis dan saling mendukung ini, pembangunan di Konawe Utara diharapkan mampu memperkuat pencapaian tujuan pembangunan nasional 2025–2029 secara berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyelarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, bahwa RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029. Selain itu, RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025 2029. Berdasarkan instruksi tersebut, penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029 dilakukan secara simultan dengan Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025–2029.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJPD Kabupaten Konawe Utara

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045 merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2029.

Kabupaten Konawe Utara, sebagai entitas pemerintahan Kabupaten yang berperan penting dalam mewujudkan Visi Provinsi dan Visi Indonesia Emas 2045, telah merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten dalam dua dekade ke depan. Dengan tekad kuat untuk bertransformasi dan dengan komitmen kuat untuk melaksanakan kebijakan, Kabupaten Konawe Utara akan menjadi contoh sukses dalam upaya Transformasi dan mendukung pencapaian tujuan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

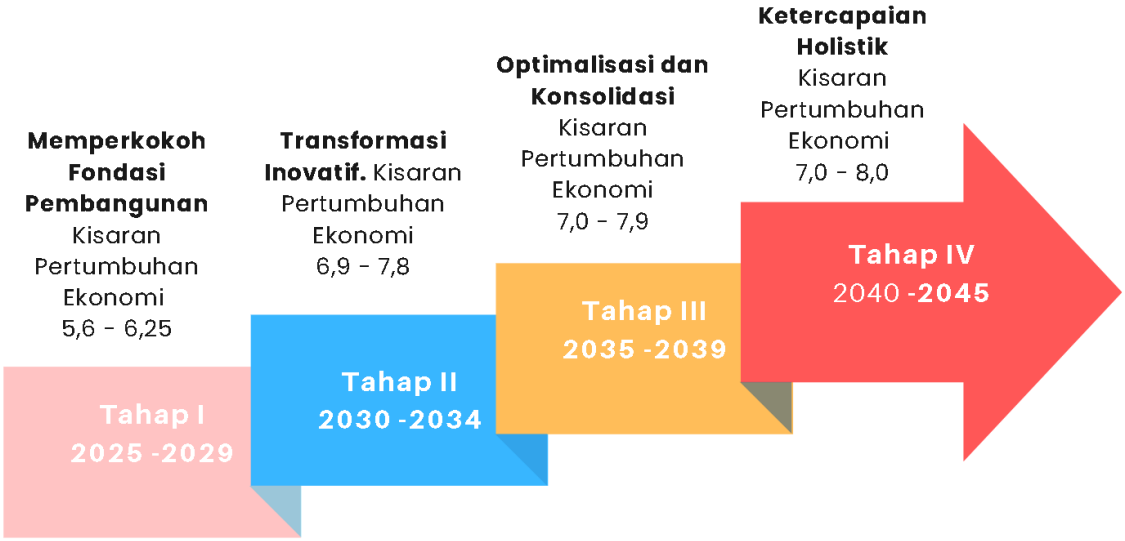

Arah Kebijakan Tahap 1 (Tahun 2025 - 2029): Memperkokoh Fondasi Pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,6 – 6,25 Persen per tahun.

1. Transformasi Pusat Pelayanan Sosial dan sumber daya manusia unggul
   - Peningkatan kualitas pendidikan, dengan mengimplementasikan program pembelajaran inovatif yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi serta akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan meraih potensinya sepenuhnya.
   - Pembangunan pusat layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan fasilitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.
   - Membangun fondasi akses terhadap sumber daya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentan.
2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
   - Kolaborasi peningkatan investasi menjadi prioritas dalam tahap ini, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Investasi yang cerdas dan strategis diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, mengembangkan infrastruktur pendukung, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif.
   - Menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset. Arah Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (*start-up*), dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional.
   - Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
   - Menekankan pada perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar

dengan fokus pada sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, dan industri berbasis teknologi.

1. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif
   - Perhatian pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Langkah-langkah mencakup penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
   - Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan kecepatan, dan memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat.
   - Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan publik.

4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
   - Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah dengan fokus pada pembentukan dasar ekonomi yang kokoh.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   - Membangun ketahanan budaya dengan pemberdayaan dan pelestarian warisan budaya lokal dan terus meletakkan dasar yang kuat dalam kerukunan antarumat beragama. Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.
   - Menciptakan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan. Upaya serius dalam membangun kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.
   - Menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.
   - Strategi mitigasi bencana diperkuat dengan infrastruktur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.
6. Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
   - Pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi berupa infrastruktur jalan, transportasi, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah.
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
   - Evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur dan identifikasi kondisi eksisting, membentuk dasar untuk perencanaan pembangunan berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Kesinambungan Pembangunan antar Periode
   - Meletakkan dasar yang kokoh untuk penyusunan kebijakan dan program agar tetap sesuai dengan dinamika perubahan dalam mencapai keberkesinambungan dan kehidupan layak untuk pembangunan periode berikutnya.

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS RPJMD adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memper-hatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 tidak hanya bersifat formal sebagai dokumen pendukung, tetapi menjadi landasan substansial dalam penyusunan arah pembangunan daerah. Proses KLHS telah menghasilkan identifikasi isu-isu penting dan rekomendasi kebijakan yang secara langsung dimasukkan ke dalam perumusan Isu Strategis Daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan di RPJMD.

Melalui KLHS, berbagai aspek keberlanjutan — mulai dari daya dukung dan daya tampung lingkungan, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, hingga pengurangan risiko bencana — telah dipertimbangkan sejak tahap awal perencanaan. Isu-isu tersebut kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial jangka panjang.

Dengan mengintegrasikan rekomendasi KLHS secara penuh ke dalam RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan bersifat inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat komitmen daerah untuk menghindari potensi dampak negatif pembangunan serta memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang.

1.3.7 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hasil telaah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mengatur secara umum tentang pengembangan wilayah nasional dan daerah, namun tidak secara khusus menyampaikan tentang arah pengembangan Kawasan Sulawesi Tenggara pada umumnya maupun Konawe Utara khususnya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagi pengembangan Kawasan Konawe Utara, yaitu;

1. Pada Pasal 7 ayat 2 huruf b4, menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku untuk daerah-daerah di Pulau Sulawesi diharapkan dapat mengembangkan Kawasan lindung dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas daerah tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pasal 14 ayat 2, pengembangan Kawasan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:
    a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
    b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
    c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
    d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

Kebijakan dalam RTRWN di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan Kabupaten Konawe Utara.

1.3.8 Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 untuk lebih fokus pada pembangunan Kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Alam. RPJMD yang berpedoman pada RTRW Provinsi bukan hanya sekadar persyaratan hukum, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, efektif, dan berkeadilan. Dengan adanya RPJMD yang selaras dengan RTRW, pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.

1.3.9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032

Perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe Utara disusun dengan mengintegrasikan RTRW 2012–2032 dan draft revisi yang tengah berjalan pada tahun 2025. Rencana ini menekankan pengembangan struktur ruang melalui sistem pusat permukiman (PKW, PKL, PPK, dan PPL) yang terhubung dengan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, serta infrastruktur dasar lainnya.

Selain itu, pola ruang wilayah diarahkan pada distribusi fungsi lindung dan budidaya, mencakup kawasan hutan, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta kawasan lindung strategis. Pemanfaatan ruang ini menjadi pedoman pembangunan daerah untuk periode 2025–2029 sekaligus memberi arah pengelolaan ruang hingga 20 tahun ke depan.

1.3.10 RPJMD Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar (Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah) khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara yang kemungkinan berpengaruh pada wilayah Kabupaten Konawe Utara seperti Kawasan Industri Konawe dan Kawasan Industri Morowali.

1.3.11 Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D), Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), Rencana Induk SPAM (RISPAM) dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

1.3.12 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

1.3.13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 (dalam RKPD Perubahan) hingga tahun 2029 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.3.14 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan instrumen yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah usaha, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lingkungan. Dalam konteks pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, PPM memiliki keterkaitan strategis sebagai salah satu pendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mendorong agar pelaksanaan PPM oleh perusahaan pertambangan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD). Dengan demikian, program PPM tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban korporasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara agar terarah, terpadu dan berkesinambungan. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
2. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
3. Memberikan tolak ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya;
1.4. Maksud dan Tujuan;
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat :
   a. Aspek geografi dan demografi;
   b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
   c. Aspek Daya Saing Daerah;
   d. Aspek Pelayanan Umum.
2.2. Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025–2029.
2.3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis memuat:
   a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
   b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat :
   a. Visi dan Misi; dan
   b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029.
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat:
   a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029; dan
   b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Subbab Program Perangkat Daerah memuat:
   a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
4.2 Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat:
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97' dan 03°86' LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 510.176 Ha atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) ±11.960Km² atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara.

Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Routa (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaberi, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara

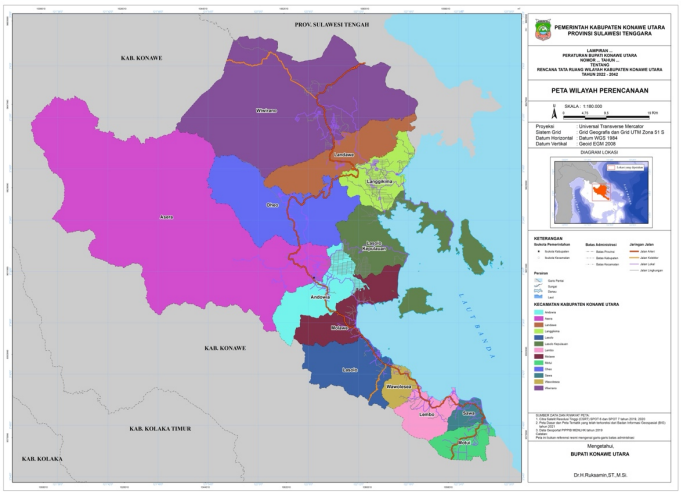

Secara administratif Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan. Kecamatan Wiwirano adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 968,06 km² atau 19,34 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Motui dengan luas 61,30 km² atau hanya 1,22 persen dari luas Kabupaten Konawe Utara.

Selain itu, wilayah Kabupaten Konawe Utara juga terbagi atas 159 desa dan 11 kelurahan, dengan jumlah desa yang terbanyak terletak di Kecamatan Asera dan Oheo, yaitu masing - masing 17 desa. Sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Lasolo Kepulauan, yaitu 6 desa Secara rinci klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah		
				Desa	Kel.	UPT
1.	Sawa	Sawa	93,76	13	1	-
2.	Motui	Bende	61,3	14	1	1
3.	Lembo	Lembo	78,12	11	1	-
4.	Wawolesea	Wawolesea	139,4	9	-	-
5.	Lasolo	Tinobu	149,4	13	1	-
6.	Lasolo Kepulauan	Boenaga	62,42	6	-	-
7.	Molawe	Molawe	365,06	8	1	-
8.	Andowia	Andowia	863,32	14	1	-
9.	Asera	Asera	595,9	17	2	1
10.	Oheo	Linomoiyo	738,5	17	1	1
11.	Langgikima	Langgikima	476,75	11	1	-
12.	Landawe	Hialu	603,53	10	-	-
13.	Wiwirano	Lamonae	874,3	15	1	1
Total			5.101,76	159	11	4

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2025

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah Konawe Utara berada pada ketinggian 0 - >2000 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0 - >40%. Kemiringan antara 25% sampai dengan >40% berada pada hulu Sungai Lasolo yang merupakan wilayah Pegunungan Matarombeo. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8% umumnya berada pada kaki bukit, lembah antar sungai, dan wilayah di muara-muara sungai. Wilayah dengan ketinggian >2000 meter dan kemiringan lebih dari 40% berada pada sekitar hulu Sungai Konaweha, yaitu Pegunungan Mekongga mengarah ke utara sampai Pegunungan Matarombeo umumnya berbukit hingga bergunung.
Seperti halnya dengan kondisi topografi Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara memiliki topografi permukaan tanah yang pada umumnya bergunung, bergelombang dan berbukit yang mengelilingi dataran rendah yang sangat potensial untuk perkembangan sektor pertanian.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan himpunan batuan dan pencirinya, geologi Lembar Lasusua-Kendari dapat dibedakan dalam dua lajur, yaitu Lajur Tinodo dan Lajur Hialu. Lajur Tinodo dicirikan oleh batuan endapan paparan benua dan Lajur Hialu oleh endapan kerak samudra/ofiolit, secara garis besar kedua mendala ini dibatasi oleh Sesar Lasolo. Struktur geologi yang dijumpai di wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sesar, lipatan dan kekar. Sesar dan kelurusan umumnya berarah barat laut-tenggara searah dengan sesar geser lurus mengiri Lasolo. Sesar Lasolo bahkan masih aktif hingga saat ini. Sesar tersebut diduga ada kaitannya

dengan Sesar Sorong yang aktif kembali pada Kala Oligosen (Simandjuntak, dkk., 1983). Sesar naik ditemukan di daerah Wawo sebelah barat Tampakura dan di Tanjung Labuandala di selatan Lasolo, yaitu beranjaknya Batuan Ofiolit ke atas Batuan Malihan Mekongga, Formasi Meluhu, dan Formasi Matano. Adapun jenis tanah di Kabupaten Konawe Utara meliputi Latosol 116.829 Ha atau 23,35%, Podzolik 140.845 Ha atau 28,15%, Organosol 23.566 Ha atau 4,71%, Mediteran 16.961 Ha atau 3,39%, Aluvial 24.067 Ha atau 4,80% dan tanah campuran 178.071 Ha atau 35,59%.

Gambar 2.2
Jenis Tanah dan Luas (Ha)
di Kabupaten Konawe Utara

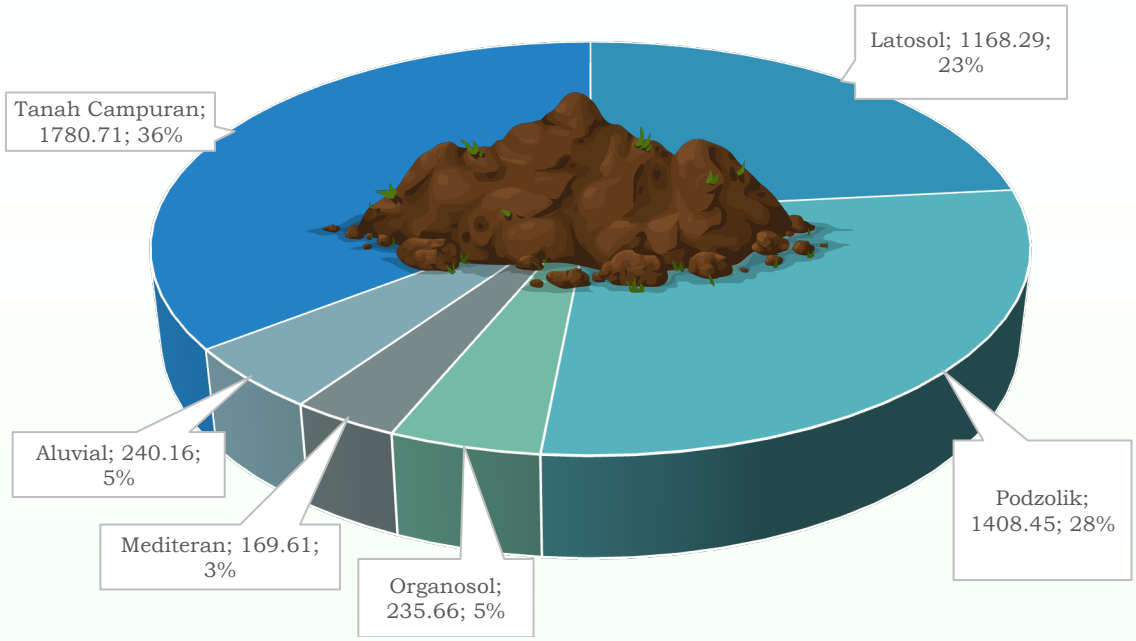

Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032

2.1.1.4 Hidrologi dan Hidrogeologi

Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.

Daerah Aliran Sungai yang melalui Kabupaten Konawe Utara adalah wilayah Sungai Lasolo Sampara dengan sub wilayah sungai terdiri dari SWS Sungai Lasolo, SWA Lalindu, SWS Tinobu, SWS Sampara, dan SWS S. Lambuti. SWS Lasolo-Sampara mempunyai 63 DPS dengan jumlah total luas DPS 14.979,6 km^2 dan total panjang sungainya 847,2 km.

Adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dicermati sebagai potensi bagi sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian, energi listrik, sarana. Hal lain yang harus dicermati terkait dengan keberadaan daerah aliran sungai yakni kerentanan terhadap bencana banjir seperti halnya yang terjadi pada titik muara sungai pertemuan Sungai Lasolo dan Sungai Landawe di perbatasan kecamatan Molawe-Asera adalah yang telah menjadi daerah banjir tahunan.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Konawe Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, keduanya memiliki dua musim dalam setahun (musim hujan dan musim panas). Pada musim hujan, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudra Pasifik. Rata-rata suhu udara maksimum 33,5^{0}C. Tekanan udara rata-rata maksimum 1.013,95 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 87,15 persen, kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu sekitar 0,76 knot.

Pada tahun 2024, Bulan Maret merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yakni sebanyak 28 hari hujan dengan total curah hujan terbesar yakni sebesar 83 mm. Dalam kurun waktu kalender tahun 2024, total 227 hari diantaranya terjadi hujan dengan curah hujan 33 mm sampai hujan deras dengan intensitas 982 mm yang merupakan hujan terderas yang terjadi di bulan Desember.

Gambar 2.3
Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

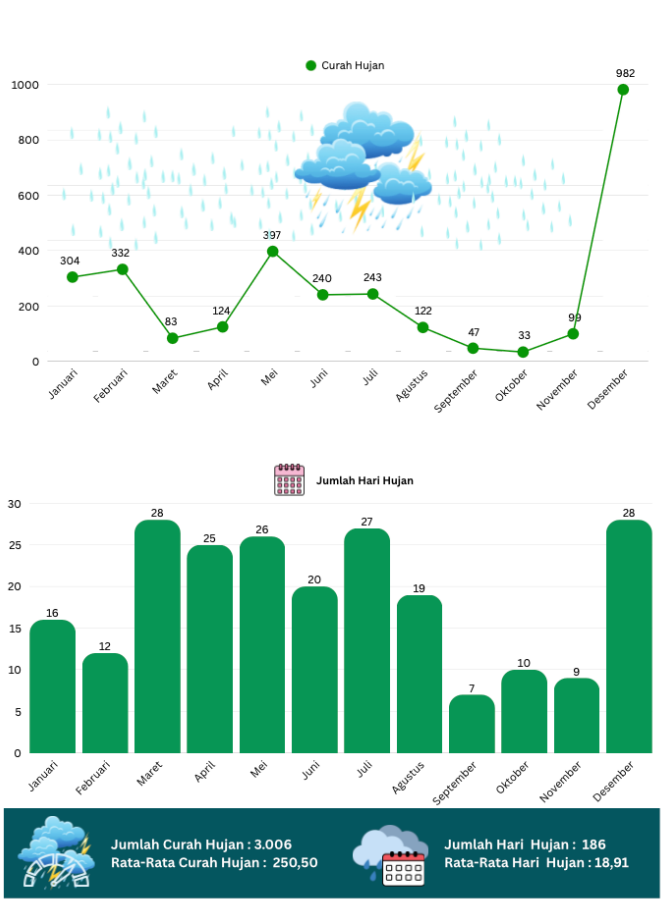

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan negara seluas 350.962 Ha dan perkebunan seluas 143.086 Ha. Sebesar 0,39 persen atau sekitar 1.963 Ha dimanfaatkan sebagai lahan sawah yang luasnya mengalami penambahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Utara disajikan Gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

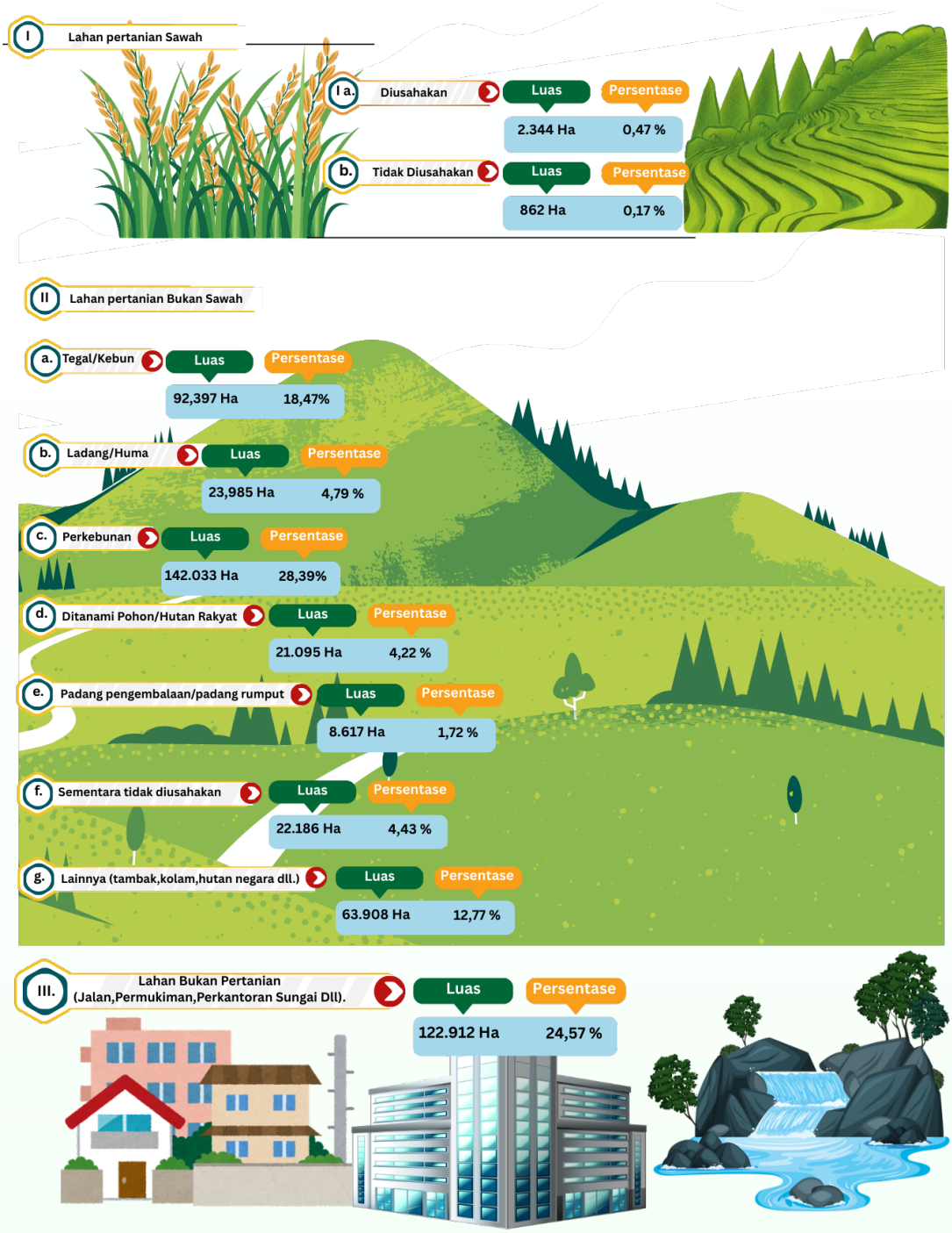

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

2.1.1.7 Kontribusi Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor nampaknya mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah :

1. Sektor primer (62,88%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (2) Pertambangan dan Penggalian;
2. Sektor sekunder (13,86%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi.;
3. Sektor tersier (23,25%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.

Gambar 2.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024

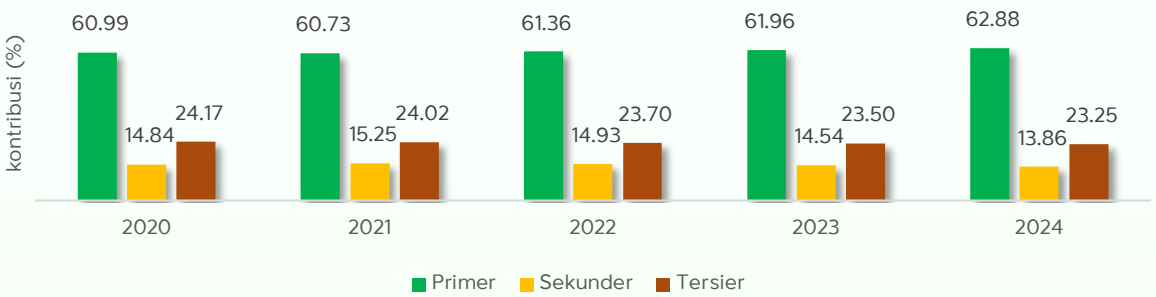

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, diolah

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Konawe Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, yang menjadi modal dasar dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Potensi sumber daya alam terbesar terletak pada sektor pertambangan khususnya nikel, dengan potensi yang sangat besar dan strategis, menjadikannya salah satu daerah penghasil nikel utama di Indonesia.

Wilayah seperti Molawe, Lasolo, dan Motui dikenal kaya akan bijih nikel laterit, baik kadar tinggi (saprolit) maupun kadar rendah (limonit). Cadangan nikel di daerah ini mencapai puluhan hingga ratusan juta ton, dan telah menarik banyak perusahaan pertambangan untuk beroperasi dengan izin usaha pertambangan (IUP) aktif. Nikel dari Konawe Utara menjadi sumber penting bagi industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) di Morosi dan Morowali. Potensi ini memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan seperti risiko kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketergantungan terhadap sektor tambang. Oleh karena itu, pengelolaan potensi nikel di Konawe Utara perlu dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan partisipatif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Gambar 2.6 Potensi Mineral Logam Kabupaten Konawe Utara

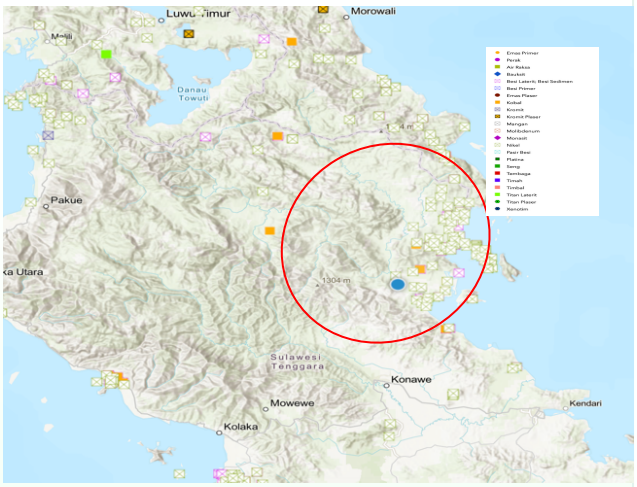

Sumber : https://geoportal.esdm.go.id/minerba/

Gambar 2.7 Cadangan Nikel Kabupaten Konawe Utara

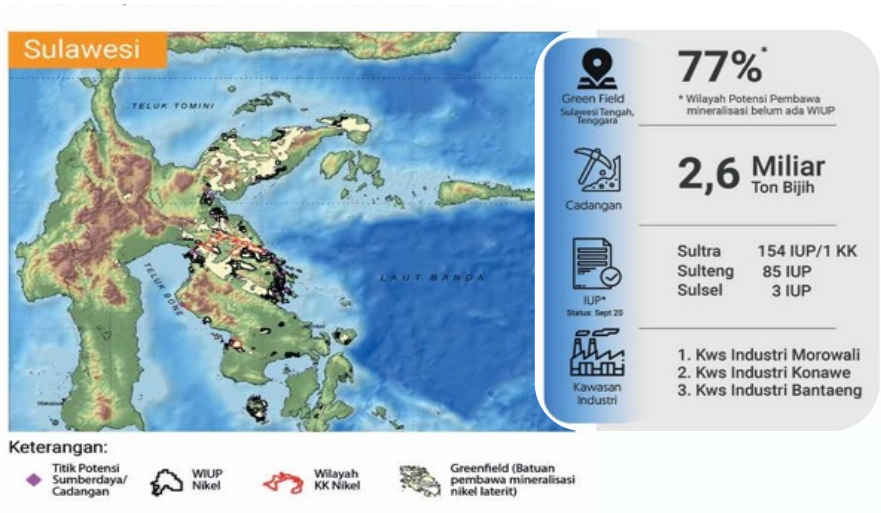

Sumber : Booklet Peluang Investasi Nikel Indonesia, Kementerian ESDM Tahun 2020.

- Dengan potensi *greenfield* nikel yang besar di Konawe Utara, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) memiliki peran strategis sebagai jembatan antara perusahaan pertambangan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan PPM yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan RPJMD serta RKPD akan memastikan manfaat kegiatan pertambangan tidak hanya dinikmati oleh industri, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas sosial secara berkelanjutan.

Selain sektor pertambangan, sektor penopang utama PDRB terbesar di Kabupaten Konawe Utara yaitu pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Pada sektor Pertanian memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian daerah serta menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat di wilayah pedesaan. Potensi ini tercermin dari ketersediaan lahan yang relatif luas dan subur, iklim yang mendukung sistem tanam sepanjang tahun, serta keberagaman komoditas yang dapat dikembangkan baik pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura,. Berikut data capaian komoditas sektor pertanian, perkebunan dan hortikultura di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.2
Data Capaian Komoditas Sektor Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	Luas Panen (Ha)			Produktivitas (Ton/Ha)			Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Padi	2.155,96	2.261,20	2.296,85	3,5	4,0	3,5	7.588,82	9.142,98	8.103,40
2	Jagung	917	736	197	4,7	6,1	5,2	4.393	4.511	1.033
3	Kedelai	18	255	85	1,5	1,6	1,3	28	432	113
4	Kacang Tanah	80	55	83	7,0	10,5	9,5	57	58	79
5	Ubi Jalar	12	7	2	10,2	8,0	9,0	117	53	18
6	Kacang Hijau	39	24	17	8,5	7,8	7,7	33	19	13

No	Uraian	Luas Panen (Ha)			Produktivitas (Ton/Ha)			Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
7	Cabai Besar	8	7	12	10	17,8	18,1	800	1.250	2.180
8	Bawang Merah	22	13	8	7,4	7,5	7,5	1.645	975	600
9	Cabai Rawit	44	26	30	20,6	21,2	16,5	10.400	5.525	4.955
10	Tomat	31	36	22	28,9	26	19,5	8.961	9.360	4.300
11	Bayam	51	78	61	12,9	11,0	12,0	6.601	8.590	7.330
12	Kangkung	66	91	64	10,9	11,3	11,8	7.229	10.320	7.555
13	Kubis	0	10	5	0	16,5	20,0	0	1.650	1.000

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2024.

Untuk sektor perikanan juga memiliki potensi yang menjanjikan dalam pembangunan perekonomian daerah, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada produksi perikanan tangkap, potensi sumber daya ikan laut tergolong melimpah dengan komoditas utama seperti teri, kembung dan lemuru. Aktivitas nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap tradisional masih mendominasi, namun peningkatan kapasitas armada, sarana pendukung pelabuhan perikanan, serta akses pasar menjadi kunci dalam mendongkrak volume produksi dan daya saing hasil tangkapan. Berikut data produksi perikanan tangkap Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.3
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2021 – 2023

No	Kelompok Ikan	Volume (Ton)			Nilai (Rp. Juta)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Alu-Alu	201,96	68,86	236,13	201,96	1.509,00	4.722,00
2	Baronang	176,50	376,93	93,36	176,50	13.192,00	3.734,00
3	Belanak	192,91	201,65	169,23	192,91	4.157,00	4.231,00
4	Beloso	3,17	34,59	24,92	3,17	865,00	623,00
5	Betok	24,53	20,81	17,08	24,53	416,00	598,00
6	Cakalang	67,98	17,83	14,90	67,98	334,00	335,00
7	Cumi-Cumi	204,38	146,45	92,00	204,38	5.095,00	2.760,00
8	Ekor Kuning	523,61	378,53	428,42	523,61	10.494,00	12.187,00
9	Gabus	112,09	180,95	145,45	112,09	4.524,00	5.818,00
10	Gurita	6,95	30,13	0,54	6,95	753,00	16,00
11	Kakap	363,58	459,70	266,19	363,58	16.559,00	11.674,00
12	Kembung	1.344,54	1.326,63	561,70	1.344,54	33.166,00	14.042,00
13	Kepiting	103,85	123,22	75,44	103,85	4.747,00	2.656,00
14	Kerang	444,00	416,00	305,20	444,00	2.696,00	1.526,00
15	Kerapu	271,59	329,77	156,96	271,59	12.533,00	6.346,00
16	Kurisi	207,92	781,26	542,23	207,92	16.902,00	5.910,00
17	Kuwe	610,77	828,86	371,76	610,77	29.010,00	14.870,00
18	Layang	444,02	210,68	169,39	444,02	3.912,00	3.388,00
19	Lele	30,52	17,39	13,01	30,52	391,00	390,00

No	Kelompok Ikan	Volume (Ton)			Nilai (Rp. Juta)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
20	Lemuru	1.160,40	1.937,15	3.145,40	1.160,40	19.371,00	25.829,00
21	Lencam	196,61	134,97	279,42	196,61	3.374,00	8.383,00
22	Lobster	1,84	0,31	0,46	1,84	20,00	136,00
23	Manfish	154,08	147,80	48,68	154,08	2.956,00	974,00
24	Mas	18,97	7,37	3,54	18,97	258,00	152,00
25	Mujair	111,67	185,48	161,55	111,67	4.976,00	6.462,00
26	Nila	83,48	14,46	29,78	83,48	404,00	1.191,00
27	Pari	17,23	1,36	3,96	17,23	34,00	99,00
28	Peperek	615,25	781,25	976,14	615,25	12.517,00	19.523,00
29	Rajungan	29,94	37,47	19,26	29,94	1.456,00	771,00
30	Sebelah	104,01	40,20	18,37	104,01	804,00	551,00
31	Selar	704,84	787,11	129,21	704,84	15.742,00	2.584,00
32	Sepat	20,79	37,00	31,87	20,79	740,00	1.116,00
33	Sidat	0,31	0,99	0,50	0,31	59,00	40,00
34	Sotong	103,42	8,40	4,79	103,42	280,00	144,00
35	Tardore	297,87	142,01	75,20	297,87	2.840,00	1.880,00
36	Tenggiri	114,70	245,05	135,73	114,70	14.145,00	7.702,00
37	Teri	5.962,98	4.454,41	6.513,50	5.962,98	71.444,00	113.466,00
38	Udang	209,79	352,80	210,60	209,79	16.358,00	11.704,00

Sumber : https://portaldata.kkp.go.id/

Pada perikanan budidaya memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman. Karakteristik geografis daerah yang memiliki akses terhadap perairan laut, sungai, dan danau menciptakan peluang besar dalam pengembangan berbagai komoditas budidaya perikanan, termasuk lele, bandeng, nila, udang, ikan mas dan kerapu sebagaimana data capaian komoditas perikanan budidaya sebagai berikut.

Tabel 2.4
Komoditas Produksi Perikanan Budidaya
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2023

No	Komoditas	2021		2022		2023	
		Volume (Ton)	Nilai (Rp Juta)	Volume (Ton)	Nilai (Rp Juta)	Volume (Ton)	Nilai (Rp Juta)
1	Lele	-	-	-	-	349,50	12.232,50
2	Nila	1.216	42.560,35	1,14	39.897,00	987,20	34.552,00
3	Ikan Mas	808	24.245,70	791,00	23.742,00	611,10	21.388,50
4	Kakap	154	4.615,29	154,00	4.618,00	313,26	12.490,49
5	Bandeng	5.781	144.517,50	5,53	138.262,00	5.400,16	189.005,43
6	Kerapu			221,00	10.244,00	297,04	14.852,05
7	Udang	2.012	137.552,48	1,97	135.182,00	1.570,85	135.154,50
8	Ikan Lainnya	469	14.849,24	246,00	7.776,00	-	-

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2025

Pengembangan perikanan budidaya di Konawe Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan teknologi budidaya, akses modal yang rendah, serta infrastruktur pendukung yang belum optimal. Penggunaan teknologi modern dan praktik budidaya berkelanjutan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, keterbatasan akses pasar dan rantai distribusi yang belum merata juga menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya di tingkat regional dan nasional.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Konawe Utara menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan keberlanjutan sumber daya alam. Daya dukung pangan Kabupaten Konawe Utara masih relatif memadai, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang produktif dan potensi pengembangan komoditas unggulan seperti padi dan jagung. Namun demikian, konversi lahan pertanian ke non-pertanian, khususnya untuk pertambangan dan permukiman, perlu diwaspadai agar tidak mengganggu ketahanan pangan daerah.

Hasil kajian KLHS RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2045, menunjukkan ketersediaan pangan Kabupaten Konawe Utara masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Produksi Pangan (beras) di Kabupaten Konawe Utara mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan rincian yaitu pada tahun 2020 sebesar 6.560,7 ton, tahun 2021 sebesar 7.589,00 ton, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 9.134,00 ton, sementara kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk tahun 2022 dengan 70.314 jiwa sebesar 7.031,00 ton sehingga masih terdapat selisih sebesar 2.111,60 ton. Berikut proyeksi hasil analisis daya dukung pangan kabupaten tahun 2025 – 2030.

Gambar 2.8
Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2025 – 2030

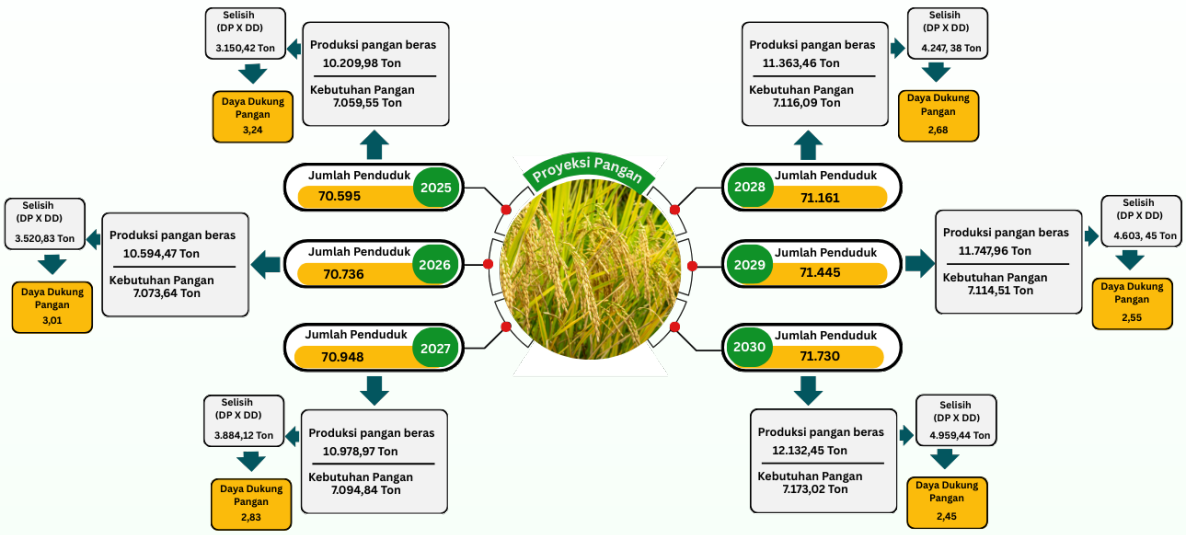

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2029

Dari sisi ketersediaan air, Kabupaten Konawe Utara memiliki sejumlah sumber air permukaan seperti sungai dan mata air. Hasil perhitungan ketersedian air Kabupaten Konawe Utara sebesar 7.725.811.098,78 m³/tahun, sementara kebutuhan air berdasarkan jumlah penduduk mencapai 70.314.000,00 m³/tahun pada tahun 2022, sehingga masih ada selisih sebesar 7.655.497.098,78 m³/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air masih sangat surplus. Berikut proyeksi daya dukung air Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2030 berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2029.

Gambar 2.9
Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2025 – 2030

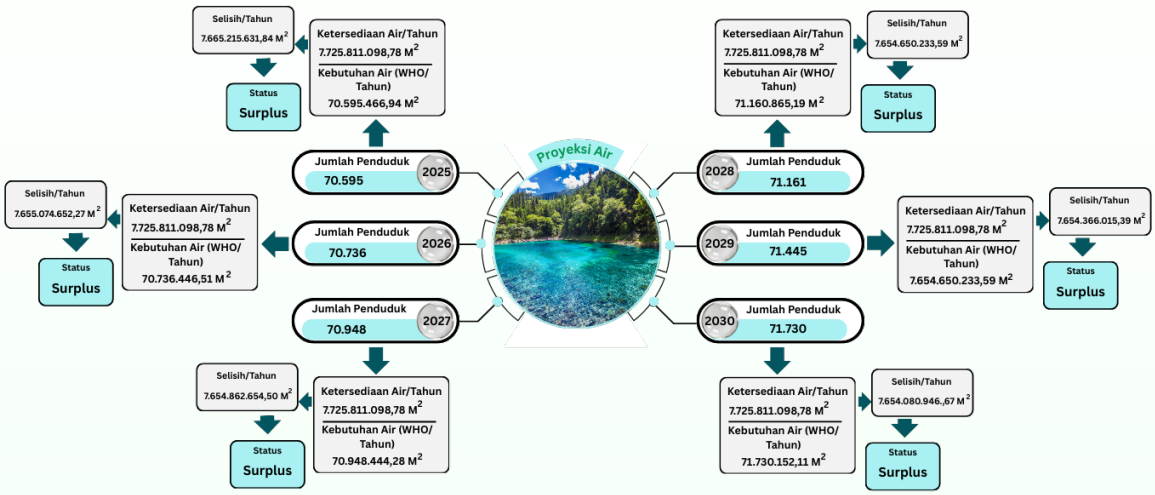

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang tercermin melalui kenaikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yaitu indikator komprehensif yang mencerminkan sejauh mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, baik dari aspek ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan pangan.

Peningkatan IKP dari 70,34 pada 2019 menjadi 78,67 pada 2023 menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam berbagai aspek penyokong ketahanan pangan. Meskipun terdapat sedikit stagnasi pada tahun 2021, tren secara keseluruhan tetap menunjukkan arah yang positif.
Capaian ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Konawe Utara:

- Semakin mampu memproduksi pangan secara mandiri,
- Memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi, serta
- Meningkatkan kualitas konsumsi dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan

Gambar 2.10 Capaian Indikator Ketahanan Energi, Air dan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2023

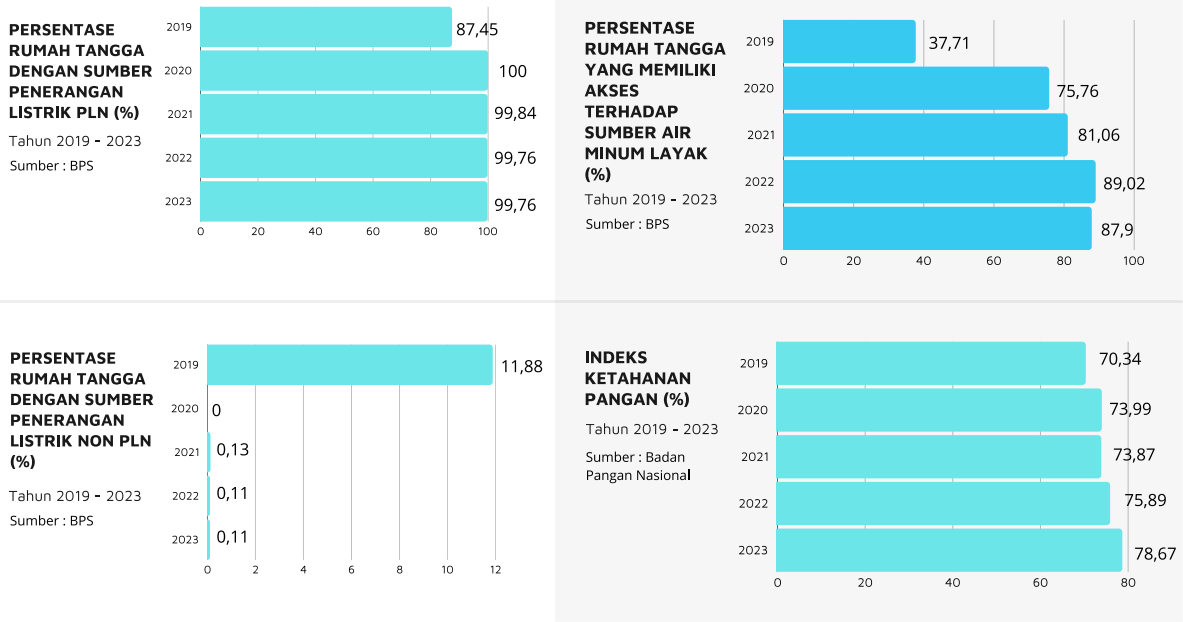

- Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek ketahanan air, khususnya dalam penyediaan akses rumah tangga terhadap sumber air minum yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan tajam selama lima tahun terakhir.
- Pada tahun 2019, hanya sekitar 37,71% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis hingga 75,76%, menandakan adanya intervensi kebijakan atau proyek penyediaan air bersih yang berdampak nyata. Tren positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya: 81,06% di tahun 2021, 89,02% pada 2022, dan sedikit terkoreksi menjadi 87,9% di tahun 2023.
- Meskipun ada penurunan tipis pada tahun terakhir, capaian ini tetap mencerminkan tingkat ketahanan air yang tinggi. Kemajuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Konawe Utara kini telah menikmati akses air bersih yang aman dan layak konsumsi, yang merupakan faktor penting dalam mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat. Ke depan, tantangan yang perlu dihadapi adalah menjaga keberlanjutan infrastruktur air bersih, pemerataan akses di wilayah terpencil, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat memengaruhi sumber daya air.
- Dari sisi ketahanan energi Kabupaten Konawe Utara mencatat kemajuan signifikan yang tercermin dari tingginya rasio elektrifikasi di wilayah ini. Rasio elektrifikasi yang nyaris mencapai 100% menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Konawe Utara telah menikmati akses terhadap listrik, baik dari jaringan PLN maupun sumber non-PLN.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Utara terus menunjukkan perbaikan, salah satunya tercermin dari peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Sanitasi yang memadai merupakan indikator penting dalam mendukung lingkungan sehat, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

- Pada tahun 2019, sebesar 76,21% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Angka ini relatif stabil hingga tahun 2021, berada pada kisaran 76–77%. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana capaian meningkat menjadi 86,56%, sebelum sedikit menurun ke 82,74% di tahun 2023. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam pembangunan infrastruktur sanitasi, seperti fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), sistem pembuangan air limbah, dan edukasi perilaku hidup bersih. Meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun terakhir, secara keseluruhan kondisi sanitasi di Konawe Utara tergolong baik dan mendukung pencapaian lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas.

Gambar 2.11 Capaian Indikator-Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas

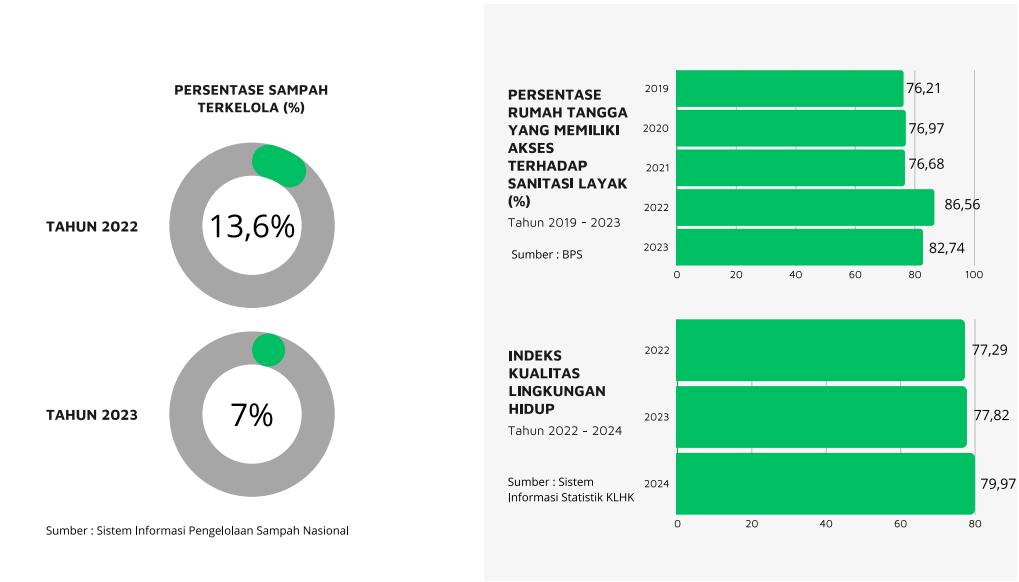

- Selain itu Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin melalui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini merupakan ukuran komprehensif yang mencakup aspek kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan, serta mencerminkan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan ekosistem.
- Pada tahun 2022, IKLH Kabupaten Konawe Utara berada pada angka 77,29, dan mengalami peningkatan menjadi 77,82 di tahun 2023. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan indeks mencapai 79,97, mendekati ambang batas kategori "baik". Selanjutnya Pengelolaan sampah merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan signifikan, dari 13,6% pada tahun 2022 menjadi hanya 7% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam sistem pengelolaan sampah daerah, baik dari aspek infrastruktur, kesadaran masyarakat, maupun pengawasan kebijakan lingkungan. Volume sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah dan air, penyebaran penyakit, hingga penurunan estetika lingkungan permukiman.
- Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup secara umum menunjukkan tren membaik (naik dari 77,29 di 2022 menjadi 79,97 di 2024), rendahnya angka pengelolaan sampah bisa menjadi potensi penghambat dalam jangka panjang. Ketimpangan ini mengisyaratkan bahwa perbaikan di bidang lain seperti air dan udara belum sepenuhnya diimbangi oleh pengelolaan limbah padat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas layanan pengelolaan sampah, edukasi masyarakat tentang pemilahan dan daur ulang, serta pengembangan inovasi pengelolaan limbah berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas strategis daerah. Langkah-langkah tersebut akan menjadi fondasi penting bagi Konawe Utara dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sehat

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan suatu wilayah, masyarakat, dan ekosistem untuk menghadapi, menyesuaikan diri, serta pulih kembali dari dampak bencana alam dan perubahan iklim secara berkelanjutan. Pembangunan yang tangguh terhadap bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kabupaten Konawe Utara menghadapi tantangan nyata dalam membangun ketahanan tersebut. Bencana banjir hampir selalu terjadi setiap tahun ketika curah hujan tinggi, dan beberapa di antaranya menimbulkan dampak sangat besar, seperti pada 2019 dan 2020. Banjir besar tersebut menerjang wilayah DAS Lasolo dengan luas daerah tangkapan air mencapai 600.191 hektar, melanda 7 kecamatan, 47 desa, serta 4 kelurahan, dan menyebabkan 9.609 jiwa (2.502 KK) harus mengungsi serta total 18.765 jiwa terdampak. Fasilitas umum, sosial, pemerintahan, serta sektor ekonomi dan pertanian mengalami kerusakan parah.

Pada 2024 dan 2025, bencana banjir kembali terjadi dengan intensitas yang lebih besar, mengakibatkan putusnya jalan nasional yang menghubungkan Konawe Utara dengan wilayah lain di Sulawesi Tenggara. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian infrastruktur, tetapi juga memperparah dampak ekonomi dan sosial masyarakat karena akses logistik, mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa terganggu.

1. Indeks Risiko Bencana

   Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko suatu wilayah terhadap potensi bencana alam. Indeks ini mencerminkan kerentanan wilayah dalam menghadapi berbagai jenis bencana, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan kekeringan, serta kapasitas wilayah tersebut dalam melakukan mitigasi dan respons terhadap bencana. IRB disusun berdasarkan 3 komponen yaitu Bahaya (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity).

Gambar 2.12 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024

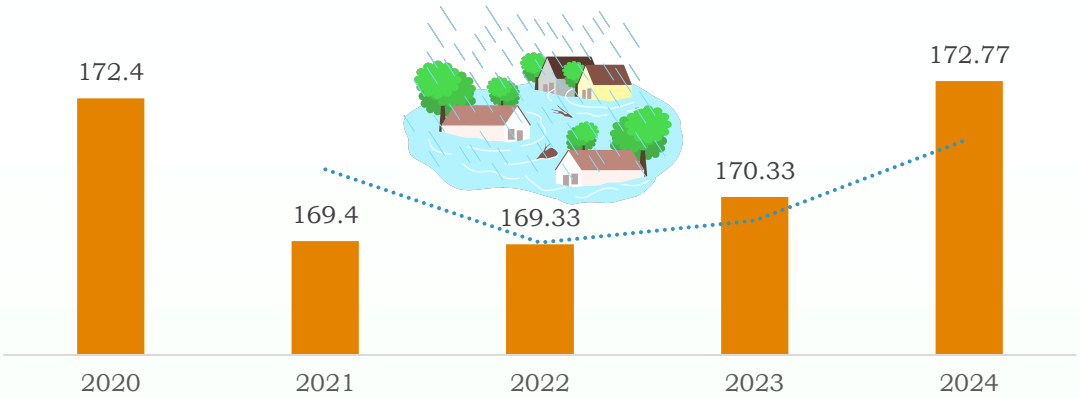

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Fluktuasi IRB ini mengindikasikan masih perlunya penguatan program mitigasi dan adaptasi bencana di Kabupaten Konawe Utara, diiringi dengan penguatan tata kelola bencana yang lebih baik. Upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana harus terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat risiko yang lebih rendah, terutama dengan mempertimbangkan potensi bencana alam yang beragam di Kabupaten Konawe Utara.

2. Indeks Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik ditingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor – faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Ada sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Kategori IKP Kabupaten/Kota dikelompokkan dalam enam kelompok, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), dan Prioritas 6 (Sangat Tahan).

Hasil perhitungan IKP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 – 2023 menunjukkan tren ketahanan pangan yang naik tiap tahunnya, selain itu Kabupaten Konawe Utara selalu berada dalam kelompok tahan, dan ditahun 2023 ini masuk dalam Prioritas 6 atau Sangat Tahan. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan Kabupaten Konawe Utara dalam mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mendukung ketersediaan pangan yang mencukupi, aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang terjamin, serta pemanfaatan pangan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Gambar 2.13 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 – 2023

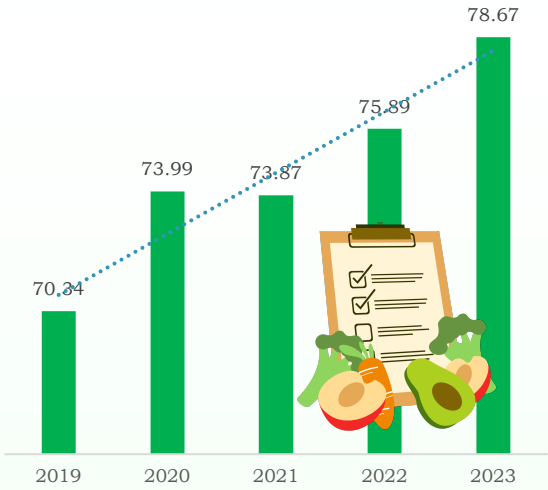

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara , 2025

3. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat alamiah seperti bencana alam, perubahan iklim, maupun non-alamiah seperti krisis sosial dan ekonomi. Indeks ini mencakup aspek-aspek utama yang mendukung daya tahan suatu daerah dalam mengantisipasi, merespons, dan pulih dari gangguan yang terjadi, sehingga mampu mempertahankan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Komponen utama dalam indeks ketahanan daerah yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan lingkungan, ketahanan infrastruktur, dan ketahanan pemerintahan.

Hingga saat ini, data Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Konawe Utara belum tersedia, sehingga analisis secara kuantitatif mengenai daya tahan wilayah terhadap bencana, perubahan iklim, dan ancaman lainnya masih belum dapat diukur secara spesifik. Meskipun demikian, penyediaan data dan pengukuran secara berkala menjadi langkah penting dalam rangka memperkuat kesiapan daerah terhadap berbagai potensi risiko.

4. Stok Karbon/Indikator Kapasitas Ekosistem

Stok Karbon merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas ekosistem dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO_2) dari atmosfer. Kapasitas ini sangat relevan dalam konteks mitigasi perubahan iklim, karena karbon yang tersimpan dalam vegetasi dan tanah membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Gambar 2.14
Stok Karbon CO2/Ha Kabupaten Konawe Utara

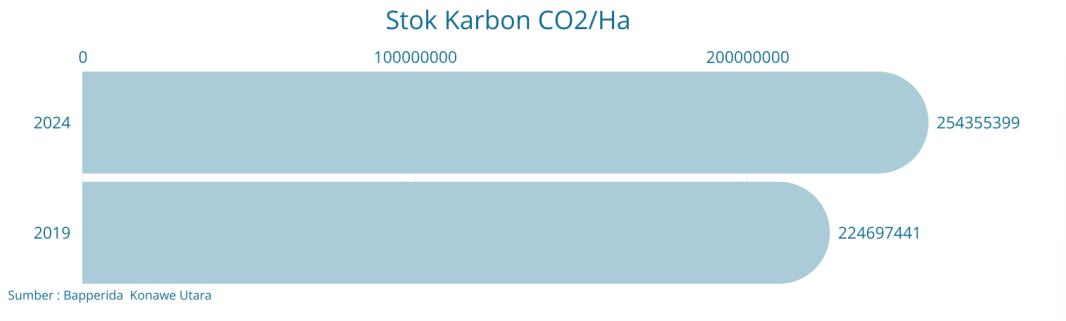

- Peningkatan stok karbon CO_2/Ha dari 22.469.7441 ton (2019) menjadi 25.435.5399 ton (2024) menunjukkan bahwa kapasitas kawasan hijau atau penyerapan karbon di Kabupaten Konawe Utara semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan indikator positif dalam upaya mitigasi perubahan iklim, karena hutan dan vegetasi berperan penting dalam menyerap emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi ekosistem yang kuat dalam hal penyerapan karbon dan ketahanan pangan yang cukup stabil. Namun, tingginya risiko bencana dan rendahnya ketahanan daerah menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara alam dengan kesiapsiagaan sosial.

2.1.7 Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebanyak 81.355 jiwa yang terdiri dari 41.853 jiwa laki-laki dan 39.502 jiwa perempuan, dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 105,95. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Konawe Utara sebesar 3,84 persen.

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020-2024

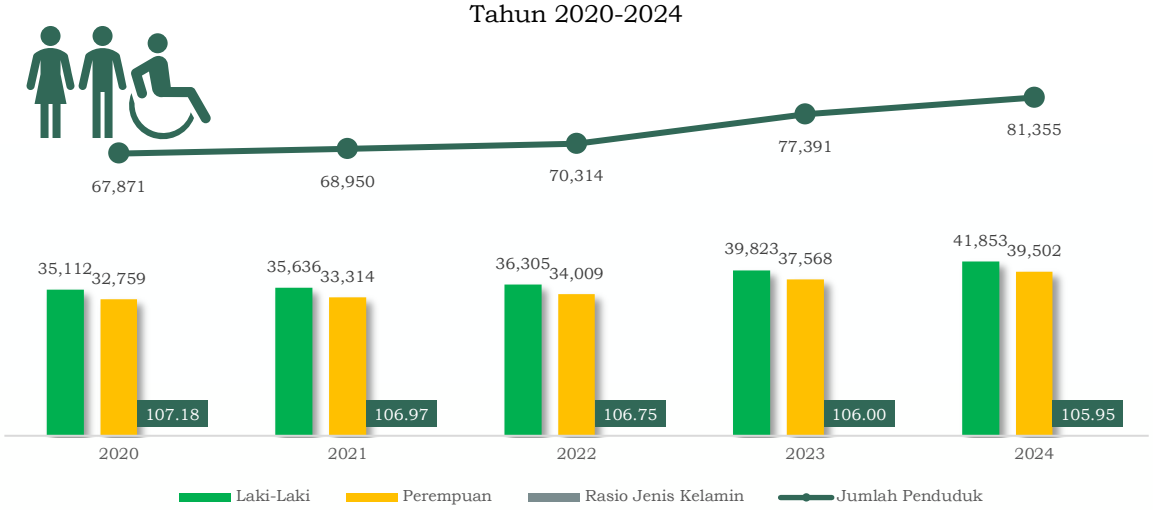

Sumber : Dirangkum dari BPS, Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2020 s.d 2025

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lasolo, Molawe, Andowia, dan Asera. Hal ini terjadi karena keempat kecamatan tersebut merupakan konsentrasi penduduk setelah Kabupaten Konawe Utara terbentuk menjadi daerah otonomi baru, selain itu kecamatan tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.

- Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berperspektif gender. Data pada Gambar 2.16 menunjukkan jumlah penduduk perempuan semakin meningkat dan lebih banyak dari penduduk laki-laki, oleh sebab itu dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender. Salah satunya mungkin dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pemerintahan.
- Ditilik dari kepadatan penduduk kecamatan, penyebaran penduduk belum merata. Kecamatan dengan luas wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah lebih besar.

Gambar 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

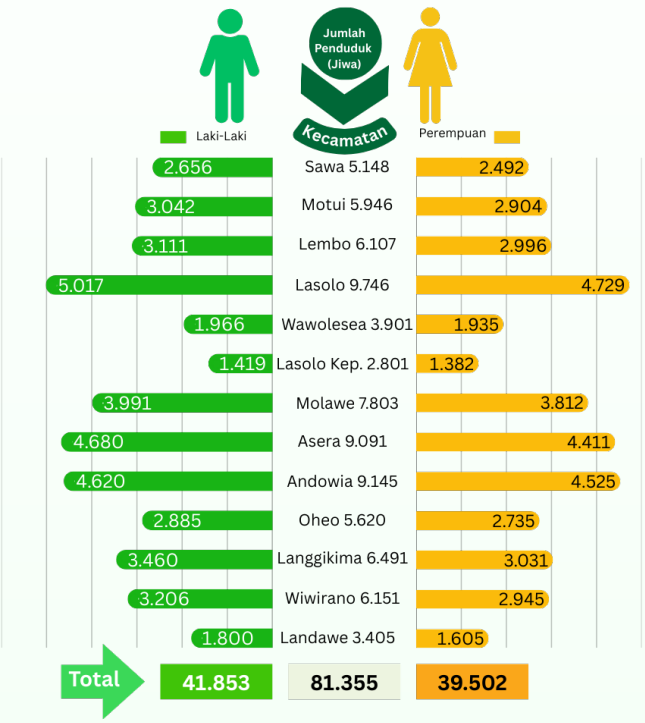

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Tahun 2024			Kepadatan (jiwa/km²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sawa	93,76	2.656	2.492	5.148	54,91
2	Motui	61,3	3.042	2.904	5.946	97,00
3	Lembo	78,12	3.111	2.996	6.107	78,17
4	Lasolo	139,4	5.017	4.729	9.746	69,91
5	Wawolesea	149,4	1.966	1.935	3.901	26,11
6	Lasolo Kep.	62,42	1.419	1.382	2.801	44,87
7	Molawe	365,06	3.991	3.812	7.803	21,37
8	Asera	863,32	4.680	4.411	9.091	10,53
9	Andowia	595,9	4.620	4.525	9.145	15,35
10	Oheo	738,5	2.885	2.735	5.620	7,61
11	Langgikima	476,75	3.460	3.031	6.491	13,62
12	Wiwirano	874,3	3.206	2.945	6.151	7,04
13	Landawe	603,53	1.800	1.605	3.405	5,64
	Konawe Utara	5.101,76	41.853	39.502	81.355	15,95

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025, dianalisis

Proporsi penduduk Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 didominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 60,13%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 27%, dan kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun) sebesar 3,64%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif. Berdasarkan komposisi tersebut, rasio beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif sebesar 50,88%, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

- Berdasarkan komposisi penduduk, menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif atau tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara lebih besar dari penduduk yang tidak produktif (usia sekolah dan lanjut usia).
- Bonus demografi ini menjadi potensi dalam proses pembangunan dalam kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber daerah.
- Penduduk Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Gambar 2.17
Piramida Penduduk
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

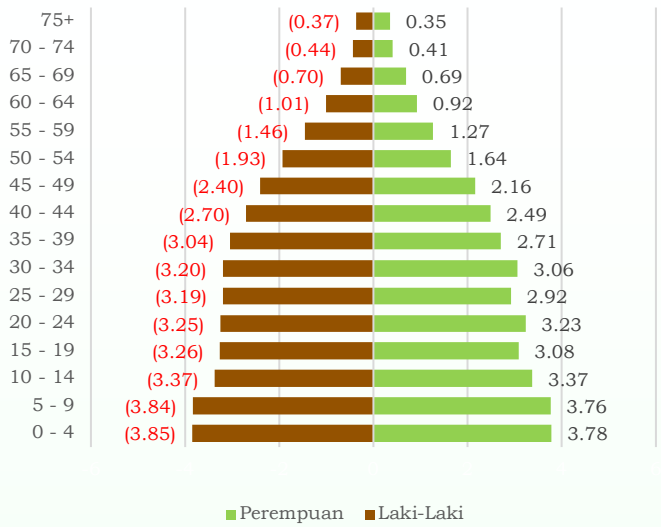

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, dengan melalui pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. IPM menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Data IPM Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Meskipun menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, capaian IPM Kabupaten Konawe Utara masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemerataan akses layanan dasar, kualitas pendidikan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih dibawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 69,86 pada tahun 2020 hingga mencapai 72,71 pada tahun 2024, untuk ketiga kalinya termasuk dalam kategori tinggi (70 < IPM < 80).

Gambar 2.18
Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

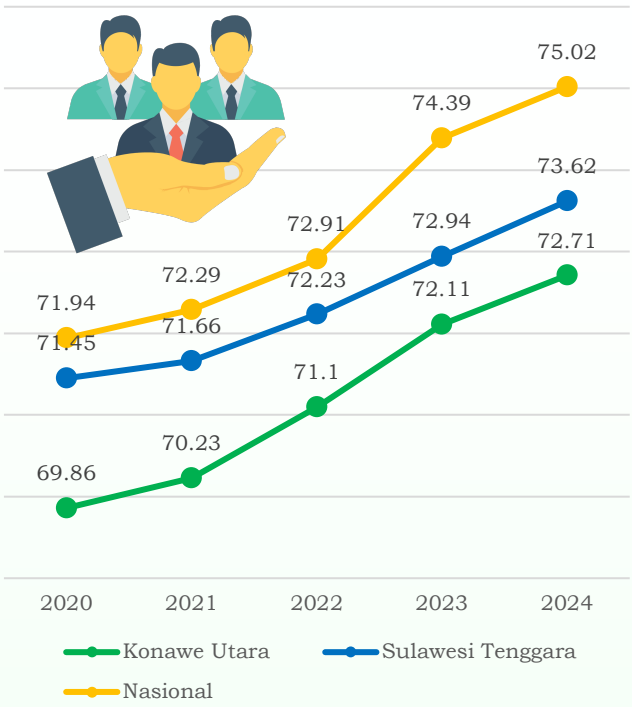

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2025

IPM Kabupaten Konawe Utara masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas MCK penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTP) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program-program lainnya.

2.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Konawe Utara adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. PDRB tidak hanya menunjukkan nilai tambah dari kegiatan ekonomi, tetapi juga memberikan gambaran pertumbuhan dan struktur ekonomi daerah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.

- Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2020 perekonomian Konawe Utara masih berjalan cukup baik, tercermin dari PDRB dan laju pertumbuhan yang positif. Namun, pandemi Covid-19 pada 2021 membawa dampak signifikan, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional (-2,07%) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (-0,65%) yang masuk kategori resesi. Memasuki 2022, ekonomi nasional dan Sulawesi Tenggara mulai pulih dengan pertumbuhan masing-masing 5,02% dan 3,97% (y-on-y), yang kemudian terus berlanjut hingga 2023 dengan capaian impresif 5,31% secara nasional dan 5,35% di Sulawesi Tenggara.
- Sejalan dengan pemulihan tersebut, perekonomian Kabupaten Konawe Utara juga mulai bangkit pada 2022 dengan pertumbuhan 5,07%, lebih tinggi dibanding 2021 sebesar 4,59%. Perbaikan ini didorong oleh pelonggaran aktivitas masyarakat yang memacu kembali kegiatan ekonomi. Pada 2023, pertumbuhan Konawe Utara tetap stabil di angka 5,07%, sedikit menurun dibanding Sulawesi Tenggara namun masih lebih tinggi dari capaian nasional. Selanjutnya pada 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara meningkat signifikan menjadi 5,74%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%) maupun Sulawesi Tenggara (5,40%). Capaian ini mencerminkan peran sektor-sektor unggulan daerah dalam menopang kinerja ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.19
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara,
Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2025

Perekonomian Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan fluktuasi terutama pada tahun 2023 akibat badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi. Pada tahun 2021 hingga 2023 Ekonomi Kabupaten Konawe Utara menguat kembali dan berhasil tumbuh menjadi 5,07 pada tahun 2022 dan terus berlanjut mengalami peningkatan hingga mencapai pertumbuhan 5,74 persen pada tahun 2024.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terutama didukung oleh

kinerja pada sektor : (1) Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, (2) Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa lainnya, dan (5) Informasi dan Komunikasi.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,03	3,63	5,92	0,34	9,28
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,98	2,41	3,80	16,28	1,51
C	Industri Pengolahan	-1,26	2,60	0,69	-16,67	-1,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,57	5,92	8,20	1,27	4,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,24	4,66	0,03	2,45	3,25
F	Konstruksi	-0,03	8,77	4,17	5,29	2,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,08	8,26	7,66	2,94	2,67
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,53	4,48	4,68	2,51	6,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,22	5,01	8,83	7,83	1,55
J	Informasi dan Komunikasi	11,08	2,77	4,41	6,41	5,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,61	4,96	4,02	1,20	1,40
L	Real Estate	0,22	0,24	4,35	1,45	2,07
M.N	Jasa Perusahaan	-1,57	5,53	5,36	4,54	-2,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,50	3,53	-0,06	9,90	17,95
P	Jasa Pendidikan	6,82	3,95	6,70	4,13	4,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,88	6,43	5,64	2,75	1,42
R.S.T.U	Jasa lainnya	-3,22	2,03	5,47	5,61	3,66
Pertumbuhan PDRB		-0,72	4,59	5,07	5,03	5,74

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Bila dilihat dari data kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2024 didominasi oleh empat sektor ekonomi, yaitu: (1) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,95 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 9,90 persen; (2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,28 persen meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 0,34 persen, (3) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,33 persen mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 2,51 persen; dan (4) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 5,81 persen menurun dibanding tahun 2023 sebesar 6,41 persen.

Gambar 2.20
Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

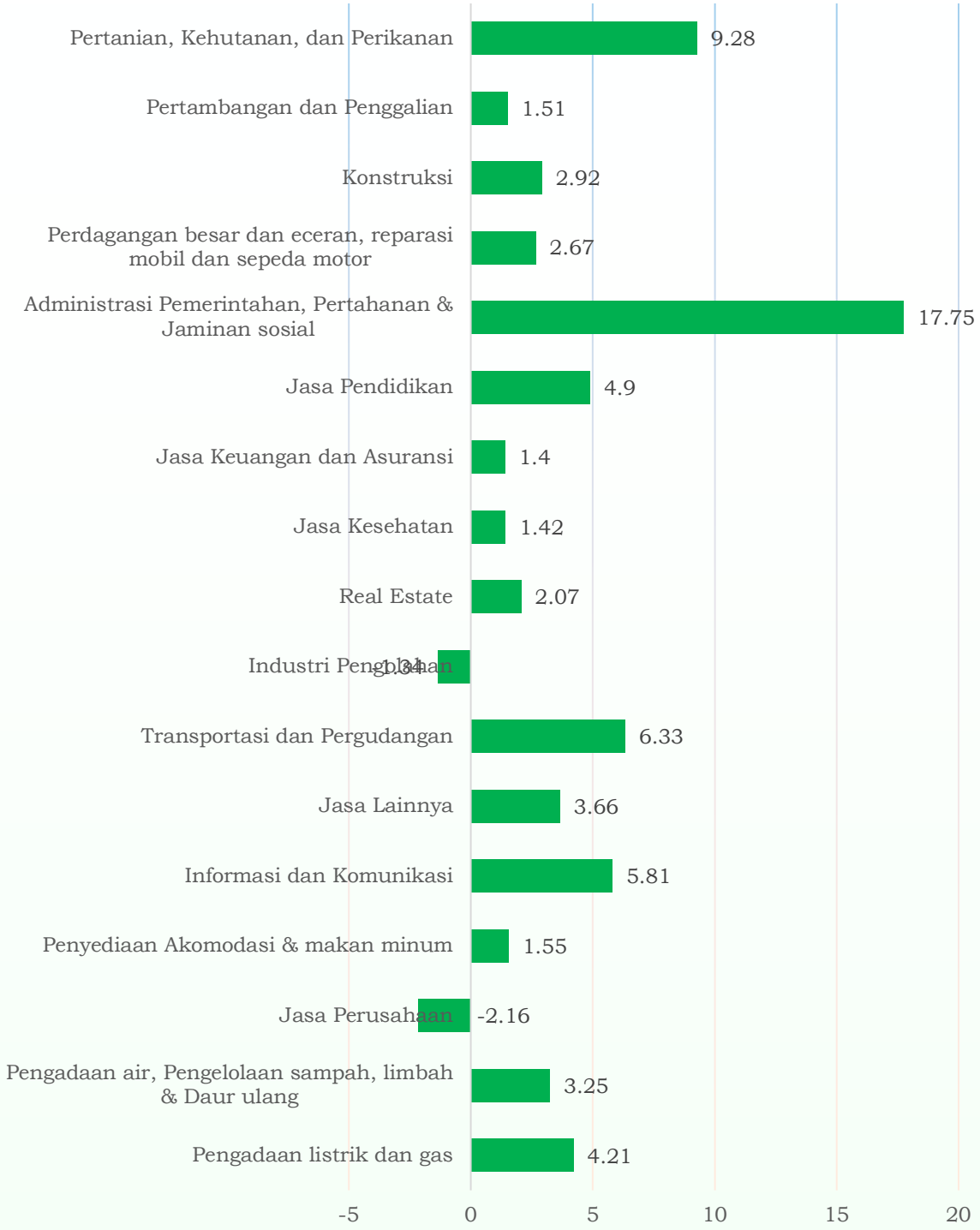

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2025

Tabel 2.7
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha		PDRB 2020		PDRB 2021		PDRB 2022		PDRB 2023*		PDRB 2024**	
		(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.577,46	39,77	1.693,98	39,74	1.875,60	39,08	1.944,21	36,96	2.265,73	39,70
B	Pertambangan dan Penggalian	839,44	21,16	883,32	20,72	1.071,66	22,33	1.325,99	25,21	1.323,14	23,18
C	Industri Pengolahan	44,64	1,13	47,30	1,11	49,50	1,03	42,21	0,80	42,26	0,74
D	Pengadaan listrik dan gas	0,11	~0,00	0,21	~0,00	0,13	~0,00	0,14	~0,00	0,15	~0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	1,39	0,04	1,48	0,03	1,51	0,03	1,58	0,03	1,66	0,03
F	Konstruksi	542,42	13,68	602,06	14,12	664,06	13,84	719,71	13,68	747,30	13,09
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	469,32	11,83	514,01	12,06	585,55	12,20	633,15	12,04	668,67	11,72
H	Transportasi dan Pergudangan	11,92	0,30	12,56	0,29	14,06	0,29	14,94	0,28	16,38	0,29
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	7,43	0,19	7,84	0,18	8,74	0,18	9,55	0,18	9,95	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	10,94	0,28	11,56	0,27	11,98	0,25	12,57	0,24	12,99	0,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	60,93	1,54	66,72	1,57	74,22	1,55	75,98	1,44	77,66	1,36
L	Real Estate	41,59	1,05	42,19	0,99	45,80	0,95	46,82	0,89	47,88	0,84
M,N	Jasa Perusahaan	1,86	0,05	2,03	0,05	2,25	0,05	2,45	0,05	2,44	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	194,49	4,90	204,60	4,80	204,81	4,27	226,06	4,30	275,45	4,83
P	Jasa Pendidikan	103,53	2,61	109,59	2,57	121,74	2,54	132,85	2,53	142,28	2,49
Q	Jasa Kesehatan	47,60	1,20	51,56	1,21	55,09	1,15	57,86	1,10	59,03	1,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,15	0,28	11,64	0,27	12,55	0,26	13,75	0,26	14,14	0,25
PDRB		3.966,23	100,00	4.262,56	100,00	4.799,25	100,00	5.295,79	100,00	5.707,11	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.8
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		PDRB 2020		PDRB 2021		PDRB 2022		PDRB 2023*		PDRB 2024**	
		(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)	(Miliar Rp.)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.141,74	-1,03	1.183,22	3,63	1.253,28	5,92	1.257,60	0,34	1.374,27	9,28
B	Pertambangan dan Penggalian	590,11	-2,98	604,35	2,41	627,35	3,8	729,48	16,28	740,53	1,51
C	Industri Pengolahan	33,39	-1,26	34,26	2,60	34,49	0,69	28,75	-16,67	28,36	-1,34
D	Pengadaan listrik dan gas	0,09	5,57	0,10	5,92	0,10	8,20	0,11	1,27	0,11	4,21
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	1,14	4,24	1,19	4,66	1,19	0,03	1,22	2,45	1,26	3,25
F	Konstruksi	372,32	-0,03	404,99	8,77	421,86	4,17	444,17	5,29	457,13	2,92
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	325,45	-1,08	352,34	8,26	379,33	7,66	390,50	2,94	400,93	2,67
H	Transportasi dan Pergudangan	9,88	-1,53	10,33	4,48	10,81	4,64	11,08	2,51	11,78	6,33
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	5,15	-0,22	5,41	5,01	5,88	8,83	6,34	7,83	6,44	1,55
J	Informasi dan Komunikasi	10,93	11,08	11,23	2,77	11,73	4,41	12,48	6,41	13,20	5,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	40,73	6,61	42,75	4,96	44,47	4,02	45,01	1,20	45,63	1,40
L	Real Estate	34,28	0,22	34,36	0,24	35,86	4,35	36,37	1,45	37,13	2,07
M,N	Jasa Perusahaan	1,40	-1,57	1,47	5,53	1,55	5,36	1,62	4,54	1,59	-2,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	137,94	1,50	142,81	3,53	142,73	-0,06	156,86	9,90	185,02	17,95
P	Jasa Pendidikan	79,06	6,82	82,18	3,95	87,69	6,70	91,31	4,13	95,78	4,90
Q	Jasa Kesehatan	35,55	9,88	37,84	6,43	39,97	5,64	41,07	2,75	41,75	1,42
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,87	-3,22	9,05	2,03	9,55	5,47	10,08	5,61	10,45	3,66
PDRB		2.828,03	-72	2.957,88	4,59	3.107,85	5,07	3.264,06	5,03	3.451,27	5,74

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Dari Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 dapat dilihat bahwa empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka program kegiatan dapat diarahkan pada sektor tersebut.

Tabel 2.9
Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,77	39,74	39,08	36,96	39,70
B	Pertambangan dan Penggalian	21,16	20,72	22,33	25,21	23,18
C	Industri Pengolahan	1,13	1,11	1,03	0,80	0,74
D	Pengadaan listrik dan gas	~0,00	~0,00	~0,00	~0,00	~0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah, dan Daur ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	13,68	14,12	13,84	13,68	13,09
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,83	12,06	12,20	12,04	11,72
H	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,54	1,57	1,55	1,44	1,36
L	Real Estate	1,05	0,99	0,95	0,89	0,84
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial	4,90	4,80	4,27	4,30	4,83
P	Jasa Pendidikan	2,61	2,57	2,54	2,53	2,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	1,21	1,15	1,10	1,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25
TOTAL PERSENTASE PDRB (%)		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian mengalami tren fluktuasi pada tahun 2020–2024 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2024, sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara menunjukkan trend perlambatan. Namun sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat signifikan. Perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha pertanian sebagai salah satu sektor primer, menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Konawe Utara.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Gambar 2.21
Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

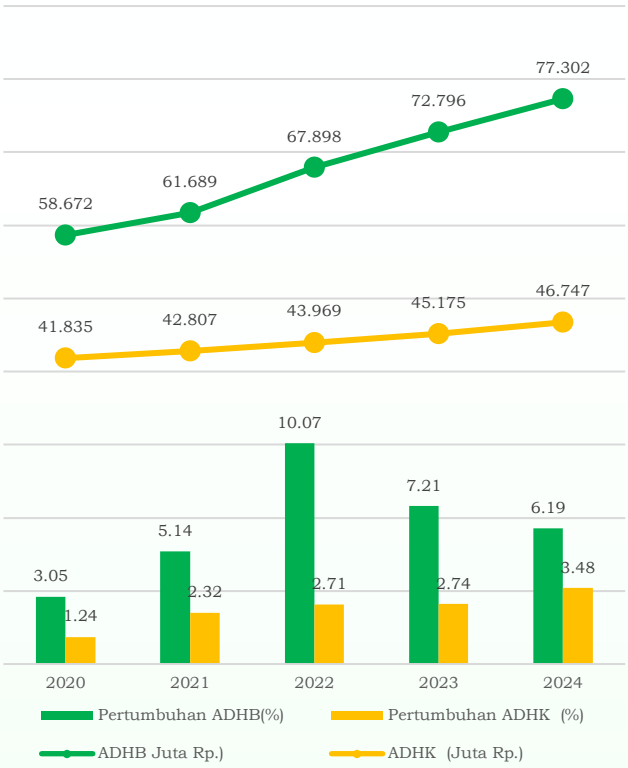

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2025

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Konawe Utara pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan baik secara nominal (harga berlaku/ADHB) maupun riil (harga konstan/ADHK 2010). Pada ADHB, nilai PDRB per kapita meningkat dari Rp58,67 juta pada tahun 2020 menjadi Rp77,30 juta pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,15 persen per tahun. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 10,07 persen, yang erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sementara itu, pada ADHK, PDRB per kapita meningkat dari Rp41,83 juta pada tahun 2020 menjadi Rp46,74 juta pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,82 persen per tahun. Perbedaan signifikan antara pertumbuhan ADHB dan ADHK menunjukkan adanya pengaruh besar dari kenaikan harga (inflasi maupun harga komoditas), sehingga peningkatan kesejahteraan riil masyarakat masih lebih terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan nominal ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat memang membaik, tetapi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada penguatan daya saing ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor pertumbuhan, khususnya di luar sektor tambang, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa. Hilirisasi industri juga penting untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas dampak positif bagi pendapatan masyarakat. Selain itu, percepatan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan UMKM melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, digitalisasi, dan dukungan akses modal harus diprioritaskan. Upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi juga menjadi kunci, terutama dengan memperkuat sektor pangan dan distribusi logistik antar wilayah. Di sisi lain, pembangunan inklusif yang merata antar kecamatan, serta penerapan prinsip berkelanjutan di sektor industri dan pertambangan, harus terus diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan. Optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan di Konawe Utara juga perlu diarahkan agar benar-benar memberikan manfaat nyata berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita riil, serta perluasan peluang usaha lokal.

2.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dari 2,61 persen pada tahun 2023 menjadi 1,05 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.22
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024

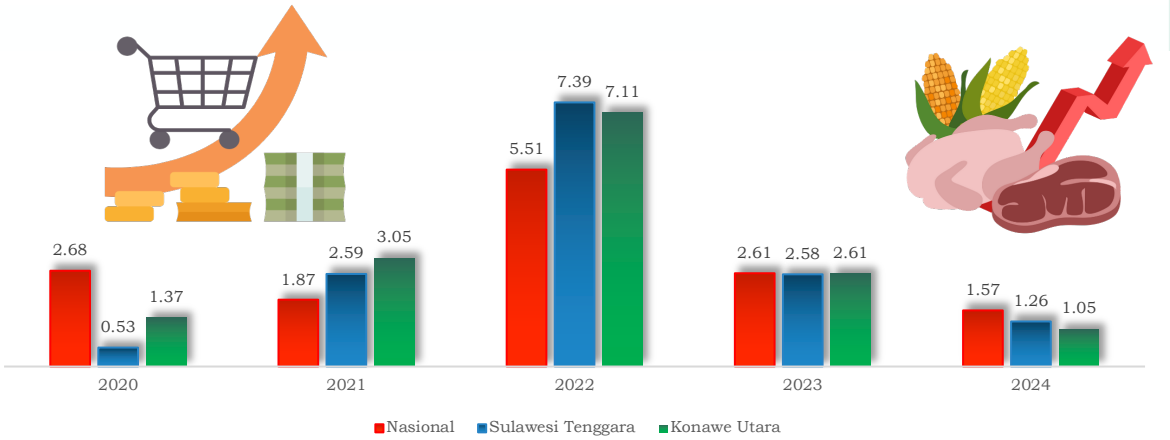

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, diolah

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe Utara melalui; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusi melalui kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data. Program Pengembangan Kebun Pekarangan (PPKP) yang telah berhasil dilaksanakan hingga Tahun 2024 salah satunya adalah penanaman cabai dan sayur-sayuran mampu menjadi penstabil inflasi di Kabupaten Konawe Utara.

2.2.1.5 Rasio Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Gambaran Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Konawe Utara tahun 2021–2024 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional disajikan pada grafik berikut:

Gambar 2.23
Gini Rasio Kabupaten Konawe Utara, Nasional dan
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2024

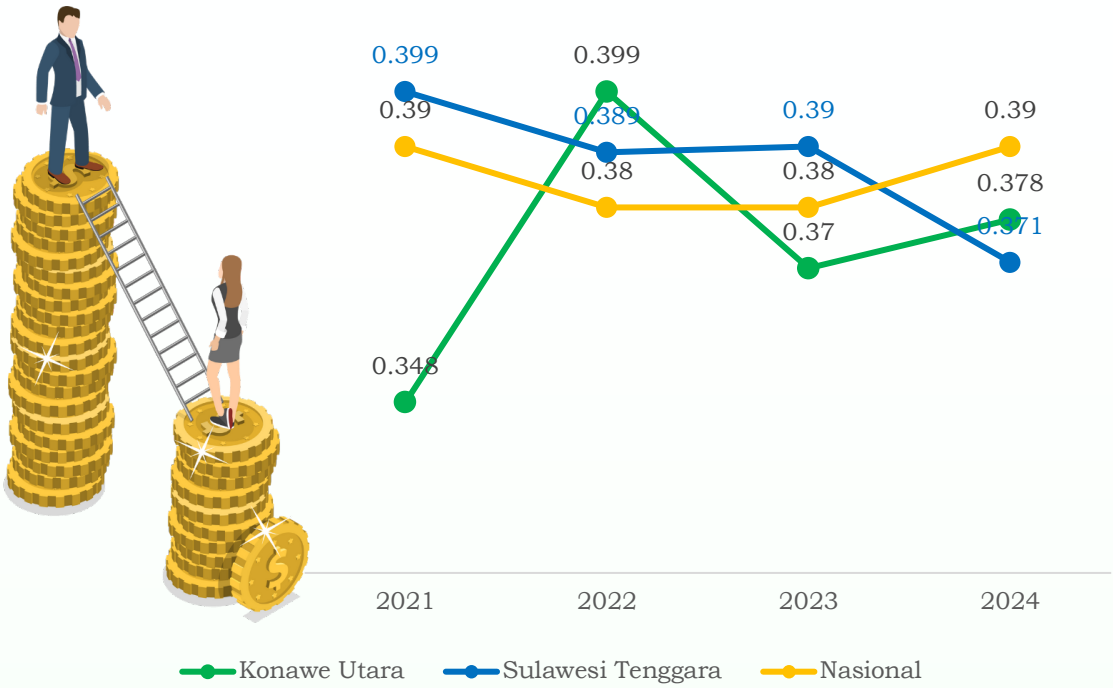

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2025

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Konawe Utara, Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2021–2024 mengalami perubahan yang fluktuatif. Secara keseluruhan, maka ketimpangan di Kabupaten Konawe Utara masih termasuk dalam kriteria rendah. Indeks Gini sejak tahun 2024 masih berada pada posisi 0,378 persen dimana indeks ini lebih tinggi dari indeks gini Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 0,371. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Konawe Utara, yaitu Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;) Sektor Transportasi dan Pergudangan; dan Sektor Informasi dan Komunikasi.

2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan).

Tabel 2.10
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin/Po (%)	Garis Kemiskinan/GK (Rp/Kap/Bln)
2020	67.871	8.78	13,53	305.100
2021	68.950	9.26	14,32	321.986
2022	70.314	9.02	13,72	340.061
2023	77.391	9.01	13,48	381.620
2024	81.355	8.94	13,17	407.710

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

Tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan 14,32% dan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tingkat kemiskinan menunjukan kecenderungan menurun. Apabila dilihat dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengukuran dengan angka terakhir sebesar Rp. 407.710,- Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan - kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti pengembangan obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru;
b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan pemberian bantuan untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
d. Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta pendampingan program yang berkelanjutan;
e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti pemberian beras untuk warga miskin lansia.
g. Pembentukan Unit Reaksi Cepat Penanggulangan kemiskinan ekstrem (URC-KIS) yang langsung menyasar target masyarakat miskin berdasarkan data P3KE *by name by address* diharapkan mampu menghapus kemiskinan ekstrem sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Konawe Utara.

Namun demikian program penanggulangan kemiskinan tersebut belum optimal karena keterbatasan jangkauan pelaksanaan program yang belum bisa menyeluruh. Jadi meskipun realisasi kinerja program dan keuangan telah tercapai 100% tetapi belum bisa secara signifikan mencapai target.

2.2.2 Kesehatan untuk semua

Kesehatan merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Paradigma "Kesehatan untuk Semua" bertujuan untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Prinsip ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin ke-3 yaitu "Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan" yang menargetkan peningkatan akses layanan kesehatan dasar, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan penyakit menular, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2.24
Indikator – Indikator Kesehatan untuk Semua

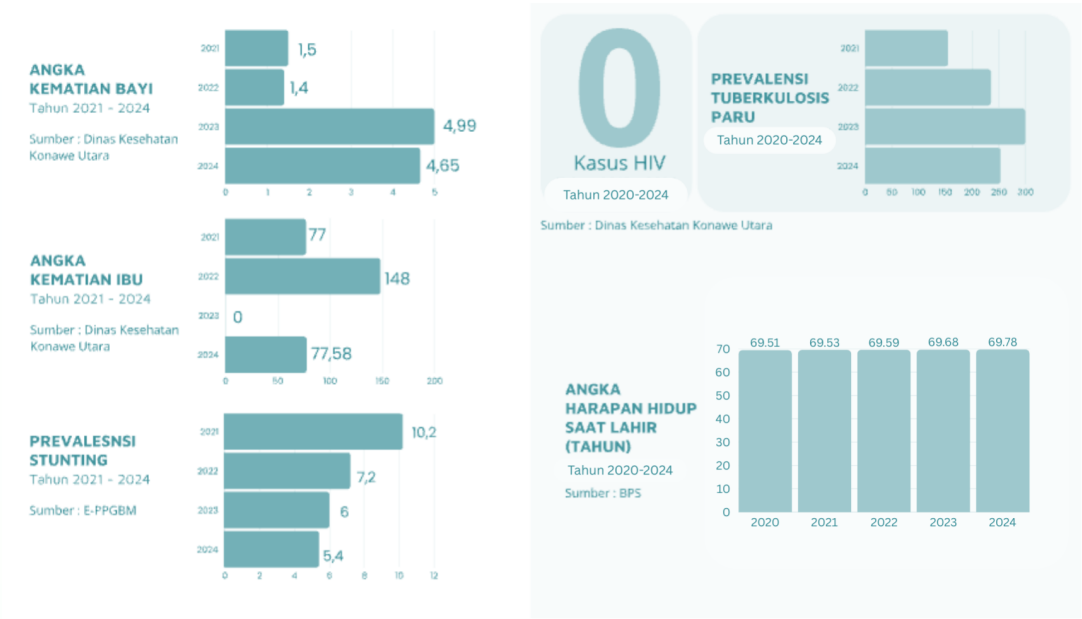

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kemajuan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana terlihat dari berbagai indikator kesehatan di atas. Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat secara konsisten dari 69,51 tahun pada 2020 menjadi 69,78 tahun pada 2024, yang mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Namun demikian, perhatian besar perlu diberikan pada fluktuasi angka kematian bayi, yang melonjak dari 1,4 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022 menjadi 4,99 pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 4,65 pada 2024. Angka ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, terutama dalam hal deteksi dini risiko kehamilan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Angka kematian ibu juga menunjukkan dinamika yang mencolok, dari 77 kasus pada 2021 melonjak ke 148 pada 2022, lalu turun drastis ke 0 pada 2023, dan kembali naik menjadi 77,58 pada 2024. Fluktuasi tajam ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa penurunan bukan disebabkan oleh pelaporan yang tidak lengkap, melainkan benar-benar mencerminkan perbaikan lapangan.

Sementara itu, prevalensi stunting mengalami tren penurunan signifikan dari 10,2% pada 2021 menjadi 5,4% pada 2024, yang menunjukkan keberhasilan program intervensi gizi dan perbaikan pola asuh anak. Di sisi lain, prevalensi tuberkulosis paru masih menjadi tantangan dengan tren yang cenderung meningkat, mencapai angka mendekati 300 kasus pada 2024. Namun, kabar baik datang dari data HIV yang menunjukkan nol kasus dari 2020 hingga 2024, menggambarkan efektivitas kampanye pencegahan dan kontrol infeksi.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe Utara telah membuat kemajuan dalam mewujudkan "Kesehatan untuk Semua", terutama dalam peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka stunting. Namun, fokus dan strategi khusus masih sangat dibutuhkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis. Pendekatan kolaboratif lintas sektor, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, serta pelibatan aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh penduduk di Konawe Utara.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang merata

2.2.3.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.25
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara,
Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020–2024

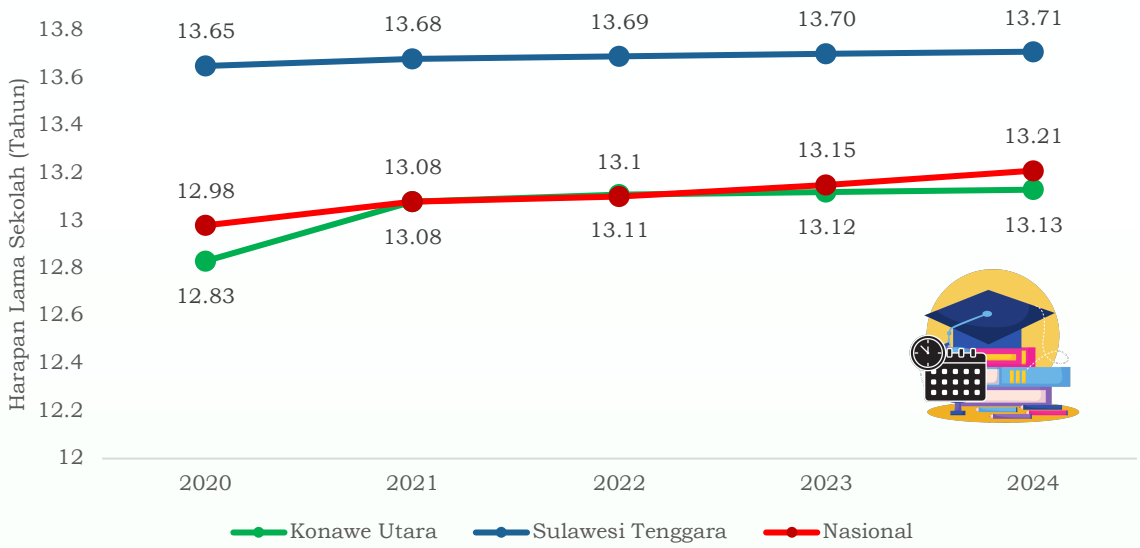

Gambar diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu meningkat, meskipun masih dibawah angka Sulawesi Tenggara dan Nasional. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 sebesar 13,13 tahun meningkat dibanding tahun 2023. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,13 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma I. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan.

2.2.3.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan, dari 9,21 pada tahun 2020 menjadi 9,61 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Konawe Utara bersekolah hanya setingkat SLTP.

Gambar 2.26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020–2024

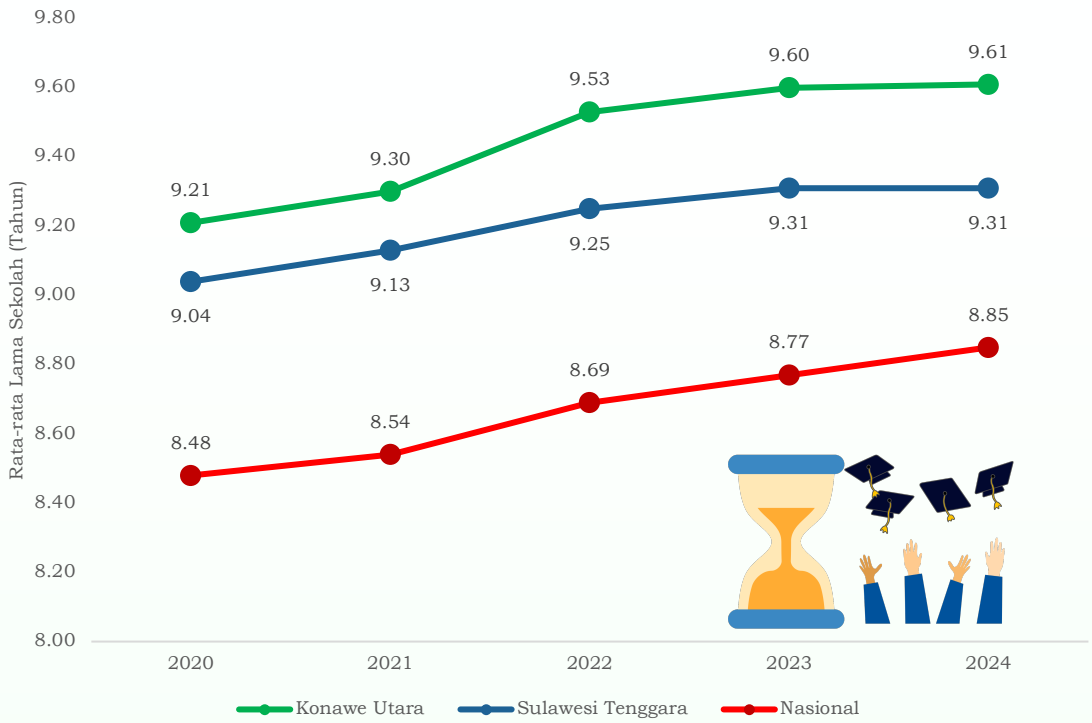

Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 selalu meningkat dan berada di atas angka Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Beasiswa untuk siswa SD - SMP - SMA dan beasiswa Konasara bagi mahasiswa perguruan tinggi.

2.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi/numerasi atau Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, tanpa harus memahami isi dari apa yang dibaca atau ditulis. Setelah tahun 2010, Angka Melek Huruf (AMH) tidak lagi digunakan sebagai indikator dalam penyusunan Indeks Pendidikan pada dimensi pengetahuan/tangkat Pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AMH dianggap tidak relevan untuk mengukur Pendidikan secara menyeluruh karena tidak mencerminkan kualitas Pendidikan.

Perkembangan AMH di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka melek huruf tercatat sebesar 96,91%, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 98,22% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 95,77%, yang menandai tantangan serius dalam mempertahankan capaian literasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, tren Konawe Utara pada tahun 2024 justru menunjukkan kesenjangan yang mencolok, di mana angka melek huruf provinsi mencapai 99,83%, tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Penurunan AMH Kabupaten Konawe Utara mengindikasikan perlunya penguatan program keaksaraan, khususnya bagi kelompok usia dewasa dan daerah terpencil, serta revitalisasi budaya literasi melalui kolaborasi antar instansi dan partisipasi masyarakat.

Gambar 2.27 Angka Melek Huruf Kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2024

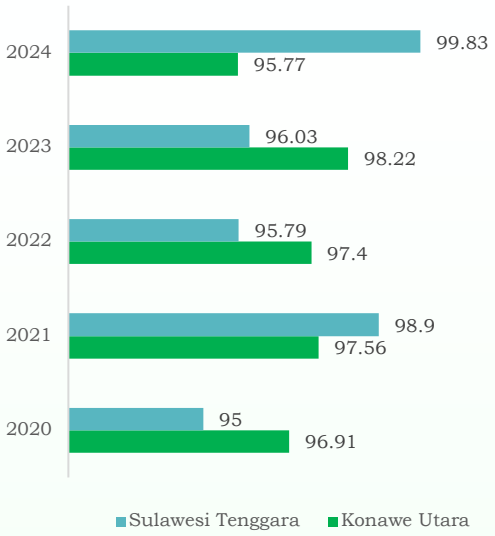

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, berbagai tahun (diolah)

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Dengan literasi, kemampuan seseorang dalam memahami dan menarik Kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik.

IPLM mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tangkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan harian, jumlah perpustakaan ber-SNP, partisipasi masyarakat dalam kegiatan/promosi, dan jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM ke dalam lima kategori : Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9) dan Sangat Tinggi (90-100).

Gambar 2.28
Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

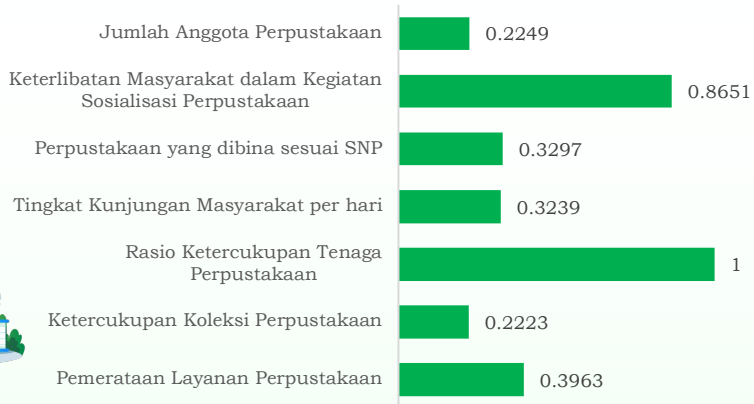

Pada tahun 2024, Kabupaten Konawe Utara memiliki nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 48,03 dengan kategori rendah. Dari tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024, enam diantaranya mendapatkan skor < 1. Sementara itu, UPLM rasio ketercukupan tenaga perpustakaan memiliki nilai sempurna dengan skor 1. Skor 1 menunjukkan bahwa kebutuhan jumlah tenaga perpustakaan sudah terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar pelayanan optimal yang telah ditetapkan, sedangkan skor < 1 mengindikasikan masih perlunya perbaikan dalam meningkatkan beberapa unsur pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara

2.2.4 Perlindungan Sosial yang adaptif

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, Kabupaten Konawe Utara telah mengintegrasikan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan. PSA dirancang untuk membantu masyarakat menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai guncangan yang meliputi bencana alam, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.

PSA berbeda dengan perlindungan sosial reguler karena memiliki fungsi adaptif yang lebih kuat dalam situasi darurat dan krisis. Beberapa unsur penting PSA yang diterapkan di Kabupaten Konawe Utara meliputi:

1) Penguatan kemitraan dan kelembagaan, untuk memastikan koordinasi yang efektif antar-lembaga terkait.
2) Ketersediaan dan pemanfaatan data kebencanaan, agar penyaluran bantuan dan program adaptif tepat sasaran.
3) Integrasi program perlindungan sosial, sehingga program adaptif dapat selaras dengan program reguler.
4) Pembiayaan adaptif, yang memungkinkan respons cepat terhadap guncangan atau kondisi darurat.

Dalam pelaksanaannya, PSA mencakup empat jenis program:

1) Protektif, seperti bantuan tunai darurat pasca-bencana dan subsidi pangan saat krisis;
2) Preventif, misalnya asuransi mikro bencana dan program mitigasi risiko kesehatan;
3) Promotif, berupa pelatihan kesiapsiagaan bencana dan edukasi perubahan iklim;
4) Transformatif, termasuk program ketahanan ekonomi berbasis komunitas dan diversifikasi sumber penghasilan.

Melalui penerapan PSA, Kabupaten Konawe Utara berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, memastikan inklusi kelompok rentan, serta memperkuat keberlanjutan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan dan risiko masa depan.

Salah satu komponen penting dalam PSA adalah program protektif yang meliputi jaminan sosial tenaga kerja (JSTK), yang berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko pendapatan dan kesehatan bagi pekerja formal maupun informal. Indikator cakupan kepesertaan JSTK menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan PSA karena:

1) Melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi: Dengan meningkatnya cakupan kepesertaan, pekerja yang terdampak kecelakaan kerja, sakit, atau PHK tetap memperoleh perlindungan finansial, sehingga masyarakat lebih mampu beradaptasi terhadap guncangan.
2) Meningkatkan daya adaptasi masyarakat: Partisipasi pekerja dalam JSTK memungkinkan keluarga pekerja tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan pendapatan saat terjadi bencana atau krisis ekonomi.
3) Menguatkan integrasi program PSA: Data kepesertaan JSTK menjadi dasar perencanaan dan monitoring PSA, sehingga program adaptif dapat menargetkan kelompok rentan dengan tepat dan mendukung mitigasi risiko sosial yang lebih efektif.

4) Menyediakan dasar untuk pembiayaan adaptif: Dengan mengetahui cakupan peserta JSTK, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana adaptif secara lebih efisien, memastikan bantuan sosial segera diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan demikian, peningkatan cakupan kepesertaan JSTK secara langsung mendukung efektivitas PSA, karena memperluas jaringan perlindungan sosial, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari guncangan sosial maupun ekonomi. Berikut data jaminan kepesertaan ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.11
Cakupan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2021	7.186	593	7.779
2	2022	7.036	552	7.558
3	2023	6.942	510	7.452
4	2024	6.617	412	7.029

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara, 2025

Berdasarkan data kepesertaan jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan jumlah peserta baik laki-laki maupun perempuan. Penurunan jumlah peserta ini terutama terlihat signifikan pada kelompok perempuan, yang berkurang dari 593 orang pada tahun 2021 menjadi hanya 412 orang pada tahun 2024. Penurunan menjadi perhatian dalam perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, khususnya bagi kelompok pekerja perempuan yang umumnya lebih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah instrument utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian program-program kerukunan. IKUB diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Kriteria pencapaian IKUB dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), dan IKUB Sangat Tinggi (80-100). Karena data IKUB untuk Kabupaten Konawe Utara tidak tersedia, analisis dilakukan pada IKUB Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

Gambar 2.29
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Tahun 2020 – 2023

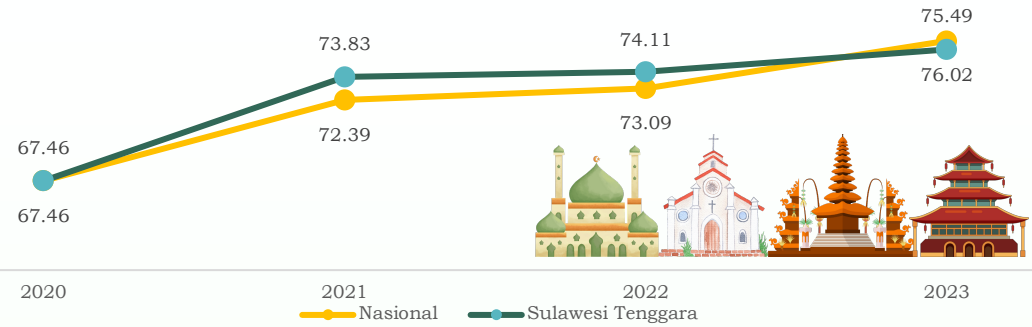

Berdasarkan data Capaian IKUB Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tren yang konsisten meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks ini berada di angka 67,46, setara dengan rata-rata nasional. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, capaian Sulawesi Tenggara terus berada di atas angka nasional, yakni 73,83 di tahun 2021, dan 74,11 pada tahun 2022. Kecenderungan positif ini menunjukkan bahwa upaya penguatan kerukunan, dialog antaragama, dan kolaborasi lintas komunitas di Sulawesi Tenggara telah membuahkan hasil, kondisi sosial yang relatif stabil menjadi modal penting dalam menjaga kohesi sosial serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, damai, dan berkelanjutan.

2.2.5.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan alat ukur penting dalam menilai kinerja pembangunan di bidang kebudayaan secara komprehensif, meliputi tujuh dimensi utama seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Konawe Utara memiliki posisi strategis dalam memperkuat identitas lokal, memperkaya wawasan kebangsaan, serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Meskipun data IPK Kabupaten belum tersedia, dilakukan analisis terhadap IPK Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 – 2023.

Berdasarkan data capaian IPK Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 s.d 2023 menunjukkan bahwa IPK Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada dibawah angka nasional tetapi memperlihatkan adanya tren positif tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan sektor kebudayaan di daerah, yang mencakup berbagai dimensi seperti pelestarian warisan budaya, pengembangan kebudayaan lokal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kegiatan dan produk budaya. Potensi budaya lokal yang ada saat ini baik dalam bentuk tradisi, seni pertunjukan, kerajinan tangan, maupun nilai-nilai adat memberikan peluang besar dalam mendorong peningkatan IPK di masa mendatang dan menjadi pilar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Gambar 2.30
Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020 – 2023

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya membangun keluarga berkualitas, mewujudkan kesetaraan gender, dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Hal ini tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan dari 8,45 tahun pada 2019 menjadi 9,17 tahun pada 2023. Kenaikan ini menandakan akses pendidikan yang semakin merata bagi perempuan, yang pada gilirannya berkontribusi besar terhadap kualitas keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan.

Gambar 2.31
Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender,
dan Masyarakat Inklusif

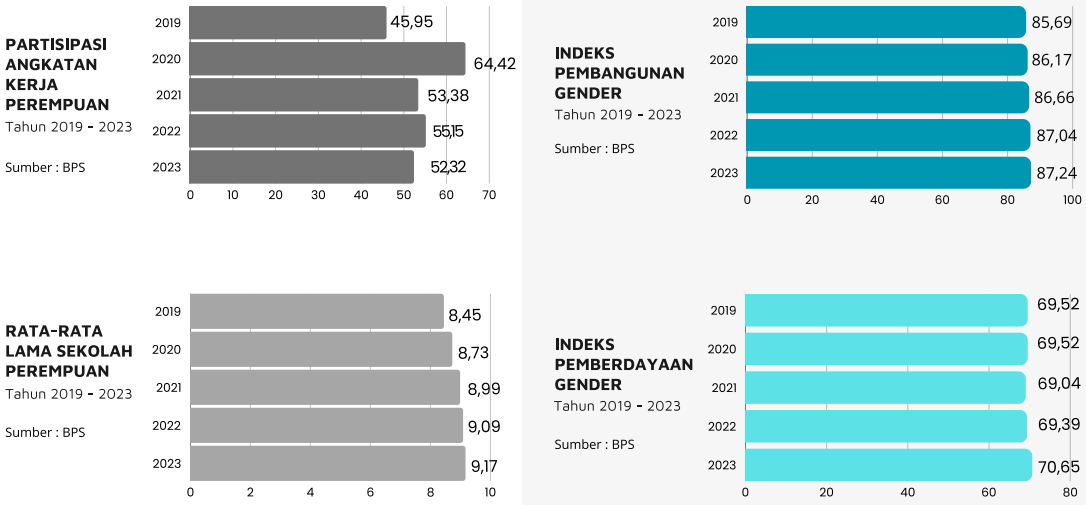

- Dari sisi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, meskipun sempat mengalami fluktuasi, terdapat peningkatan dari 45,95 persen pada 2019 menjadi 52,32 persen pada 2023. Ini menandakan semakin besarnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan semakin terbukanya ruang kerja yang inklusif bagi gender perempuan.
- Sejalan dengan capaian tersebut, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengalami peningkatan dari 85,69 menjadi 87,24, yang mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan tren positif, naik dari 69,52 menjadi 70,65 pada periode yang sama. Kenaikan IDG ini menandakan bahwa perempuan di Konawe Utara mulai mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan serta memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi.
- Secara keseluruhan, perkembangan indikator-indikator ini menggambarkan bahwa Kabupaten Konawe Utara sedang berada pada jalur yang tepat dalam mendorong terwujudnya keluarga yang kuat dan berkualitas, serta menciptakan masyarakat yang lebih setara dan inklusif. Meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, tren yang positif ini perlu dijaga dan diperkuat melalui kebijakan afirmatif, program pemberdayaan perempuan, dan investasi berkelanjutan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud di tingkat lokal.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan atau penduduk berdasarkan umur menjadi salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka ketergantungan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk mendukung kehidupan penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka ketergantungan yang lebih rendah menunjukkan berkurangnya beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi.

Di Kabupaten Konawe Utara, tren angka ketergantungan selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, angka ketergantungan tercatat sebesar 50,88%, lalu menurun menjadi 50,45% tahun 2021 dan 50,06% tahun 2022. Namun, terjadi peningkatan kembali ke angka 50,88% di tahun 2023, sebelum akhirnya menurun secara signifikan menjadi 49,88% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan struktur penduduk, di mana beban tanggungan terhadap kelompok usia produktif semakin berkurang. Kondisi ini dapat menjadi peluang demografis yang positif, jika diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan perluasan kesempatan kerja. Penguatan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelompok usia produktif dan penyediaan layanan dasar bagi kelompok usia non-produktif tetap menjadi strategi penting dalam menjaga keseimbangan demografis yang berkelanjutan.

Gambar 2.32
Angka Ketergantungan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 - 2024

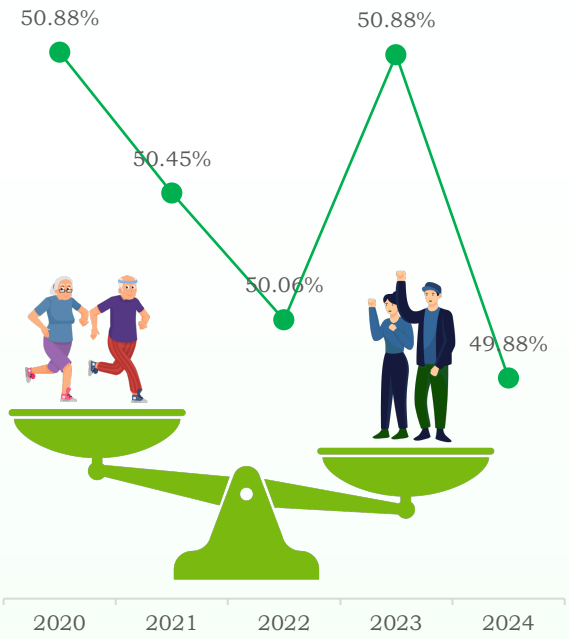

Sumber : BPS Konawe Utara, 2025

2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi strategis dalam struktur perekonomian daerah karena kemampuannya menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan terhadap total PDB merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana industrialisasi berkembang di suatu wilayah. Di Kabupaten Konawe Utara, meskipun sektor ini belum menjadi penyumbang utama PDB daerah, tren pertumbuhannya menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan, terutama dengan kehadiran kawasan industri berbasis pertambangan dan hilirisasi sumber daya alam.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio PDB industri pengolahan tercatat sebesar 1,13%, kemudian sedikit menurun menjadi 1,11% di tahun 2021 dan 1,03% pada tahun 2022. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 0,80%, dan kembali turun menjadi 0,74% pada tahun 2024.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan belum berkembang secara optimal dan belum menjadi pendorong utama dalam struktur ekonomi daerah. Menurunnya kontribusi ini dapat disebabkan oleh terbatasnya investasi, infrastruktur pendukung industri, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Upaya strategis untuk memperkuat sektor industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, maupun kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang berkelanjutan. Dukungan lintas sektor dan kemitraan antara pemerintah, swasta, serta masyarakat menjadi kunci untuk membalikkan tren ini dan menjadikan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.33
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024

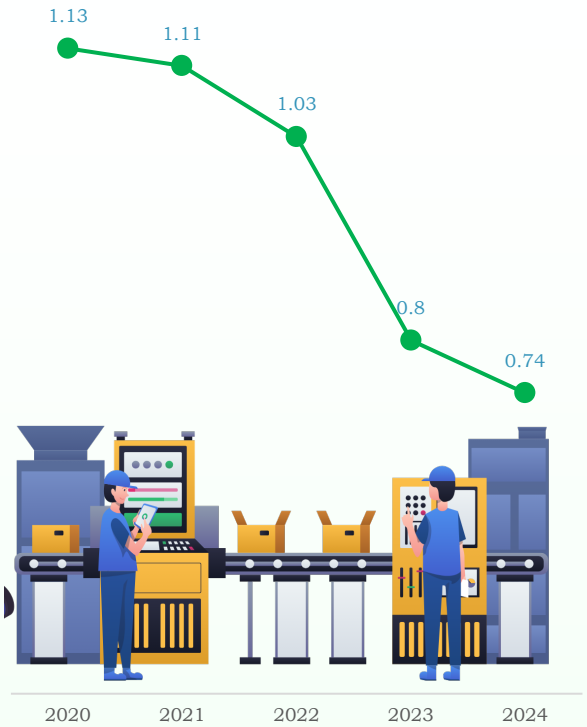

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara tahun 2025

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil namun stabil.

Gambar 2.34
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024

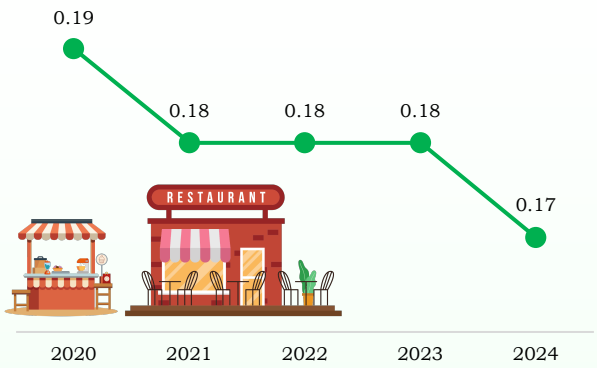

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar 0,19% terhadap total PDRB, lalu sedikit menurun menjadi 0,18% pada tahun 2021 dan bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2023. Di tahun 2024, rasio ini mengalami penurunan tipis menjadi 0,17%. Angka tersebut menggambarkan bahwa meskipun sektor ini memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pariwisata dan konsumsi lokal, namun kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih tergolong rendah. Hal ini dapat mencerminkan belum optimalnya pengembangan sektor kuliner, perhotelan, serta layanan akomodasi lainnya.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan Gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah penduduk yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Perkembangan TPAK di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi partisipasi masyarakat usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 74,45%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 70,60% dan ditahun 2022 meskipun terdapat sedikit peningkatan namun di tahun 2023 menjadi penurunan sebesar 70,75%, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, yaitu mencapai 78,17%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.35 TPAK Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Capaian TPAK tahun 2024 menunjukkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pulihnya aktivitas ekonomi pascapandemi, tumbuhnya sektor-sektor padat karya, serta adanya program pemberdayaan dan pelatihan kerja. Angka TPAK yang tinggi mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan daerah karena mencerminkan optimalisasi potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting untuk mengukur kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan serta mengimplementasikan inovasi di berbagai sektor pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi kreatif, efektif, dan efisien dalam menjawab tantangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 2.36
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2024

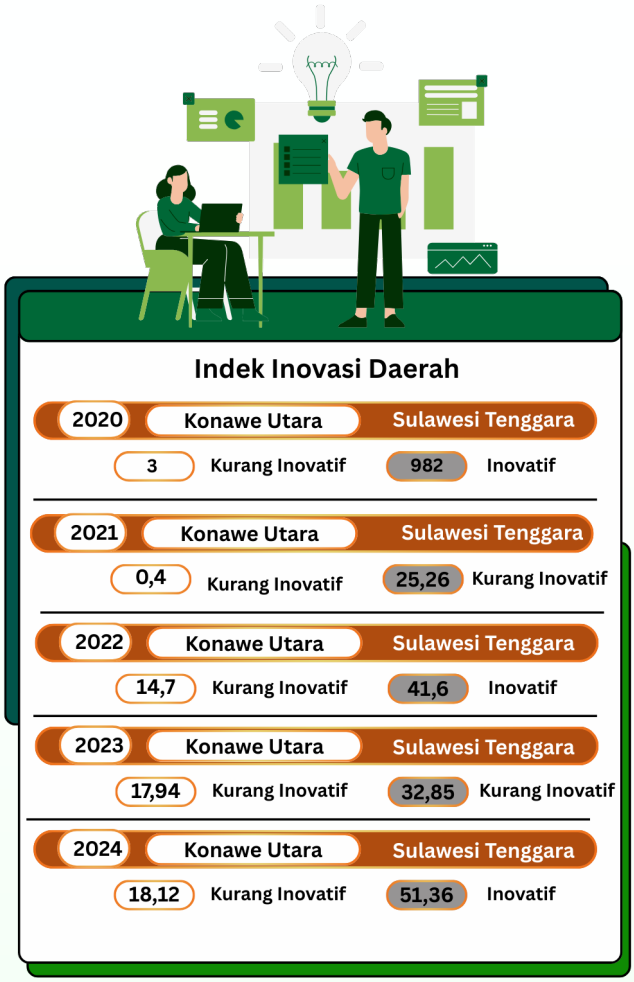

Sumber : Kemendagri, 2025

Melalui penilaian terhadap berbagai aspek seperti kelembagaan, kebijakan, program, dan dampak inovasi, indeks Inovasi Daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim kompetitif antar daerah untuk terus berinovasi. Semakin tinggi nilai indeks, maka menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin adaptif dan progresif dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat Kabupaten. Gambar 2.36 menyajikan capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 -2024.

Berdasarkan data capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Konawe Utara, meski menunjukkan tren kenaikan namun Kabupaten Konawe Utara masih berada dalam kategori "Kurang Inovatif". Pemerintah daerah terus berupaya mendorong penguatan ekosistem inovasi daerah, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, penyusunan regulasi daerah yang mendukung inovasi, serta penguatan peran perangkat daerah dalam menghasilkan inovasi yang dapat terukur, berdampak, dan berkelanjutan.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau dan biru merupakan strategi utama pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekosistem, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong pertumbuhan inklusif rendah karbon. Ekonomi hijau menekankan pengelolaan sumber daya daratan dan energi, sedangkan ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan lestari sumber daya kelautan dan pesisir.

Komponen ekonomi hijau mencakup pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan lestari, efisiensi energi, pengelolaan limbah sirkular, serta konservasi keanekaragaman hayati. Sementara itu, ekonomi biru meliputi perikanan berkelanjutan, akuakultur ramah lingkungan, ekowisata bahari, konservasi ekosistem pesisir, serta mitigasi perubahan iklim. Keberhasilan implementasi diukur melalui Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru. Indeks hijau menilai kinerja pengelolaan sumber daya darat dan energi, efisiensi energi, emisi karbon, dan perlindungan biodiversitas. Indeks biru menilai pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, termasuk keberlanjutan perikanan, konservasi kawasan pesisir, pariwisata bahari, dan adaptasi iklim.

Peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer menjadi indikator penting transisi menuju ekonomi hijau. Hal ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi daerah dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

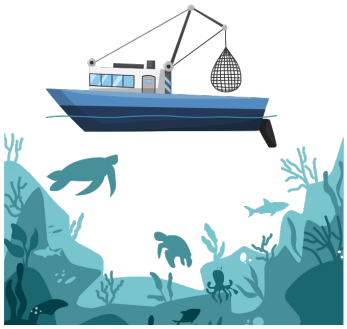

Di Kabupaten Konawe Utara, ketersediaan data indikator masih terbatas. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi lingkungan dan energi, pengembangan basis data terintegrasi, serta kolaborasi multipihak menjadi langkah strategis. Upaya ini akan menjadi fondasi penting dalam memastikan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2.3.4 Transformasi Digital

2.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan dan kemajuan suatu daerah dalam menyediakan infrastruktur, akses, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan. Terdapat 11 indikator dalam penyusunan IP-TIK yang terbagi menjadi 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK, subindeks penggunaan TIK, dan subindeks keahlian. Hingga saat ini, Kabupaten Konawe Utara belum memiliki data tersendiri terkait capaian IP-TIK. Oleh karena itu, sebagai acuan awal, digunakan data capaian Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 5,78 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 5,88 pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya bersifat gradual, peningkatan IP-TIK dalam subindeks akses dan infrastruktur, dan subindeks penggunaan TIK namun pada subindeks keahlian terjadi penurunan sebesar 0,03.

Kondisi perkembangan saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Konawe Utara untuk mulai membangun sistem informasi sektoral yang terintegrasi, memperkuat infrastruktur jaringan, serta meningkatkan literasi digital masyarakat dan aparatur. Transformasi digital melalui penguatan TIK sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, pengembangan ekonomi digital, serta pemerataan akses informasi. Upaya percepatan pembangunan TIK di daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berbasis data.

Gambar 2.37
Capaian IP-TIK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023

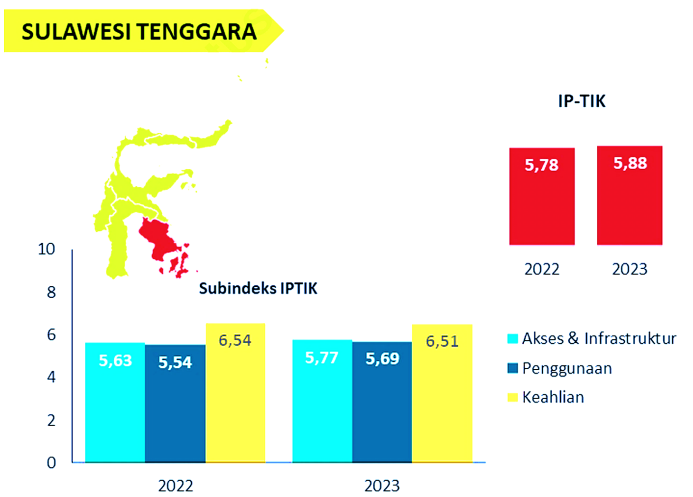

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator utama dalam analisis makro ekonomi daerah yang mencerminkan besaran investasi fisik yang dilakukan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencakup pengeluaran untuk memperoleh aset tetap seperti bangunan, mesin, kendaraan, serta infrastruktur lainnya yang digunakan dalam proses produksi lebih dari satu tahun. PMTB menjadi cerminan dari tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian daerah serta kapasitas penguatan struktur ekonomi jangka panjang.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam penyajian PDRB berdasarkan pengeluaran lebih menjelaskan tentang proporsi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik. Disisi lain, komponen ini juga dapat diartikan sebagai representasi dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan untuk investasi fisik (FIskal). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung dalam proses produksi diberbagai sektor usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi dalam negeri maupun dari impor.

Selain adanya peningkatan pada komponen konsumsi akhir baik dari rumah tangga maupun pemerintah, komponen PMTB juga terus mengalami pertumbuhan, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan 2010. Secara keseluruhan, pertumbuhan PMTB dalam periode 2020 – 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun ditahun 2020 sempat mengalami tren negatif akibat adanya pandemi Covid-19. Berikut data perkembangan dan struktur PMTB Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.12
Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan PMTB					
a. ADHB (Milliar Rp)	3.966,23	4.262,56	4.799,25	5.259,79	5.707,11
b. ADHK (Milliar Rp)	2.828,03	2.957,88	3.107,85	3.264,06	3.451,27
Proporsi PMTB terhadap PDRB (% ADHB)	26,34	26,84	26,34	26,12	25,11
Pertumbuhan PMTB terhadap PDRB (% ADHK)	-1.21	6,51	3,81	4,47	3,47

2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, ekspor barang dan jasa menjadi salah satu ukuran strategis yang mencerminkan kinerja dan daya saing suatu wilayah dalam perdagangan domestik maupun internasional. Indikator ini mencakup seluruh aktivitas penjualan barang seperti hasil pertanian, pertambangan, industri pengolahan, serta jasa yang meliputi pariwisata, transportasi, dan komunikasi kepada konsumen luar negeri atau daerah lain. Peningkatan ekspor barang dan jasa menunjukkan tingginya nilai tambah dari proses produksi lokal, sekaligus memperlihatkan kapasitas daerah dalam menghasilkan produk yang kompetitif di pasar global. Hal ini juga berkontribusi terhadap peningkatan devisa daerah dan perluasan kesempatan kerja. Data

Capain nilai Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 masih tergolong rendah sebesar 0,03% terhadap PDRB, hal ini menunjukkan kontribusi yang masih sangat rendah terhadap total nilai ekspor daerah.

Kondisi ini bukan semata-mata karena tidak adanya aktivitas produksi barang dan jasa yang berorientasi ekspor, melainkan lebih disebabkan oleh pola distribusi dan logistik perdagangan yang mengandalkan wilayah lain sebagai pusat pengiriman ekspor. Banyak produk unggulan yang berasal dari Konawe Utara, seperti hasil tambang, komoditas pertanian, maupun hasil laut, dikirim terlebih dahulu ke daerah lain seperti Kota Kendari atau wilayah pelabuhan besar lainnya lalu kemudian diekspor secara resmi. Akibatnya, pencatatan ekspor lebih banyak terakumulasi pada wilayah pengiriman akhir, bukan pada daerah asal komoditas. Fenomena ini menyebabkan rendahnya nilai ekspor yang tercatat secara administratif di Kabupaten Konawe Utara, meskipun secara riil daerah ini berperan dalam memasok komoditas ekspor nasional.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau *City Development Index* (CDI), yang digunakan untuk mengukur kinerja Kabupaten/Kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menjadi komponen Indeks Infrastruktur meliputi air bersih, sanitasi, Listrik, dan telepon. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur, semakin baik tingkat pembangunan di suatu Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berfungsi sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan. Indeks ini berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini disusun berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, yang memberikan informasi dari perspektif masyarakat secara obejektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun manfaatnya. Data lengkap mengenai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur untuk Kabupaten Konawe Utara saat ini belum tersedia.

2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Pemenuhan akses terhadap hunian layak menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Hunian layak mencakup tempat tinggal yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan ruang, serta memiliki akses terhadap air minum bersih dan sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menyediakan lingkungan pemukiman yang aman, sehat, dan manusiawi. Dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak diupayakan melalui berbagai program strategis seperti penyediaan rumah bersubsidi, bantuan stimulan perumahan swadaya, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan infrastruktur dasar pemukiman. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas fisik perumahan, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Berikut data rumah di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan kelayakan rumah (rumah layak huni dan rumah tidak layak huni).

Tabel 2.13
Jumlah Rumah Berdasarkan Kelayakan di Rinci Per Kecamatan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021–2024

No.	Kecamatan	Kelayakan Rumah								Total Rumah			
		Layak Huni				Tidak Layak Huni							
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Sawa	920	942	946	962	383	367	366	367	1.303	1.309	1.312	1.329
2	Motui	754	770	782	799	678	664	652	644	1.432	1.434	1.434	1.443
3	Lembo	1344	1353	1368	1383	522	515	506	496	1.866	1.868	1.874	1.879
4	Lasolo	1586	1591	1614	1634	550	553	539	527	2.136	2.144	2.153	2.161
5	Wawolesea	519	545	555	568	495	470	463	453	1.014	1.015	1.018	1.021
6	Lasolo Kepulauan	357	357	366	372	166	166	162	159	523	523	528	531
7	Molawe	1073	1078	1103	1117	351	349	333	321	1.424	1.427	1.436	1.438
8	Asera	1064	1072	1103	1129	1092	1090	1069	1051	2.156	2.162	2.172	2.180
9	Andowia	1678	1687	1709	1730	368	369	358	348	2.046	2.056	2.067	2.078
10	Oheo	387	398	424	444	903	897	876	867	1.290	1.295	1.300	1.311
11	Langgikima	990	1002	1021	1033	395	384	369	362	1.385	1.386	1.390	1.395
12	Wiwirano	1327	1335	1353	1372	466	462	452	442	1.793	1.797	1.805	1.814
13	Landawe	439	442	465	475	411	406	386	382	850	848	851	857
KONAWE UTARA		12.438	12.572	12.809	13.018	6.780	6.692	6.531	6.419	19.218	19.264	19.340	19.437

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Konawe Utara, 2025

2.3.6.3 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi dalam memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal

sosial. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Konawe Utara menurut IDM, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut
Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
1	ASERA	Wanggudu Raya	0,7913	Maju
		Walalindu	0,7646	Maju
		Tangguluri	0,7297	Maju
		Amorome	0,7613	Maju
		Wawolimbue	0,6644	Berkembang
		Walasolo	0,8043	Maju
		Wunduhaka	0,7243	Maju
		Tapuwatu	0,5917	Tertinggal
		Aseminunulai	0,6616	Berkembang
		Puunggomosi	0,8137	Maju
		Puuwanggudu	0,7537	Maju
		Longeo Utama	0,6702	Berkembang
		Kota Mulya	0,7592	Maju
		Amorome Utama	0,6089	Berkembang
		Andedao	0,7165	Maju
		Alaa Wanggudu	0,6922	Berkembang
		Oheo Trans	0,631	Berkembang
2	WIWIRANO	Padalere	0,66	Berkembang
		Tetewatu	0,7705	Maju
		Culumbatu	0,7032	Berkembang
		Wawoheo	0,7127	Maju
		Lamparinga	0,7056	Berkembang
		Lamonae Utama	0,6832	Berkembang
		Wacumelewe	0,6684	Berkembang
		Mata Osole	0,8079	Maju
		Pondoa	0,6937	Berkembang
		Wawonsangi	0,6137	Berkembang
		Wawontoaho	0,7056	Berkembang
		Larompana	0,6921	Berkembang
		Wacu Pinodo	0,7057	Berkembang
		Padalere Utama	0,7002	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
3	LANGGIKIMA	Molore	0,6571	Berkembang
		Lameruru	0,631	Berkembang
		Sarimukti	0,7038	Berkembang
		Morombo Pantai	0,6416	Berkembang
		Polora Indah	0,6875	Berkembang
		Pariama	0,7652	Maju
		Tobimeita	0,7035	Berkembang
		Alenggo	0,706	Berkembang
		Mekar Jaya	0,74	Maju
		Molore Pantai	0,6376	Berkembang
		Ngapa Inia	0,6037	Berkembang
4	MOLAWE	Bandaeha	0,6943	Berkembang
		Awila	0,7213	Maju
		Mowundo	0,7092	Maju
		Mandiodo	0,6683	Berkembang
		Tapunggaya	0,6295	Berkembang
		Mataiwoi	0,739	Maju
		Awila Puncak	0,7035	Berkembang
		Tapuemea	0,661	Berkembang
5	LASOLO	Abola	0,6735	Berkembang
		Belalo	0,7057	Berkembang
		Andeo	0,7057	Berkembang
		Matapila	0,6297	Berkembang
		Andumowu	0,837	Mandiri
		Basule	0,8098	Maju
		Waworaha	0,6681	Berkembang
		Otole	0,7337	Maju
		Watukila	0,6921	Berkembang
		Lametono	0,6859	Berkembang
		Larodangge	0,6643	Berkembang
		Tetelupai	0,7552	Maju
		Lalowaru	0,6951	Berkembang
		Muara Tinobu	0,7152	Maju
		Marombo Pantai	0,6586	Berkembang
		Tokowuta	0,694	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
6	LEMBO	Alo Alo	0,7068	Berkembang
		Puulemo	0,6048	Berkembang
		Padaleu	0,7025	Berkembang
		Bungguosu	0,7279	Maju
		Puusiambu	0,6278	Berkembang
		Taipa	0,7225	Maju
		Tongalino	0,7038	Berkembang
		Pasir Putih	0,6595	Berkembang
		Laramo	0,6871	Berkembang
		Lapulu	0,6443	Berkembang
		Watuwula	0,6587	Berkembang
7	SAWA	Lalembo	0,7259	Maju
		Laimeo	0,6773	Berkembang
		Pudonggala	0,7951	Maju
		Matanggonawe	0,7281	Maju
		Kokapi	0,807	Maju
		Tongauna	0,7057	Berkembang
		Puupi	0,6159	Berkembang
		Pudonggala Utama	0,6886	Berkembang
		Ulu Sawa	0,7375	Maju
		Tudungano	0,7076	Maju
		Tanjung Laimeo	0,6984	Berkembang
		Panggulawu	0,7033	Berkembang
		Pekaroa	0,6979	Berkembang
8	OHEO	Laronaha	0,721	Maju
		Bandaeha	0,6979	Berkembang
		Kota Maju	0,6686	Berkembang
		Landawe	0,7421	Maju
		Wiwirano	0,6897	Berkembang
		Mopute	0,7619	Maju
		Tadoloiyo	0,7051	Berkembang
		Puuhialu	0,6783	Berkembang
		Sambandete	0,6917	Berkembang
		Paka Indah	0,7029	Berkembang
		Lameoru	0,7086	Maju

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
		Walandawe	0,6935	Berkembang
		Bendewuta	0,7046	Berkembang
		Tinondo	0,6486	Berkembang
		Horoe	0,6643	Berkembang
		Tadoloiyo Trans	0,6924	Berkembang
9	ANDOWIA	Lahimbua	0,7876	Maju
		Laronanga	0,6979	Berkembang
		Lambudoni	0,6886	Berkembang
		Lamondowo	0,6886	Berkembang
		Labungga	0,7052	Berkembang
		Mataiwoi	0,707	Berkembang
		Larobende	0,6846	Berkembang
		Puusuli	0,6406	Berkembang
		Banggarema	0,7051	Berkembang
		Amolame	0,7052	Berkembang
		Anggolohipo	0,6679	Berkembang
		Puuwonua	0,7065	Berkembang
		Ambake	0,7046	Berkembang
		Waworate	0,7068	Berkembang
10	MOTUI	Tondowatu	0,7176	Maju
		Matandahi	0,8095	Maju
		Banggina	0,639	Berkembang
		Motui	0,733	Maju
		Wawoluri	0,8054	Maju
		Lambuluo	0,6863	Berkembang
		Poni Poniki	0,6757	Berkembang
		Puuwonggia	0,6573	Berkembang
		Punggulahi	0,694	Berkembang
		Sama Subur	0,6808	Berkembang
		Ranombupulu	0,6441	Berkembang
		Tobimeita	0,7029	Berkembang
		Kapolano	0,6992	Berkembang
		Sambasule	0,7143	Maju
11	WAWOLESEA	Tanjung Bunga	0,646	Berkembang
		Kampoh Bunga	0,6325	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI IDM 20224	STATUS IDM 2024
		Lemo Bajo	0,6737	Berkembang
		Barasanga	0,6832	Berkembang
		Wawolesea	0,6605	Berkembang
		Toreo	0,644	Berkembang
		Otipulu	0,6362	Berkembang
		Kampoh Cina	0,6383	Berkembang
12	LASOLO KEPULAUAN	Boenaga	0,6125	Berkembang
		Waturambaha	0,6721	Berkembang
		Labengki	0,6183	Berkembang
		Morombo	0,6422	Berkembang
		Tapunopaka	0,5848	Tertinggal
		Boedingi	0,5727	Tertinggal
13	LANDAWE	Kuratao	0,6679	Berkembang
		Landiwo	0,6883	Berkembang
		Kolosua	0,6497	Berkembang
		Laumoso	0,6971	Berkembang
		Hialu Utama	0,7297	Maju
		Polo-Polora	0,666	Berkembang
		Tambakua	0,7054	Berkembang
		Matabaho	0,674	Berkembang
		Landawe Utama	0,7068	Berkembang
		Mata Benua	0,6814	Berkembang
		Hialu	0,707	Berkembang
Rata - Rata Idm Konawe Utara 2024			0,6940	Berkembang
Rata - Rata Idm Konawe Utara 2023			0,6545	Berkembang
Rata - Rata Idm Konawe Utara 2022			0,6254	Berkembang
Rata - Rata Idm Konawe Utara 2021			0,5855	Tertinggal
Rata - Rata Idm Konawe Utara 2020			0,5824	Tertinggal

Sumber : idm.kemendesa.go.id/idm_data

Data ini menunjukkan bahwa IDM Konawe Utara meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,6545. Posisi IDM Kabupaten Konawe Utara dibandingkan dengan Kabupaten se Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Gambar berikut :

Sementara Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan analisis Tahun 2024, dari 159 desa di Kabupaten Konawe Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah yang berstatus/klasifikasi Mandiri sebanyak 1 desa;
2. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi Maju sebanyak 41 desa;
3. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi berkembang sebanyak 114 desa;
4. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi tertinggal sebanyak 3 desa;
5. Tidak ada desa yang berstatus/klasifikasi sangat tertinggal;
6. Berdasarkan ranking IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Andumowu Kecamatan Lasolo (0,837); Desa Puunggomosi Kecamatan Asera (0,8137); dan Desa Basule Kecamatan Lasolo (0,8098). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Boedingi Kecamatan Lasolo Kepulauan (0,5727); Desa Tapunopaka Kecamatan Lasolo Kepulauan (0,5848); dan Desa Tapuwatu Kecamatan Asera (0,5917).

Gambar 2.38
Nilai IDM Kabupaten se Sulawesi Tenggara
Tahun 2024

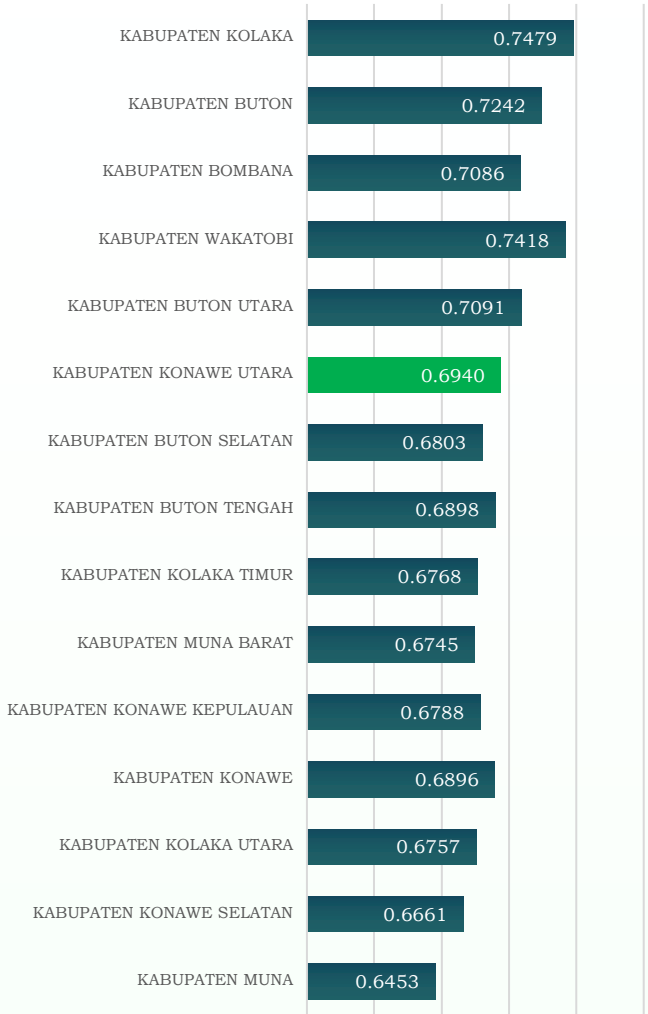

Sumber : idm.kemendesa.go.id/idm_data

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber pajak, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Di Kabupaten Konawe Utara, Rasio pajak daerah tetap menjadi salah satu indikator pentung untuk mengukur efektvitas kebijakan fiskal dan kemandirian daerah. Berikut data rasio pendapatan pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.39
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024

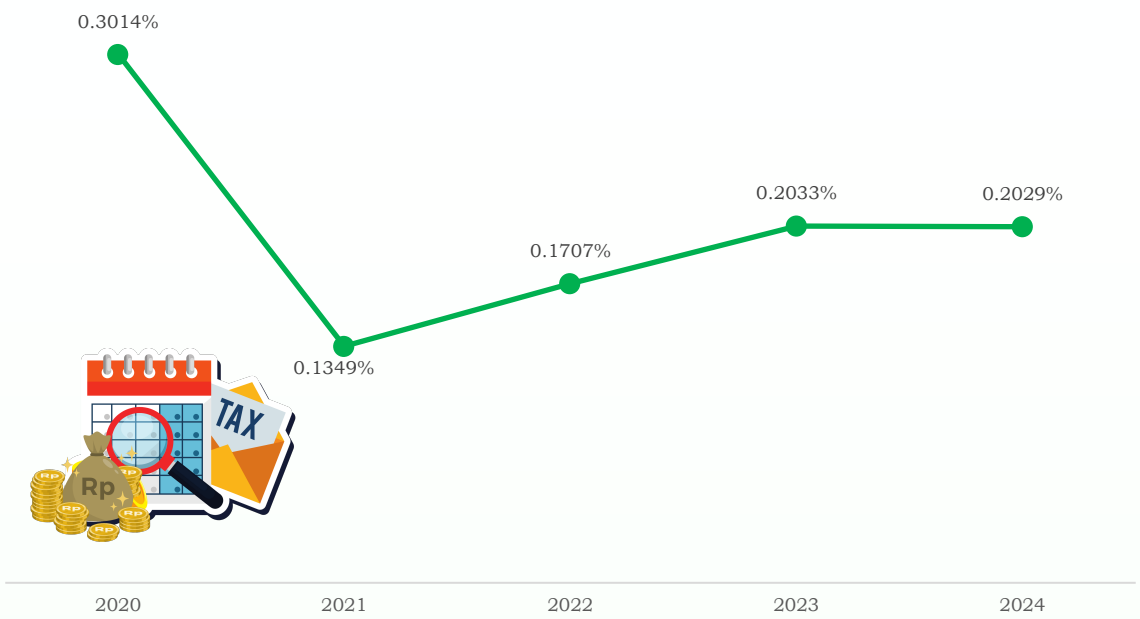

- Berdasarkan data capaian, menunjukkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren fluktuasi dalam periode 2020 hingga 2024. Data tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,3014%, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,1349%.
- Penurunan ini mencerminkan menurunnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total PDRB yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap aktivitas usaha dan penerimaan daerah.
- Memasuki tahun 2022, rasio kembali meningkat menjadi 0,1707% seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi, dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Potensi optimalisasi pajak daerah Kabupaten Konawe Utara masih besar, dan perlu upaya lebih lanjut dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperbaiki tata kelola pemungutan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

2.4 Aspek Layanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten merupakan instrumen pengukuran kinerja pembangunan hukum daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya perbaikan regulasi, tata kelola, dan pelayanan publik berbasis hukum telah dilaksanakan. Peningkatan capaian Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu fokus pembangunan daerah dalam rangka memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aspek yang diukur dalam indeks ini mencakup penyusunan regulasi yang berkualitas, penguatan kelembagaan hukum, penyederhanaan birokrasi berbasis peraturan, serta pemberdayaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Melalui penguatan reformasi hukum, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelayanan, memperbaiki iklim investasi, dan memperkuat perlindungan hak masyarakat, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pencapaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebesar 66,4 dengan kategori Cukup Baik, ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan akuntabel di tingkat daerah.

Nilai indeks ini merepresentasikan kinerja pada beberapa dimensi, antara lain: kualitas regulasi daerah, efektivitas implementasi hukum, akses masyarakat terhadap keadilan, serta tata kelola kelembagaan hukum. Meskipun demikian, capaian ini juga menandakan masih terdapat ruang perbaikan dalam memperkuat harmonisasi regulasi, memperluas literasi hukum masyarakat, serta meningkatkan kapasitas aparat hukum daerah.

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan instansi pemerintah daerah. Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan SPBE menjadi instrumen strategis untuk mendorong digitalisasi layanan publik, integrasi sistem pemerintahan, dan penguatan inovasi berbasis teknologi. Pengukuran indeks SPBE meliputi beberapa domain utama, antara lain kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, layanan SPBE, dan infrastruktur pendukung. Berikut data capaian SPBE Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024.

Pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini karena adanya penguatan penerapan SPBE, termasuk dalam aspek interoperabilitas sistem, ketersediaan aplikasi layanan publik, peningkatan kompetensi SDM TIK, serta penguatan aspek keamanan informasi dan manajemen data. Walaupun hasil capaian Indeks SPBE Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren yang cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar layanan elektronik yang optimal sesuai dengan arah kebijakan nasional di bidang pemerintahan digital.

Gambar 2.40
Indeks SPBE Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024

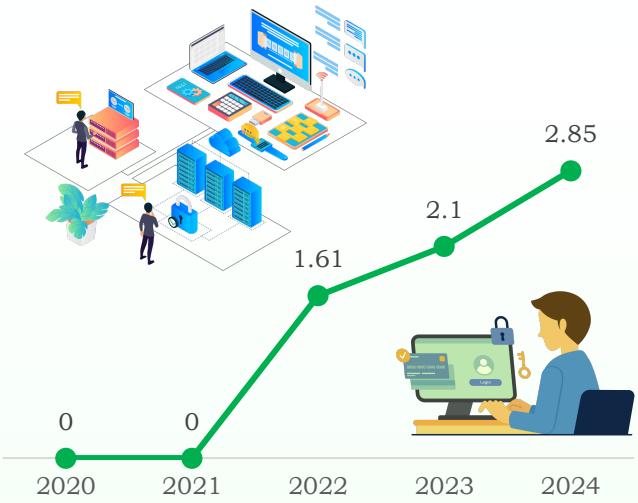

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara, 2025.

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, khususnya unit pelayanan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian IPP dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017.

Gambar 2.41 Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 - 2024

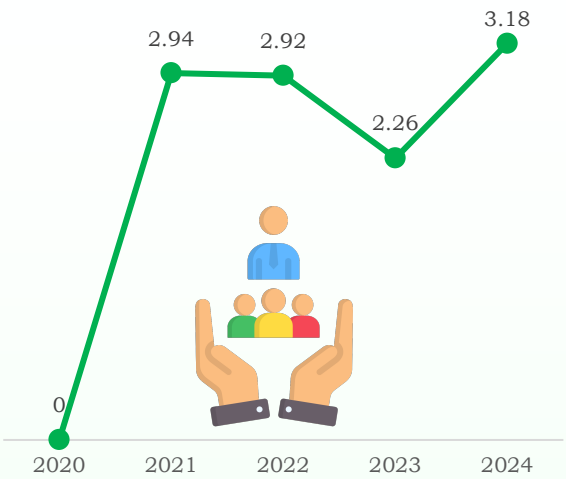

Sumber : Setda Kabupaten Konawe Utara, 2025

Hasil IPP diklasifikasikan dalam beberapa kategori: Pelayanan Prima (nilai 4,50–5,00), Sangat Baik (4,00–4,49), Baik (3,50–3,99), Cukup (3,00–3,49), dan Kurang (di bawah 3,00). Nilai IPP tidak hanya mencerminkan kualitas teknis pelayanan, tetapi juga menjadi acuan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024, terlihat tren yang fluktuatif. Pada tahun 2024, capaian IPP berada pada angka 3,18 dengan kategori Cukup. Capaian ini menjadi penting karena selain menggambarkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, juga menjadi instrumen untuk mendukung visi penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Metodologi pengukuran IPP dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, analisis data administratif, serta diskusi dengan pemangku kepentingan. Aspek yang dinilai mencakup transparansi dan akuntabilitas tata kelola, kualitas pelayanan publik, tingkat inovasi, dan partisipasi masyarakat. Hasil pengukuran menunjukkan ada faktor yang mendorong peningkatan, seperti mulai diterapkannya digitalisasi layanan, komitmen reformasi birokrasi, serta beberapa inovasi layanan publik. Namun, capaian IPP juga masih terhambat oleh berbagai kendala, antara lain kualitas pelayanan yang belum merata, kompetensi aparatur yang belum optimal dalam penguasaan teknologi, keterbatasan infrastruktur internet, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

Hambatan ini menunjukkan bahwa peningkatan IPP membutuhkan langkah perbaikan yang lebih konkret. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas digitalisasi melalui sistem one stop service, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin, mempercepat integrasi data antar-OPD, memperkuat infrastruktur jaringan di wilayah terpencil, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan langkah perbaikan tersebut, IPP Konawe Utara diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Transformasi digital, peningkatan kapasitas aparatur, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

2.4.2 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen evaluatif yang dikembangkan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengelola seluruh sumber daya strategis secara efektif, efisien, dan produktif guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. IDSD disusun berdasarkan kerangka konseptual yang mencakup empat pilar utama, yaitu: ekonomi, sosial, infrastruktur dan sumber daya manusia, serta kelembagaan dan tata kelola. Keempat pilar ini dirinci lebih lanjut ke dalam sub-pilar dan indikator yang mencerminkan kapasitas dan kinerja pembangunan di tingkat daerah.

IDSD tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks penguatan otonomi daerah dan pencapaian target pembangunan nasional. Melalui IDSD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keunggulan dan tantangan struktural yang dihadapi dalam upaya meningkatkan daya saing wilayahnya, baik dalam skala nasional maupun regional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, IDSD menjadi salah satu referensi utama untuk mengarahkan program dan kegiatan strategis yang berbasis pada potensi unggulan dan kebutuhan perbaikan sistemik di berbagai sektor. Peningkatan capaian IDSD tidak hanya memerlukan intervensi sektoral, tetapi juga pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.

Gambar 2.42
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024

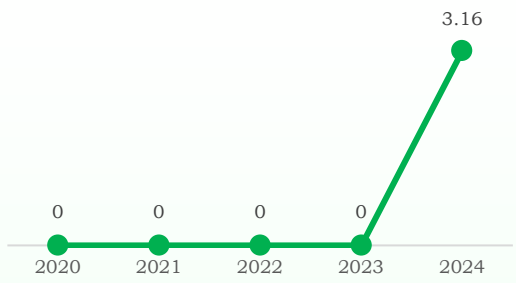

Sumber : Bapperida Konawe Utara, 2025

Pada tahun 2024, capaian IDSD Kabupaten Konawe Utara sebesar 3,16. Nilai IDSD ini mencerminkan mulai berjalannya proses konsolidasi data dan pemutakhiran informasi pembangunan lintas sektor, terutama dalam pilar-pilar utama penilaian seperti kapasitas ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan publik, dan pembiayaan pembangunan. Meskipun nilai indeks ini masih berada pada kategori rendah, namun keberadaannya penting sebagai baseline untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Peningkatan nilai IDSD membutuhkan intervensi strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas regulasi daerah, penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan birokrasi. Selain itu, integrasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita juga menjadi faktor penting dalam mendongkrak daya saing daerah.

2.4.3 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.4.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.3.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2.15
Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara

No	Nama Lembaga	Jumlah Sekolah						Jumlah Peserta Didik			Jumlah Guru		
		2022		2023		2024							
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	TK	12	76	12	77	32	60	2.684	3.775	3.778	233	260	275
2.	KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Tabel 2.15 menunjukkan bahwa Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Konawe Utara tiap tahun bertambah dan cukup banyak sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah memberikan insentif pada 233 pendidik PAUD non formal untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Wajib belajar sembilan tahun yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten adalah pendidikan dasar jenjang SD dan SMP.

a. Kondisi Pendidikan Dasar

Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun disajikan pada Tabel 2.16 yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di

Kabupaten Konawe Utara dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 1.342 orang. Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 630 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan sertifikasi guru guna mewujudkan profesionalitas kinerja pendidik di Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya di saat bersamaan diperlukan pula perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan bagi guru GTT dan PTT.

Tabel 2.16
Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara

No	Lembaga	Sekolah			Guru			Jumlah Siswa			Rasio Guru/ Sekolah			Rasio Guru/ Murid		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	SD	104	104	104	891	967	1.342	8.809	8.809	9.321	8,57	9,30	9,30	0,10	0,11	0,11
2	MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMP	36	36	36	520	557	630	3.346	3.240	3.301	14,17	14,44	14,44	0,14	0,16	0,16
4	MTs	4	4	4	67	67	79	401	401	392	24,33	16,75	16,75	0,18	0,17	0,17
5	SMA	11	11	11	212	225	228	3.032	2.918	2.779	16,27	19,27	19,27	0,06	0,07	0,07
6	SMK	4	4	4	48	42	41	349	407	277	10,00	12,00	12,00	0,14	0,14	0,14
7	MA	2	2	2	22	22	19	145	145	153	16,50	11,00	11,00	0,17	0,15	0,15
	Jumlah	161	161	161	1.760	1.880	2.339	16.082	15.920	15.953	10,78	11,40	11,40	0,11	0,11	0,11

Sumber : Dinas P & K Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

b. Tingkat Kelulusan SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dam SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga tahun 2024 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2024. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2024 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan jenjang SMP/MTs tahun 2023 sebesar 0,01%.

c. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

BOP Kabupaten Konawe Utara diberikan untuk tiap siswa SD/MI sebesar Rp.350.000,-per siswa per tahun sedangkan untuk tiap siswa SMP Negeri sebesar Rp.500.000,- per siswa per tahun dan siswa SMP Swasta diberikan Rp.450.000,- per siswa per tahun. Selain itu untuk siswa miskin SD/MI diberikan dana bantuan sebesar Rp.450.000,- per siswa per tahun dan siswa miskin SMP sebesar Rp.750.000,- per siswa per tahun.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada tabel berikut ini diuraikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dimana pada tabel tersebut digambarkan bahwa ada kecenderungan menurunnya partisipasi sekolah pada jenjang sekolah menengah. Peningkatan APS dapat ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan serta penambahan tenaga pengajar.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 – 2024

No.	Jenjang Pendidikan	2022	2023	2024
1.	APS Penduduk Usia 7 - 12 th	99,32	99,27	99,74
2.	APS Penduduk Usia 13 - 15 th	93,19	93,00	97,81
3.	APS Penduduk Usia 15 - 18 th	74,94	75,04	73,41

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2023 s.d 2025

e. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada Tahun 2024, APM SD/MI Kabupaten Konawe Utara sebesar 95,28 menurun dari tahun 2022 sebesar 96,82. Data ini menunjukkan bahwa 94 dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Konawe Utara bersekolah tepat waktu di jenjang SD/sederajat.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 - 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni			Angka Partisipasi Kasar		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	SD/MI	96,82	96,74	95,28	110,16	106,47	105,78
2.	SMP/MTs	81,15	77,33	77,47	89,98	91,07	93,72
3.	SMA/SMK/MA	65,23	66,45	68,39	85,82	83,62	86,07

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2023 s.d 2025

f. Akreditasi sekolah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit disebutkan pada pasal 60 Ayat 2, bahwa Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sebagai tindak lanjut amanah konstitusi tersebut

pemerintah menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan dasar penetapan variabel, indikator, dan butir penilaian dalam instrumen penilaian akreditasi.

Pada Tahun 2024, jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A sebanyak 3 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 35 Sekolah. Untuk Sekolah Menengah Pertama, jumlah sekolah terakreditasi A sebanyak 6 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 15 Sekolah. Persentase sekolah terakreditasi minimal B dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19
Sekolah Terakreditasi di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No.	Tahun Capaian	Jenjang Pendidikan	Akreditasi				Total	Persentase Terakreditasi Minimal B
			A	B	C	Belum Terakreditasi		
1.	2022	SD/MI	3	24	60	17	104	24,03
		SMP/MTs	6	13	17	0	36	52,77
2.	2023	SD/MI	3	29	68	4	104	30,77
		SMP/MTs	6	14	23	0	40	42,50
3.	2024	SD/MI	3	35	64	2	104	33,65
		SMP/MTs	6	15	22	0	40	37,50

https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi

3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelaksanaan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam mengukur capaian SPM.

Tabel 2.20
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	11,991	100%	2024	104 Jumlah Sekolah Dasar,	84,92%	2024	
		38,72%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelum nya	2024	1.226 Sumber daya Manusia			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
2	Pendidikan Kesetaraan	3168	100%	2024	16 Jumlah Sekolah, 55 Sumber Daya Manusia	100%	2024	
		9,09%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelum nya					
3	Pendidikan Anak Usia Dini	2849	100%	2024	126 jumlah sekolah,284 sdm	84.38%	2024	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat pelaksanaan capaian SPM bidang Pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik pada seluruh kelompok usia, hal ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

2.4.3.1.2 Kesehatan

1) Pelayanan Kesehatan

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Tabel 2.21
Rasio Posyandu per 1000 Balita
Di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Posyandu	158	172	172	172	171
2.	Jumlah Balita	7.482	7.552	7.660	7.682	7.719
3.	Rasio	21,12	22,78	22,45	22,39	22,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Dari Tabel 2.21 dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 rasio Posyandu per 1000 Balita sebesar 22,15 berarti dalam 1000 Balita terdapat 22 Posyandu.

b. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebanyak 81.355 jiwa, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Konawe Utara telah mencukupi.

Tabel 2.22
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2.	Puskesmas	22	22	22	22	22
3.	Puskesmas Pembantu	36	16	16	16	16
4.	Poskedes	5	-	-	-	-
5.	Polindes	7	-	-	-	-
6.	Posyandu	158	172	172	172	172
7.	Praktek Dokter	1	1	1	1	1
8.	Praktek Bidan	1	1	1	1	1
9.	Apotek	7	6	6	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Akreditasi puskesmas di Kabupaten Konawe Utara mulai dijalankan tahun 2017. Dari 22 puskesmas, saat ini sudah 16 puskesmas telah terakreditasi, 4 puskesmas diantaranya yaitu puskesmas Tetewatu, Lasolo, Matandahi, Motui telah berstatus akreditasi utama. Pada Tahun 2023, sebanyak 2 Puskesmas telah berhasil melaksanakan Re-akreditasi dari target 6 puskesmas yang ada di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.23
Penilaian Akreditasi Puskesmas
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama Puskesmas	Jenis Puskesmas	2017	2019	2020	Status
1.	Andeo	Non Rawat Inap	√			Madya
2.	Andowia	Non Rawat Inap	-	-	-	
3.	Asera	Non Rawat Inap		√		Madya
4.	Lamparinga	Non Rawat Inap			√	Madya
5.	Landawe	Non Rawat Inap		√		Madya
6.	Langgikima	Non Rawat Inap		√		Madya
7.	Langgikima Pesisir	Non Rawat Inap				
8.	Laronanga Pantai	Non Rawat Inap				
9.	Lasolo	Rawat Inap	√			Utama
10.	Lasolo Kepulauan	Non Rawat Inap				
11.	Lembo	Non Rawat Inap		√		
12.	Matandahi	Rawat Inap	√			Utama
13.	Molawe	Non Rawat Inap		√		
14.	Motui	Rawat Inap		√		Utama
15.	Oheo	Non Rawat Inap				
16.	Paka Indah	Non Rawat Inap			√	Madya
17.	Sawa	Non Rawat Inap		√		Madya
18.	Tapunggaya	Non Rawat Inap		√		Madya
19.	Tetewatu	Non Rawat Inap			√	Utama
20.	Wanggudu Raya	Non Rawat Inap				
21.	Wawolesea	Non Rawat Inap		√		Madya
22.	Hialu	Non Rawat Inap			√	Madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Akreditasi puskesmas bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana puskemas sampai dengan kinerja para tim medis sesuai standar prosedur. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang mendapat pelayanan di tempat tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan status akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten Konawe Utara menjadi akreditasi paripurna. Untuk itu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan akan terus ditingkatkan.

c. Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun 2020 - 2024. Angkanya berkisar antara 0,00103 (tahun 2020) sampai 0,00046 (tahun 2024).

Tabel 2.24
Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes	30	38	38	38	38
2.	Jumlah Penduduk	67.871	68.950	70.314	72.250	81.355
Rasio		0,00103	0,00055	0,00054	0,00053	0,00046

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara Dalam, 2025

d. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.25
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokter Spesialis	-	-	-	-	9
2.	Dokter Umum	9	13	20	22	28
3.	Dokter Gigi	5	6	7	8	9
4.	Bidan	143	136	271	280	378
5.	Perawat	68	87	236	160	372
6.	Apoteker	15	23	56	54	71

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.26
Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi	14	19	19	27	30
2.	Jumlah Penduduk	67.871	68.950	68.950	70.314	72.250
3.	Rasio	0,21	0,21	0,28	0,38	0,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

Pada Tahun 2024 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,42 per 1000 penduduk atau satu dokter melayani 3.034 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dokter di Kabupaten Konawe Utara sudah cukup memadai, meskipun masih perlu ditingkatkan. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara melakukan kontrak tenaga dokter.

Tabel 2.27
Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tenaga Medis (Bidan, Perawat, dan Apoteker)	226	246	563	494	821
2.	Jumlah Penduduk	67.871	68.950	70.314	72.250	81.355
3.	Rasio	3,33	3,57	8,01	6,84	10,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

e. Jaminan Kesehatan

Pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Konawe Utara melalui kepesertaan JKN pada tahun 2023 telah terdaftar sebesar 69.608 jiwa atau 99,00%, Data kepesertaan JKN Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Data Kepersertaan Jaminan Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2021

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	2020		2021		2022		2023		2024	
		Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%
1.	PBI APBN	27.086	42,45	27.084	41,66	24.459	35,5	29.759	42,32	29.759	42,32
2.	PBI APBD Kab.	24.707	38,72	25.675	39,49	29.395	42,4	23.558	33,50	23.558	33,50
3.	PBI APBD Prov.	2.189	3,43	2.110	3,25	2.110	3,25	2.110	3,00	2.110	3,00
4.	Pekerja Penerima Upah (PPU)	6.677	10,46	7.564	11.63	9.843	14,3	13.608	19,35	13.608	19,35
5.	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	1.239	1,94	1.672	2,57	949	1,4	222	0,32	222	0,32
6.	Bukan Pekerja	193	0,30	348	0,54	384	0,6	351	0,50	351	0,50
Jumlah Penduduk Yang Terdaftar JKN		64.211	98,96	64.453	99,13	62.091	97,30	67.140	97,4	69.608	99,00
Jumlah Penduduk Yang Belum Terdaftar JKN		673	1,04	564	0,87	1.723	2,70	1.810	1,00	706	1,00
Total Penduduk Kab. Konawe Utara		64.884	100	65.017	100	63.814	100	68.950	100	70.314	100

Sumber : BPJS Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025, diolah

Jumlah Penduduk yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN sebesar 706 jiwa atau 1,00%, hal ini dapat tercapai karena pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah telah berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder dan pemutakhiran data setiap bulan. Beberapa penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas pemerintah untuk mengupayakan agar semua penduduk terdaftar dalam JKN.

2) Balita Gizi Buruk

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.29
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Balita Yang Diukur	5.058	6.261	5.247	6.682	6.696
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	0	12	7	19	11
3.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,00	0,19	0,13	0,29	0,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Data kesakitan terdiri dari dua sumber, yaitu bersumber dari masyarakat (community based data) dan bersumber dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Data kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit tidak menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Tabel 2.30
Angka Kesakitan di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Malaria	-	-	-	9	9
2.	Tuberkulosis (TB) BTA	77	118	170	217	63
3.	Pneumonia Balita	-	-	6	-	-
4.	Kusta	-	-	4	7	7
5.	Tetanus	61	18	-	-	-

No.	Uraian	Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	Campak	105	22	1	-	-
7.	Diare	58	11	302	402	400
8.	DBD	-	7	5	9	60
9.	Hipertensi	39	113	653	246	120
10.	ISPA	154	27	44	36	36
Jumlah		494	316	728	926	695

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

4) Promosi Kesehatan

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2024 di Kabupaten Konawe Utara pada semua tatanan disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Persentase PHBS di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Persentase (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Tangga	53,00	57,53	60,46	79,92	56,60
2.	Institusi Pendidikan	61,00	63,56	64,85	87,34	90,38

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

5) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target layanan yang ditetapkan 100 persen.

Tabel 2.32
Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1528	1497	97,97%	100%	13.25%		79.03%	TUNTAS PRATAMA
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1460	1381	94,59%	100%	16.86%			
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1390	1369	98,49%	100%	18,46%			
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6824	5346	78,34%	100%	13.26%			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3998	3655	91,42%	100%	15.93%			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	43531	25611	58,83%	100%	16.91%			
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3600	2215	61,53%	100%	15.19%			
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14010	7494	53,49%	100%	17.85%			
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	720	949	100,00%	100%	20%			

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	84	43	51,19%	100%	10.65%			
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1102	1162	100,00%	100%	18.49%			
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1031	743	72,07%	100%	5.21%			

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Capaian SPM dalam bidang Kesehatan, menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan Kesehatan telah memberikan manfaat yang maksimal bagi penduduk. Fokus utama dalam pencapaian SPM BIdang Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara meliputi : 1) Akses Pelayanan Kesehatan, hal ini mencakup ketersediaan fasilitas Kesehatan yang memadai, jarak tempuh yang wajar bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan Kesehatan; 2) Kualitas Pelayanan, standar kualitas pelayanan Kesehatan yang diberikan meliputi kualitas dan kompetensi tenaga medis yang kompeten, standar prosedur tenaga medis yang dipatuhi, penggunaan teknologi medis, serta ketersediaan obat-obat dan alat Kesehatan yang sesuai; 3) Cakupan layanan Kesehatan seperti pelayanan imunisasi, pelayanan ibu dan anak, penanganan penyakit menular, dan layanan gizi; 4) Pencegahan dan Promosi Kesehatan seperti program vaksinasi, penyuluhan Kesehatan, kampanye penyadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, dan pengendalian risiko penyakit; 5) Pengukuran dan Evaluasi untuk memastikan tercapainya SPM, ini secara berkala perlu dilakukan terhadap berbagai indikator Kesehatan yang relevan.

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti disajikan pada tabel 2.32 dengan total 12 indikator SPM yang dilaksanakan terdapat 4 indikator yang masih rendah yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, serta Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.

6) Upaya Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting

baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat penting (severety stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) dan tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS tahun 2006.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Beberapa penyebab stunting sebagai berikut :

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum, pada masa kehamilan dan setelah melahirkan.
2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (ante natal care) atau pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, post natal care atau pelayanan setelah melahirkan dan pembelajaran dini yang berkualitas.
3. Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga pada makanan bergizi
4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) merupakan Kegiatan survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama BPS dan pihak terkait untuk mengukur status gizi masyarakat, khususnya balita, melalui metode sampling yang representatif, guna menghasilkan data prevalensi stunting dan indikator gizi lainnya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) adalah Sistem aplikasi berbasis elektronik yang digunakan oleh petugas kesehatan dan kader posyandu untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan data pengukuran gizi individu (terutama balita) secara rutin di tingkat masyarakat, sebagai bahan pemantauan dan intervensi gizi secara langsung.

Sedangkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) adalah survei nasional yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mengumpulkan data menyeluruh tentang status kesehatan penduduk Indonesia. Cakupannya lebih luas dibanding SSGI karena tidak hanya fokus pada gizi, tetapi juga mencakup penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan ibu dan anak, perilaku kesehatan, hingga faktor lingkungan.

Jika SSGI fokusnya hanya pada status gizi (termasuk stunting),maka SKI memotret gambaran umum kesehatan masyarakat. Jadi data stunting di SKI hanyalah salah satu bagian dari seluruh indikator yang dikumpulkan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara mengalami fluktuasi selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 29,5%, yang dapat diartikan bahwa hampir sepertiga balita di kabupaten konawe utara mengalami masalah pertumbuhan. Di tahun 2022 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 21,6%, menunjukkan adanya perbaikan status gizi anak. Namun, pada tahun 2023 prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 24,7%, dan naik lagi pada 2024 menjadi 27%, hal tersebut menandakan tantangan yang masih besar dalam mempertahankan penurunan angka stunting di Konawe Utara

Namun, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dibanding SSGI. Dimana pada tahun 2021

prevalensi stunting dari data EPPGBM tercatat sebesar 10,2%, lalu turun menjadi 7,2% pada tahun 2022, lalu kembali turun menjadi 6% di tahun 2023, dan 5,4% di tahun 2024. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik metode pengumpulan data EPPGBM yang hanya mencatat balita yang hadir di posyandu, sehingga angka yang dihasilkan cenderung berbeda dengan SSGI.

Secara umum, data SSGI memberikan gambaran bahwa upaya penurunan stunting di Konawe Utara memerlukan strategi yang konsisten dan berkelanjutan, mengingat tren fluktuatif yang terjadi. Sementara EPPGBM tetap berperan penting sebagai alat pemantauan cepat di lapangan untuk mengidentifikasi balita yang membutuhkan intervensi gizi segera.

Tabel 2.33
Prevalensi Stunting di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2021-2024

Sumber Data	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
SSGI	29,5	21,6	24,7	27
EPPGBM	10,2	7,2	6	5,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2025

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mendorong percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Konawe Utara No.17 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Stunting Di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dibidang penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/M.PPN/HK/02/2022 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024.

Upaya penurunan Prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara memerlukan rencana intervensi yang komprehensif. Intervensi yang dilakukan pemerintah kelompokan menjadi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Intervensi gizi sensitif dilakukan oleh sektor lain di luar kesehatan yang terkait dengan upaya penanggulangan stunting.

Intervensi spesifik yang diberikan pemerintah Kabupaten Konawe Utara dapat dikelompokan berdasarkan sasaran program, yaitu :

1. Sasaran ibu hamil dilakukan melalui perlindungan ibu hamil terhadap kekurangan zat besi, asam folat, dan kekurangan energi dan protein kronis; perlindungan terhadap kekurangan iodium, dan perlindungan terhadap malaria
2. Sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, dilakukan melalui dorongan pemberian IMD/Inisiasi menyusui dini (pemberian kolostrum ASI), memberikan edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang bayi/balita setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat
3. Sasaran ibu menyusui dan Anak usia 7- 23 bulan, dilakukan melalui dorongan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping-ASI (MP-ASI), penyediaan dan pemberiaan obat cacing, pemberiaan suplementasi zink,

fortifikasi zat besi ke dalam makanan, perlindungan terhadap malaria, pemberian imunisasi, pencegahan dan pengobatan diare

Intervensi sensitif dilakukan melalui bebagai program kegiatan, di antaranya penyediaan akses air bersih, penyediaan akses terhadap sanitasi salah satunya melalui program STBM, fortifikasi bahan pangan oleh Kementerian Pertanian, penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua, pemberian pendidikan anak usia dini universal oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, Keluarga Berencana (KB), pemberian edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi remaja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

Upaya intervensi sensitif dan spesifik di Kabupaten Konawe Utara telah memberikan hasil yang cukup optimal, hal ini di dukung pula dengan dibentuknya Unit Reaksi Cepat Kemiskinan, Inflasi dan Stunting Selaras (URC-KISS) yang mampu bergerak cepat dengan menyasar langsung bayi dan balita yang beresiko stunting (*by name by address*). Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggerakkan seluruh Perangkat Daerah dan berkolaborasi dalam upaya penurunan dan intervensi kasus stunting. Berbagai penanganan yang dilakukan antara lain pemberian bantuan tunai, bantuan sembako, serta bantuan makanan bergizi dengan melibatkan aparatur desa dan Puskesmas. Upaya penurunan angka stunting ini terus digalakkan dalam upaya mencapai target 0 kasus di tahun 2025.

2.4.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi mantap untuk memperlancar transportasi. Pada Tahun 2023, panjang jalan nasional di Kabupaten Konawe Utara sepanjang, 170,91 km, jalan provinsi 38,10 km, dan jalan kabupaten 699,94 km.

Tabel 2.34
Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

No.	Jenis Permukaan	Jalan Kabupaten (km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aspal	116,86	127,54	133,59	179,04	206,44
2.	Kerikil	342,58	324,74	472,05	425,13	442,13
3.	Tanah	226,32	242,46	93,91	89,74	89,74
4.	Lainnya	4,16	5,2	0,39	6,03	6,03
Jumlah		684,65	689,92	699,94	699,94	744,34

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2025

Secara keseluruhan persentase kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Kabupaten Konawe Utara sebesar 89,52%, sisanya belum mantap 10,48%.

Tabel 2.35
Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No.	Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2.	2020	699,94	581,72	83,11	118,22	16,89
3.	2021	699,94	588,16	84,03	111,78	15,97
4.	2022	699,94	626,59	89,52	73,35	10,48
5.	2023	699,94	615,67	87,96	84,27	12,04
6.	2024	699,94	626,59	89,52	73,35	10,48

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2023

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik, sedang, pengerasan, dan kerikil sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak, rusak berat dan jalan tanah. Pada Tahun 2023 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 626,59 km (89,52%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 615,67 km (87,96%) pada Tahun 2022. Sebagian besar pemeliharaan jalan kabupaten tahun 2023 pada ruas dengan kondisi jalan sedang, dan sebagian pada kondisi jalan belum mantap (rusak dan rusak berat). Disamping itu, terdapat perubahan kondisi jalan dari mantap menjadi tidak mantap yang belum termasuk penanganan tahun 2023. Perencanaan kedepan, pemeliharaan jalan akan diprioritaskan untuk jalan dengan kondisi tidak mantap.

2) Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Sampai dengan Tahun 2023, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2023 adalah 75,34% (8.683,10 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 75,22% (1.569,80 m). Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2019–2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.36
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

Tahun	Total Irigasi Primer (m)	Kondisi				Total Irigasi Sekunder (m)	Kondisi			
		Baik (m)	%	Rusak (m)	%		Baik (m)	%	Rusak (m)	%
2020	11.406,38	6.946,16	60,90	4.460,21	39,10	2.095,18	1.121,01	53,50	974,16	46,50
2021	11.466,00	7.059,94	61,57	4.406,06	38,43	2.091,00	1.319,64	63,10	771,36	36,89
2022	11.525,63	7.698,26	66,79	3.827,37	33,21	2.086,83	1.453,39	69,65	633,43	30,35
2023	11.525,63	8.683,10	75,34	2.842,52	24,66	2.086,83	1.569,80	75,22	517,03	24,78
2024	11.890,53	6.695,23	56,31	5.195,31	43,69	9.227,86	5.918,49	64,18	3.309,37	35,86

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2025

Gambar 2.43
Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik
di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024

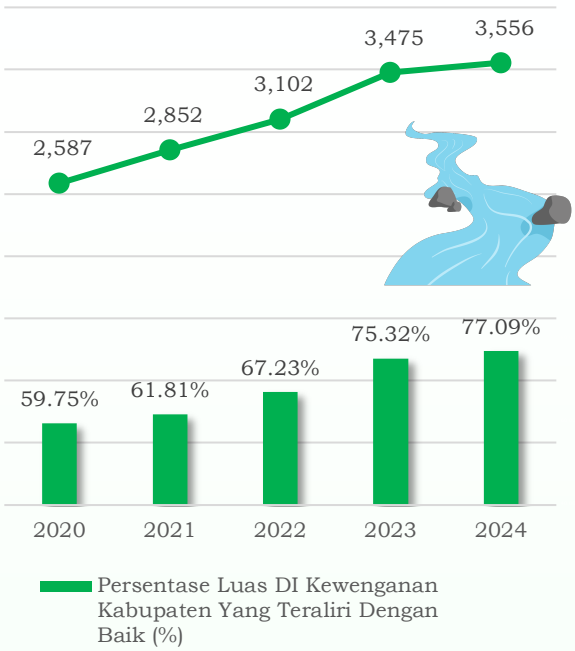

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2025

Kondisi irigasi di Kabupaten Konawe Utara selama 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan cakupan irigasi yang teraliri dengan baik. Irigasi primer meningkat dari 60,90% pada 2020 menjadi puncaknya 75,34% pada 2023, meskipun turun menjadi 56,31% pada 2024 akibat adanya jaringan baru yang belum sepenuhnya berfungsi optimal. Irigasi sekunder juga mengalami peningkatan dari 53,50% pada 2020 menjadi 75,22% pada 2023, kemudian 64,18% pada 2024 seiring pengembangan jaringan baru. Secara keseluruhan, data mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan luas jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, meskipun pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan baru tetap menjadi prioritas.

Luas daerah irigasi yang teraliri dengan baik di Kabupaten Konawe Utara terus meningkat dari 2.587 ha (59,75%) pada 2020 menjadi 3.556 ha (77,09%) pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang berdampak positif terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Ke depan, perlu penguatan program pemeliharaan irigasi, pengembangan di wilayah potensial, serta integrasi dengan program pertanian dan pendampingan petani untuk memastikan seluruh jaringan irigasi berfungsi optimal dan mendukung peningkatan hasil pertanian secara berkelanjutan.

3) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Konawe Utara adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara. Dokumen yang disusun telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum R.I dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Kabupaten Konawe Utara tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW. Namun sampai dengan tahun 2022 karena keterbatasan anggaran dan panjangnya proses penyusunan hingga penetapan, untuk itu perlu dilakukan upaya dan langkah percepatan dalam penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Kabupaten Konawe Utara 2012-2032 pada tahun 2024.

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan keperuntukannya, seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuaian
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
A	KAWASAN LINDUNG					
1.	Kawasan Hutan Lindung	213.254,16	-	-	213.254,16	
2.	Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	
3.	Sempadan Pantai	-	-	-	-	
4.	Sempadan Sungai	-	-	-	-	
5.	Kawasan Cagar Budaya	-	-	-	-	
	Jumlah (Ha)	213.254,16	-	-	213.254,16	
	% Terhadap Kawasan Lindung	100,00	-	-	100,00	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	42,62	-	-	42,62	
B	KAWASAN BUDIDAYA				-	
1.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	85.986,04	34.542,56	9.782,71	130.311,31	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
2.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi (HP)	39.701,09	20.242,33	5.354,42	65.297,84	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
3.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	21.553,72	6.975,48	3.526,08	32.055,28	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuaian
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
4.	Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	953,72	455,02	248,60	1.657,34	Terjadinya alih fungsi menjadi kawasan permukiman
5.	Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1.500,00	-	-	1.500,00	Menunggu Pentepan RP2
6.	Kawasan peruntukan pertanian basah	2.137,39	240,88	1.019,26	3.397,53	Perubahan kawasan menjadi perkebunan
7.	Kawasan peruntukan Perkebunan Kelapa Sawit	13.336,55	1.161,44	904,01	15.402,00	Menjadi Kawasan Pertambangan
8.	Kawasan peruntukan perkebunan tanaman rakyat	17,65	1,95	4,73	24,33	Alih fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit
9.	Kawasan peruntukan pertambangan	14.995,18	7.172,46	5.661,36	27.829,00	Menggunakan kawasan hutan
10.	Kawasan peruntukan permukiman	6.574,89	1.389,31	1.331,98	9.296,18	Kurangnya anggaran dalam program pengembangan permukiman yang sudah diatur dalam indikasi program
11.	Kawasan peruntukan perikanan budidaya	1.172,34	-	23,67	1.196,01	Alih fungsi lahan
12.	Kawasan peruntukan peternakan	98,38	22,42	3,74	124,54	Belum maksimalnya program pengembangan peternakan
13.	Kawasan peruntukan lainnya	89,55	8,22	4,99	102,76	Belum maksimalnya pengadaan tanah untuk pembangunan lainnya
	Jumlah (Ha)	187.017,05	72.212,07	27.855,73	287.084,85	
	% Terhadap kawasan budidaya	60,32	28,01	11,68	100,01	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	34,61	16,07	6,70	57,38	
	Total (Ha)	400.271,21	72.212,07	27.855,73	500.339,01	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	80,00	14,43	5,57	100,00	
	Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah		

Sumber : Bapperida, 2025

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar ruang yang ada masih sesuai dengan keperuntukkannya yaitu 80,00%, masuk dalam kategori tinggi, namun masih ada ketidaksesuaian sebesar 5,57%, masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemanfaatannya belum mentaati rencana pola ruang. Upaya yang dilakukan pemda antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan konsolidasi tanah, konsultansi serta audit pemanfaatan tanah.

4) Penyediaan Air Minum

Penyediaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Konawe Utara (Tirta Lasolo) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka penanganan di desa rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Adapun lingkungan kawasan perkotaan dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di masing - masing.

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Penduduk menggunakan sumur gali baik terlindungi maupun tak terlindungi, mencapai 11,01%, penduduk yang menggunakan mata air baik terlindungi maupun tak terlindungi 43,87%, sisanya menggunakan air dalam kemasan 0,64%, hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 2,47%).

Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan mekanisme sharing APBN di daerah yang rawan air bersih. Instalasi yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2023 menurut data Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan umum sebesar 98,10%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Konawe Utara sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas.

Tabel 2.38
Penyediaan Air Minum Menurut Sumbernya
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No.	Sumber Air Minum	Persentase (%)
1.	Pompa	2,964
2.	Air Dalam Kemasan	0,832
3.	Sumur Terlindungi	8,148
4.	Sumur Tak Terlindungi	5,064
5.	Mata Air Terlindungi	41,664
6.	Mata Air Tak Terlindungi	10,98
7.	Air Permukaan	0,828
8.	Lainnya	29,52
Total		100,00

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2024

5) Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti disajikan pada tabel 2.39 dengan total 2 indikator SPM yang dilaksanakan seluruh capaian indikator masih rendah yaitu Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Rendahnya capaian SPM bidang Pekerjaan Umum menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di sektor air minum dan air limbah domestik.

Tabel 2.39
Pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah Di Kabupaten/Kota	Realisasi		
		Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari	14.476	5.68	8.796	39,2%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	14.476	23.211	49.17	38.93

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

2.4.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Jumlah Rumah dan Kekurangan Rumah serta RTLH

Rumah atau hunian tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum, kondisi rumah layak huni di Kabupaten Konawe Utara telah mencapai 66,23 %, sedangkan kondisi rumah tidak layak huni sebesar 33,77%, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.40.

Tabel 2.40
Ketersediaan Sarana Perumahan
Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah 2023 (unit)	RTLH 2023 (unit)	RLH 2023 (unit)	% RTLH	% RLH
1	Sawa	1.312	366	946	27,90%	72,10%
2	Motui	1.434	652	782	45,47%	54,53%
3	Lembo	1.874	506	1.368	27,00%	73,00%
4	Lasolo	2.153	539	1.614	25,03%	74,97%
5	Wawolesea	1.018	463	555	45,48%	54,52%
6	Lasolo Kepulauan	528	162	366	30,68%	69,32%
7	Molawe	1.436	333	1.103	23,19%	76,81%

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah 2023 (unit)	RTLH 2023 (unit)	RLH 2023 (unit)	% RTLH	% RLH
8	Asera	2.172	1069	1.103	49,22%	50,78%
9	Andowia	2.067	358	1709	17,32%	82,68%
10	Oheo	1.300	876	424	67,38%	32,62%
11	Langgikima	1.390	369	1021	26,55%	73,45%
12	Wiwirano	1.805	452	1.353	25,04%	74,96%
13	Landawe	851	386	465	45,36%	54,64%
Kab. Konawe Utara		19.340	6.531	12.809	33,77%	66,23%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, Tahun 2024

2) Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog)

Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Konawe Utara pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan backlog eksisting dengan kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut.

Tabel 2.41
Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan
di Kabupaten Konawe Utara

No	Kecamatan	Jumlah KK Tahun 2019	Jumlah Rumah 2019 (unit)	Backlog Rumah 2019	Jumlah KK Proyeksi 2040	Kebutuhan Rumah KK	Total Kebutuhan Rumah	Kebutuhan Rumah/ Tahun
A	b	c	d	e = c - d	f	g = f - c	h = (g+e)	i = h/20
1	Sawa	1.294	1.294	-	3.221	1.927	1.927	96
2	Motui	1.246	1.246	-	2.651	1.405	1.405	70
3	Lembo	1.575	1.298	277	3.661	2.086	2.363	118
4	Lasolo	2.272	1.815	457	5.361	3.089	3.546	177
5	Wawolesea	1.015	1.018	- 3	1.989	974	971	49
6	Lasolo Kepulauan	567	553	14	6.726	6.159	6.173	309
7	Molawe	1.728	1.367	361	4.501	2.773	3.134	157
8	Asera	2.142	2.142	-	4.482	2.340	2.340	117

No	Kecamatan	Jumlah KK Tahun 2019	Jumlah Rumah 2019 (unit)	Backlog Rumah 2019	Jumlah KK Proyeksi 2040	Kebutuhan Rumah KK	Total Kebutuhan Rumah	Kebutuhan Rumah/ Tahun
9	Andowia	1.981	1.320	661	4.358	2.377	3.038	152
10	Oheo	1.311	1.311	-	5.177	3.866	3.866	193
11	Langgikima	1.415	1.415	-	2.747	1.332	1.332	67
12	Wiwirano	1.493	1.540	47	3.585	2.092	2.045	102
13	Landawe	828	828	-	1.458	630	630	31
Kab. Konawe Utara		18.867	17.147	1.720	49.917	31.050	32.770	1.638

Target Kebutuhan Rumah Layak Huni

- 2026 : 28.613 Unit
- 2027 : 30.251 Unit
- 2028 : 31.889 Unit
- 2029 : 33.527 Unit
- 2030 : 35.165 Unit

Sumber : RP3KP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

3) Sarana Prasarana Kawasan Permukiman

Analisis pelayanan umum bagian perumahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya rumah tangga pengguna air bersih dan jumlah seluruh rumah tangga dan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Ketersediaan Prasarana Perumahan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Tangga Pengguna Air minum layak	5.069	11.263	12.336	14.844	14.932
	Jumlah Rumah Tangga	13.442	14.867	15.218	16.675	16.987
	Persentase (%)	37,71	75,76	81,06	89,02	87,9
2.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	13.169	14.767	15.218	16.675	16.965
	Jumlah Rumah Tangga	13.442	14.867	15.218	16.675	16.987
	Persentase (%)	97,97	99,33	100,00	100,00	99,87
3.	Rumah Tangga Bersanitasi layak	10.350	11.443	11.654	14.434	14.055

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Rumah Tangga	13.442	14.867	15.218	16.675	16.987
	Persentase (%)	77,00	76,97	76,58	86,56	82,74

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, 2023

4) Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan digitasi citra satelit dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara, luas kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2.450,45 Ha. Permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara di berdasarkan SK Bupati Konawe Utara No. 397/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara seluas 112.669 Ha dengan Kawasan yang tersebar di 44 titik kawasan kumuh. Selanjutnya, hasil verifikasi luas kawasan pemukiman kumuh pada kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2022 diketahui bahwa luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara seluas 528,13 Ha. Dengan demikian, dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara mengacu pada data tersebut. Nama kawasan serta luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Kumuh Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 dan hasil verifikasi luasan Tahun 2021 dapat dilhat pada Tabel berikut.

Tabel 2.43
Luas Kawasan Pemukiman Kumuh
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km^2)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
1	Wawonsangi	49,73	14,55
2	Tambakua	162,97	5,30
3	Alenggo	16,00	39,10
4	Molore Pantai	11,46	8,68
5	Sarimukti	35,66	29,00
6	Morombo Pantai	5,00	13,00
7	Morombo	10,30	9,00
8	Waturambaha	18,98	6,50
9	Boedingi	1,60	2,00
10	Tapunopaka	1,46	9,30
11	Sambandete	91,69	14,40
12	Tinondo	84,72	9,50

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km^2)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
13	Laumoso	25,22	28,00
14	Puusuli	69,12	18,05
15	Tapuemea	1,27	7,00
16	Labungga	24,50	16,00
17	Puuwanggudu	45,00	1,70
18	Wanggudu Raya	24,45	11,00
19	Amorome Utama	33,72	53,16
20	Kelurahan Asera	6,89	16,30
21	Longeo Utama	30,30	9,00
22	Amorome	53,35	15,30
23	Wawolibue	3,61	9,30
24	Walalindu	5,61	1,60
25	Tapuwatu	25,00	3,30
26	Alaa Wanggudu	7,76	4,70
27	Muara Tinobu	0,87	4,70
28	Otipulu	8,35	5,70
29	Tetelupai	3,60	3,00
30	Tanjung Bunga	1,58	10,50
31	Watuwula	3,96	5,30
32	Puusiambu	4,26	12,60
33	Tudungano	1,70	9,30
34	Punggulahi	3,90	11,00
35	Sambasule	2,00	5,30
36	Poni Poniki	3,50	4,70
37	Tobimeita	5,20	5,70
38	Sama Subur	2,00	15,00
39	Kelurahan Wanggudu	111,78	28,74
40	Wunduhaka	5,88	8,50
41	Banggina	2,00	0,00
42	Tanjung Laimea	2,10	2,60
43	Tapunggaya	7,50	15,00
44	Paka Indah	89,90	25,75

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km²)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
Total Kawasan Kumuh			528,13
Total Kawasan Permukiman			2450,72
Total Kawasan Tidak Kumuh			1.922,59
Persentase Kawasan Tidak Kumuh (%)			78,45%

Sumber : SK Bupati Konawe Utara No. 397/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara, Hasil verifikasi kegiatan RP2KPKPK Tahun 2022

5) Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Pada tahun 2024, RTLH dapat tertangani 80 unit dari dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan RUTILAHU dengan rincian data sebagai berikut :

Gambar 2.44
Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

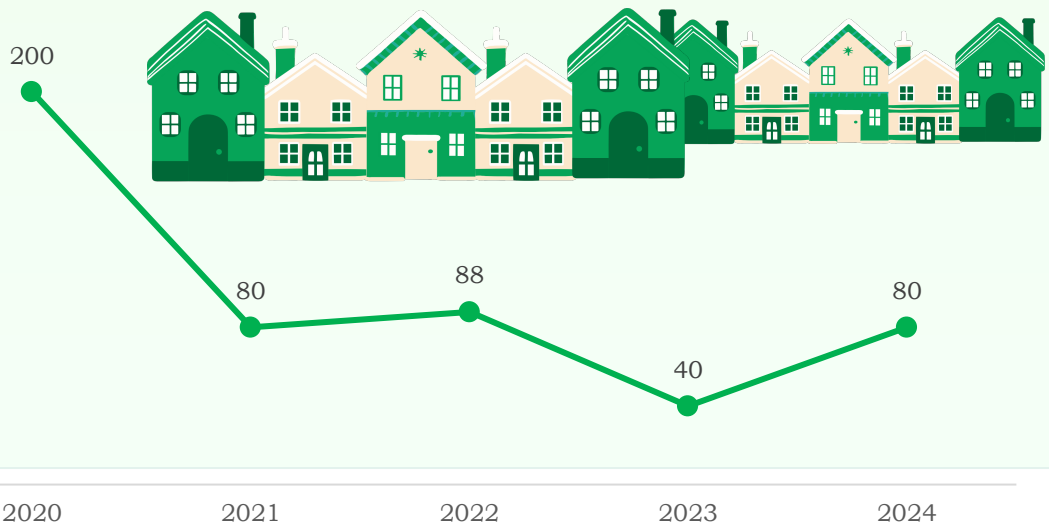

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

6) Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Perumahan Rakyat mengacu pada sejumlah kriteria atau persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat. SPM diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan perumahan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe Utara masih menunjukkan hasil yang relatif rendah.

Untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dari total target 625 unit rumah baru terealisasi sebanyak 315 unit atau 50,40%, sementara 310 unit lainnya belum terlayani. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan capaian, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, ketersediaan lahan, serta faktor teknis dalam proses pembangunan dan rehabilitasi.

Sementara itu, pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, capaian sedikit lebih baik, yaitu 97 unit rumah dari target 183 unit atau 53% realisasi, dengan 86 unit masih belum terlayani. Meskipun persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan rumah korban bencana, capaian ini tetap mengindikasikan adanya tantangan, terutama dalam hal pembiayaan, percepatan proses administrasi, serta kesiapan masyarakat untuk menempati lokasi relokasi.

Secara keseluruhan, capaian SPM bidang perumahan rakyat masih berada pada kisaran 50% dari target pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, baik bagi korban bencana maupun masyarakat yang terkena relokasi, belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan melalui optimalisasi sumber pendanaan lintas sektor, perencanaan berbasis prioritas, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar backlog perumahan dapat diselesaikan secara bertahap dan terukur.

Tabel 2.44
Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah Target Pelayanan SPM Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Realisasi		
		Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	625	315	310	50.40%
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	183	97	86	53%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, Tahun 2025

2.4.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Konawe Utara juga dilaksanakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Konawe Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Tabel 2.45
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024

No.	Jumlah DPT	Pileg 2020	Pilpres 2020	Pilbup 2021	Pemilu 2024
1.	Jumlah Pemilih	43.922	43.922	46.123	54.200
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	39.483	39.770	42.875	50.042
3.	Tingkat Partisipasi (%)	89,89	90,55	92,96	93,37
4.	Jumlah Suara Sah	37.957	38.632	42.864	50.042
5.	Jumlah Tidak Sah/Golput	1.526	1.138	518	4.158
6.	Persentase Suara Sah (%)	96,14	97,14	98,80	

Sumber : KPU Kab. Konawe Utara, 2025

Melihat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sebagai pemilih pemula. Kegiatan pembinaan politik salah satunya adalah sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan perempuan.

Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.46
Pelaksanaan SPM bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

NO.	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN		KOEFISIEN SUB KEGIATAN	KOEFISIEN KEGIATAN	KOEFISIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	7=4X5X6	*8= i I(∑7)*
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana	1	Dokumen	0,4	0,17	0,068	7%
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	400	Orang	0,6		40,8	4080%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	1	Dokumen	0,1	0,50	0,05	5%
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)	1	Kegiatan	0,1		0,05	5%
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	80	Orang	0,2		8	800%
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	400	Orang	0,2		40	4000%
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana	2	Set	0,2		0,2	20%

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN		KOEFISIEN SUB KEGIATAN	KOEFISIEN KEGIATAN	KOEFISIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
		prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana						
		8 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10	Unit	0,2		1	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	9 Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	Kegiatan	0,3	0,33	0	0%
		10 Respon cepat darurat bencana	1	Laporan	0,3		0,099	10%
		11 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	Laporan	0,1		0,033	3%
		12 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	10	Orang	0,3		0,99	99%
JUMLAH					**3**	**1**	**91,29**	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, 2025

2.4.3.1.6 Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :

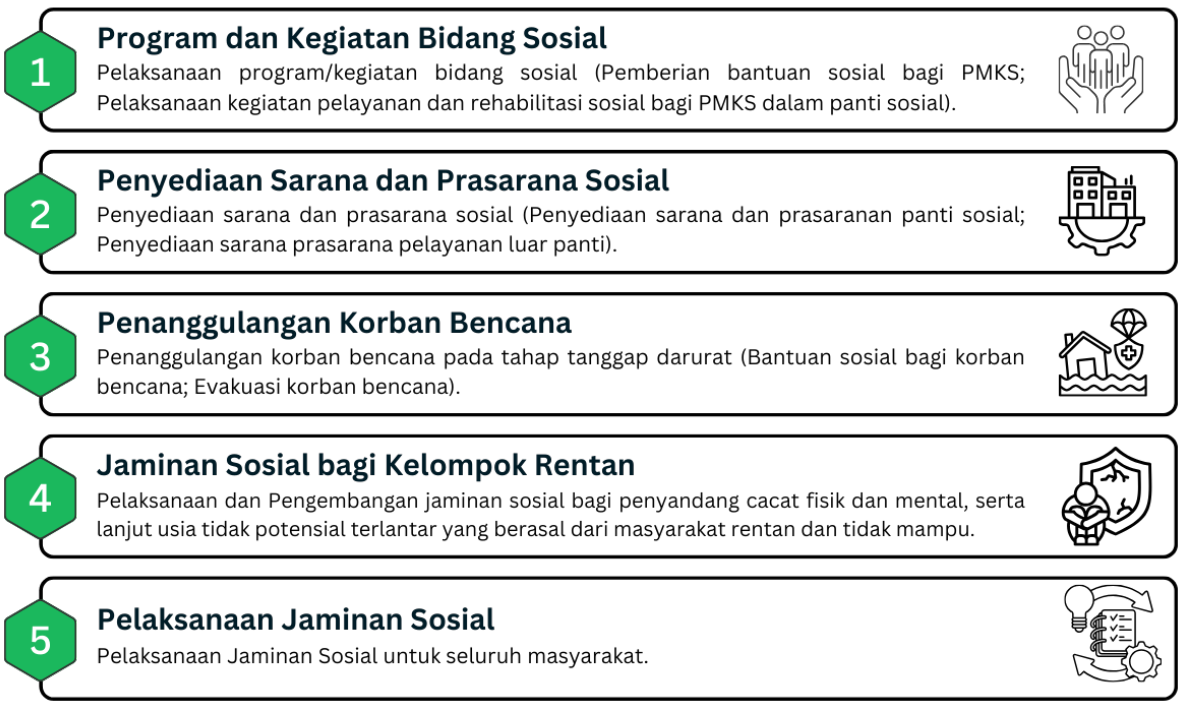

Gambar 2.45
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

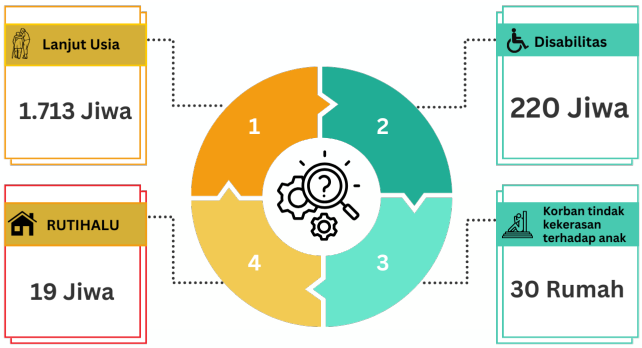

Sumber : Dinas Sosial Kab. Konawe Utara, Tahun 2024

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas: Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Gambar 2.46
Pelaksanaan SPM bidang sosial
Kabupaten Konawe Utara tahun 2024

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	100% Target Tercapai	✓
Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	100% Target Tercapai	✓
Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	100% Target Tercapai	✓
Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	100% Target Tercapai	✓
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100% Target Tercapai	✓

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Berdasarkan data capaian SPM Kabupaten Konawe Utara tahun 2024, terlihat bahwa seluruh indikator SPM yang tercantum mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kelima indikator tersebut meliputi rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, tuna sosial (termasuk gelandangan dan pengemis), serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana.

Analisis menunjukkan bahwa capaian penuh ini mencerminkan penanganan yang tuntas terhadap sasaran yang ada. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa kategori, seperti tuna sosial dan korban bencana, memiliki populasi yang fluktuatif atau terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, pemantauan tambahan melalui data sasaran atau target numerik sangat penting agar capaian 100% dapat dianalisis apakah karena penanganan efektif atau karena jumlah populasi yang relatif kecil.

Selain itu, pencapaian ini sebaiknya dikonfirmasi melalui penginputan lengkap ke aplikasi e-SPM, agar capaian kinerja dapat tercatat secara resmi dan terbaca dalam pelaporan Kemendagri. Dengan demikian, akuntabilitas dan keselarasan data SPM dapat terjaga, sekaligus menjadi dasar valid untuk perencanaan program sosial ke depan.

2.4.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.3.2.1 Tenaga Kerja

1) Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.47. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara cenderung meningkat. Pada tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 97,60%.

Tabel 2.47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2024

No.	Jenis	2023		Jumlah	2024		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	23.197	12.795	35.992	23.511	16.948	40.459
	Bekerja	22.581	12.416	34.997	23.224	16.265	39.489
	Pengangguran Terbuka	616	379	995	287	683	970
2	Bukan Angkatan Kerja	3.247	11.636	14.883	3.230	8.068	11.298
	Sekolah	1.231	1.594	2.825	1.300	1.373	2.673
	Mengurus Rumah Tangga	1.047	9.258	10.305	1.310	6.422	7.732
	Lainnya	969	784	1.753	620	273	893
Jumlah		50.875	24.431	50.875	26.741	25.016	51.575
TPAK (%)		71,64			97,60		

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2025

2) Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah pengangguran (disguised unemployment). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat dan berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tabel 2.48. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe Utara mencapai angka 2,76%, mengalami sedikit penurunan menjadi menjadi 2,40 pada tahun 2024. Faktor utama penyebab meningkatnya angka pengangguran terbuka yaitu adanya pemberhentian beberapa kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara sehingga menambah jumlah pengangguran yang ada.

Tabel 2.48
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2024

No.	Jenis	2023		Jumlah	2024		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	23.197	12.795	35.992	23.511	16.948	40.459
	Bekerja	22.581	12.416	34.997	23.224	16.265	39.489
	Pengangguran Terbuka	616	379	995	287	683	970
	Jumlah						
TPT (%)				2,76 %			2,40 %

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2025

Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu: Program Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan dilaksanakan dalam upaya mengurangi pengangguran serta meningkatkan sektor-sektor ekonomi utamanya sektor industri kecil dan menengah. Pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara salah satunya adalah pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian.

Gambar 2.47
Pelatihan kewirausahaan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

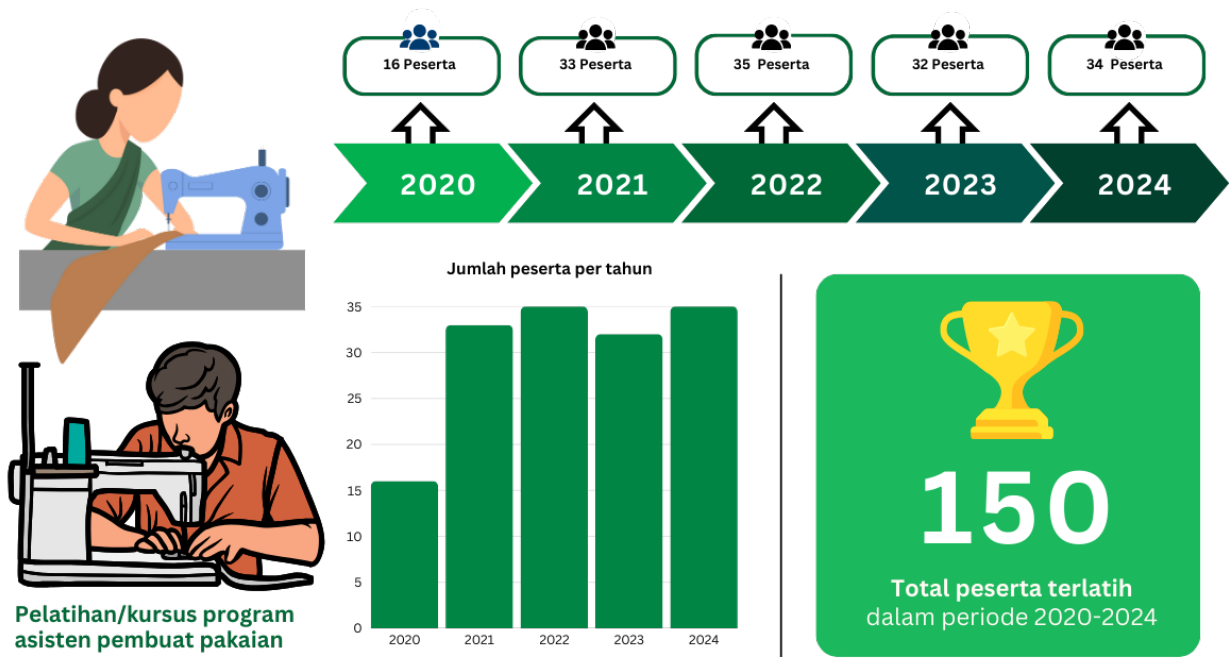

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 69,04 meningkat menjadi 73,57 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Konawe Utara semakin meningkat.

Tabel 2.49
Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA
di Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2024

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,66	87,04	87,24	87,68
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,04	69,39	70,65	73,57
3.	Partisipasi Pekerja Perempuan	34,51	36,40	35,84	55,73
4.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	49,16	49,72	49,96	52,55
5.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	33,82	34,30	36,72	39,87
6.	KDRT	6	13	5	-
7.	Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur	28	-	-	-
8.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Tabel 2.50
Jumlah Korban Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023	Total
1.	Korban berdasarkan bentuk kekerasan a. Fisik b. Psikis c. Seksual d. Eksploitasi e. Trafficking f. Penelantaran g. Lainnya	 - - 4 - - 1 -	 5 2 4 - - 2 -	 5 2 4 - - 2 -	 10 4 12 - - 5 -
2.	Korban berdasarkan jenis pelayanan a. Pengaduan b. Kesehatan	 -	 7	 7	 14

No.	Uraian	2021	2022	2023	Total
	c. Bantuan Hukum	-	-	-	-
	d. Penegakan Hukum	-	-	-	-
	e. Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-
	f. Reintegrasi Sosial	-	-	-	-
	g. Pemulangan	-	-	-	-
	h. Pendampingan Tokoh Agama	-	-	-	-
		-	-	-	-
3.	Korban berdasarkan usia				
	a. 0-6	1	1	1	3
	b. 6-12	1	2	2	5
	c. 13 – 17	2	5	5	12
	d. 18 – 24	-	-	-	-
	e. 25 – 44	1	4	4	9
	f. 45 – 59	-	-	-	-
	g. 60+	-	-	-	-
4.	Korban berdasarkan Pendidikan				
	a. Tidak/Belum pernah sekolah	-	-	-	-
	b. SD	1	2	2	5
	c. SLTP	2	4	4	10
	d. SLTA	2	4	4	10
	e. Perguruan Tinggi	-	-	-	-
	f. PAUD/TK	-	-	-	-
	g. NA	-	2	-	2
5.	Kasus berdasarkan tempat kejadian				
	a. Rumah Tangga	2	6	6	14
	b. Tempat Kerja	-	-	-	-
	c. Lainnya	3	3	3	9
	d. Sekolah	-	1	1	2
	e. Fasilitas Umum	-	2	2	4
	f. Lembaga Pendidikan Kilat	-	-	-	-
6.	Korban berdasarkan status pekerjaan				
	a. Tidak Bekerja	-	-	-	-
	b. Bekerja	-	-	-	-
	c. Pelajar	4	8	8	20
	d. Menguruh Rumah Tangga	1	4	4	9
	e. NA	-	-	-	-
7.	Korban berdarkan jenis pekerjaan				
	a. Swasta/Buruh	-	-	-	-
	b. PNS/TNI/POLRI	-	-	-	-
	c. Pedagang/Tani/Nelayan	-	-	-	-
8.	Korban berdasarkan status perkawinan				
	a. Belum kawin	4	8	8	20
	b. Kawin	-	3	3	6
	c. Cerai	1	1	1	3
	d. NA	-	-	-	

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Gambar 2.48
Partisipasi Perempuan Dalam Berpolitik
Tahun 2020–2024

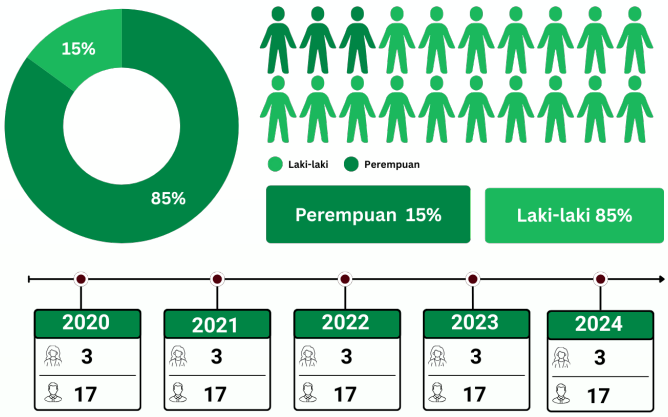

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025

Di Kabupaten Konawe Utara, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting Pemerintah Daerah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

Persentase perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Konawe Utara dilihat dengan mengukur jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten dibandingkan dengan jumlah total anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2024, sebanyak 3 dari 20 anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara merupakan anggota legislator perempuan. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, keterwakilan perempuan di legislatif tetap berjumlah 3 orang, atau hanya sebesar 15%. Ke depan diharapkan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagai upaya mengawal dan memperjuangkan hak-hak perempuan menuju kesetaraan gender.

2.4.3.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam. Kinerja pada Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara secara lengkap terlihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.49
Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

Ketersediaan pangan utama kkl/kapita/hari

Analisis: Ketersediaan kalori harian menunjukkan tren **penurunan** dalam lima tahun terakhir, menandakan adanya tantangan dalam pemenuhan kecukupan energi masyarakat.

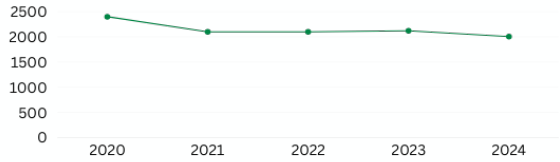

Pola Pangan Harapan (PPH)

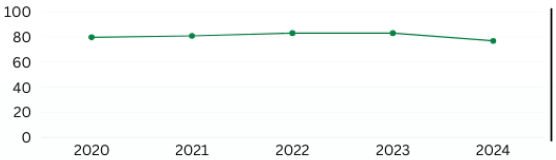

Analisis: Skor keragaman pangan sempat membaik namun mengalami **penurunan di tahun 2024**, menjadi fokus untuk ditingkatkan kembali.

Ketersediaan Padi

Analisis: Produksi padi sebagai pangan pokok utama relatif terjaga di level yang aman meskipun berfluktuasi.

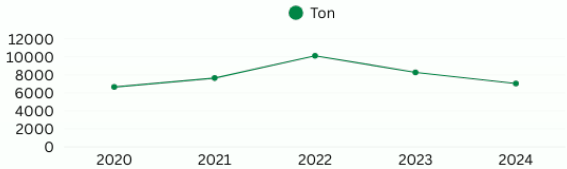

Ketersediaan Jagung

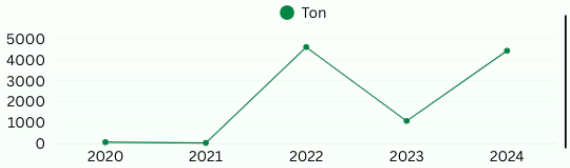

Analisis: Terjadi **lonjakan produksi yang sangat signifikan pada tahun 2022 dan 2024**, menunjukkan potensi besar sebagai komoditas strategis.

Ketersediaan Palawija

Analisis: Ketersediaan palawija menunjukkan tren **peningkatan pesat**, menjadi pilar penting untuk diversifikasi pangan daerah.

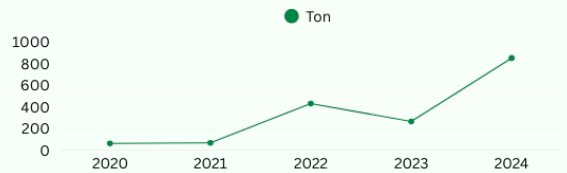

Sumber : Dinas Ketahan Pangan, Tahun 2025

2.4.3.2.4 Pertanahan

Pada urusan pertanahan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kabupaten Konawe Utara, Fasilitasi penyelesaian konflik tanah negara dan upaya tertib administrasi pertanahan melalui penyediaan data base pertanahan di 11 kelurahan. Data status tanah di Kabupaten Konawe Utara tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.51
Perkembangan Status Hak Tanah
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2023

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Hak Milik	1.005	3.553	2.592	2.791	6.600
2.	Hak Guna Bangunan	4	7	-	4	7
3.	Hak Guna Usaha	9	9	-	-	-
4.	Hak Pakai	227	69	147	89	137
5.	Hak Wakaf	-	1	2	7	6
6.	Hak Pengelolaan	1	-	-	-	-
Jumlah		1.246	3.624	2.741	2.891	6.750

Sumber : BPN Kab. Konawe Utara, 2025

2.4.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.52
Kinerja Pengelolaan Lingkungan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja		Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL		90	90	90	90	90
2.	Jumlah Perusahaan Yang Memilki AMDAL		54	54	54	54	54
3.	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tempat pengelolaan Limbah		16	16	16	16	16
4.	Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya Dan Diinformasikan Status Mutu Airnya		5	5	5	5	5
5.	Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan		2	1	1	1	1
6.	Indeks Kualitas Air		60	55	50	55	50

No.	Indikator Kinerja		Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
7.	Indeks Kualitas Udara		92	94	94	91	94
8.	Indeks Tutupan Lahan		95	95	97	97	100
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		80,62	79,55	78,11	82,60	

Sumber : DLH Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2022 cenderung menurun, namun terjadi peningkatan pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 dan 2023 belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk masa mendatang, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, agar tercapai peningkatan nilai IKLH dengan ketiga komponennya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan hasil analisa terhadap peningkatan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dan penurunan 2 (dua) indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2023 dapat dijelaskan beberapa faktor penyebabnya sebagai berikut.

Gambar 2.50
Analisis Faktor penyebab menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

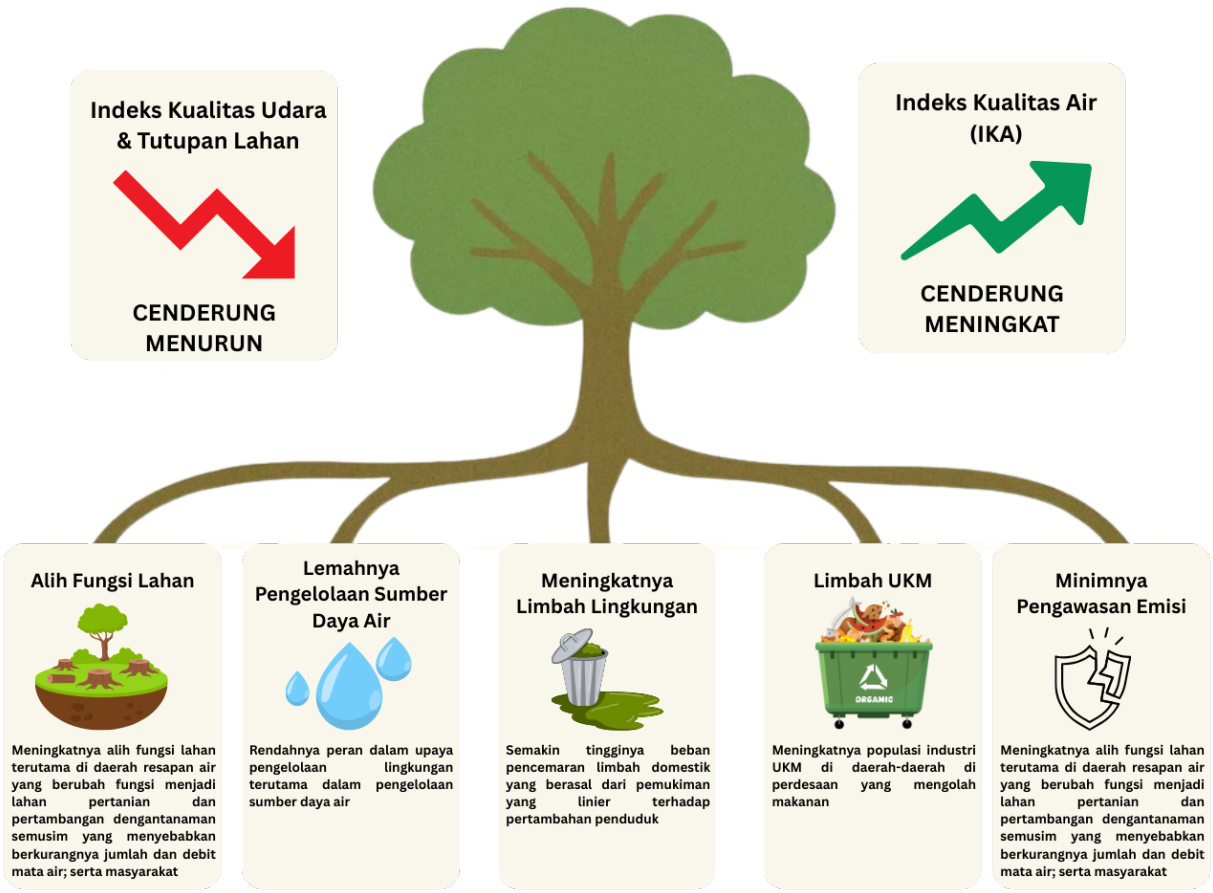

2.4.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk Kabupaten Konawe Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan positif. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 sebanyak 81.355 Jiwa dengan komposisi Laki-laki sebanyak 41.853 Jiwa dan Perempuan sebanyak 39.502 Jiwa. Kelompok penduduk usia 0-4 Tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 7,63% jiwa pada tahun 2024, diikuti dengan kelompok usia 5-9 tahun serta kelompok umur 15-19 tahun. Kelompok usia inilah yang paling menjadi perhatian sehingga membutuhkan proses administrasi kependudukan yang baik. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator SPM yang dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara. Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2024 ditampilkan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Cakupan Penerbitan KTP
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian						
		2022			2023			2024
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah (Jiwa)
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	25.592	24.062	49.654	29.150	27.407	56.557	53.828
2.	Jumlah Penduduk Wajib KTP	25.733	24.223	49.956	29.133	27.424	56.557	55.273
3.	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	99,45	99,34	99,4	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Selain cakupan penerbitan KTP, indikator SPM yang juga dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari

setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2019 hingga tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.54
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran sampai tahun N	4.310	22.558	27.651	24.744	25.413	19.539
2.	Jumlah kelahiran sampai tahun N	4.310	26.894	31.987	25.949	25.949	26.082
3.	Persentase penerbitan akta kelahiran	100,00	83,88	86,44	95,36	97,93	74,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain community-development merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan fasilitasi, seperti pelaksanaan program Jumat Berkah berupa pelayanan, penyuluhan, pemberian bantuan dan melihat langsung potensi desa serta kendala yang dihadapi masyarakat untuk diselesaikan bersama masyarakat desa. Pemerintah kabupaten juga melakukan pendampingan dan penguatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap desa. Upaya-upaya lain seperti pengembangan kapasitas masyarakat desa, kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta fasilitasi musyawarah pembangunan desa, fasilitasi pengembangan kebun pekarangan di desa. Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebesar 100% dibanding Tahun 20223 sebesar 0,6757. Adapun capaian kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,5429	0,5855	0,6254	0,6545	0,6757	100,00
2.	Persentase BPD Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase LPM Berprestasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
4.	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Posyandu Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Jumlah BUMdes yang aktif	159	159	159	159	159	33,96
7.	kelompok usaha di desa yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	16	33	35	32	-	-

Sumber : DPMD dan Pemdes Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Kepersertaan Keluarga Berencana
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah %
1.	PUS	16.979		18.279		18.276		18.372		17.820		12.852
2.	Peserta KB Aktif	13.256		13.482		13.959		15.709		11.786		7.252
3.	Peserta KB MKJP	17		22		22		26		45		1.683
4.	Peserta KB Pria	13		29		29		32		36		180
5.	Peserta KB Baru	1.878		1.945		2.062		2.214		2.018		3.143
6.	PUS Unmetneed	19		21		18		15		17		1.421
7.	Rasio Ekseptor KB Per 100 PUS	81,84		82,62		82,73		85,50		77,46		

Sumber : DPPKB Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Tabel 2.57
Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat
Tahun 2019 – 2024

No.	Uraian	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pernikahan yang tercatat	397	418	378	293	357	249
2.	Perceraian yang tercatat	-	-	6	6	19	-
3.	Pasangan Usia Dini	127	98	64	-	-	-

Sumber : BPS, Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.58
Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No.	Uraian	Lokasi	Kedudukan
1.	Kec. Wiwirano	- Kelurahan Lamonae - Desa Wacumelewe - Desa Larompana - Desa Mataosole - Desa Culambatu - Desa Wawontoaha - Desa Tetewatu - Desa Pondoa - Desa Padalere Utama - Desa Wacupinodo - Desa Padalere - Desa Wawosangi - Desa Lamonae Utama	Kampung Keluarga Berkualitas
2.	Kec. Landawe	- Desa Landawe Utama - Desa Kuratao - Desa Landiwo - Desa Kolosua - Desa Lahumoso - Desa Polopolora - Desa Hialu Utama - Desa Hialu - Desa Tambakua	Kampung Keluarga Berkualitas
3.	Kec. Langgikima	- Kelurahan Langgikima - Desa Alenggo - Desa Sarimukti - Desa Tobimeita - Desa Morombo Pantai - Desa Molore - Desa Molore Pantai - Desa Ngapainia - Desa Lameruru - Desa Polorah Indah	Kampung Keluarga Berkualitas
4.	Kec. Oheo	- Desa Badaeha - Desa Horoe - Desa Landawe - Desa Lameoru - Desa Kota Maju - Desa Wiwirano - Desa Walandawe	Kampung Keluarga Berkualitas

No.	Uraian	Lokasi	Kedudukan
		- Desa Puuhialu - Desa Tadoloiyo - Desa Linomoyo - Desa Tadoloiyo Trans - Desa Sambandete - Desa Paka Indah - Desa Tinondo - Desa Laronaha	
5.	Kec. Asera	- Kelurahan Wanggudu - Desa Puunggomosi - Desa Walasolo - Desa Longeo Utama - Desa Tangguluri - Desa Amorome Utama - Desa Kota Mulya - Desa Amorome - Desa Walalindu - Kelurahan Asera - Desa Asemi Nunulai - Desa Oheo Trans - Desa Andedao - Desa Wunduhaka - Desa Wawolimbue - Desa Wanggudu Raya - Desa Alaa Wanggudu	Kampung Keluarga Berkualitas
6.	Kec. Andowia	- Kelurahan Andowia - Desa Ambake - Desa Anggolohipo - Desa Lamondowo - Desa Laronanga - Desa Lambudoni - Desa Larobende - Desa Lahimbua - Desa Mataiwoi - Desa Banggarema - Desa Puuwonua - Desa Waworate - Desa Labungga	Kampung Keluarga Berkualitas
7.	Kec. Molawe	- Kelurahan Molawe - Desa Bandaeha - Desa Mataiwoi - Desa Awila - Desa Awila Puncak - Desa Tapunggaya - Desa Mowundo	Kampung Keluarga Berkualitas
8.	Kec. Lasolo	- Desa Otole - Desa Watukila - Desa Larodangge - Desa Waworaha - Desa Andumowu - Desa Lametono - Desa Belalo - Desa Abola - Desa Matapila - Desa Andeo - Desa Tetelupai - Desa Basule - Kelurahan Tinobu - Desa Tokowuta - Desa Morombo Pantai	Kampung Keluarga Berkualitas

No.	Uraian	Lokasi	Kedudukan
9.	Kec. Lembo	- Desa Alo-Alo - Desa Puulemo - Desa Laramo - Desa Padaleu - Kelurahan Lembo - Desa Bungguosu - Desa Lapulu - Desa Puusiambu - Desa Taipa - Desa Tongalino	Kampung Keluarga Berkualitas
10.	Kec. Sawa	- Desa Puudonggala Utama - Desa Puupi - Desa Lalembo - Desa Tundungano - Desa Pekaroa - Desa Laimeo - Desa Tongauna - Desa Matanggonawe - Desa Kokapi - Kelurahan Sawa - Desa Pudonggala	Kampung Keluarga Berkualitas
11.	Kec. Motui	- Kelurahan Bende - Desa Puungulahi - Desa Matandahi - Desa Kapulano - Desa Puuwongia - Desa Banggina - Desa Motui - Desa Ranombupulu - Desa Wawoluri - Desa Tondowatu - Desa Sama Subur - Desa Tobi Meita - Desa Samba Sule	Kampung Keluarga Berkualitas
12.	Kec. Lasolo Kepulauan	- Desa Waturambaha - Desa Boedingi - Desa Morombo - Desa Tapunopaka - Desa Labengki	Kampung Keluarga Berkualitas
13.	Kec. Wawolesea	- Desa Otipulu - Desa Toreo - Desa Wawolesea - Desa Lemobajo - Desa Barasanga - Desa Kampoh Cina - Desa Kampoh Bunga	Kampung Keluarga Berkualitas

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

2.4.3.2.9 Perhubungan

Kabupaten Konawe Utara sebagai pintu gerbang dari wilayah utara Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki beberapa fasilitas prasarana perhubungan yang mendukung arus tranportasi baik barang maupun penumpang. Tabel 2.59 memperlihatkan prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.59
Sarana dan Prasarana Perhubungan
di Kabupaten Konawe Utara tahun 2024

No	Jenis Prasarana Moda	Jumlah (Unit)	Lokasi
1.	Transportasi Udara	1	
	- Heliport	1	Kel. Wanggudu
2.	Transportasi Perairan	20	-
	- Pelabuhan Laut	1	Ds. Lameruru,
		1	Kel. Molawe
	- Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Ds. Molore
		1	Ds. Boenaga
		1	Ds. Waturambaha
		1	Ds. Tapungggaya
		1	Kel. Molawe
		1	Ds. Pasir Putih
		1	Ds. Tokowuta
		2	Ds. Taipa
		1	Kel. Tinobu
		1	Ds. Kampo Cina
		1	Ds. Ulu Sawa
	- Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Kel. Lamonae
		2	Andowia
		1	Ds. Bandaeha-Oheo
		1	Ds. Lambuluo
		1	Ds. Banggina
3.	Transportasi Darat	1	
	- Terminal Angkutan Darat Type B	1	Ds. Lahimbua

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.60
Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
1.	Tersus PT. Cinta Djaya	3°33'54.00"S // 122°12'11.89"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
2.	Tersus PT. Stargate Resource Pasific	3°18'27.73"S // 122°17'09.45"T	Ds. Molore	Beroperasi
3.	Tersus PT. Stargate Resource Pasific	3°18'40.57"S // 122°17'25.90"T	Ds. Molore	Beroperasi
4.	Tersus PT. Konawe Nikel Nusantara	3°23'32.65"S // 122°15'06.23"T	Ds. Morombo	Beroperasi
5.	Tersus. PT. Sriwijaya Raya	3°33'51.80"S // 122°12'37.76"T	Ds. Tapunggaya	Beroperasi
6.	Tersus PT. Pertambangan Bumi Indonesia	3°23'46.24"S // 122°14'31.47"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
7.	Tersus PT. Makmur Lestari Primatama	3°19'30.10"S // 122°17'39.70"T	Ds. Molore	Belum Beroperasi
8.	Tersus PT. Cipta Djaya Surya	3°19'50.20"S // 122°17'27.49"T	Ds. Molore	Beroperasi
9.	Tersus PT. Bumi Konawe Abadi	3°47'45.08"S // 122°27'51.66"T	Ds. Pudonggala	Beroperasi
10.	Tersus PT. Bumi Konawe Minerina	3°34'50.79"S // 122°11'56.03"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
11.	Tersus PT. Bumi Konawe Minerina	3°34'36.40"S // 122°14'07.66"T	Ds. Tapunggaya	Beroperasi
12.	Tersus PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera	3°39'59.50"S // 122°15'34.20"T	Ds. Tapunopaka	Beroperasi
14.	Tersus PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera	3°21'25.30"S // 122°17'34.23"T	Ds. Molore	Beroperasi
15.	Tersus PT. Pernick Sultra	3°21'44.94"S // 122°19'30.58"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
16.	Tersus PT. Sultra Jembatan Mas	3°24'9.02"S // 122°23'13.89"T	Ds. Waturambaha	Belum Beroperasi
17.	Tersus PT. Adhi Kartiko Pratama	3°16'39.99"S // 122°18'36.18"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
18.	Tersus PT. Kembar Emas Sultra	3°17'19.68"S // 122°18'09.51"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
19.	Tersus PT. Sinar Jaya Utama Sultra	3°22'12.92"S // 122°20'25.17"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
20.	Tersus PT. Wanagon Anoa Indonesia	3°34'38.96"S // 122°11'53.96"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
21.	Tersus PT. Bosowa Minning	3°16'48.48"S // 122°18'27.63"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
22.	Tersus PT. Daka Group	3°26'59.32"S // 122°23'02.25"T	Ds. Boedinge	Beroperasi
23.	Tersus PT. Mallibu	3°24'08.25"S // 122°14'34.16"T	Ds. Morombo Pantai	Tidak Beroperasi
24.	Tersus PT. Cipta Djaya Surya	3°23'31.07"S // 122°14'37.98"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
25.	Tersus PT. Manunggal Sarana Surya Pratama	3°24'14.63"S // 122°23'19.76"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
26.	Tersus PT. Paramitha Persadatama	3°26'22.62"S // 122°23'01.79"T	Ds. Boedinge	Beroperasi
27.	Tersus PT. Bhumi Karya Utama	3°22'52.37"S // 122°16'27.79"T	Ds. Morombo	Beroperasi
28.	Tersus PT. Tristaco Mineral Makmur	3°22'22.22"S // 122°16'41.20"T	Ds. Morombo	Beroperasi

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
29.	Tersus PT. Karyatama Konawe Utara	3°16'45.18"S // 122°18'30.49"T	Ds. Lameruru	Belum Beroperasi
30.	Tersus PT. Duta Tambang Gunung Perkasa	3°23'29.88"S // 122°16'17.12"T	Ds. Morombo	Beroperasi
31.	Tersus PT. Binanga Hartama Raya	3°22'54.51"S // 122°18'17.83"T	Ds. Morombo	Beroperasi
32.	Tersus PT. Bhumi Swadaya Mineral	3°16'26.78"S // 122°18'39.91"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
33.	Tersus PT. Bososi Pratama	3°23'57.87"S // 122°14'27.84"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
34.	Tersus PT. Indra Bakti Mustika	3°17'14.85"S // 122°18'14.35"T	Ds. Lameruru	Belum Beroperasi
35.	Tersus PT. Roshini Indonesia	3°23'00.78"S // 122°21'12.71"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
36.	Tersus PT. Tiran Indonesia	3°16'24.50"S // 122°18'48.90"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
37.	Tersus Pt. Primastian Metal Pratama	3°27'41.76"S // 122°21'56.14"T	Ds. Boedinge	Beroperasi
38.	Tersus PT. Global Citra Konawe Utara	3°47'43.60"S // 122°27'37.67"T	Ds. Pudonggala	Beroperasi
39.	Tersus PT. Antam	3°27'58.48"S // 122°18'4.22"T	Ds. Tapunopaka	Beroperasi
40.	Tersus PT. Alam Raya Indah	3°22'09.00"S // 122°17'05.84"T	Ds. Morombo	Beroperasi
41.	Tersus PT. Titan Agro Abadi	3°24'27.64"S // 122°14'35.10"T	Ds. Morombo	Belum Beroperasi
42.	Tersus PT. Jety Baraya Sulawesi	3°34'3.46"S // 122°12'28.86"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
43.	Tersus PT. Kabaena Kromit Pratama	3°34'24.46"S // 122°11'51.83"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
44.	Tersus PT. Cinta Djaya	3°33'55.17"S // 122°12'0.51"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
45.	Tersus PT. Rizki Sinar Biokas	3°27'48.37"S // 122°22'3.46"T	Ds. Boedinge	Belum Beroperasi
46.	Tersus PT. Apollo Nikel Indonesia	3°22'52.62"S // 122°22'0.15"T	Ds. Waturambaha	Belum Beroperasi
47.	Galangan PT. Buana Karya Shipyard	3°23'45.28"S // 122°15'19.08"T	Ds. Morombo	Beroperasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2023

Tabel 2.61
Kondisi Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No.	Lokasi Dermaga Rakyat/ Pelabuhan Rakyat	Jenis Dermaga/Pelabuhan	Jumlah	Kondisi
1	Ds.Lameruru	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
2	Ds. Ngapainia	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
3	Ds.Molore	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
4	Ds. Boenaga	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
5	Ds.Boedingi	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
6	Ds.Mataiwoi	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik

No.	Lokasi Dermaga Rakyat/ Pelabuhan Rakyat	Jenis Dermaga/Pelabuhan	Jumlah	Kondisi
7	Ds.Watukila	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
8	Ds.Toreo	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
9	Ds.Labengki	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
10	Ds. Waturambaha	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
11	Ds. Tapungggaya	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
12	Kel. Molawe	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
13	Ds. Pasir Putih	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
14	Ds. Tokowuta	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
15	Ds. Taipa	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	2	Berfungsi sebagian
16	Kel. Tinobu	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
17	Ds. Kampo Cina	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
18	Ds. Ulu Sawa	Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Berfungsi baik
19	Kel. Lamonae	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
20	Andowia	Pelabuhan Sungai dan Danau	2	Berfungsi sebagian
21	Ds. Bandaeha-Oheo	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
22	Ds. Lambuluo	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik
23	Ds. Banggina	Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Berfungsi baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Konawe Utara berupa armada bis angkutan penumpang sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.62
Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau
Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No	Jenis Sarana Angkutan	Jumlah Sarana					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bus Besar	4	4	4	4	4	4
2.	Bus Sedang	10	10	56	40	40	43
3.	Bus Kecil	42	42	1.723	1.101	1.101	1.113
4.	Truck Besar	56	56	70	70	230	232
5.	Truck Sedang	39	39	212	214	300	303
6.	Truck Kecil/Pick UP	44	65	622	624	700	702
7.	Perahu Jukung	405	405	428	579	579	581
8.	Perahu Ketek	196	196	190	224	224	226
9.	Speed Boat	28	28	35	36	36	36

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2025

Kedepan perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

Kecelakaan adalah kejadian yang diterima dan merupakan hasil dari sekumpulan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian baik itu dari segi materi maupun dari segi non materi yang menimpa setiap manusia, benda fisik seperti kekayaan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang menyangkut dari itu semua. Kecelakaan dibedakan dengan insiden, perbedaan dari keduanya itu terdapat pada ada atau tidaknya kerugian. Kecelakaan selalu disertai dengan timbulnya kerugian, dan sedangkan insiden tidak adanya kerugian yang didapat oleh manusia. Korban kecelakaan dapat berupa luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia.

Kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2024 jumlah kecelakaan sebanyak 58 kasus meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 48 kasus. Jumlah kasus kecelakaan dan korban kecelakaan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Jumlah Kecelakaan dan Korban Kecelakaan di
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kecelakaan	29	29	41	62	48	58
2.	Jumlah Korban Kecelakaan	50	58	69	88	81	86
	- Meninggal Dunia	10	9	12	16	14	21
	- Luka Berat	1	14	1	-	-	2
	- Luka Ringan	39	35	56	72	67	65

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2025

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam menekan angka kecelakaan antara lain dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana serta peningkatan perlengkapan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Perlengkapan jalan yang berfungsi baik di Kabupaten Konawe Utara setiap tahun mengalami peningkatan. Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik serta target perlengkapan jalan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.64
Jumlah Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	20242
1.	Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik (Unit)	112	126	140	152	280
2.	Target perlengkapan jalan (Unit)	344	372	397	407	418
3.	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	32,56	33,90	35,24	37,35	66,94

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di Kabupaten Konawe Utara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.65
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase wilayah yang terlayani jaringan mobile broadband	72,92	76,02	78,70	80,00	84,28	84,52
2.	Jumlah Kecamatan Yang Terlayani	7 Kec.	7 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec
3.	Jumlah penduduk yang menggunakan handphone.	29.651	29.712	30.454	52.274	64.808	66.721
4.	Jumlah BTS	19	21	32	63	63	63
5.	Jumlah Penerapan sistem informasi/aplikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13	20	21	86	86	86

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki satu website utama dengan alamat http://www.konaweutarakab.go.id/, dengan 9 subdomain. Subdomain untuk OPD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Alamat Subdomain Website
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

NO	NAMA SUBDOMAIN	INSTANSI	STATUS	KETERANGAN
1	bagor.konaweutarakab.go.id	BAGIAN ORGANISASI	Aktif	Terkelola
2	bkad.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
3	bkpsdm.konaweutarakab.go.id	BPKPSDM	Aktif	Terkelola
4	bloglpse.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PENYEDIA BARANG DAN JASA	Aktif	Terkelola
5	dinkes.konaweutarakab.go.id	DINAS KESEHATAN	Non Aktif	Kontrak Hosting Habis
6	dishub.konaweutarakab.go.id	DINAS PERHUBUNGAN	Aktif	Terkelola
7	diskominfo.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Aktif	Terkelola
8	dispenda.konaweutarakab.go.id	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Aktif	Terkelola
9	distanak.konaweutarakab.go.id	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Non Aktif	Belum Terkelola/Server
10	dpkp.konaweutarakab.go.id	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Aktif	Terkelola
11	dpmd.konaweutarakab.go.id	DPMD	Non Aktif	Kontrak Hosting Habis
12	dpmptsp.konaweutarakab.go.id	DINAS PERISINAN DAN PTSP	Aktif	Terkelola
13	dukcapil.konaweutarakab.go.id	DINAS CAPIL	Aktif	Terkelola
14	e-kinerja.konaweutarakab.go.id	BPKPSDM	Aktif	Terkelola
15	e-lapkin.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Terkelola
16	e-planning.konaweutarakab.go.id	BAPPERIDA	Aktif	Terkelola
17	e-presensi.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Terkelola
18	e-tukin.konaweutarakab.go.id	BKPSDM	Aktif	Tidak Terkelola
19	humas.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Non Aktif	Integrasi SKPD
20	info.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Non Aktif	Tidak Terkelola
21	infocovid19.konaweutarakab.go.id	DINAS KESEHATAN	Non Aktif	Aktifasi Posko
22	jidh.konaweutarakab.go.id	BAGIAN HUKUM	Aktif	Terkelola
23	lpse.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PENYEDIA BARANG DAN JASA	Aktif	Terkelola
24	nakertrans.konaweutarakab.go.id	DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	Aktif	Terkelola
25	pembangunan.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PEMBANGUNAN	Aktif	Terkelola

NO	NAMA SUBDOMAIN	INSTANSI	STATUS	KETERANGAN
26	perpus.konaweutarakab.go.id	DINAS PERPUSTAKAAN	Aktif	Terkelola
27	ppid.konaweutarakab.go.id	DINAS KOMINFO	Non Aktif	Hosting Belum Ada
28	sianawai.konaweutarakab.go.id	BAGIAN ORTALA	Aktif	Terkelola
29	siap.konaweutarakab.go.id	BAGIAN PEMBANGUNAN	Aktif	Terkelola
30	simda.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
31	ssh.konaweutarakab.go.id	BKAD	Aktif	Terkelola
32	disperindag.konaweutarakab.go.id	DISPERINDAG	Aktif	Terkelola
33	jdih-dprd.konaweutarakab.go.id	SEKRETARIAT DPRD	Aktif	Terkelola

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2024

2.4.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan umum bidang urusan koperasi dan UMKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UMKM. Perkembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	296	304	347	351	348
2	Jumlah Koperasi Aktif	227	113	192	196	194
3	Persentase Koperasi Aktif	76,69	37,17	55,33	55,84	56

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.68
Perkembangan Modal dan Aset Koperasi
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Modal Sendiri (Rp.Juta)	3.961	3.968	2.1201	5.250	4.762
2	Modal Luar (Rp.Juta)	3.763	3.763	9.448	465.100	944.800
3	Aset (Rp.Ribu)	675.582	675.582	7.906.053	2.353.317	8.027.983
4	Omzet (Rp.Ribu)	712.500	705.375	14.425.452	816.192	877.800

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2025

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Konawe Utara antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada.

Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM, pelatihan manajemen ekspor, impor, dan pelatihan penggunaan teknologi. Perkembangan UKM di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara mencapai sebanyak 4.449 unit, meningkat dibanding tahun 2022.

Tabel 2.69
Pertumbuhan Jumlah UMKM
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro	1.021	1.079	1.086	2.698	3.411
2.	Usaha Kecil	1.323	1.364	1.374	939	939
3.	Usaha Menengah	133	132	132	99	99
Jumlah UMKM		2.477	2.575	2.592	3.736	4.449

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.70
Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro	1.506	1.392	1.468	4.996	6.822
2.	Usaha Kecil	2.559	912	963	1.168	1.757
3.	Usaha Menengah	457	270	282	615	1.037
Jumlah Tenaga Kerja		4.522	2.574	2.713	6.779	9.616
Angkatan Kerja		31.104	29.535	32.552	33.811	35.992
Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM		14,54	8,72	8,33	20,05	26,72

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2025

2.4.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Kabupaten Konawe Utara yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam, menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal dalam negeri (1) maupun penanam modal asing (PMA) untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.71
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

Tahun	Jumlah Investor			Nilai Investasi (Rp.Milyar)	Peningkatan nilai realisasi (Rp. Milyar)	Persentase Peningkatan (%)
	PMDN	PMA	Total			
2020	2	6	8	79.822.558.294	26.857.879.858	50,71
2021	2	6	8	756.647.610.089	676.825.051.795	847,91
2022	2	6	8	1.195.694.966.121	439.047.356.032	58,03
2023	2	6	8	1.895.410.871.545	699.715.905.424	58,52
2024	2	6	8	1.163.726.533.205	(731.684.338.340)	-38,60

Sumber : Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Investasi di Kabupaten Konawe Utara sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif meskipun jumlah investor relatif tetap, yakni terdiri dari 2 PMDN dan 6 PMA. Pada tahun 2020, realisasi investasi tercatat sebesar Rp79,82 miliar dengan peningkatan 50,71%. Tahun 2021 menjadi titik lonjakan tertinggi, dengan realisasi mencapai Rp756,64 miliar atau meningkat 847,91% dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan adanya daya tarik kuat bagi investor.

Tren positif berlanjut pada 2022 dengan nilai investasi sebesar Rp1,19 triliun (tumbuh 58,03%) dan kembali meningkat pada 2023 yang menjadi puncak investasi sebesar Rp1,89 triliun (naik 58,52%). Namun, pada 2024 investasi mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1,16 triliun atau turun 38,60%, yang diduga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan kondisi regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun demikian, capaian investasi hingga 2023 membuktikan bahwa Konawe Utara memiliki daya tarik yang kuat, sehingga ke depan diperlukan penguatan fasilitasi perizinan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP), peningkatan kepastian regulasi, serta promosi potensi daerah untuk mengembalikan dan menjaga tren investasi yang positif.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Konawe Utara telah rampung dibangun dan mulai beroperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran MPP menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Salah satu fokus utama dari MPP adalah mempermudah proses pelayanan perizinan usaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin di banyak tempat yang berbeda. Melalui pelayanan perizinan yang terpusat, sederhana, dan efisien,

MPP diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Konawe Utara. Dengan demikian, keberadaan MPP tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan investasi daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.

2.4.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

Kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan kususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, karang taruna, pemuda dan sosial, serta kader anti narkoba.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam memasyarakatkan olahraga.

Tabel 2.72
Perkembangan Olahraga
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi	14	16	16	17	17	34
2.	Jumlah Atlit yang dibina	1	4	11	15	15	34
3.	Jumlah klub olahraga	20	21	21	23	23	56
4.	Jumlah sarana olahraga	294	295	300	314	326	345

Sumber : Dispora Konawe Utara, Tahun 2025

Pada Pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 , Kabupaten Konawe utara memperolah peringkat 11, dan pada tahun 2018 peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota. Pada Tahun 2022, Kabupaten Konawe Utara berhasil menempati peringkat 2 dari 17 Kabupaten/Kota. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam membangun olahraga, yang didukung oleh sarana dan prasarana olahraga serta kesejahteraan atlet. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memberikan insentif kepada atlet yang meraih medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 hingga Rp.50.000.000,- per atlet.

2.4.3.2.14 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Konawe Utara masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Wanggudu. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari 4

(empat) publikasi; Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Statistik Daerah, dan Statistik Kesejahteraan.

Urusan statistik sektoral di Kabupaten Konawe Utara dikoordinasi oleh Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan Bapperida Kabupaten Konawe Utara, salah satunya dengan menerbitkan kompilasi produk administrasi. Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, telah diterbitkan kompilasi statistik infrastruktur wilayah Tahun 2023 dan 2024 yang telah mendapat rekomendasi dari BPS serta telah didesiminasi dan dipublikasi.

2.4.3.2.15 Persandian

Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengendalian sistem keamanan informasi merupakan pelaksanaan dari urusan persandian. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, meliputi: Sosialisasi Keamanan Informasi ; Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi; Kegiatan Forum Komunikasi Sandi Daerah; Koordinasi persandian pusat dan daerah.

2.4.3.2.16 Kebudayaan

Salah satu potensi sebagai penyangga utama wisata di Kabupaten Konawe Utara adalah potensi budaya baik yang berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Upaya pelestarian budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya melalui festival.

Tabel 2.73
Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	-	2	4	4	4
2.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1	1	1	1	1	1
3.	Situs Cagar Budaya Yang Dilindungi	4	4	4	4	4	4
4.	Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi	-	-	-	-	-	-
5.	Bagunan Cagar Budaya Yang Dilindungi	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.2.17 Perpustakaan

Urusan perpustakaan selama tahun 2019 hingga 2023 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.74
Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	769	825	219	308	574
2.	Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.286	2.291	2.291	2.291	12.127
3.	Jumlah eksamplar koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	7.573	7.624	7.624	7.642	97.015
4.	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan buku	5	6	-	-	-

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

2.4.3.2.18 Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Pada urusan Kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku dengan indikator kinerja yaitu persentase arsip statis dan dinamis yang diarsipkan dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2022 sebesar 9,88% meningkat di Tahun 2023 menjadi sebesar 10,48% persen.

2.4.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Kondisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.75
Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	39,93	39,77	39,74	39,23	37,15	39,70
2.	Produksi Perikanan (Ton)						
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15.165	15.059	15.300,49	15.265,8	15.678,28	15.463,3
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	9.397	8.819	9.439,78	10.055,04	9.529,10	9.860
	Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	1.503	1.378	1.404,91	1.378,35	1.559,04	1.604.125
3.	Nilai Hasil Perikanan (Juta Rp.)						
4.	Konsumsi Ikan (Kg/kap/thn)	49,27	49,32	46,39	50,35	48,91	48,91
5.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan						
	- Pengasapan Ikan	85	88	88	103	103	103
	- Penggaraman/Pengeringan	255	258	258	270	270	270
6.	Jumlah Unit Armada & Alat Tangkap Ikan						
	- Perahu Tanpa Motor	341	330	441	455	414	414
	- Motor Tempel	2.128	1.832	1.684	1.723	1.916	1.943
	- Kapal Motor	73	76	328	328	229	229
	- Alat tangkap pukat	360	455	837	552	699	25
	- Alat tangkap jaring	894	1030	1.099	1.523	2.573	1.121
	- Alat tangkap pancing	490	630	2.198	2.223	2.223	450
	- Alat tangkap lainnya	354	504	4.115	4.560	3.142	33
7.	Nilai Tukar Nelayan	106,09	106,12	104,93	102,45	104,92	96,98

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2025

2.4.3.3.2 Pariwisata

Pengembangan Potensi Kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2026 yang telah membagi Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) menjadi 6 (enam) wilayah KPP yaitu : KPP Taipa, KPP Pulau Labengki, KPP Wawolesea, KPP Wiwirano, KPP Oheo, dan KPP Asera.

Perkembangan Kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas dan sarana penunjang. Capaian kinerja Kebudayaan dan Pariwisata dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.76
Kondisi Pengelolaan Pariwisata
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Indikator Kinerja	Capain					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah wisatawan Mancanegara	1.790	44	88	103	148	167
2.	Jumlah wisatawan domestik	61.446	8.143	14.673	28.693	33.735	39.699
Jumlah Kunjungan (orang)		63.236	8.187	14.761	28.796	33.883	39.866
3.	Jumlah akomodasi	15	23	89	91	103	97.200
4.	Rata - rata lama tinggal (hari)	3	3	3	3	3	3
5.	Jumlah objek wisata	6	6	6	6	6	6
6.	Jumlah desa wisata	1	1	1	12	12	12

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

Prioritas Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Konawe Utara yaitu di Kawasan “Segitiga Berlian” (Taipa-Pulau Labengki-Air Panas Wawolesea). Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap mengembangkan objek wisata lainnya di Kabupaten Konawe Utara.

2.4.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, selalu berada diatas 39 persen dengan total yang bekerja di sector pertanian sebesar 34,36 dari angkatan kerja

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, kelembagaan, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Konawe Utara sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Tabel 2.77
Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No	Kinerja	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian Tanaman Pangan						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan (%)	1,73	2,51	2,52	3,29	4,21	
2	Produksi Tanaman Padi (Ton)	7.339,05	6.560,70	7.588,82	8.952,07	8.272,57	7,037
	Luas Panen (Ha)	1.999,45	1.963,44	2.155,96	2.234,94	2.344,20	2,059
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,67	3,34	3,52	4,01	3,53	34,18
3	Produksi Jagung (Ton)	14.033	3.539	2.687	4.595,20	1.078,00	4,419
	Luas Panen (Ha)	2.344		43,33	73,70	217,3	838
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,99		6,0	6,24	4,96	52,73
B	Hortikultura						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Hortikultura (%)	6,65	0,12	0,14	0,48	0,64	
2	Produksi Bawang Merah (Ton)	52.7	152	164,5	97,5	60	1.735,00
	Luas Panen (Ha)			22	13	8	
	Produktivitas (Ton/Ha)			7,47	7,5	7,5	108,43
3	Produksi Cabai (Ton)	421,9	760	1.040	677,5	713,5	7.040
	Luas Panen (Ha)			44	66	38	
	Produktivitas (Ton/Ha)			23,63	10,27	18,78	385,92
C	Peternakan						
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan (%)	8,18	2,32	2,30	2,36	3,04	
2	Produksi Daging Sapi (Kg)	89.540	91.675	50.365	84.300	169.984	94,103
	Produksi Daging Kambing (Kg)	2.343	2.743	2.530	2.960	1.075	-
	Produksi Daging Ayam (Kg)	76.670	78.871	178.123	102.329	163.727	103,166
	Produksi Daging Itik (Kg)	-	-	1.221	-	7.300	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.3.4 Perkebunan

Sub Sektor perkebunan adalah sub sektor andalan Kabupaten Konawe Utara. Laju pertumbuhan sub sektor perkebunan pada PDRB tahun 2023 sebesar 8,14 persen atau meningkat dari tahun 2020 sebesar 8,19 persen. Komoditas utama yang diusahakan antara lain yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, lada dan cengkeh. Tabel berikut menggambarkan luas tanaman menghasilkan dan produksi hasil beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.78
Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019–2024

No.	Komoditas	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Dalam	Luas Panen (Ha)	2,426.5	2,426.5	2.654	2.623,50	2.623,5	3032,575
		Produksi (Ton)	1,589.13	961.35	1.698,8	1.836,15		754
		Produktivitas (Ton/Ha)	65.49	39.62	0,62	0,70		
2	Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	18.006,1	18,006.1	23.293,3	23.243,70		24311,153
		Produksi (Ton)	593.75	60.230	125.153,8	188.985,67		198.424
		Produktivitas (Ton/Ha)	3.30	0.33	5,37	8,13		
3	Kopi	Luas Panen (Ha)	511.5	511,5	547	495		373
		Produksi (Ton)	341.46	251.54	351,05	289,1		215.404
		Produktivitas (Ton/Ha)	66.76	49.18	0,64	0,58		
4	Kakao	Luas Panen (Ha)	3,988.5	3,988.5	3.352	3.101,50		1641
		Produksi (Ton)	1,418.32	585.70	671,1	424,4		283.919
		Produktivitas (Ton/Ha)	35.56	14.68	0,20	0,14		

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2019 s.d 2024

2.4.3.3.5 Kehutanan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyiapkan rencanaa peningkatan pengelolaan perhutanan sosial. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan

Hutan Tanaman Rakyat oleh kab/kota sesuai dengan PP 23 Tahun 2022 Pasal 26 ayat 7. Hutan Tanaman Rakyat di Konawe Utara seluas ±950 Ha yang berlokasi di Desa Awila, Molawe, Molawe Puncak Kec. Molawe dan Desa Banggarema Kec. Andowia.

2.4.3.3.6 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenganan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energy adalah dengan melakukan kajian. Kajian Geothermal di Air Panas Wawolesea menunjukkan bahwa energy panas bumi di Wawolesea belum dapat dijadikan alternative energy dikarenakan standar panas minimal energy panas bumi seharusnya 90°C sedangkan panas bumi di Wawolesea adalah 75°C. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan energy di Kabupaten Konawe Utara.

2.4.3.3.7 Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Konawe Utara diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian daerah, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD. Sampai dengan akhir tahun 2025 di Kabupaten Konawe Utama terdapat 13 pasar yang kondisinya sudah baik dan 5 pasar kondisi sedang, data tersebut disajikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No.	Nama Pasar	Luas Tanah (Ha)	Status	Kondisi	Jumlah Kios	Jumlah Los Kering (Unit)	Jumlah Bos Basah (Unit)	Tahun Rehab
1	Pasar Sawa	3,241	Aktif	Sedang	20	4	1	2017
2	Pasar Motui	1,341	Aktif	Baik	10	6	3	2022
3	Pasar Wawoluri	2.729	Aktif	Sedang	-	5	0	2007
4	Pasar Lembo	9,944	Aktif	Baik	12	4	0	
5	Pasar Tinobu	5,7	Aktif	Baik	32	6	2	2016
6	Pasar Wawolesea	-	Aktif	Baik	36	0	0	2019
7	Pasar Morombo	-	Aktif	Baik	-	2	0	

No.	Nama Pasar	Luas Tanah (Ha)	Status	Kondisi	Jumlah Kios	Jumlah Los Kering (Unit)	Jumlah Bos Basah (Unit)	Tahun Rehab
8	Pasar Molawe	5,61	Aktif	Baik	9	25	0	2019
9	Pasar Tapunggaeya	4.810	Aktif	Sedang	-	3	0	1997
10	Pasar Asera	5	Aktif	Baik	20	8	2	2022
11	Pasar Lahimbua	75,663	Aktif	Baik	96	12	2	2013
12	Pasar Kuliner	8	Aktif	Baik	16	0	0	2019
13	Pasar Laronanga	2.700	Aktif	Baik	-	4	1	
14	Pasar Todoloiyo	5	Aktif	Sedang	36	3	0	2019
15	Pasar Langgikima	18.720	Aktif	Baik	30	15	1	2021
16	Pasar Molore	2.400	Aktif	Baik	-	2	0	2009
17	Pasar Lamonae	10	Aktif	Baik	40	2	0	2016
18	Pasar Landawe	-	Tidak Aktif	Baik	12	3	0	2019
Jumlah					369	104	12	

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara, 2025

2.4.3.3.8 Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif kecil, hanya 1,03 persen tahun 2023. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Konawe Utara diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Jumlah Industri Kecil Menengah
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Besar	3	3	3	3	3	
2	Industri Menengah	11	15	15	15	37	-
3	Industri Kecil	257	276	382	247	258	341
4	Jumlah IKM	271	294	400	262	273	
5	Jumlah IKM yang difasilitasi	38	42	48	52	85	

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara 2025

Tabel 2.81
Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerjacdi Kabupaten Konawe Utara tahun 2024

No	Jenis Usaha Indusri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Produksi (unit)	Nilai (Rp.000)
1.	Makanan dan Minuman	216	280	70.704.050	921.800
2.	Kayu dan hasil hutan	194	277	632,905	883.022
3.	Kertas dan barang dari kertas	1	3	400	80.000
4.	Kimia dan barang dari karet	-	-	-	-
5.	Galian bukan logam	48	147	134.504.834	1.824.150
6.	Logam dasar besi dan baja	3	5	110	103.300
7.	Furnitur	60	107	1.604.050.000	480.281
8.	Pengolahan lainnya	1	3	-	26.400
9.	Lainnya	54	72	17.052.150	828.600
Jumlah		577	894	2.459.216.992	5.147.554

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2025

2.4.3.3.9 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar.

Tabel 2.82
Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah KK	Jiwa		Jumlah	Asal Daerah
		Laki-Laki	Perempuan		
2016	75	158	125	287	Jawa, Lampung, Banten
2017	25	54	59	113	Jawa, NTB
2019	15	15	17	32	Jawa
2020	14	16	18	34	Jawa
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 4 (empat) wilayah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), yaitu UPT Padalere, UPT Puuhialu, UPT Puupi, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu. Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada areal kawasan transmigrasi dan permukiman penduduk di Kabupaten Konawe Utara diarahkan untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

2.4.3.4 Unsur Pendukung

2.4.3.4.1 Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Setda Kabupaten Konawe Utara terdiri atas 12 Bagian.

Tabel 2.83
Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	B	B	B	B	B
2.	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)	Nilai/ Predikat	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
3.	Jumlah produk hukum : - Peraturan Daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati	Jumlah	7 35 445	6 81 436	4 52 852	12 50 504	8 99 596
4.	Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemda konawe utara dengan pemerintah daerah lainnya	Kegiatan	143	274	192	188	196
5.	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	%	100	100	100	100	100
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Predikat	-	CC (50,04)	CC (50,08)	CC (51,04)	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, 2025

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan nilai B meningkat dari tahun 2017 dengan predikat C. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil, peningkatan keterkaitan antara program,/kegiatan dan sasaran, selanjutnya mengurutkan/cascading semua indicator kinerja dimulai dari dokumen perencanaan jangka menengah sampai dengan perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, selanjutnya akan terus ditingkatkan di tahun - tahun mendatang.

2.4.3.4.2 Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.4.3.5 Unsur Penunjang

2.4.3.5.1 Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pusat juga dilaksanakan.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-planning terintegrasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Gambar 2.51
Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara

Selain itu, tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Tabel 2.84
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanan yang telah ditetapkan dengan perkada tepat waktu	2	2	3	3	3
2	Kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD	62,48	60,74	100	100	100
3	Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh bidang litbang Bapperida	3	3	1	8	7
4	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	14,11	18,12

Sumber : Bapperida Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

2.4.3.5.2 Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang - undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah.

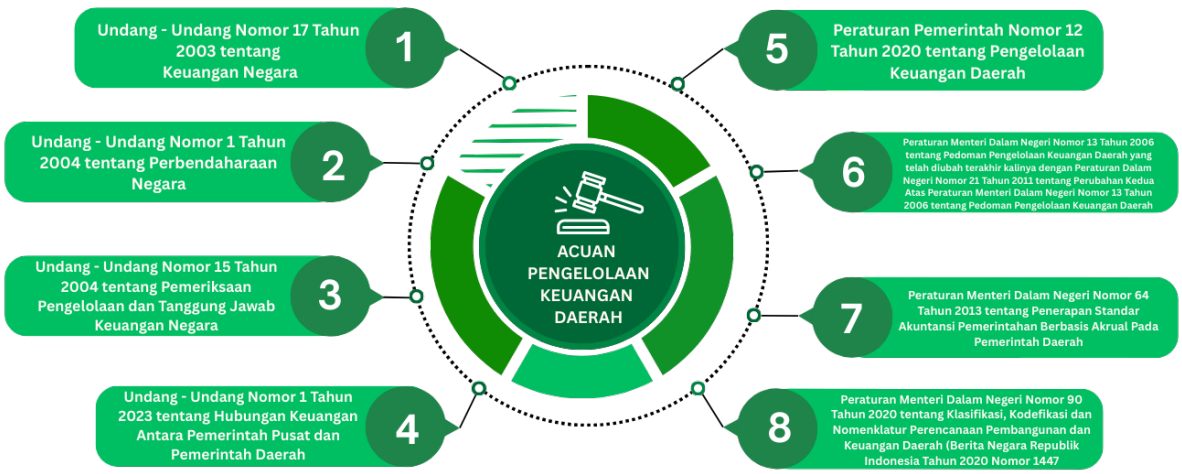

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber

dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Sultra) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Namun demikian, berbagai permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi yaitu, belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah; masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah; belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan secara online; dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun adalah permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan teknologi informasi.

Tabel 2.85
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2019–2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat kemandirian keuangan daerah (persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah)	2,00%	1,49%	1,79%	2,85%	3,01%	3,01%

Sumber : BPKAD Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel diatas memperlihatkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Konawe Utara. Kondisi tersebut, perlu didukung dengan kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Beberapa upaya strategis dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Gambar 2.52
Upaya Strategis Menuju Good Governance dalam
Pengelolaan Keuangan & Barang Daerah

2.4.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 berjumlah 4.130 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.86
Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024

No.	Golongan	2021	2022	2023	2024
1	Golongan I	6	5	4	3
2	Golongan II	345	276	251	202
2	Golongan III	1.937	1.915	2.134	1.799
4	Golongan IV	440	483	543	617
5	Golongan V - PPPK	-	-	-	15
6	Golongan VII - PPPK	-	-	-	481
7	Golongan IX - PPPK	-	-	-	901
8	Golongan X - PPPK	-	-	-	112
Jumlah		2.621	2.728	2.679	4.130

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2025

Tabel 2.87
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024

No.	Golongan	2021	2022	2023	2024
1	Fungsional Tertentu	1.055	1.029	1.177	1.426
2	Fungsional Umum	1.034	986	1.179	648
3	Fungsional PPPK	-	-	-	901
4	Struktural				
	Eselon IV	417	448	354	354
	Eselon III	189	174	185	185
	Eselon II	33	31	37	37
Jumlah		2.496	2.621	2.679	2.679

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2025

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Konawe Utara diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional yang dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis.

Tabel 2.88
Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya	154	162	165	165	173
2.	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	371	388	389	389	389

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2025

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Konawe Utara belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga tidak dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri dan belum adanya pasal di dalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklatpim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural. Yang menjadi perhatian kedepannya yaitu perlu pengoptimalan sistem manajemen SDM aparatur dengan menggunakan teknologi informasi sehingga program kegiatan dalam rangka peningkatan aparatur PNS dapat terkontrol dan terencana secara sistematis.

2.4.3.6 Unsur Pengawasan

2.4.3.6.1 Pengawasan (Inspektorat Daerah)

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.89
Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	TLHP Internal dan Eksternal	
		Target (%)	Realisasi (%)
1.	2020	100,00	81,02
2.	2021	100,00	80,38
3.	2022	100,00	86,00
4.	2023	100,00	86,49
5.	2024	100,00	81,13

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2019 - 2023 dengan realisasi melebihi target yang telah direncanakan. Rata rata capaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2019 - 2023 adalah sebesar 86,00%.

Untuk memaksimalkan kinerja APIP maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur Inspektorat Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2022 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 35 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90
Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	1	1	-
	Sekretaris	1	1	-
	Inspektur Pembantu	4	4	-
	Kasubag	2	2	-
	Staf	10	20	10
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	14	65	51
	P2UPD	3	50	47
	Auditor Kepegawaian	-	-	-
3	Fungsional Umum	9	12	3
Jumlah		39	155	38
Status Leveling APIP		3		

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2024

2.4.3.7 Unsur Kewilayahan

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 (tiga belas) wilayah kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh Bupati.

Gambar 2.53
Fungsi Utama Camat dalam unsur Kewilayahan

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Gambar 2. 54
Ruang lingkup Keuangan Daerah

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

2.5.1 Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terutama penyesuaian akibat kondisi perekonomian nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2026 s.d tahun 2030) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri. Gambaran umum realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 disajikan dalam gambar 2.55 berikut.

Gambar 2.55
Gambaran Umum Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

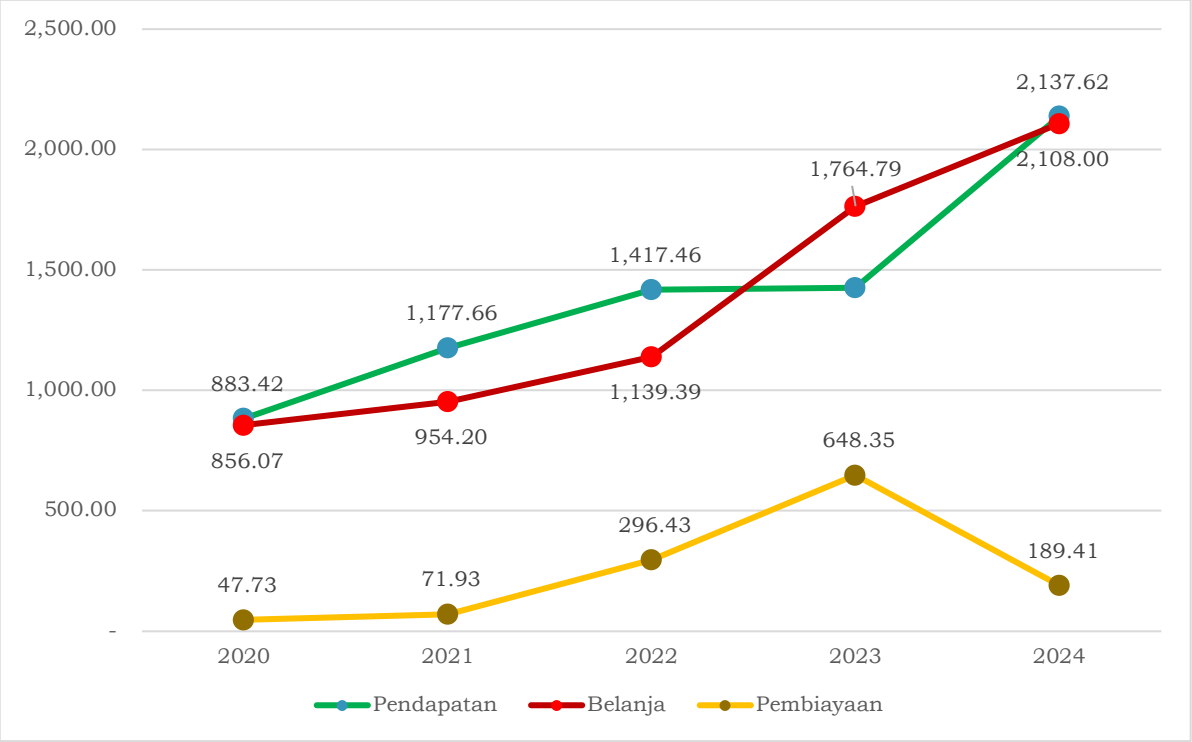

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan dari sebesar 883,42 Miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 2.137,62 Miliar rupiah pada tahun

2024. Selama kurun waktu tahun 2020–2024 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 20,36%. Pertumbuhan pendapatan daerah berfluktuasi, tertinggi pada tahun 2024 sebesar 49,75% dan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 2,34%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah fluktuatif dengan rata-rata sebesar 33,85%. Pertumbuhan pendapatan transfer fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 20,81%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,26%. Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2020–2024 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	29,907,922,318	35,501,844,525	42,527,307,706	48,767,492,067	74,420,246,465
	B. Pendapatan Transfer	834,530,366,675	1,124,824,353,454	1,320,815,504,720	1,377,759,665,944	2,062,294,741,359
	C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	18,983,668,173	17,344,780,877	54,117,393,050	909,843,249	906,608,307
	JUMLAH PENDAPATAN	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	486,384,357,129	603,124,803,083	669,787,208,708	888,018,640,239	1,086,467,642,565
	B. Belanja Modal	132,001,111,279	166,302,614,638	300,310,749,645	652,675,409,964	776,507,589,224
	C. Belanja Tak Terduga	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		20,352,802,942
	D. Belanja Transfer	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	224,091,504,538	224,673,422,364
	JUMLAH BELANJA	856,065,731,732	954,203,238,124	1,139,393,903,553	1,540,694,050,203	2,108,001,457,095
	SURPLUS/DEFISIT	27,356,225,434	223,467,740,732	278,066,301,923	-113,257,048,943	29,620,139,036
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	50,731,973,809	75,176,575,746	302,934,535,728	695,226,463,150	310,998,277,498
	B. Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000	3,250,000,000	6,500,000,000	46,879,632,171	121,581,307,554
	PEMBIAYAAN NETTO	47,731,973,809	71,926,575,746	296,434,535,728	648,346,830,979	189,416,969,944
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	75,088,199,243	295,394,316,478	574,500,837,651	535,089,782,036	219,037,108,980

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, diolah

Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 97,94% pada tahun 2016 menjadi 94,47% pada tahun 2020. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari sebesar 2,02% pada tahun 2020 menjadi 3,48% pada tahun 2024. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 3,71% pada tahun 2020 menjadi 0,04% pada tahun 2024. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.56
Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Persen)

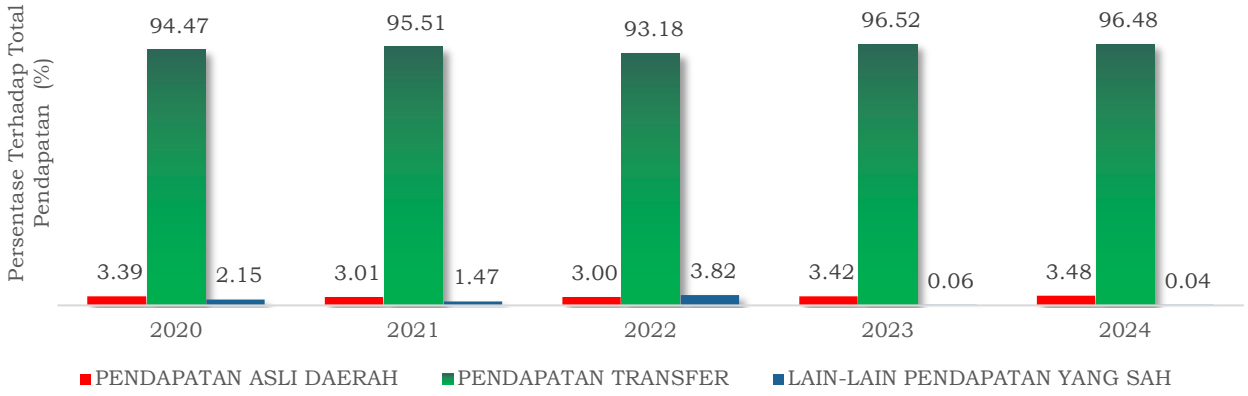

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, diolah

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Utara cukup fluktuatif serta menunjukkan peningkatan dari sebesar 29,91 Miliar pada tahun 2020 menjadi 74,42 Miliar rupiah pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.57
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

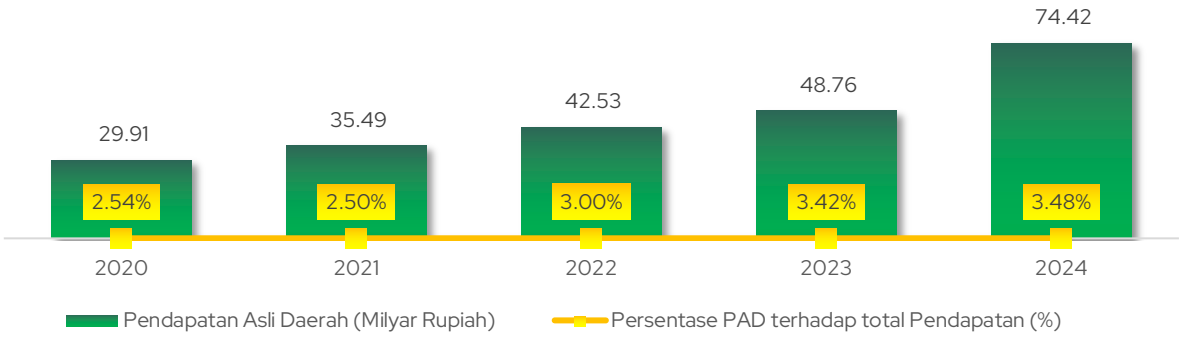

Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dana perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dan dana penyesuaian), dan dana transfer pemerintah provinsi. Pencapaian dana tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2020–2024 perkembangan dana transfer cenderung meningkat dari sebesar 852,78 Miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 2.062,29 Miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam mengawal proses dan transparansi alokasi Dana

Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan berdampak langsung dalam peningkatan pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Gambar 2.58
Perkembangan Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

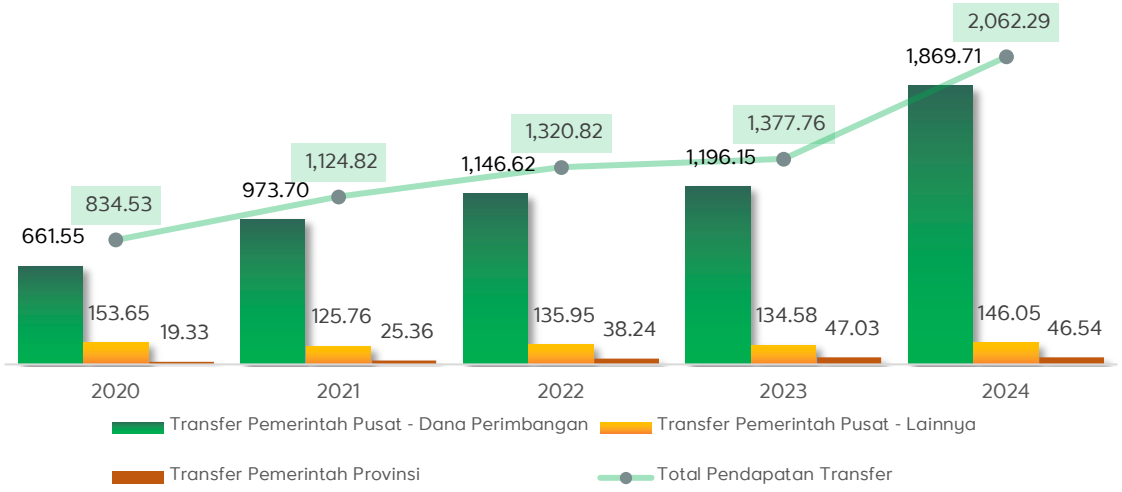

Lain-lain pendapatan daerah mencakup: pendapatan hibah; pendapatan dana desa; pendapatan dana darurat; dan pendapatan lainnya. Pencapaian target lain-lain pendapatan daerah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari hibah, sehingga sulit dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2020–2024 realisasi lain-lain pendapatan daerah menunjukkan fluktuasi dan penurunan pada dua tahun terakhir. Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar berikut.

Gambar 2.59
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

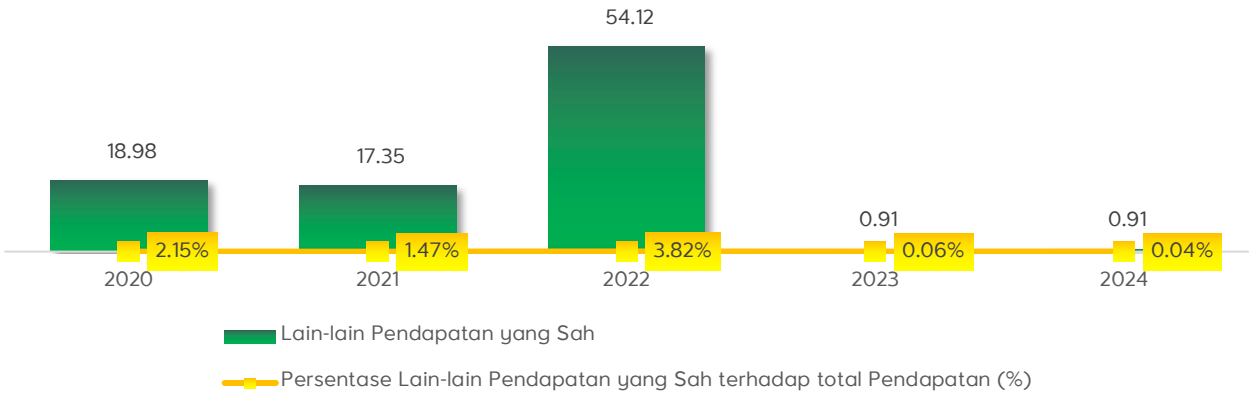

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah tercantum pada tabel 2.92 berikut ini.

Tabel 2.92
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara_Tahun 2020–2024 (Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29,907,922,318	35,501,844,525	42,527,307,706	48,767,492,067	74,420,246,465
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	11,953,787,565	5,749,698,315	8,192,725,540	10,695,704,107	11,578,106,644
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1,849,981,933	1,090,383,027	677,444,846	932,429,900	948,181,120
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,548,358,303	5,273,876,765	5,907,800,450	6,914,292,822	11,947,282,906
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	11,555,794,517	23,387,886,418	27,749,336,870	30,225,065,238	49,946,675,795
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	834,530,366,675	1,124,824,353,454	1,320,815,504,720	1,377,759,665,944	2,062,294,741,359
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	661,548,666,999	948,841,247,658	1,146,619,788,874	1,196,150,957,398	1,869,705,331,847
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	121,145,641,351	396,118,246,229	602,369,530,161	634,300,423,234	1,192,326,711,000
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	428,934,559,000	421,367,680,000	420,867,930,000	439,043,488,000	498,052,424,077
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	111,468,466,648	131,355,321,429	123,382,328,713	122,807,046,164	179,326,196,770
04.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	153,651,180,000	150,623,782,000	135,951,542,100	134,581,242,000	146,051,748,464
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus					
4.2.02.02	Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD)	153,651,180,000	150,623,782,000	135,951,542,100	134,581,242,000	146,051,748,464
04.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	19,330,519,676	25,359,323,796	38,244,173,746	47,027,466,546	46,537,661,048
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19,330,519,676	25,359,323,796	38,244,173,746	47,027,466,546	46,537,661,048
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18,983,668,173	17,344,780,877	54,117,393,050	909,843,249	906,608,307
04.03.01	Pendapatan Hibah	18,483,668,173	1,536,864,513	54,117,393,050	909,843,249	906,608,307
04.03.02	Pendapatan Dana Darurat					
04.03.03	Pendapatan Lainnya	500,000,000	15,807,916,364			
	Jumlah	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah, membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, Kondisi demikian tentu saja akan sangat menyulitkan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.60
Kerangka Strategis Peningkatan PAD Kabupaten Konawe Utara

2.5.1.2 Ruang dan Kapasitas Fiskal Daerah

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (bersifat wajib) dan belanja yang mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU Belanja Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya. Saat ini, ruang fiskal daerah sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Semakin besar Ruang Fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri.

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya Ruang Fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Stephen S. Heller (*IMF Policy Discussion Paper, 2005*) mengemukakan bahwa Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

- Data Peta Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 menunjukkan bahwa Pendapatan daerah sebesar Rp. 2,137,621,596,131 dimana proporsi pajak daerah sebesar 0,54%, retribusi daerah 0,04% dan proporsi terbesar bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 94,30%.

Tabel 2.93
Pendapatan dan proporsi unsur Pendapatan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

Catatan	Uraian	Anggaran	% dari Total Pendapatan
	PENDAPATAN DAERAH		
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	11,578,106,644	0.54%
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	948,181,120	0.04%
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,947,282,906	0.56%
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	49,946,675,795	2.34%
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	1,192,326,711,000	55.78%
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	498,052,424,077	23.30%
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	179,326,196,770	8.39%
4.2.02.02	Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD)	146,051,748,464	6.83%
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46,537,661,048	2.18%
04.03.01	Pendapatan Hibah	906,608,307	0.04%
	Jumlah Pendapatan	2,137,621,596,131	100%

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, 2025

- Belanja dari pendapatan transfer yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp. 751,105,618,642.10 dengan proporsi terbesar Dana Alokasi Umum yang Penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp. 147.001.282.000, Dana Desa sebesar Rp. 333,468,505,077.10 serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 105,726,114,949.00. Adapun belanja tertentu secara total sebesar Rp. 812.653.581.139 dengan penggunaan diantaranya untuk anggaran pendidikan

sebesar 20% serta Belanja Gaji dan Tunjangan ASN & PPPK. Secara rinci data belanja disajikan dalam tabel 2.94 berikut.

Tabel 2.94
Uraian Pendapatan Yang Penggunaannya Telah Ditentukan
dan Belanja Tertentu Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran
	JUMLAH PENDAPATAN	2,137,621,596,131.00
	PENDAPATAN YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN	751,105,618,642.10
1	BLUD dan Kapitasi JKN	18,426,570,747.00
2	Dana Alokasi Umum yang Penggunaannya telah ditentukan	147,001,282,000.00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	105,726,114,949.00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73,600,081,821.00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	26,345,403,000.00
6	Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	333,468,505,077.10
7	10 % DBH Pajak Provinsi - PKB	46,537,661,048.00
	BELANJA TERTENTU	832,410,384,577.86
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK, TPG, TKG dan Tamsil ASN dan PPPK	355,140,363,407.00
2	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13,239,521,518.00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	261,149,699.00
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2,682,912,800.00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi untuk ASN dan PPPK	7,713,894,847.00
6	Belanja Bidang Pendidikan (20%)	427,524,319,226.20
7	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi BPJS Kesehatan	13,181,804,000.00
8	0,5% Belanja Kegiatan Pengawasan	10,688,107,980.66
9	Belanja Kegiatan Diklat	1,596,375,000.00
10	Bantuan Hibah partai Politik	381,936,100.00
	Jumlah Belanja	1,583,516,003,219.96
	Kapasitas Fiskal	554,105,592,911.05

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.94 dapat diketahui bahwa Ruang fiskal Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 sebesar Rp. 554,105,592,911.05. besaran nilai yang dapat secara leluasa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten dan kota. Pada pasal 1 butir 1 Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan

daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Gambar 2.61
Fungsi Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Selanjutnya pada Pasal (6) Butir (1) PMK Nomor 84 Tahun 2023, Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

$KFD_{Kabupaten/Kota-i}$ = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

$$\mathbf{RKFD_{Kabupaten/Kota-i}} = \frac{\mathbf{KFD_{Kabupaten/Kota-i}}}{\mathbf{Belanja\ Pegawai_{Kabupaten/Kota-i}}}$$

Keterangan :

- $KFD_{Kabupaten/Kota-i}$: Kapasitas Fiskal suatu Kabupaten/Kota
- $RKFD_{Kabupaten/Kota-i}$: Rasio Kapasitas Fiskal suatu Kabupaten/Kota
- Pendapatan : Jumlah pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Penerimaan pembiayaan tertentu : berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan : berupa dana otonomi khusus.
- Belanja tertentu terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja bunga; c. belanja bagi hasil; dan d. alokasi dana desa.
- Pengeluaran pembiayaan tertentu berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota hasil formulasi di atas, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasaitas Fiskal Daerah sebagai berikut :

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 0,947	Sangat Rendah
0,947 ≤ RKFD < 1,203	Rendah
1,203 ≤ RKFD < 1,459	Sedang
1,459 ≤ RKFD < 1,715	Tinggi
1,715 ≤ RKFD	Sangat Tinggi

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementrian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Konawe Utara dalam empat tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dan cenderung meningkat.

Pada tahun 2020, nilai RKDF Kabupaten Konawe Utara termasuk sangat rendah sebesar 0,637. Pada Tahun 2021 hingga 2022 terjadi lonjakan hingga mencapai nilai 2,189 dengan kategori sangat tinggi. Pada Tahun 2023, nilai RKFD Kabupaten Konawe Utara sedikit menurun menjadi 2,036 namun masih dalam kategori Sangat Tinggi namun kembali

meningkat menjadi 2.284 pada tahun 2024. Adapun gambaran Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2029 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.62
Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Kab. Konawe Utara
Tahun 2020–2024

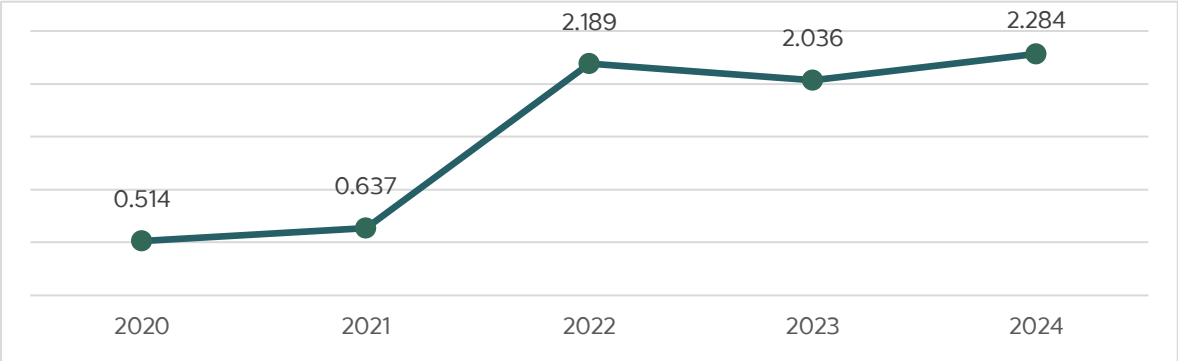

2.5.1.3 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu jangka waktu tertentu. Analisis terhadap Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan kemampuan aset daerah dalam penyediaan dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif.

Adapun gambaran mengenai posisi Neraca Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.95
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No.	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	101,285,434,737.44	319,500,458,647.62	578,447,047,312.88	326,416,019,875.93	232,533,378,162.32
	B. Investasi Jangka Panjang	17,298,797,402	20,436,260,234	24,699,976,504.00	29,127,500,000.00	35,734,890,220.00
	C. Aset Tetap	1,264,247,141,595.41	1,323,555,621,699	1,481,272,085,690.94	1,935,600,650,509.69	2,481,899,506,022.71
	D. Aset Lainnya	50,335,268,689.67	47,546,555,837.20	77,876,160,925.87	766,725,314,127.96	143,596,931,377.62
	JUMLAH ASET	1,433,166,642,424.52	1,711,038,896,417.33	216,229,527,043,369.00	3,057,869,484,513.58	2,893,764,705,782.65
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	4,378,390,557	1,591,344,809	1,417,205,187.00	53,932,193,687.10	37,743,816,179.37
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	-	7,540,219,250.00	100,696,144,110.00	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	4,378,390,557	1,591,344,809.00	8,957,424,437.00	154,628,337,797.10	37,743,816,179.37
3	EKUITAS					
	Ekuitas	1,428,787,711,867.52	1,709,447,551,608.33	2,153,337,845,996.69	2,903,241,146,716.48	2,856,020,889,603.28
	JUMLAH EKUITAS	1,428,787,711,867.52	1,709,447,551,608.33	2,153,337,845,996.69	2,903,241,146,716.48	2,856,020,889,603.28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,433,166,642,424.52	1,711,038,896,417.33	2,162,295,270,433.69	3,057,869,484,513.58	2,893,764,705,782.65

Sumber: LKPD Kab. Konawe Utara Tahun 2020 – 2024 (dianalisis)

** : Angka Target*

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari; (i) aset lancer, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Konawe Utara memiliki aset senilai Rp. 2,893,764,705,782.65 dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap yakni Rp. 2,481,899,506,022.71 Sedangkan nilai pertumbuhan aset selama 2020–2024 mencapai 18,88 persen pertahun.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Pertumbuhan rata-rata Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 memiliki perubahan yang cukup fluktuatif yaitu sebesar 56,04 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Kas Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.321,73 persen, diikuti oleh komponen Kas di Bendahara Dana BOS sebesar 4.472,38 persen dan Persediaan sebesar 775,21 persen.

Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, memberikan sumbangan dalam Neraca Aset Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 19,90 persen pertahun. Pada tahun 2020, investasi jangka panjang baru sebesar Rp. 17,298,797,402 dan tahun 2024 mencapai Rp. 35,734,890,220.00. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh komponen investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah.

Pertumbuhan rata-rata Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020–2024 memiliki kenaikan yang cukup besar setiap tahun yaitu sebesar 18,80 persen. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan pertumbuhan sebesar 21,40 persen. Kemudian diikuti dengan komponen Tanah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,54 persen dan komponen Peralatan dan Mesin sebesar 14,22 persen.

Pencatatan untuk Aset Lainnya pada kurun waktu 2020–2024 juga mengalami peningkatan seperti Aset Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 215,38 persen yang berasal dari komponen Aset Lainnya, lalu diikuti oleh komponen Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 900,23 persen.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 37,743,816,179.37 lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar 154,628,337,797.10 yang berasal dari Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban jangka pendek yang diharapakan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan tumbuh rata-rata 58,58 persen per tahun. Peningkatan Utang Jangka Pendek ini didorong adanya peningkatan utang jangka pendek lainnya yang sebesar Rp 607,114,085.00, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 291,877,216.73 dan Utang Beban sebesar Rp. 607,114,085.00.

Pertumbuhan Kewajiban hanya terjadi pada Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang tidak ada karena Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat atapun Utang Jangka Panjang lainnya.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi; (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana

cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu dimasa datang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Konawe Utara tahun 2020–2024 menunjukkan angka yang positif dengan dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,70 persen per tahun.

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan *Quick Ratio*. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar digunakan untuk melihat Kabupaten Konawe Utara dalam menyelesaikan hutang jangka pendeknya, dimana semakin besar rasio yang diperoleh, maka semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Sedangkan *Quick Ratio* adalah aset lancer dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020–2024 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 8,70 persen setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Konawe Utara sangat liquid dengan kemampuan pengembalian terhadap utang lancar yang sangat tinggi pada tahun 2020–2024. Jika dicermati terlihat aktiva lancar selama empat tahun berturut-turut naik dan rasio lancar juga menunjukkan kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan pada aktiva lancar diikuti pula dengan kenaikan kewajiban jangka pendek yang lebih besar persentasenya yaitu kewajiban utang kepada pihak ketiga. Keterangan lebih jelas dapat lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Rasio lancar (*current ratio*)	2,67	5,41	8,79	17,93	17,46	8,70
2.	Rasio quick (*quick ratio*)	2,54	4,77	7,86	16,98	16,73	8,04

Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (dianalisis)

Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar, karena quick ratio telah mempertimbangkan persediaan didalam hitungannya. Berdasarkan tabel diatas nilai quick ratio neraca keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2020–2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel 2.97
Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024

No.	Rasio Solvabilitas	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Rasio Kewajiban terhadap Aset	0.0031	0.0009	0.0000	0.0506	0.0130	0.014
2.	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	0.0031	0.0009	0.0042	0.0533	0.0132	0.015

Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (dianalisis)

Berdasar hasil perhitungan pada tabel rasio solvabilitas diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset pada tahun 2020 sebesar 0,0031 dan pada tahun 2024 sebesar 0,0130. Semakin besar nilai rasio kewajiban terhadap aset, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara selama 4 (empat) tahun cukup kuat untuk membayar jika pemerintah melakukan pinjaman ke kreditor dan tingkat kemampuan membayar tersebut cenderung stabil dengan laju pertumbuhan 0,006 persen per tahun.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Nilai rasio kewajiban terhadap ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar 0,0031 dan pada tahun 2024 sebesar 0,0132. Semakin kecil nilai tersebut, maka semakin baik pula rasio kewajiban terhadap ekuitas kerena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

2.5.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

2.5.2.1 Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Akan tetapi mulai Tahun 2022, klasifikasi belanja daerah diubah menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk dikeluarkan, antara lain Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek dan wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Adapun rinciannya adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa termasuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Operasi mencangkup Belanja Pegawai (termasuk Gaji dan Tunjangan), Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 66,16% pada Tahun 2022 sejak diberlakukannya kebijakan pembayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai (TPP) oleh ASN Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan akan berlanjut hingga Tahun 2023 dan Tahun 2024;

3. Belanja Operasi berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
5. Efisiensi Belanja Belanja Barang dan Jasa untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisiensikan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
6. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
   - Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
   - Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum. Dana Alokasi Umum diatur penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya.
   - Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/ prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, meningkatkan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
   - Dana Alokasi Khusus Non Fisik digunakan untuk Kesehatan dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas, dan dana BOS untuk Sekolah.
7. Belanja bantuan sosial difokuskan dalam upaya mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Konawe Utara dengan melakukan intervensi terpadu lintas sektor dalam berbagai aspek, seperti bantuan langsung tunai, bantuan sembako, pembangunan rumah, serta sanitasi dan air bersih.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020–2024 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 856,07 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar 2.108,00 Miliar pada tahun 2024. Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci tercantum pada gambar 2.63 berikut.

Gambar 2.63
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

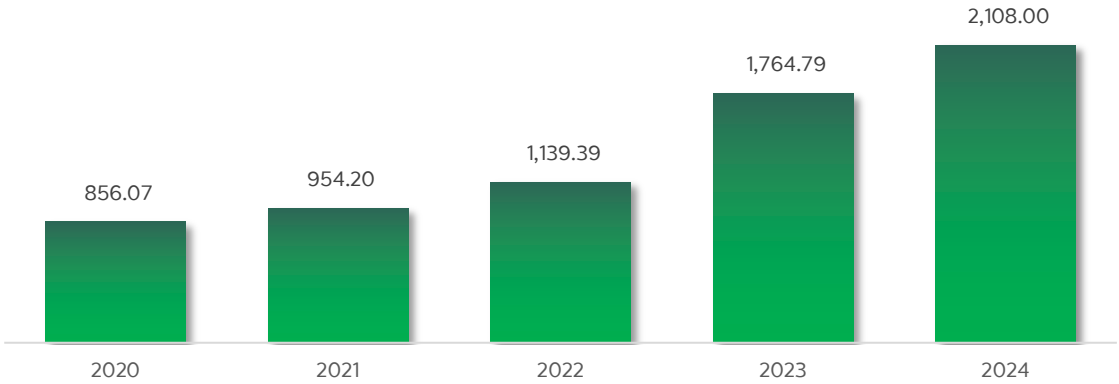

Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara memiliki komposisi terbesar pada belanja operasi dengan proporsi sebesar 56,82% pada tahun 2020 dengan kecenderungan menurun menjadi 51,54% pada tahun 2024. Selanjutnya adalah belanja modal dengan proporsi cenderung meningkat dari sebesar 15,42% pada tahun 2020 menjadi 36,84% pada tahun 2024. Kemudian belanja transfer dengan kecenderungan menurun dari sebesar 21,15% pada tahun 2020 menjadi 10,56% pada tahun 2024. Peningkatan belanja modal setiap tahunnya menunjukkan bahwa arah pembangunan dan pendanaan telah mengalami perbaikan dan lebih berkualitas dengan meningkatkan belanja sektor infrastruktur pelayanan publik. Disisi lain menunjukkan bahwa efisiensi sektor belanja operasi telah dilakukan dengan mengurangi belanja-belanja penunjang, belanja Barang dan Jasa untuk kegiatan pemerintahan. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Konawe Utara tercantum pada gambar 2.64 berikut.

Gambar 2.64
Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (persen)

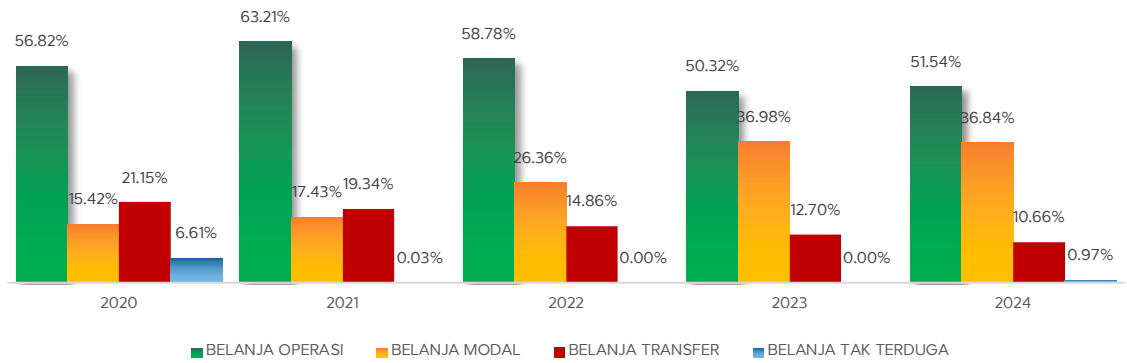

Gambar 2.65
Realisasi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

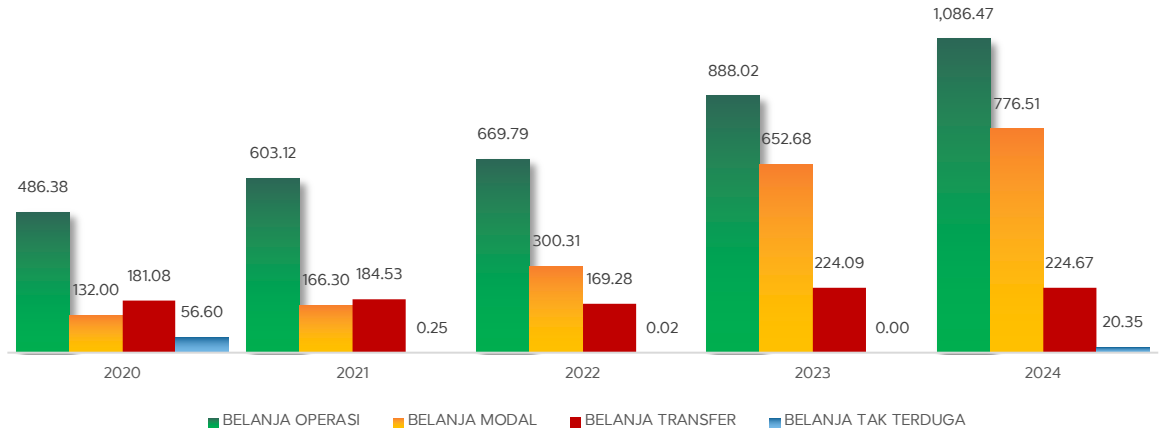

Beberapa permasalahan yang terkait dengan belanja daerah antara lain Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami perencanaan belanja, terutama pada penyesuaian belanja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terkendala pada saat pencairan dana. Selain itu, Kegiatan pengadaan barang jasa dan modal yang dilakukan melalui mekanisme lelang dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan sehingga penyerapan belanja daerah menumpuk di akhir tahun, serta adanya peraturan-peraturan baru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja, sehingga muncul kendala pada saat pencairan dana.

Perincian belanja daerah Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2020–2024 tercantum pada tabel 2.98 berikut ini.

Tabel 2.98
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PENDAPATAN	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131
5.01	BELANJA OPERASI	486,384,357,129	603,124,803,083	669,787,208,708	888,018,640,239	1,086,467,642,565
05.01.01	Belanja Pegawai	198,598,939,688	258,171,508,987	267,915,581,871	280,984,263,807	355,140,363,407
05.01.02	Belanja Barang dan jasa	217,925,323,491	333,404,307,996	385,852,612,472	550,742,323,100	639,319,257,295
05.01.03	Belanja Bunga			2,728,228,515	3,959,618,032	4,046,032,653
05.01.04	Belanja Subsidi					
05.01.05	Belanja Hibah	58,249,225,950	11,548,986,100	11,692,935,850	52,332,435,300	86,645,103,210
05.01.06	Bantuan Sosial	11,610,868,000		1,597,850,000		1,316,886,000
05.01.07	Belanja Bantuan keuangan					
5.02	BELANJA MODAL	132,001,111,279	166,302,614,638	300,310,749,645	652,675,409,964	776,507,589,224
	Belanja Modal	132,001,111,279	166,302,614,638	300,310,749,645	652,675,409,964	776,507,589,224
05.02.01	Belanja Modal Tanah		1,890,266,950	8,900,258,850	25,787,194,522	14,796,757,934
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		62,667,311,493	37,806,351,477	81,570,412,199	161,816,475,516
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		39,472,575,550	54,144,425,217	121,207,413,068	228,405,672,385
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		58,833,465,410	186,918,919,500	403,341,075,025	346,123,000,447
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3,438,995,235	12,540,794,601	19,825,210,150	3,221,269,500
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya				944,105,000	22,144,413,442

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.03	BELANJA TAK TERDUGA	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		20,352,802,942
05.03.01	Belanja Tak Terduga	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		20,352,802,942
5.04	BELANJA TRANSFER	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	224,091,504,538	224,673,422,364
05.04.01	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA				887,017,038	1,162,813,400
5.4.01.01	Bagi Hasil Pajak				887,017,038	1,069,555,771
5.4.01.02	Bagi Hasil Retribusi					93,257,629
5.4.01.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
05.04.02	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	223,204,487,500	223,510,608,964
5.4.02.01	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					
5.4.02.02	Bantuan Keuangan ke Desa	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	223,204,487,500	223,510,608,964
5.4.02.03	Bantuan Keuangan Lainnya	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		
	BELANJA	856,065,731,732	954,203,238,124	1,139,393,903,553	1,540,694,050,203	2,108,001,457,095
	SURPLUS/DEFISIT	27,356,225,434	223,467,740,732	278,066,301,923	(113,257,048,943)	29,620,139,036

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

2.5.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 23,12 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 15,93 persen pada tahun 2024. Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2020–2024 Kabupaten Konawe Utara tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.99
Analisis Proporsi Belanja Pegawai

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Kebutuhan Pemenuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100
1.	2020	198,598,939,688	859,065,731,732	23.12
2.	2021	258,171,508,987	957,453,238,124	26.96
3.	2022	267,915,581,871	1,145,893,903,553	23.38
4.	2023	280,984,263,807	1,587,573,682,374	17.70
5.	2024	355,140,363,407	2,229,582,764,649	15.93
Rata-rata				21,42

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, dianalisis

Pada tahun 2020 proporsi belanja aparatur mencapai 23,12%, sedangkan pada tahun 2021 proporsi belanja aparatur naik menjadi 26,96%. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 15,93%. Proporsi belanja pegawai mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih dibawah 30 persen dengan rata-rata sebesar 21,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan belanja daerah sangat baik, karena proporsi belanja aparatur masih lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi belanja daerah yang bersifat pelayanan masyarakat yaitu masih diatas 70 persen. Namun demikian pengelolaan belanja daerah perlu dikelola dengan baik agar proporsi belanja daerah yang digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi tidak lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja untuk memberikan pelayanan publik.

2.5.2.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah

Tahun Anggaran 2024, masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

Gambar 2.66

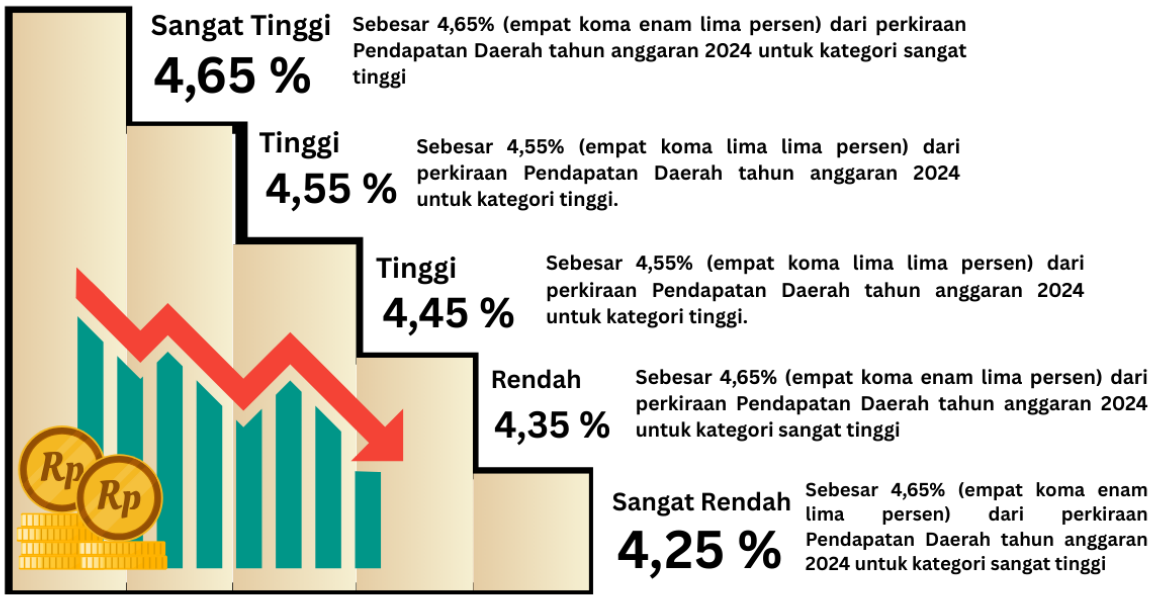

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama, yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2024. Selanjutnya Kategori Kapasitas Fiskal Daerah mengacu pada kategori Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2024. Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD. Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berdasarkan pertimbangan :

a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui;
b. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui;
c. Pembiayaan Utang Daerah yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah telah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
e. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
f. Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan telah disetujui oleh Menteri Keuangan;
g. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah, telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri;

h. rasio kemampuan keuangan Daerah dalam mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
i. jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah dan jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melampaui 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD. Persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Daerah secara lengkap. Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD menjadi dasar dalam proses evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah mengenai APBD.

Dalam rangka pemantauan Defisit APBD tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah melaporkan rencana Defisit APBD tahun anggaran 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD ditetapkan. Rencana Defisit APBD merupakan rencana defisit dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/ gubernur untuk dievaluasi.

Dalam rangka pemantauan Pembiayaan Utang Daerah, Pemerintah Daerah melaporkan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya semester berkenaan. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sesuai batas waktu dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi anggaran dalam APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020–2024 selain pada tahun 2023, perbandingan antara pendapatan dan belanja masih lebih besar pendapatan. Sedangkan pada tahun 2023, kondisi belanja lebih besar dari pendapatan sehingga dalam pembiayaan digunakan untuk menutup defisit dari selisih tersebut. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang paling besar masih tetap dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, APBD Kabupaten Konawe Utara hanya sekali mengalami defisit anggaran yakni pada tahun 2023 akibat adanya kebijakan pinjaman daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, serta mengalami empat (4) kali surplus anggaran yakni pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024. Kondisi APBD yang mengalami surplus dan defisit tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan tentu berpengaruh total terhadap penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk investasi pemerintah dalam rangka pembiayaan BUMD, baik Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun PDAM. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pemenuhan dana cadangan.

Tabel 2.100
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024 (Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50,731,973,809	75,176,575,746	302,934,535,728	695,226,463,150	310,998,277,498
6.1.01	Penggunaan SiLPA	50,731,973,809	75,176,575,746	295,394,316,478	547,305,742,675	310,998,277,498
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan					
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			7,540,219,250	147,920,720,475	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah					
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah					
6.1.07	Penerimaan Kembali Dana Bergulir					
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000	3,250,000,000	6,500,000,000	46,879,632,171	121,581,307,554
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan					
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3,000,000,000	3,250,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keu Bank				40,379,632,171	115,081,307,554
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6.2.05	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga					
6.2.06	Dana Talangan					
6.2.07	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir					
	PEMBIAYAAN NETTO	47,731,973,809	71,926,575,746	296,434,535,728	648,346,830,979	189,416,969,944
	SISA LEBIH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) PEMBIAYAAN ANGGARAN	75,088,199,243	295,394,316,478	574,500,837,651	535,089,782,036	219,037,108,980

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan dari sebesar 47,73 Miliar pada tahun 2020 menjadi 648,35 Miliar pada tahun 2023 karena adanya kebijikan pinjaman daerah yang diambil oleh pemerintah. Penerimaan pembiayaan sedikit terkoreksi menjadi 311 Miliar pada tahun 2024, seperti terlihat pada gambar 2.67 berikut.

Gambar 2.67
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

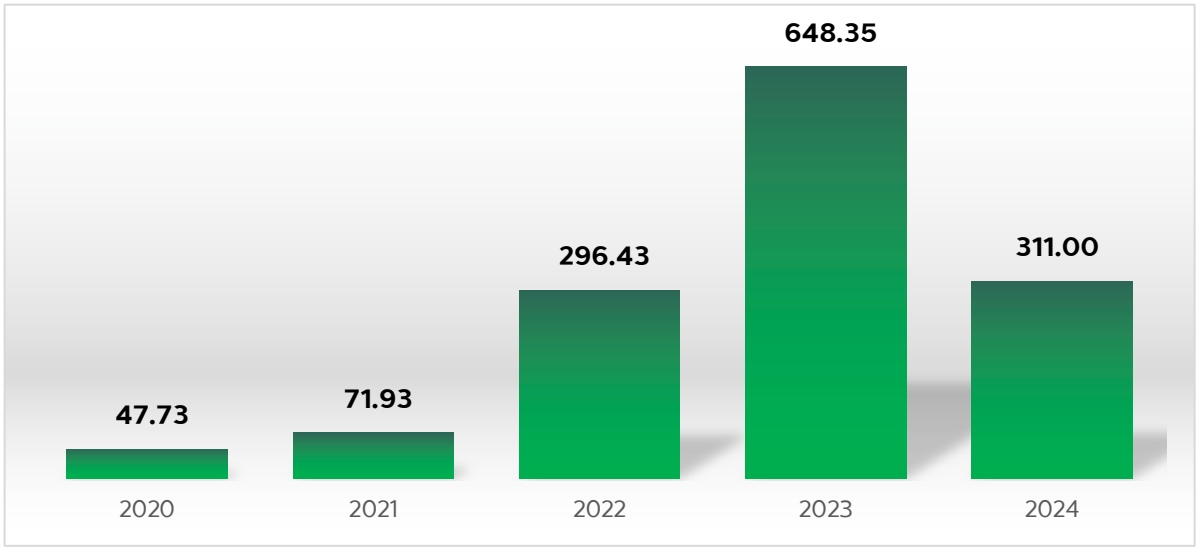

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, 2025 (diolah)

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan/Bank. Pengeluaran pembiayaan daerah pada 2023 dan 2024 cukup meningkat akibat pembayaran pokok pinjaman sebesar 200 Miliar di Bank Sultra yang dilunasi selama dua tahun, seperti terlihat pada gambar 2.68 berikut.

Gambar 2.68
Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

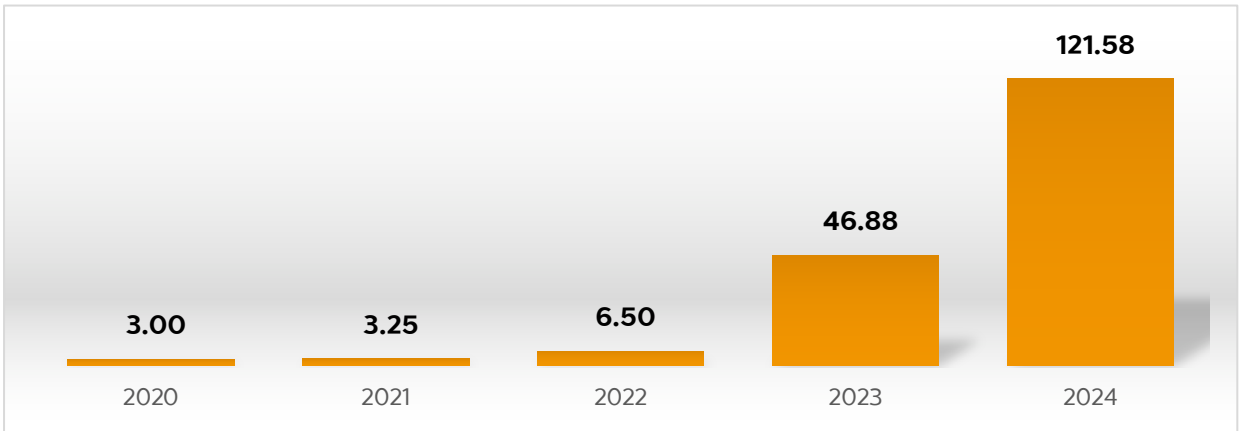

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, 2025 (diolah)

Defisit riil anggaran Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2020–2024 hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 9.786.786.917 sedangkan tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 terjadi surplus anggaran seperti tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131
Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	856,065,731,732	954,203,238,124	1,139,393,903,553	1,540,694,050,203	2,108,001,457,095
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000,000,000	3,250,000,000	6,500,000,000	46,879,632,171	121,581,307,554
Defisit Riil		24,356,225,434	220,217,740,732	271,566,301,923	(160,136,681,114)	(91,961,168,518)

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, dianalisis

Sumber penutup defisit riil anggaran terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dengan rincian yang dalam tabel 2.102 berikut.

Tabel 2.102
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020–2024

NO.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penggunaan SiLPA	208.29	34.14	108.77	341.77	338.18
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	2.78	92.37	-
5	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, dianalisis

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 50,73 Miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar 311 Miliar rupiah pada tahun 2024 yang tercantum pada gambar 2.69 berikut.

Gambar 2.69
Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

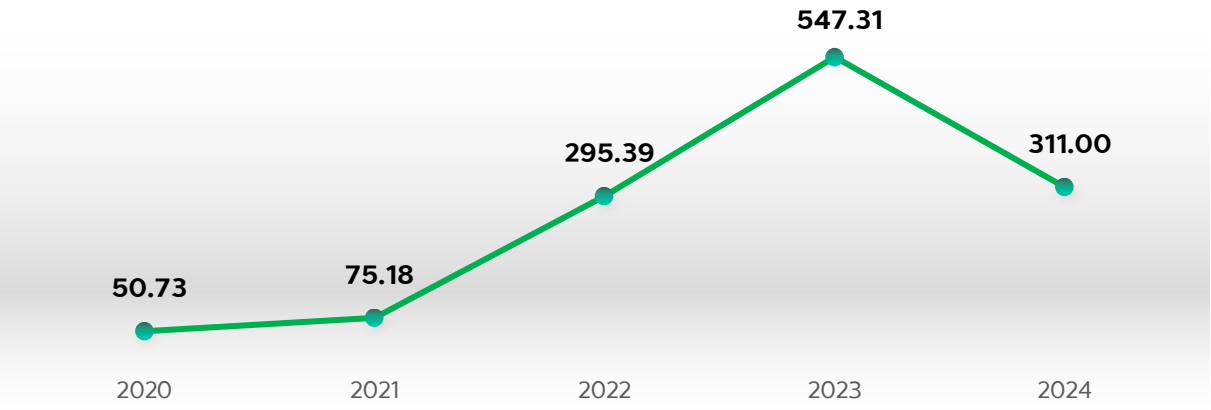

Adapun komponen realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran antara lain pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pelampauan peneriman pembiayaan, dan sisa pengeluaran pembiayaan

2.5.3. KERANGKA PENDANAAN

2.5.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Asumsi penyusunan Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2026-2030 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan daerah yang telah pulih beberapa tahun terakhir serta mengalami tren positif. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah Kabupaten Konawe Utara tahun 2026-2030 kemungkinan besar mengalami tren positif dan akan terus meningkat dengan pertumbuhan diatas 5%.

Gambar 2.70
Asumsi proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2030

Dengan mendasarkan pada asumsi dan kebijakan di atas, maka dilakukan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum pada tabel 2.103 berikut:

Tabel 2.103
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Realisasi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	74,420,246,465	75,536,550,162	90,643,860,194	113,304,825,243	132,566,645,534	158,417,141,413
	B. Pendapatan Transfer	2,062,294,741,359	1,424,644,519,827	1,675,246,932,111	1,918,295,689,377	2,164,743,591,402	2,404,602,817,838
	C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	906,608,307	2,764,582,045	4,008,643,965	5,812,533,750	8,428,173,937	12,220,852,209
	JUMLAH PENDAPATAN	2,137,621,596,131	1,502,945,652,034	1,769,899,436,270	2,037,413,048,370	2,305,738,410,873	2,575,240,811,460
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	1,086,467,642,565	814,850,731,924	855,593,268,520	898,372,931,946	943,291,578,543	990,456,157,470
	B. Belanja Modal	776,507,589,224	571,031,193,053	621,638,357,730	693,854,416,741	955,008,473,756	1,406,123,496,001
	C. Belanja Tak Terduga	20,352,802,942	132,877,279,641	140,318,407,301	148,176,238,110	156,474,107,444	165,236,657,461
	D. Belanja Transfer	224,673,422,364	220,022,613,830	230,201,127,477	240,894,779,987	252,138,504,369	263,971,224,005
	JUMLAH BELANJA	2,108,001,457,095	1,738,781,818,448	1,847,751,161,028	1,981,298,366,784	2,306,912,664,112	2,825,787,534,937
	SURPLUS/DEFISIT	29,620,139,036	-235,836,166,414	-77,851,724,758	56,114,681,586	-1,174,253,239	-250,546,723,477
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	310,998,277,498	367,336,166,414	209,351,724,758	75,385,318,414	132,674,253,239	257,046,723,476
	B. Pengeluaran Pembiayaan	121,581,307,554	131,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	6,500,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO	189,416,969,944	235,836,166,414	77,851,724,758	(56,114,681,586)	1,174,253,239	250,546,723,476

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Proyeksi APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2026–2030 menunjukkan perkembangan fiskal yang dinamis dengan tren kenaikan pendapatan, sementara kebutuhan belanja juga meningkat cukup signifikan. Dari sisi pendapatan, total penerimaan daerah diproyeksikan tumbuh dari Rp1,50 triliun pada 2026 menjadi Rp2,57 triliun pada 2030. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yang stabil, dari Rp75,53 miliar pada 2026 menjadi Rp158,41 miliar pada 2030. Peningkatan PAD ini sejalan dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi daerah, terutama dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Konawe Utara yang diperkirakan mendorong pertumbuhan investasi dan perluasan basis pajak daerah. Pendapatan transfer juga tetap mendominasi, dengan tren meningkat dari Rp1,42 triliun pada 2026 menjadi Rp2,40 triliun pada 2030, yang mencerminkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat terhadap implementasi prioritas nasional di Konawe Utara.

Dari sisi belanja daerah, kebutuhan anggaran meningkat dari Rp1,73 triliun pada 2026 menjadi Rp2,82 triliun pada 2030. Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar, dengan alokasi naik dari Rp814,85 miliar pada 2026 menjadi Rp990,45 miliar pada 2030 untuk mendukung pelayanan publik dasar dan pemeliharaan infrastruktur. Belanja modal menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp571,03 miliar pada 2026 hingga Rp1,40 triliun pada 2030, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri, konektivitas wilayah, dan layanan masyarakat.

Posisi surplus/defisit masih berfluktuasi. Pada 2026 terjadi defisit Rp235,83 miliar, yang menurun menjadi Rp77,85 miliar pada 2027, lalu berbalik surplus Rp56,11 miliar pada 2028. Namun, pada 2029 kembali terjadi defisit tipis Rp1,17 miliar dan membesar menjadi Rp250,54 miliar pada 2030. Fluktuasi ini mencerminkan tekanan belanja infrastruktur yang cukup besar pada akhir periode.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan menjadi instrumen penting dalam menutup defisit, dengan proyeksi tertinggi Rp367,33 miliar pada 2026 dan tetap signifikan hingga Rp257,04 miliar pada 2030. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan relatif stabil di kisaran Rp131,5 miliar, sebelum turun drastis menjadi Rp6,5 miliar pada 2030.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkomitmen mendorong alternatif pembiayaan pembangunan pada periode 2025–2030. Strategi ini mencakup optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan pembiayaan kreatif dan inovatif, serta peningkatan peran investasi swasta, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur kawasan industri dan layanan publik strategis. Dengan pendekatan ini, pembangunan tetap dapat berjalan sesuai prioritas tanpa terlalu membebani APBD.

2.5.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja pegawai dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara sebagaimana Tabel 104. Berdasarkan dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Pembagian anggaran untuk masing-masing prioritas I, II dan III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1,236,377,955,980	1,502,945,652,034	1,769,899,436,270	2,037,413,048,370	2,305,738,410,873	2,575,240,811,460
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	131,407,593,227	367,336,166,414	209,351,724,758	75,385,318,414	132,674,253,239	257,046,723,476
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	500,000,000,000	-	-	-	-	-
Total penerimaan		1.018.531.912.900	1.319.229.787.331	1.044.252.874.555	1.071.498.181.177	1.101.343.609.521	1.134.242.401.453
	Dikurangi:						
5	Belanja Pegawai	537,804,859,519	573,837,785,107	609,870,710,695	645,903,636,282	681,936,561,870	717,969,487,458
6	Pengeluaran Pembiayaan	6,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	131,500,000,000	6,500,000,000
Kapasitas riil kemampuan keuangan		1,323,480,689,688	1,164,944,033,341	1,237,880,450,333	1,335,394,730,501	1,624,976,102,242	2,107,818,047,479

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Tabel 2.105
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,323,480,689,688	1,164,944,033,341	1,237,880,450,333	1,335,394,730,501	1,624,976,102,242	2,107,818,047,479
	digunakan untuk mendanai prioritas :						
2.	Prioritas I Pengeluaran wajib mengikat serta untuk program-program pelayanan wajib dasar terutama pemenuhan SPM	628,653,327,602	553,348,415,837	587,993,213,908	634,312,496,988	771,863,648,565	1,001,213,572,552
3.	Prioritas II Program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar	496,305,258,633	436,854,012,503	464,205,168,875	500,773,023,938	609,366,038,341	790,431,767,805
4.	Prioritas III Program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD	198,522,103,453	174,741,605,001	185,682,067,550	200,309,209,575	243,746,415,336	316,172,707,122
	Jumlah prioritas I, II, dan III	1,323,480,689,688	1,164,944,033,341	1,237,880,450,333	1,335,394,730,501	1,624,976,102,242	2,107,818,047,479

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Tabel 2.104 dan 2.105 menggambarkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun, namun hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara relatif terbatas. Perlu adanya akselerasi dalam mendukung peningkatan PAD dengan mendorong upaya percepatan proyek Strategis Nasional (PSN). Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjaga sejalan dengan hilirisasi SDA yang membuka lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan UMKM, dan sektor tersier lainnya sebagai objek penerimaan PAD Kabupaten Konawe Utara.

2.6 Permasalahan Dan Isu Strategis

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, penyajian pada bagian ini akan menjelasan butir-butir penting permasalahan dan isu- isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk kurung waktu 5 tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Kabupaten Konawe Utara berada pada posisi strategis baik secara geografis maupun ekonomi. Letaknya yang memiliki akses ke jalur laut dan daratan, ditambah kekayaan sumber daya alam berupa cadangan nikel berskala besar, lahan pertanian subur, kawasan perikanan tangkap dan budidaya yang melimpah, serta hutan yang luas, menjadikannya salah satu motor potensial pembangunan wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, keunggulan potensi tersebut belum diimbangi dengan pencapaian pemerataan pembangunan yang optimal. Distribusi hasil pembangunan masih timpang antarwilayah, kualitas infrastruktur dasar belum merata, dan sektor unggulan non-tambang belum berkembang sepadan dengan sektor pertambangan. Sementara itu, degradasi lingkungan akibat aktivitas tambang, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengelolaan limbah mulai menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem.

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan hingga kategori tinggi, capaian ini masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Akses pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja belum merata di seluruh kecamatan, sehingga berpengaruh pada daya saing tenaga kerja lokal. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai permasalahan strategis yang menjadi prioritas penanganan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sektor tambang, pengelolaan sumber daya alam yang belum berkelanjutan, ketimpangan ekonomi, hingga rendahnya kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Penanganan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berjalan selaras dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Perlu Ditingkatkan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah. Di Kabupaten Konawe Utara, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren positif. Dalam kurun waktu 2020–2024, IPM meningkat dari 69,86 menjadi 72,71, sehingga masuk dalam kategori tinggi. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 73,62 dan rata-rata nasional sebesar 75,02. Hal ini menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat Konawe Utara, meskipun membaik, masih tertinggal dibandingkan daerah lain.

Dari aspek pendidikan, pemerataan akses masih menjadi persoalan utama. Di beberapa kecamatan terpencil, jumlah sekolah menengah terbatas, fasilitas pendidikan kurang memadai, dan distribusi tenaga pendidik tidak merata. Kualitas pembelajaran juga terpengaruh oleh keterbatasan sarana seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses teknologi informasi. Rendahnya angka partisipasi pendidikan di tingkat menengah dan atas di sebagian wilayah menjadi indikasi bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem pendidikan formal.

Pada sektor kesehatan, tantangan serupa juga dihadapi. Meskipun fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas sudah tersedia di hampir semua kecamatan, kualitas layanan dan pemerataan tenaga medis masih menjadi hambatan. Wilayah pedalaman dan kepulauan sulit dijangkau tenaga kesehatan, sehingga penanganan kasus darurat kerap terlambat. Penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan ISPA masih cukup tinggi di beberapa daerah, dipengaruhi oleh sanitasi yang kurang memadai dan keterbatasan akses air bersih di sebagian wilayah.

Dari sisi keterampilan kerja, masih terjadi kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan pasar, khususnya industri pertambangan dan sektor modern lainnya. Minimnya pelatihan vokasi dan pendidikan keterampilan menyebabkan banyak tenaga kerja lokal terpinggirkan dari peluang kerja strategis, sehingga posisi penting diisi oleh pekerja dari luar daerah. Kondisi ini berkontribusi pada ketimpangan pendapatan dan memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara umum, peningkatan kualitas SDM di Konawe Utara membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Upaya tersebut mencakup pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan mutu layanan publik, serta pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Tanpa peningkatan kualitas SDM yang signifikan, potensi ekonomi besar yang dimiliki daerah ini sulit dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas yang Belum Merata

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Rasio elektrifikasi mendekati 100% menjadi bukti bahwa akses listrik telah menjangkau hampir seluruh rumah tangga. Namun, kesenjangan kualitas dan pemerataan infrastruktur antarwilayah masih terlihat jelas. Beberapa ruas jalan penghubung antar kecamatan dan desa, terutama di daerah pegunungan seperti Oheo, Wiwirano, dan wilayah pesisir seperti Lasolo Kepulauan, masih

dalam kondisi rusak atau belum diaspal, sehingga menghambat kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kegiatan ekonomi, tetapi juga mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Akses listrik memang sudah menjangkau hampir seluruh wilayah, tetapi beberapa desa masih mengandalkan sumber non-PLN seperti generator atau panel surya, yang sering kali tidak stabil dan memiliki keterbatasan kapasitas. Hal ini memengaruhi kelancaran kegiatan rumah tangga maupun usaha kecil yang membutuhkan suplai listrik konsisten. Perbaikan juga terlihat pada penyediaan air bersih. Data menunjukkan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak meningkat tajam dari 37,71% pada 2019 menjadi 87,9% pada 2023. Meski demikian, pemerataan akses masih menjadi pekerjaan rumah. Di wilayah pedalaman, dataran tinggi, dan kepulauan, ketersediaan air bersih terkendala oleh minimnya infrastruktur distribusi, sistem perpipaan yang belum memadai, dan keterbatasan sumber air permukaan.

Selain itu, kesenjangan akses telekomunikasi dan internet masih menjadi hambatan. Di beberapa desa, sinyal telepon seluler lemah dan jaringan internet belum tersedia secara memadai. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya akses informasi, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, dan terhambatnya penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik (e-government). Di era transformasi digital, keterbatasan ini dapat memperlebar jurang ketimpangan antara wilayah yang terhubung dan yang terisolasi secara teknologi.

Dengan demikian, meskipun capaian infrastruktur di Konawe Utara cukup positif, tantangan pemerataan dan peningkatan kualitas tetap menjadi prioritas strategis untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dapat menikmati manfaat pembangunan secara setara. Produk unggulan lokal, baik pertanian, perikanan, maupun hasil hutan, belum diolah secara maksimal menjadi produk bernilai tambah tinggi. Akibatnya, potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan Masih Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,74%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% dan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,40%. Capaian ini terutama didorong oleh ekspansi sektor pertambangan, yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah, diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan.

Namun, keberhasilan pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Distribusi manfaat pembangunan masih timpang antarwilayah, dengan desa-desa yang berada di sekitar kawasan tambang umumnya memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi dibandingkan wilayah non-tambang yang bergantung pada sektor pertanian tradisional. Ketimpangan ini semakin nyata ketika

melihat akses terhadap infrastruktur, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang lebih banyak terkonsentrasi di pusat pertumbuhan ekonomi.

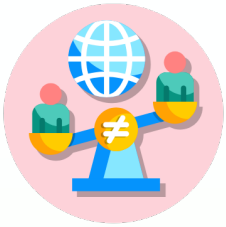

Tingkat kemiskinan di Konawe Utara masih berada di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. Faktor penyebabnya antara lain adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal, terbatasnya lapangan kerja di sektor non-tambang, dan ketergantungan ekonomi masyarakat pada komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Sementara sektor tambang menyerap tenaga kerja, proporsi pekerja lokal yang terserap relatif kecil akibat perbedaan kompetensi dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Masalah pengangguran juga menjadi tantangan. Banyak tenaga kerja usia produktif yang belum terserap ke dalam sektor formal, khususnya lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Di sisi lain, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum berkembang optimal sebagai penopang ekonomi rakyat, karena keterbatasan modal, kemampuan manajemen, dan akses pasar. Fenomena ini menciptakan lingkaran permasalahan: wilayah non-tambang cenderung tertinggal, kemiskinan sulit ditekan, dan ketergantungan pada sektor tertentu menghambat diversifikasi ekonomi. Tanpa intervensi kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi berbasis sektor non-ekstraktif, ketimpangan ini berpotensi melebar, sekalipun pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat.

4. Belum tercapainya Kemandirian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan berkat ketersediaan lahan pertanian yang luas dan hasil produksi yang secara umum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, produksi beras mencapai 9.134 ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 7.031 ton. Artinya, terdapat surplus beras sebesar 2.111 ton yang secara teoritis mampu menopang cadangan pangan daerah. Namun, surplus produksi tidak otomatis menjamin ketahanan pangan yang merata. Distribusi pangan di Konawe Utara masih menghadapi kendala infrastruktur, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, sehingga pasokan tidak selalu stabil dan harga dapat berfluktuasi tajam. Ketidakstabilan harga ini sering kali merugikan petani, yang menjual hasil panen dengan margin keuntungan rendah, sekaligus memberatkan konsumen di wilayah dengan ongkos distribusi tinggi.

Di sektor pertanian non-padi, produksi komoditas strategis seperti jagung mengalami penurunan signifikan. Pada 2023, produksi jagung hanya mencapai 1.033 ton, turun tajam dari 4.511 ton pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, serangan hama, dan keterbatasan sarana produksi seperti irigasi dan benih unggul. Kondisi ini menunjukkan rapuhnya sistem produksi pangan non-padi yang seharusnya menjadi penyangga diversifikasi pangan daerah.

Sektor perikanan tangkap, yang memiliki kontribusi penting terhadap sumber protein masyarakat, juga menghadapi tantangan serupa. Produksi ikan teri, misalnya, cukup besar yaitu 6.513 ton pada tahun 2023, namun nilai tambahnya rendah karena sebagian besar dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lanjutan. Minimnya fasilitas pengolahan hasil perikanan, seperti cold storage dan industri pengolahan, menghambat pengembangan rantai nilai dan membatasi kontribusi sektor ini terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan.

Ketahanan pangan di Konawe Utara tidak hanya bergantung pada ketersediaan produksi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengakses dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan. Tantangan di bidang distribusi, infrastruktur pendukung, diversifikasi komoditas, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Tanpa pembenahan menyeluruh, ketahanan pangan daerah dapat terganggu meskipun data produksi menunjukkan surplus.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Kurang Berkelanjutan

Kabupaten Konawe Utara dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan nikel. Cadangan nikel di wilayah ini mencapai puluhan hingga ratusan juta ton, menjadikannya pemasok penting bagi industri smelter di Sulawesi dan bahkan Indonesia. Aktivitas pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, serta menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja. Namun, pemanfaatan potensi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

- Eksploitasi tambang yang masif memicu sejumlah dampak negatif, di antaranya deforestasi, degradasi lahan, sedimentasi sungai, dan pencemaran pesisir. Di beberapa wilayah pesisir, masuknya sedimen dari kawasan tambang ke perairan mengancam ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan habitat biota perikanan. Konflik pemanfaatan lahan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal juga kerap muncul, terutama di kawasan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian atau pemukiman.
- Sektor pertanian, yang seharusnya menjadi penyangga ketahanan pangan, menghadapi tantangan berat. Alih fungsi lahan produktif menjadi area tambang mengurangi luas tanam dan mengancam keberlanjutan produksi pangan. Pada tahun 2023, produksi padi tercatat 8.103 ton, relatif stagnan dibanding tahun sebelumnya. Komoditas jagung mengalami penurunan drastis dari 4.511 ton pada 2022 menjadi 1.033 ton pada 2023, yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, serangan hama, dan keterbatasan sarana irigasi.
- Sektor perikanan tangkap, meskipun mencatat hasil signifikan — terutama pada komoditas teri yang mencapai 6.513 ton pada 2023 — masih belum mampu memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian lokal. Hal ini disebabkan minimnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan yang representatif, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), dan sistem distribusi yang efisien. Akibatnya, sebagian besar hasil tangkapan dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang tidak maksimal. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah pengelolaan sampah dan limbah. Persentase sampah yang berhasil terkelola justru menurun dari 13,6% pada 2022 menjadi hanya 7% pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan lemahnya sistem manajemen limbah, yang dapat berdampak pada kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya alam di Konawe Utara menghadapi dilema antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi tambang, dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan. Tanpa perencanaan terpadu dan pengawasan ketat, potensi yang ada justru berisiko menjadi sumber kerentanan jangka panjang bagi daerah ini.

6. Tata Kelola Pemerintahan belum optimal

Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Konawe Utara, peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan kelembagaan masih menjadi agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun telah ada perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal efektivitas, koordinasi, dan pengawasan. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap aktivitas usaha, khususnya di sektor pertambangan. Proses perizinan yang belum sepenuhnya transparan, serta keterbatasan sumber daya pengawas di lapangan, membuka celah terjadinya pelanggaran lingkungan dan konflik pemanfaatan lahan. Situasi ini tidak hanya berpotensi merugikan ekosistem, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial antara masyarakat lokal dan pelaku usaha.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memerlukan perhatian. Walaupun kontribusi PAD terhadap anggaran daerah terus meningkat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya masih menjadi sorotan. Optimalisasi sumber pendapatan belum maksimal, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun potensi ekonomi lain yang belum tergarap sepenuhnya. Dari sisi pelayanan publik, penerapan e-government dan digitalisasi administrasi masih terbatas. Akses masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi informasi belum merata, sebagian akibat keterbatasan infrastruktur internet dan kapasitas SDM aparatur dalam memanfaatkan teknologi. Kondisi ini membuat proses pelayanan publik di beberapa sektor masih berjalan lambat, berbelit, dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan warga.

Secara umum, tantangan tata kelola pemerintahan di Konawe Utara terletak pada perlunya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur, meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengawasan, serta mendorong inovasi pelayanan publik. Tanpa perbaikan mendasar di aspek ini, keberhasilan program pembangunan akan sulit dioptimalkan, dan risiko ketidakefisienan anggaran akan tetap tinggi.

7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana belum tangguh

Kabupaten Konawe Utara memiliki kondisi geografis dan ekologis yang beragam, mencakup kawasan pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan dan pegunungan. Keragaman ini sekaligus menjadi kekuatan dan tantangan, terutama terkait kelestarian lingkungan dan pengelolaan risiko bencana. Aktivitas ekonomi, khususnya pertambangan dan pembukaan lahan, memberikan tekanan besar terhadap kualitas lingkungan hidup.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah degradasi lahan dan deforestasi akibat penambangan nikel dan pembukaan hutan untuk aktivitas ekonomi lain. Sedimentasi sungai yang berasal dari daerah tambang mengganggu kualitas air dan berdampak pada kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya perairan. Di wilayah pesisir, pencemaran dan abrasi mengancam ekosistem laut serta mata pencaharian nelayan.

Dari sisi kebencanaan, Konawe Utara termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Banjir tahunan kerap terjadi di titik-titik rawan seperti pertemuan Sungai Lasolo dan Sungai Landawe, sementara longsor mengancam daerah dengan topografi curam di musim hujan. Perubahan iklim turut memperbesar risiko ini melalui pola curah hujan yang semakin tidak menentu dan peningkatan intensitas badai. Indeks Risiko Bencana (IRB) daerah menunjukkan tren penurunan dalam periode 2019–2023, menandakan adanya upaya mitigasi yang mulai berdampak positif. Namun, kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pengetahuan, infrastruktur perlindungan, maupun sistem peringatan dini.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengalami peningkatan dari 77,29 pada tahun 2022 menjadi 79,97 pada 2024. Meskipun demikian, perbaikan ini belum diiringi oleh pengelolaan limbah yang memadai. Data menunjukkan bahwa persentase sampah yang berhasil terkelola justru menurun signifikan, dari 13,6% (2022) menjadi hanya 7% (2023), mengindikasikan lemahnya manajemen persampahan dan potensi memburuknya kualitas lingkungan dalam jangka panjang. Kondisi ini menuntut strategi yang menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup, sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Tanpa langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana, risiko kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, dan keselamatan masyarakat akan semakin besar.

8. Kebudayaan dan Ketahanan Sosial Masih Rentan

Kabupaten Konawe Utara memiliki kekayaan budaya yang merepresentasikan identitas kolektif masyarakat, mulai dari tradisi lisan, upacara adat, kesenian tradisional, hingga kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam. Kebudayaan ini berfungsi bukan sekadar sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai perekat sosial yang membentuk nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas antarwarga. Dengan kata lain, kelestarian budaya lokal sangat berpengaruh terhadap ketahanan sosial masyarakat. Namun, modernisasi yang cepat, migrasi tenaga kerja dari luar daerah, serta ekspansi industri pertambangan membawa tantangan besar bagi keberlanjutan kebudayaan lokal. Tradisi yang dulunya menjadi pedoman perilaku mulai bergeser, dan ruang sosial untuk praktik budaya menyempit. Generasi muda cenderung kurang mengenal nilai-nilai tradisi karena minimnya integrasi pendidikan budaya dalam sistem sekolah dan kurangnya kegiatan pelestarian di tingkat komunitas.

Kerentanan kebudayaan ini berdampak langsung pada ketahanan sosial. Ketika nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan antarwarga melemah, potensi konflik sosial, menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong, dan berkurangnya solidaritas komunitas menjadi lebih besar. Situasi ini diperparah oleh adanya potensi gesekan antara penduduk lokal dan pendatang akibat perbedaan latar belakang budaya dan kepentingan ekonomi. Selain itu, pelestarian budaya belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata. Padahal, festival adat, kerajinan tangan, dan atraksi budaya dapat menjadi sarana memperkuat rasa bangga masyarakat sekaligus

membuka peluang ekonomi baru. Keterbatasan promosi, infrastruktur budaya, dan sinergi antar pemangku kepentingan menyebabkan potensi ini belum tergarap optimal.

Untuk menjaga ketahanan sosial di tengah perubahan pesat, kebijakan pelestarian budaya di Konawe Utara perlu diintegrasikan dengan program pembangunan manusia, pendidikan karakter, dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Dengan demikian, kebudayaan bukan hanya dilestarikan, tetapi juga dihidupkan kembali sebagai modal sosial yang mampu memperkuat kohesi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif.

2.6.2 Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah.

2.6.2.1. Isu Global/Internasional

Perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe Utara pada periode 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang terus bergerak cepat dan penuh ketidakpastian. Isu-isu seperti perubahan iklim, krisis keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, transisi energi, revolusi industri 4.0, serta ketegangan geopolitik, membawa dampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan di tingkat dunia ini mempengaruhi sektor-sektor strategis daerah, mulai dari pertanian, perikanan, energi, industri, hingga tata kelola pemerintahan. Dengan memahami arah tren dan tantangan global, Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang responsif, memanfaatkan peluang dari perkembangan teknologi dan ekonomi hijau, sekaligus memitigasi risiko terhadap sumber daya alam, perekonomian, dan kualitas hidup masyarakat. Integrasi isu global ke dalam RPJMD menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan Konawe Utara sejalan dengan perkembangan dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapaun Isu-isu global yang terjadi saat ini antara lain :

1. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global.
   Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar umat manusia pada abad ke-21. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri, menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat secara signifikan. Fenomena ini mengakibatkan perubahan pola cuaca yang ekstrem, mencakup intensitas badai yang meningkat, kekeringan berkepanjangan, hujan lebat yang memicu banjir bandang, hingga gelombang panas yang mengancam kesehatan manusia. Dampaknya terasa pada kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es di kutub, yang mengancam keberadaan kota-kota pesisir dan pulau kecil. Di sisi lain, perubahan pola curah hujan memengaruhi siklus tanam, mengganggu produktivitas pertanian, dan memicu ketidakpastian pasokan pangan. Isu ini menjadi prioritas global yang memerlukan upaya mitigasi melalui penurunan emisi dan adaptasi, seperti pembangunan infrastruktur tangguh iklim dan pemulihan ekosistem.

2. Krisis Keanekaragaman Hayati.
   Krisis ini merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar di dunia. Laju kepunahan spesies flora dan fauna meningkat pesat akibat kerusakan habitat, polusi,

perubahan iklim, dan perburuan ilegal. Hutan tropis, terumbu karang, dan ekosistem air tawar mengalami degradasi yang signifikan, mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem penting seperti penyerbukan alami, penyediaan air bersih, pengendalian hama, dan penyimpanan karbon. Hilangnya keanekaragaman hayati juga berdampak langsung terhadap sumber penghidupan jutaan manusia yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan kehutanan. Isu ini menuntut kolaborasi global untuk konservasi, restorasi ekosistem, dan perlindungan spesies yang terancam punah.

3. Ketahanan Pangan Global.

Ketahanan pangan dunia terancam oleh kombinasi faktor, termasuk perubahan iklim, konflik geopolitik, degradasi lahan, dan pertumbuhan populasi. Produksi pangan mengalami gangguan akibat kekeringan, banjir, dan serangan hama yang semakin sering dan sulit diprediksi. Konflik internasional dan proteksionisme perdagangan memperburuk rantai pasok pangan, memicu lonjakan harga komoditas. Di tengah tantangan tersebut, permintaan akan pangan sehat dan berkelanjutan semakin meningkat. Upaya global diarahkan pada pengembangan pertanian cerdas iklim, teknologi pertanian presisi, dan pengurangan kehilangan serta pemborosan pangan.

4. Krisis Energi dan Transisi ke Energi Terbarukan.

Krisis energi menjadi isu global seiring meningkatnya permintaan energi, keterbatasan pasokan bahan bakar fosil, dan volatilitas harga yang dipengaruhi ketegangan geopolitik. Negara-negara berlomba melakukan transisi energi menuju sumber terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi untuk mengurangi emisi karbon. Transisi ini membutuhkan investasi besar pada infrastruktur, teknologi penyimpanan energi, dan integrasi jaringan listrik. Negara yang cepat beradaptasi akan mendapat keuntungan kompetitif, sementara yang tertinggal berisiko menghadapi ketergantungan energi dan beban ekonomi yang lebih besar.

5. Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0.

Kemajuan teknologi digital mengubah cara manusia bekerja, berbisnis, dan berinteraksi. Kecerdasan buatan, Internet of Things, big data, dan robotika memungkinkan efisiensi produksi, peningkatan layanan publik, dan inovasi bisnis baru. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan berupa disrupsi pasar kerja, kesenjangan keterampilan, dan risiko keamanan siber. Negara-negara harus mempersiapkan SDM yang adaptif, membangun infrastruktur digital yang inklusif, dan mengatur tata kelola teknologi untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

6. Urbanisasi dan Perubahan Demografi Global.

Urbanisasi yang pesat di berbagai belahan dunia memunculkan tantangan baru dalam perencanaan kota, penyediaan layanan dasar, dan pengelolaan lingkungan. Di negara berkembang, fenomena bonus demografi membuka peluang pertumbuhan ekonomi, namun memerlukan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sementara itu, negara maju menghadapi penuaan populasi yang mengurangi produktivitas dan meningkatkan beban layanan kesehatan. Perubahan pola migrasi internasional juga mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan politik global, sehingga diperlukan strategi adaptasi yang tepat.

7. Geopolitik dan Ketidakpastian Global.

Konflik internasional, ketegangan wilayah, dan pergeseran aliansi politik-ekonomi global menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi perdagangan, investasi, dan stabilitas keamanan. Persaingan pengaruh antara negara besar, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, membentuk dinamika baru dalam perdagangan, teknologi, dan diplomasi. Selain itu, ancaman keamanan siber lintas negara menjadi isu strategis yang memerlukan koordinasi internasional. Dalam situasi ini, negara perlu memperkuat diplomasi, kemandirian ekonomi, dan ketahanan nasional.

8. Kesehatan Global.

Kesehatan global menghadapi tantangan serius berupa potensi pandemi baru, penyakit menular lintas batas, dan resistensi antimikroba. Perubahan iklim, urbanisasi, dan globalisasi meningkatkan risiko penyebaran penyakit dari hewan ke manusia (zoonosis). Pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya sistem kesehatan yang tangguh, rantai pasok medis yang aman, dan kerjasama internasional yang kuat. Kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, vaksin, dan teknologi medis masih menjadi masalah utama, terutama di negara berkembang.

9. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkular.

Ekonomi hijau mendorong pertumbuhan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, pengurangan emisi, dan efisiensi sumber daya. Sementara itu, ekonomi sirkular berupaya meminimalkan limbah melalui daur ulang, penggunaan kembali, dan inovasi desain produk. Tren ini didorong oleh tuntutan konsumen, regulasi pemerintah, dan tekanan pasar global. Penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) menjadi standar internasional yang memengaruhi daya saing produk di pasar global.

10. Perdagangan dan Rantai Pasok Global.

Rantai pasok global semakin kompleks dan rentan terhadap gangguan akibat bencana alam, konflik, dan krisis kesehatan. Perubahan kebijakan perdagangan internasional, proteksionisme, dan kenaikan biaya logistik mendorong diversifikasi sumber pasokan dan penguatan perdagangan regional. Digitalisasi perdagangan, termasuk e-commerce lintas negara, menjadi salah satu solusi adaptasi. Namun, meningkatnya standar keberlanjutan produk memerlukan penyesuaian cepat bagi produsen di seluruh dunia.

11. Krisis Air dan Sumber Daya Alam.

Ketersediaan air bersih menurun di banyak wilayah akibat polusi, perubahan iklim, dan konsumsi berlebihan. Kompetisi untuk memperebutkan sumber daya alam seperti tanah subur, mineral strategis, dan sumber daya perikanan semakin meningkat. Eksploitasi berlebihan mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengurangi kapasitas regenerasi sumber daya. Pengelolaan sumber daya yang bijak dan berbasis keberlanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan ekonomi.

12. Inovasi Sains dan Teknologi.

Kemajuan pesat di bidang bioteknologi, nanoteknologi, energi terbarukan, dan eksplorasi luar angkasa membuka peluang baru di berbagai sektor. Teknologi seperti CRISPR memungkinkan pengembangan varietas tanaman yang tahan perubahan iklim dan pengobatan penyakit genetik. Material baru dan teknologi penyimpanan energi yang efisien mendorong transisi energi bersih. Namun, inovasi ini juga menimbulkan tantangan etis, keamanan, dan regulasi yang harus dikelola secara hati-hati.

13. Perubahan Nilai Sosial dan Budaya Global.

Perubahan nilai sosial di tingkat global ditandai dengan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender, keberagaman, hak asasi manusia, dan keberlanjutan. Globalisasi budaya melalui media digital mempercepat pertukaran ide, gaya hidup, dan tren konsumsi. Tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik semakin menguat, memengaruhi kebijakan publik dan praktik bisnis. Fenomena ini mendorong transformasi sosial yang lebih partisipatif dan inklusif.

2.6.2.2. Isu Strategis Nasional

Pembangunan nasional Indonesia pada periode 2025–2029 berlangsung di tengah dinamika global dan domestik yang kompleks, ditandai oleh percepatan perubahan, kemajuan teknologi, serta berbagai tantangan lintas sektor. Di tingkat nasional, terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian khusus karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang, termasuk arah menuju Indonesia Emas 2045.

Isu strategis nasional mencerminkan prioritas pembangunan yang harus diselesaikan guna memperkuat ketahanan negara, meningkatkan daya saing, serta memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Isu-isu tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan antarwilayah, ketahanan pangan–energi–air, penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan bencana, serta reformasi birokrasi.

Bagi daerah, termasuk Kabupaten Konawe Utara, pemahaman dan respons terhadap isu strategis nasional menjadi penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan, memanfaatkan peluang yang tercipta, dan berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional. Integrasi isu strategis nasional ke dalam RPJMD akan memastikan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pusat, adaptif terhadap tantangan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Adapun yang menjadi isu strategis nasional Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010– 2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015– 2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co-operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019–2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang

diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50–75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (World Health Organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian

target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

6. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perception Index I*ndonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019–2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.6.2.3. Isu Strategis Regional Wilayah Sulawesi

Wilayah Sulawesi memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama sebagai pusat produksi pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata berbasis alam. Kawasan ini juga menjadi jalur penting konektivitas laut dalam Sea Toll dan memiliki ekosistem unik seperti Taman Nasional Bunaken, Wakatobi, dan hutan tropis Sulawesi. Namun, pembangunan wilayah ini masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, tekanan terhadap lingkungan, dan keterbatasan kualitas SDM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029 mengarahkan pembangunan Sulawesi untuk memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi berbasis sumber daya berkelanjutan dan hub konektivitas kawasan timur Indonesia. Adapun yang menjadi isu pembangunan wilayah Sulawesi antara lain :

1. Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menghadapi daya saing rendah serta sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat belum dapat memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.
2. Pusat-pusat pertumbuhan seperti Wilayah Metropolitan (WM), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Destinasi Pariwisata (DPP) belum dapat memberikan dampak optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dengan daratan.
3. Masih kurang memadainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kawasan perkotaan dan belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antardaerah sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah sementara kawasan perdesaan dan afirmasi belum dapat dioptimalkan sebagai penyangga ekonomi.

4. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian.
5. Masih rendahnya akses fasilitas dan mutu pendidikan menyebabkan belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja. Terdapat TPT yang masih rendah dari rata-rata nasional (Sulawesi Barat).
6. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Sulawesi menjadi salah satu penyebab tingkat kesehatan masyarakat masih di bawah rata-rata nasional yang ditandai dengan rendahnya usia harapan hidup (UHH). Selain itu, kasus schistosomiasis masih ditemukan di Sulawesi Tengah sedangkan prevalensi stunting tinggi (Sulawesi Barat) juga masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.
7. Tingginya laju deforestasi yang berdampak pada meningkatnya ancaman kepunahan dan kehilangan jasa ekosistem esensial terutama di wilayah pesisir dan kepulauan.
8. Masih adanya risiko bencana yang cukup tinggi terutama terkait bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuefaksi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan).

2.6.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, terutama di sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan, serta potensi pariwisata bahari yang mendunia. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tantangan pembangunan daerah meliputi kesenjangan antarwilayah, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan risiko bencana. Isu-isu strategis berikut menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

1. Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi yang memperhatikan kualitas kehidupan, yaitu pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang menuntut adanya partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika perekonomian mulai tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan mengalami penurunan. Pertumbuhan inklusif juga merupakan pertumbuhan yang menyangkut partisipasi semua masyarakat. Semua pihak dapat memperoleh manfaat yang sama rata dan berpihak kepada masyarakat miskin atau proo poor growth. Pertumbuhan inklusif bukan hanya pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi baru saja melainkan juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, pertumbuhan inklusif memiliki beberapa indikator, antara lain pertumbuhan yang tinggi, kemiskinan, ketimpangan, serta tingkat pengangguran yang rendah.

Sejak tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi namun tetap berada di atas rata-rata nasional. Tahun 2009 mencatat pertumbuhan 7,78%, kemudian naik signifikan menjadi 11,65% pada 2012 akibat lonjakan ekspor ore tambang sebelum kebijakan hilirisasi. Pasca penerapan Undang-Undang Minerba yang mewajibkan pembangunan smelter, pertumbuhan melambat menjadi 7,50% (2013) dan 6,26% (2014).

Pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi -0,65%, yang menjadi capaian terendah dalam periode ini. Setelah penanganan pandemi, perekonomian pulih dengan pertumbuhan 5,53% (2022) dan diperkirakan stabil di 5,40% (2024, c-to-c). Dari

sisi kemiskinan, persentase penduduk miskin turun dari 17,44% (2009) menjadi 11,43% (2023), dengan penurunan terbesar terjadi sebelum 2015. Tren perlambatan penurunan kemiskinan terlihat sejak 2015 (13,74%) hingga 2023 yang hanya berkurang 2,31 poin persentase. Pada awal 2020 sempat mencapai titik terendah 11,0%, namun pandemi membuat angka kemiskinan kembali naik. Keseluruhan tren menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan, meskipun efeknya melemah sejak 2015 dan sangat dipengaruhi oleh guncangan eksternal seperti pandemi.

Selama lima tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Sulawesi Tenggara, yang diukur dengan Gini Ratio, mengalami fluktuasi. Ketimpangan tertinggi terjadi pada awal 2018 sebesar 0,409, kemudian menurun menjadi 0,366 di akhir 2023 dan 0,370 pada 2024. Berdasarkan metode Bank Dunia, ketimpangan pengeluaran 40% penduduk termiskin pada 2024 mencapai 18,06% atau masuk kategori rendah.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren menurun sejak 2005 (8,92%), dengan penurunan signifikan menjadi 2,72% pada 2016. Fluktuasi terjadi pada 2015 (5,55%) dan 2020 (4,58%) akibat pandemi COVID-19, sebelum kembali membaik hingga 3,09% pada 2024. Persentase kemiskinan belum mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ketimpangan dan pengangguran relatif terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, karena manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi isu strategis bagi Sulawesi Tenggara. Faktor penentunya mencakup: Pendapatan per kapita – berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusivitas pertumbuhan. Peran pemerintah – kebijakan dan belanja daerah yang berpihak pada pemerataan manfaat ekonomi. Kualitas sumber daya manusia – human capital yang baik meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan industri pertambangan di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya meningkatkan angka PDRB, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

2. Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tenggara

Penduduk miskin di Sulawesi Tenggara masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah layak huni, dan pangan. Kesempatan berusaha dan bekerja masih rendah karena tingkat pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk pekerjaan layak, keterbatasan akses permodalan, dan kesulitan pemasaran produk usaha mikro/kecil. Pandemi COVID-19 pada 2020 berdampak signifikan, tercermin dari kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,19% (2018) menjadi 4,58% (2020). Jumlah penduduk miskin bertambah 1,85 ribu orang pada Maret 2020, meskipun persentasenya turun menjadi 11%. Kenaikan jumlah miskin terjadi hanya di perkotaan (+4,35 ribu orang), sementara perdesaan justru mencatat penurunan.

Penduduk perkotaan terbukti lebih rentan terhadap guncangan ekonomi akibat pandemi karena sebagian besar bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian, seperti ojek, sopir angkot, dan pedagang kecil. Kebijakan pembatasan sosial, pengurangan jam operasional, dan pembatasan transportasi menekan pendapatan, memperlambat perputaran uang, dan memicu kenaikan harga di beberapa wilayah.

Pasca pandemi, masyarakat mulai memulihkan kondisi ekonomi keluarga, namun kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara mencapai 11,43% atau 321,53 ribu jiwa, masih di atas rata-rata nasional. Kemiskinan lebih banyak terjadi di perdesaan (13,94% atau 241,64 ribu jiwa) dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di perkotaan, tingkat

kemiskinan sebesar 7,40% atau 79,89 ribu jiwa, umumnya bekerja di sektor jasa dan administrasi. Kemiskinan di Sulawesi Tenggara bersifat multidimensi, sehingga memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan untuk mencegah timbulnya masalah sosial dan ekonomi baru di masa depan.

3. Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah

Ketimpangan antarkelompok meliputi ketimpangan sosial dan ekonomi mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah. ketimpangan sosial dan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan sosial dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, diimplementasikan melalui program-program bantuan sosial yang ditargetkan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan. Berbagai kebijakan publik juga telah diterapkan guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi, masih ada tantangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan tersebut termasuk ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah. Terlebih lagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang cukup luas dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil menjadi penyebab sulitnya melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan terbatasnya akses terhadap berbagai pelayanan seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga dampaknya menimbulkan ketimpangan antarkelompok dan wilayah. Masih adanya masalah ini juga disebabkan karena ketidaktepatan kebijakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan konteks sosial dan ekonomi di berbagai daerah sehingga mengurangi efektivitas dalam mengatasi ketimpangan. Anggaran yang kurang memadai juga menjadi faktor utama dalam kegagalan implementasi kebijakan.

4. Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorentasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

Jika pemerintah daerah menginginkan daerahnya berdaya saing, maka program pembangunannya harus berasal dari pengembangan potensi ekonomi unggulannya. Pengembangan potensi ekonomi dapat ditempuh melalui riset dan inovasi untuk mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki daya saing yang

tinggi secara umum didominasi oleh Provinsi yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/atau daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasiskan sektor industri dan sektor jasa. Sedangkan Provinsi yang memiliki posisi daya saing relatif rendah umumnya merupakan daerah dengan basis ekonomi yang bersandar pada sektor primer (khususnya pertanian).

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, meliputi: sektor pertanian (tanaman pangan) dengan komoditi utama: padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, sektor perkebunan dengan komoditi unggulan: kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, dan pala, sektor perikanan dengan perikanan tangkap dan budidaya, sektor pertambangan memiliki nikel dengan ratusan ribu hektar yang tersebar di beberapa wilayah dan aspal buton yang tersebar di Pulau buton, dan sektor pariwisata memiliki wisata alam yang indah seperti wisata alam bawah laut di Pulau Wakatobi. Kawasan wisata Wakatobi merupakan bentang kepulauan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan ini terkenal sebagai salah satu tujuan wisata menarik di Indonesia, khususnya wisata bahari. Wakatobi memiliki beragam destinasi wisata baik alam maupun budaya serta beragam keunikan. Potensi Pulau Wakatobi yang sering dijuluki sebagai “surganya” para penyelam dari berbagai penjuru dunia.

Begitu beragamnya potensi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dikembangkan agar mampu meningkatkan perekonomian daerah dan dapat pula menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan wilayah di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan wilayah antara lain kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah dengan sebagian besar tenaga kerja berpendidikan setingkat sekolah menengah ke bawah dan rendahnya kualitas hidup masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Sulawesi Tenggara dan produktivitas tenaga kerja perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

5. Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara. IPM Sultra meningkat dari 65,99 pada 2010 menjadi 72,94 pada 2023. Selama periode 2012 hingga 2017 pembangunan manusia di Sultra berstatus “sedang”, pada 2018-2023 pembangunan manusia Sultra bersatus “tinggi”. Capaian IPM tahun 2023 tumbuh 0,71 poin dibanding 2022 yang tercatat sebesar 72,23. Berdasarkan dimensinya yang terdiri dari dimensi pengetahuan/pendidikan, dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama 9,31 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,70 tahun. Sementara dimensi kesehatan atau lama hidup pada komponen Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) mencapai 71,79 tahun. Capaian RLS dan HLS Sulawesi Tenggara telah melebihi capaian nasional dengan capaian masing-masing: RLS (8,77 tahun) dan HLS (13,15 tahun). Sedangkan capaian UHH Sulawesi Tenggara belum dapat melebihi capaian nasional sebesar 73,93 tahun.

Meningkatnya angka RLS dan HLS ini tentunya seiring dengan memadainya fasilitas pendidikan. Kedepan, fasilitas pendidikan harus semakin baik karena dilembaga itulah akan melahirkan manusia yang menjadi masa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan.

Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi individu. Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan

produktivitas dan mendorong peningkatan pendapatan, sehingga tidak akan ada lagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang tidak mempunyai kesempatan berusaha dan bekerja hanya karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pembangunan manusia di bidang pendidikan harus mengedepankan pada akses dan mutu pendidikan untuk semua yaitu setiap penduduk usia sekolah memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi gender dan sosial ekonomi serta mendapatkan pendidikan budaya dan karakter dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang di sertai dengan perubahan proses berbagai aspek kehidupan sosial menuntut terciptanya masyarakat yang gemar membaca. Perpustakaan sebagai organisasi publik memiliki peranan strategis untuk turut mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, yang menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Dengan membaca, masyarakat dapat memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai serta koleksi bahan pustaka yang lengkap menjadi hal penting dalam meningkatkan literasi. Di masa pandemi COVID-19, perpustakaan juga berfungsi sebagai alternatif sumber belajar bagi siswa untuk menambah pengetahuan di tengah keterbatasan pembelajaran daring.

Di bidang kesehatan, Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun ketersediaan rumah sakit dan puskesmas belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Tantangan kesehatan lainnya adalah tingginya kasus kekurangan gizi pada ibu hamil, yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting di beberapa daerah. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak, yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan hingga risiko kematian.

Umur Harapan Hidup (UHH) di Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 71,79 tahun, menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Namun, angka kesakitan dan kematian masih cukup tinggi, terutama akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertensi, dan stroke yang menjadi penyebab utama kematian dini. Kondisi ini menuntut perubahan paradigma pembangunan kesehatan dari yang bersifat kuratif menjadi lebih preventif dan promotif, disertai upaya penurunan disparitas layanan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, serta ketersediaan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah.

6. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya.

Pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai perbaikan struktur sosial, perubahan sikap dan perilaku masyarakat, serta pembenahan sistem kelembagaan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dengan penurunan kemiskinan, terutama di perdesaan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses layanan, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan, juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dengan fokus kebijakan pada empat hal: (1) perluasan akses pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin; (2) perlindungan sosial; (3) penanganan gizi kurang dan rawan pangan; dan (4) perluasan kesempatan berusaha. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan infrastruktur publik lain secara minimal bagi seluruh warga negara.

Berbagai program seperti Pamsimas, SPAM, sistem persampahan, program padat karya, dan Kota Tanpa Kumuh telah diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dasar dan mengurangi kantong kemiskinan ekstrem. Pembangunan infrastruktur jalan juga berperan penting dalam meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, mengingat karakteristik Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan, tantangan besar yang dihadapi adalah peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan transportasi darat, laut, dan udara. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara menjadi prioritas strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat integrasi wilayah.

7. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi, transparansi publik, akuntabilitas kinerja, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarpemangku kebijakan harus berjalan selaras dan konsisten. Profesionalisme aparatur menjadi faktor penentu dalam memberikan pelayanan publik yang prima, dengan penyediaan ruang informasi dan pengaduan yang transparan dan mudah diakses. Pelayanan publik di bidang perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kemudahan berusaha, dan pemenuhan hak-hak sipil lainnya harus terus ditingkatkan tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel mulai dari perencanaan partisipatif, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan kinerja. Target peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga mencapai kategori A dapat dicapai melalui konsistensi penerapan siklus manajemen kinerja. Di bidang pengelolaan keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan harus terus dipertahankan, dengan memenuhi kriteria kesesuaian standar akuntansi, efektivitas pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Optimalisasi capaian kinerja juga perlu ditunjang oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penerapan e-government.

Keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta didukung penempatan SDM yang tepat dan produktif. Penguatan kelembagaan dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan menjadi kunci efektivitas birokrasi, disertai koordinasi yang baik antarinstansi untuk menyatukan pandangan dan mengintegrasikan visi-misi. Koordinasi yang solid juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, menekan kriminalitas, serta menciptakan iklim sosial yang kondusif. Kondisi yang aman dan harmonis akan melindungi hak-hak sipil masyarakat, memperkuat demokrasi, dan memastikan program pembangunan di Sulawesi Tenggara dapat terlaksana secara lancar serta mencapai target yang telah ditetapkan.

8. Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Mitigasi bencana merupakan upaya penting untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Tujuannya meliputi pengenalan risiko, peningkatan kesadaran, perencanaan penanggulangan, hingga penanganan pascabencana. Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong wilayah rawan bencana, antara lain tanah longsor, banjir, gelombang pasang, gempa bumi, tsunami, abrasi, serta kecelakaan laut yang dipicu oleh perubahan iklim dan meningkatnya aktivitas pelayaran. Pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020–2022 menjadi bukti nyata bencana nonalam yang berdampak besar pada kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Potensi kerugian dari bencana mencakup korban jiwa, kerusakan harta benda, gangguan aktivitas ekonomi, hingga hilangnya rasa aman.

Mitigasi bencana harus terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tiga dari 17 tujuan SDGs terkait langsung dengan isu lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut, dan pemeliharaan ekosistem darat. Di Sulawesi Tenggara, perubahan iklim memicu banjir, longsor, dan kekeringan, serta mengancam ketersediaan air bersih akibat degradasi kawasan tangkapan air, eksploitasi air tanah, dan alih fungsi pesisir. Daerah pesisir yang menjadi pusat hunian nelayan kecil rentan terhadap abrasi, badai, pemutihan karang, dan cuaca ekstrem, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas adaptif berbasis kesehatan ekosistem laut dan perilaku pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Di sektor kehutanan, tantangan mencakup tekanan pemanfaatan kawasan hutan, kebakaran, pencurian hasil hutan, dan belum optimalnya pengelolaan lestari. Maraknya tambang ilegal menambah risiko kerusakan lahan, sementara rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) membuat emisi gas rumah kaca tetap tinggi. Kendala teknologi dan investasi menghambat pengembangan EBT, sedangkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan terlihat dari perilaku membuang sampah sembarangan, penggundulan hutan, dan penggunaan energi yang tidak efisien.

Meningkatnya kejadian bencana juga disebabkan rendahnya konservasi di wilayah rawan, terbatasnya SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana, serta kurangnya koordinasi antar sektor dan wilayah. Pengetahuan masyarakat tentang mitigasi dan deteksi dini masih rendah, sementara kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti tsunami, banjir, kekeringan, dan longsor belum optimal. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem peringatan dini, manajemen kedaruratan, percepatan pemulihan pascabencana, serta integrasi program pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

2.6.2.5 Isu Strategis Kab. Konawe Utara

Dari uraian permasalahan pokok pembangunan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis baik itu isu global, nasional, regional dan Isu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta mempertimbangkan potensi daerah yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

Tabel 2.106 Teknik Perumusan Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	Sulawesi Tenggara	
Kabupaten Konawe Utara memiliki struktur penduduk yang didominasi usia produktif, mencapai lebih dari 65% pada 2024, dengan tingkat melek huruf di atas 98% dan rata-rata lama sekolah 9,72 tahun. Capaian kesehatan juga positif dengan angka kematian ibu nol kasus dan kematian bayi turun menjadi 7 jiwa pada 2023. Bonus demografi ini menjadi modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama jika disertai peningkatan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan penguatan kapasitas SDM sesuai kebutuhan sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, perikanan, dan industri kreatif.	• Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Perlu Ditingkatkan	• Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja;	• Urbanisasi dan Perubahan Demografi Global. • Kesehatan Global.	• Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia; • Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	• Masih rendahnya akses fasilitas dan mutu pendidikan; • Tingkat kemiskinan yang masih tinggi disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian; • Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan	• Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah; • Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja; • Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara
Rasio elektrifikasi hampir mencapai 100% dan akses air minum layak mencapai 87,9% pada 2023, dengan konektivitas jalan antar kecamatan sebagian besar sudah terhubung. Letak geografis yang strategis dengan akses darat dan laut memberi peluang pengembangan transportasi multimoda dan logistik. Potensi pengembangan infrastruktur digital juga besar, mengingat meningkatnya kebutuhan jaringan internet dan telekomunikasi untuk mendukung layanan publik, ekonomi digital, serta pemerataan akses informasi di wilayah pedesaan dan kepulauan.	• Infrastruktur Dasar dan Konektivitas yang Belum Merata	• Konektivitas dan Infrastruktur Dasar			• belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antardaerah;	• Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya.	Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	Sulawesi Tenggara	
Kabupaten ini memiliki sumber daya alam melimpah, termasuk cadangan nikel berskala besar. Selain itu, terdapat lahan luas untuk pengembangan perkebunan dan hortikultura. Dengan letak strategis di jalur perdagangan laut dan darat, daerah ini berpotensi menjadi pusat distribusi dan industri pengolahan hasil tambang, pertanian, serta perikanan, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.	• Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan Masih Tinggi; • Belum tercapainya Kemandirian dan Ketahanan Pangan.	• Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja;	• Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkular. Ketahanan Pangan Global. • Krisis Energi dan Transisi ke Energi Terbarukan. • Geopolitik dan Ketidakpastian Global.	• Rendahnya Produktivitas; • Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	• Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah; • Pusat-pusat pertumbuhan belum dapat memberikan dampak optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan;	• Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi; • Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tenggara;	Daya Saing Ekonomi Daerah
Struktur kelembagaan pemerintahan sudah terbentuk hingga tingkat desa, memberikan peluang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah. Pengembangan e-government dan layanan publik berbasis digital dapat mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan transparansi. Kerja sama dengan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat sipil berpotensi memperluas inovasi pelayanan publik, termasuk penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk sektor strategis seperti pertambangan dan lingkungan.	• Tata Kelola Pemerintahan belum optimal		• Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0. • Inovasi Sains dan Teknologi.	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		• Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	Sulawesi Tenggara	
Dengan IKLH yang meningkat menjadi 79,97 pada 2024, Kabupaten Konawe Utara masih memiliki potensi besar di sektor konservasi, termasuk hutan, pesisir, dan kawasan sungai. Potensi pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro dan tenaga surya dapat menjadi alternatif ramah lingkungan bagi pasokan energi. Wilayah ini juga memiliki peluang untuk mengembangkan wisata berbasis ekosistem dan penerapan mitigasi bencana berbasis alam guna mengurangi risiko banjir, longsor, dan abrasi pantai.	• Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Kurang Berkelanjutan; • Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana belum tangguh	• Sedimentasi dan Pencemaran Air Sungai; • Rawan bencana alam; • Konflik pemanfaatan ruang antara kegiatan konservasi hutan lindung dengan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan permukiman;	• Perubahan Iklim dan Pemanasan Global. • Krisis Keanekaragaman Hayati. • Krisis Air dan Sumber Daya Alam.	• Krisis Lingkungan	• Tingginya laju deforestasi; • Masih adanya risiko bencana yang cukup tinggi	• Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan	Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam
Warisan budaya Tolaki, tradisi gotong royong, dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi modal sosial yang kuat. Potensi festival adat, seni tradisional, dan kerajinan lokal dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata budaya dan sumber ekonomi kreatif. Pelestarian budaya yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan pendidikan karakter akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat, mendorong kohesi antarwarga, serta memperkuat identitas daerah di tengah arus modernisasi dan migrasi penduduk.	• Kebudayaan dan Ketahanan Sosial Masih Rentan		• Perubahan Nilai Sosial dan Budaya Global.				Pembangunan kebudayaan dan Ketahahan Sosial

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2025.

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Konawe Utara berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara memiliki masalah inti yakni rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Kabupaten Konawe Utara dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang- kurangnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal SDM masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Konawe Utara berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan rendahnya serta belum meratanya pendapatan per kapita masyarakat. Permasalahan rendahnya akses dan mutu pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf di Kabupaten Konawe Utara sebesar 98,41 persen pada tahun 2024 dan angka rata-rata lama sekolah 9,72 tahun pada 2024. Oleh karena itu, untuk memperbaiki daya saing SDM di Kabupaten Konawe Utara pada masa datang, perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pendidikan, terutama dari segi kualitas maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Angka harapan hidup di Kabupaten Konawe Utara cenderung naik perlahan dimana pada tahun 2022 sebesar 69,63 dan meningkat menjadi 69,82 tahun pada 2024. Selain itu angka kematian ibu berhasil mencapai 0 kasus pada tahun 2024, capaian ini sangat baik jika dibandingkan di tahun sebelumnya yang selalu ada kasus kematian ibu. Demikian pula Angka Kematian Bayi tahun 2022 sebanyak 12 jiwa signifikan menurun di tahun 2024 sebanyak 6 jiwa. Mutu pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai ke wilayah perdesaan terpencil dan perbatasan mengingat penduduk tersebar di seluruh sudut wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Permasalahan turunan yang juga dapat memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana pada tahun 2022 sebesar 64,12 juta rupiah meningkat menjadi 72,84 juta rupiah di tahun 2024. Angka pendapatan per kapita hanya membagi total produksi barang dan jasa dengan jumlah penduduk, namun belum mampu menggambarkan pemerataan pendapatan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 sebesar Rp 1.457.892,-. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2024 sebesar Rp 774.284 dan bukan makanan Rp 683.608. Angka tersebut bermakna bahwa pengeluaran per bulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara menunjukkan masih didominasi untuk konsumsi makanan. Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

Gambar 2.71
Variabel Isu 1 : Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
Kabupaten Konawe Utara

2. Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, kelistrikan, telekomunikasi) secara merata. Selain itu, sebab utama lainnya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai dimana terlihat kemantapan jalan kabupaten sebesar 90,11 persen pada tahun 2024.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi sebagai infrastruktur pengembangan pertanian, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Sampai dengan Tahun 2024, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan

irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2024 adalah 75,61% (8.713,40 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 75,29% (1.572,10 m).

Dari sisi transportasi, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kabupaten Konawe Utara masih kecil dan masih jauh di bawah rasio rata-rata provinsi dan nasional. Akses jalan di wilayah pedalaman belum berkondisi mantap, bahkan banyak jalan yang terputus oleh alur sungai maupun karena rusak parah. Sarana transportasi umum juga belum berkembang baik, dengan jumlah armada angkutan darat di Kabupaten Konawe Utara hanya 217 unit pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ke pusat- pusat produksi dan belum optimalnya pemasaran ke pusat- pusat distribusi.

Gambar 2.72
Variabel Isu 2 : Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman

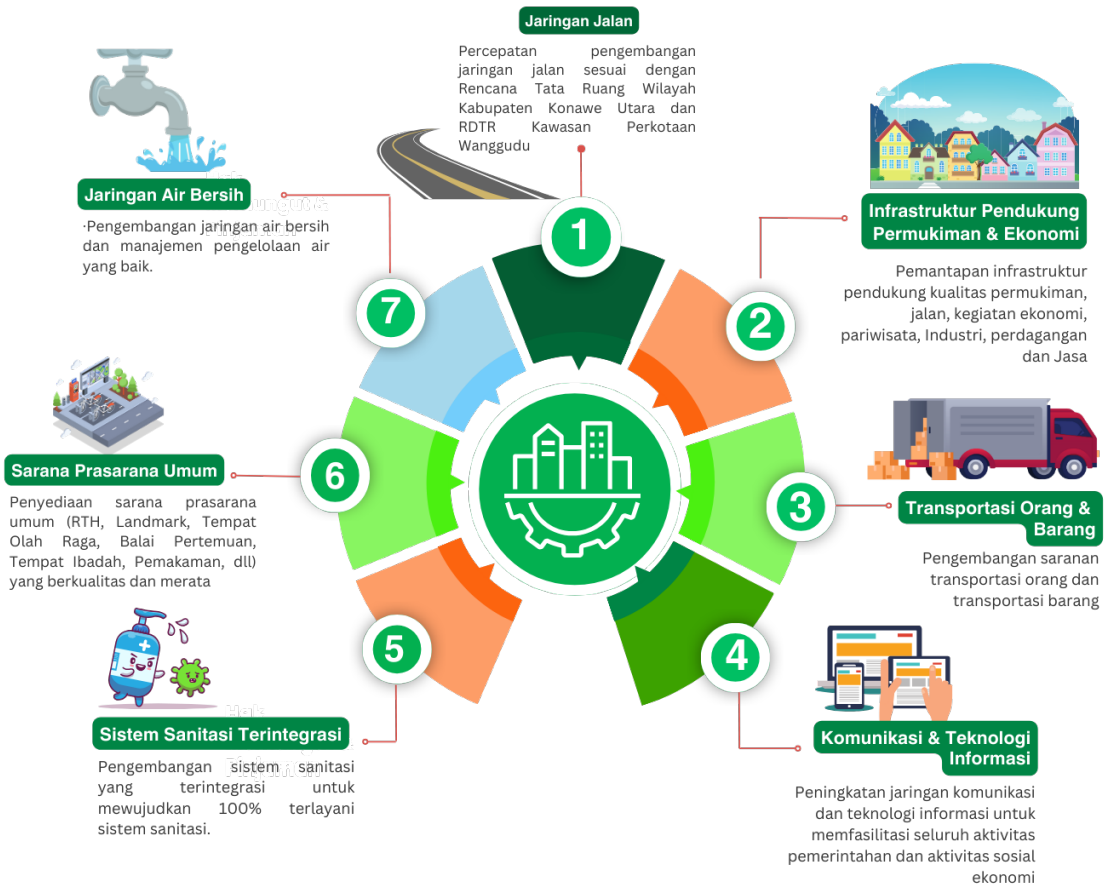

3. Daya saing ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak lanjutan terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Tercatat pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Konawe Utara berada pada 5,74%, pertumbuhan ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -0,72 %. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sehingga menyebabkan perekonomian nasional terkontraksi menjadi -2,07% dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65%.

Jika ditilik menurut lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang merupakan sektor dengan peranan terbesar dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara sebesar

36,84 persen sekaligus menjadi sektor unggulan daerah tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan, tahun 2023 sebesar 0,25 persen dan 0,14 persen pada tahun 2024. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024 yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,92 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10,46 persen, Penyediaan akomodasi dan makan minum 8,02 persen, jasa lainnya 5,73 persen, informasi dan komunikasi 5,42 persen, konstruksi 5,28 persen, jasa perusahaan 4,67 persen, jasa pendidikan 4,25 persen, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,41 persen.

Dari aspek ketenagakerjaan, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 sebanyak 78.164 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif 47.386 jiwa (60,59 persen), dari penduduk usia produktif tersebut sebanyak 77,03 % merupakan Angkatan Kerja, selanjutnya dari angkatan kerja sebanyak 2,54 persen adalah Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan 0,22 persen dari tahun 2023 sebesar 2,76 persen menjadi 2,98 persen pada tahun 2024.

Sebanyak 40,42 persen penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan berdasarkan tingkat pendidikan, para pekerja di Kabupaten Konawe Utara masih banyak yang memiliki pendidikan SD ke bawah yaitu sekitar 32,84 persen. Berbagai lapangan kerja juga masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kabupaten Konawe Utara karena tidak mampu dipenuhi oleh SDM lokal. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Konawe Utara relatif masih rendah.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Konawe Utara belum mampu menurunkan kemiskinan dengan signifikan yang cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Tercatat angka kemiskinan di tahun 2024 sebesar 13,12 persen atau menurun dari 13,48 persen di tahun 2023.

Adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah perdesaan menyebabkan penurunan kemiskinan tergolong lambat. Tersedianya lapangan kerja seharusnya mengurangi kemiskinan. Namun, kalau sekarang ini, ada lapangan kerja, tetapi masyarakat tetap miskin. Hal ini menjadi permasalahan pokok di Kabupaten Konawe Utara yang harus dituntaskan dalam 5 tahun mendatang.

Tingginya kemiskinan di Konawe Utara menyebabkan orientasi untuk bekerja berubah. Penduduk rela bekerja tanpa dibayar asalkan tempat tinggal dan makan minum setiap hari terjamin. Mereka juga rela dibayar murah karena jenis lapangan kerja terbatas. Dengan demikian, berarti kemiskinan harus ditekan dulu dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Agar lapangan kerja berkualitas di Konawe Utara dibutuhkan investasi, sedikitnya investasi menjadi salah satu akar masalah kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara. Investasi penting untuk menambah lapangan kerja berkualitas, yang akhirnya bisa menekan kemiskinan. Untuk itu kedepan harus bisa meningkatkan investasi di daerah. Investasi yang ditarik mesti berbasis keunggulan daerah. Konawe Utara memiliki potensi pertanian dan perikanan melalui pengembangan agroindustri. Investasi untuk memaksimalkan potensi itu dan menciptakan nilai tambah akan menjadikan perekonomian daerah unggul.

Gambar 2.73
Variabel Isu 3 : Daya saing ekonomi daerah

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability, transparancy, predictability, dan participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan dimana capaian pada tahun 2024 indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai nilai CC (61,45), belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum prima; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Reformasi birokrasi masih menjadi isu strategis nasional dan di daerah. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah profesional aparatur belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan.

Gambar 2.74
Variabel Isu 4 : Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

5. Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam

Mengingat Kabupaten Konawe Utara adalah daerah dengan Indeks Resiko Bencana tinggi yaitu 158,92 pada tahun 2024 (tinggi/zona merah), maka penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah bencana banjir, pencemaran lingkungan serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah dari 79,97 pada 2023 menjadi 80,12 pada 2024 menunjukkan tren positif, namun pengelolaan limbah dan sampah masih rendah, dengan persentase sampah terkelola hanya 7,4% pada 2024.

Gambar 2.75
Variabel Isu 5 : Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam

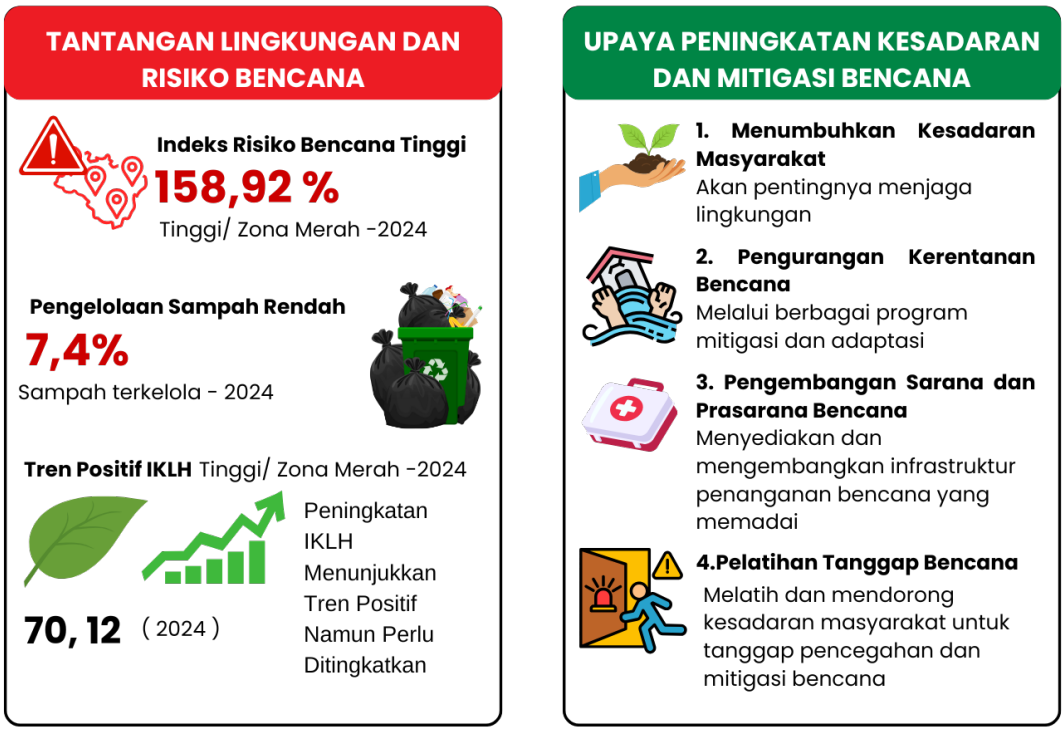

6. Pembangunan kebudayaan dan Ketahahan Sosial

Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah majemuk yang dihuni oleh berbagai suku dan etnis seperti Tolaki, Bajo, Landawe, Culambatu, Muna Buton, Bugis-Makassar, Toraja, Jawa-Sunda, Bali, hingga Flobamora. Keberagaman ini membentuk khazanah budaya yang kaya, mulai dari nilai-nilai adat istiadat, kearifan lokal, seni, bahasa, hingga tradisi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas daerah, tetapi juga menjadi modal sosial yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, maupun bencana.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa event budaya skala besar yang terlaksana di Konawe Utara baru mencapai 6 kegiatan, dengan tambahan 12 kegiatan lokal berbasis desa/kelurahan. Angka ini masih jauh dari potensi maksimal mengingat luasnya jaringan kelembagaan adat di daerah. Minimnya kegiatan ini disebabkan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya koordinasi antar pemangku budaya. Padahal, event budaya bukan hanya ajang pelestarian tradisi, tetapi juga

sarana membangun kohesi sosial, memperkuat toleransi antar komunitas, dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi fondasi ketahanan sosial.

Kelembagaan adat seperti Lembaga Adat Tolaki, Bajo, Landawe, Culambatu, Muna Buton, Bugis-Makassar, Toraja, Jawa-Sunda, Bali, dan Flobamora memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai luhur, penyelesai konflik berbasis kearifan lokal, dan pengikat solidaritas antarwarga. Penguatan kelembagaan ini akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi, menyelesaikan masalah secara damai, serta menjaga integrasi sosial.

Dalam konteks ketahanan sosial, budaya berfungsi sebagai perekat yang menghubungkan masyarakat lintas etnis dan agama, membangun rasa saling percaya, serta menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga stabilitas daerah. Tradisi gotong royong, musyawarah mufakat, dan solidaritas komunitas yang ada di Konawe Utara dapat menjadi modal penting dalam mengantisipasi dampak negatif globalisasi, polarisasi sosial, dan potensi konflik horizontal.

Karena itu, pembangunan kebudayaan di Konawe Utara tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan pelestarian seni dan adat semata, tetapi harus diposisikan sebagai strategi memperkuat ketahanan sosial. Melalui sinergi pemerintah, budayawan, tokoh adat, dan masyarakat, kekayaan budaya dapat dioptimalkan untuk membangun rasa kebersamaan, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan masyarakat yang tangguh, berdaya saing, dan berkarakter kuat menghadapi tantangan masa depan. Isu-isu strategis ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan Visi dan Misi Kabupaten Konawe Utara yang akan memandu arah pembangunan selama periode RPJMD 2025- 2029. Visi dan Misi Kabupaten Konawe Utara dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh semua isu-isu tersebut.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III
VISI MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2025–2029. Visi dan misi ini menjadi landasan strategis yang memandu penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah daerah, dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

> RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan potensi dan tantangan daerah serta diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional, provinsi, dan regional guna mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Konawe Utara secara geografis berada di jazirah utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dimiliki oleh daerah, dengan tetap berpedoman dan memperhatikan keselarasan arah pembangunan pada: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2045; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029; RPJMD Kabupaten/Kota sekitar; serta Ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, regional, maupun lokal. Dengan landasan tersebut, RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menghadirkan arah pembangunan yang lebih terarah, terpadu, konsisten, dan berkesinambungan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara.

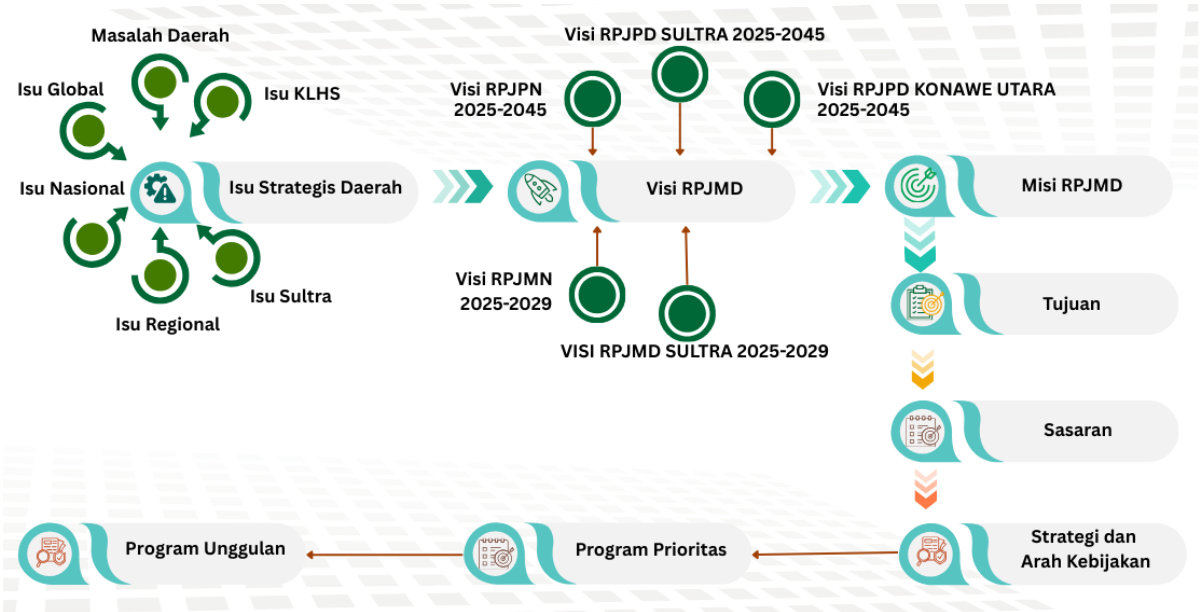

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

A. Visi

Sebelum merumuskan visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap visi, misi, serta pentahapan pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi. Dokumen-dokumen dimaksud meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2045.

Penelaahan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya kesinambungan pembangunan serta keselarasan arah kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih bukan hanya berfungsi sebagai arahan strategis pembangunan di Kabupaten Konawe Utara, melainkan juga merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan Kabupaten Konawe Utara dalam periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung sekaligus menjadi bagian dari pembangunan nasional Republik Indonesia. Hal ini akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh kekuatan serta potensi daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Adapun visi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025–2045 adalah:

"Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan".

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Negara Kesatuan Republik Indonesia

  Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

- Bersatu

  Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu system hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata diseluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia

- Berdaulat
  Pada Tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

- Maju
  Pada Tahun 2045,Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

- Berkelanjutan
  Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Sedangkan Visi RPJMN 2024-2029 adalah :

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2045 menetapkan visi:

"Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Berdaya Saing, Maju Dan Berkelanjutan"

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing
  didefinisikan sebagai kemampuan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menunjukkan keunggulan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif, pengembangan keunggulan Sumber Daya Alam secara optimal untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, mampu beradaptasi pada perubahan global, mampu bertansformasi di bidang sosial, ekonomi dan tata kelola, pengembangan riset dan inovasi diberbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna.

- Sulawesi Tenggara yang Maju
  didefinisikan sebagai pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang unggul, adaptif dan inklusif, menjadi daerah high income dan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian nasional. Menjadi daerah tangguh dalam menghadapi segala tantangan dan situasi krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, serta memiliki pertahanan yang tangguh dari segala ancaman dari dalam dan luar negeri. Sebagai daerah yang modern dengan sarana dan prasarana yang canggih dan mutakhir, dan tetap menjaga kohesi sosial dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tengah peradaban modern. Memiliki sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif dan pelayanan prima kepada masyarakat.

- Sulawesi Tenggara yang Berkelanjutan
  didefinisikan sebagai Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dari berbagai aspek yang harmoni ditandai dengan kehidupan yang sejahtera dan merata serta lingkungan yang asri dan lestari, menerapkan pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan yang lebih baik, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang dan berkelanjutan.

Selanjutnya, arah pembangunan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, dengan visi:

"Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera dan Religius".

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

- Sulawesi Tenggara Maju
  Dalam lima tahun ke depan adalah daerah yang memiliki ekonomi kuat dan berdaya saing, SDM unggul, konektivitas antar pulau, infrastruktur yang merata, pemerintahan bersih, serta lingkungan yang lestari. Pencapaian ini akan mewujudkan masyarakat yang lebih aman, sejahtera, dan semakin religius, serta berkelanjutan, menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan timur Indonesia.

- Sulawesi Tenggara Aman
  Dalam lima tahun ke depan adalah daerah yang memiliki stabilitas sosial dan politik, ketertiban masyarakat yang terjaga, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan kondisi ini, masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang, nyaman, dan produktif, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

- Sulawesi Tenggara Sejahtera
  Dalam lima tahun ke depan adalah daerah yang memiliki ekonomi yang berkembang, masyarakat yang sehat dan berpendidikan dan taraf hidup meningkat, serta pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan kesejahteraan yang meningkat, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat hidup lebih adil, makmur, dan berdaya saing, serta menikmati pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

- Sulawesi Tenggara Religius
  Dalam lima tahun ke depan adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan sosial, kehidupan yang harmonis, dan toleransi yang tinggi, tanpa mengesampingkan keberagaman. Dengan pendekatan religius yang inklusif, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat hidup dengan lebih harmonis, berakhlak, dan sejahtera, serta menjadikan agama sebagai pilar utama dalam menciptakan daerah yang aman, adil, dan berkualitas.

Selaras dengan Visi RPJPN 2025–2045 dan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025–2045, maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2045, yaitu:

"Terwujudnya Konawe Utara Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur dan Berkelanjutan"

Visi ini mencerminkan aspirasi masyarakat Kabupaten Konawe Utara untuk menjadi daerah yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan melalui transformasi menyeluruh, memandang ke depan hingga tahun 2045. Setiap kata yang terdapat dalam visi ini merangkum semangat perubahan Kabupaten Konawe Utara. Transformasi, sebagai pusat dari visi ini, menjadi katalisator perubahan yang akan membawa kebaikan bagi setiap aspek kehidupan di Konawe Utara. Selanjutnya arti dari Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan dari Visi diatas diuraikan sebagai berikut :

Substansi visi yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2045, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, serta RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2045, menjadi landasan penting dalam penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Keseluruhan visi tersebut memberikan kerangka acuan agar Sasaran Pokok RPJPD pada periode bersangkutan dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih terukur, konsisten, dan selaras dengan

pembangunan nasional maupun provinsi. Dengan berpedoman pada kerangka tersebut, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara dalam RPJMD Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

H. Ikbar, S.H., M.H
Bupati Konawe Utara

H. Abuhaera, S.Sos, M.Si
Wakil Bupati Konawe Utara

VISI : "KONASARA BERKIBAR"

(KONAWE UTARA BERSAMA IKBAR DAN ABUHAERA)

"KONAwe Utara sebagai rumah berSAma yang semakin maju dan sejahteRA"

Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

Rumah Bersama

Frasa ini menekankan nilai kebersamaan, inklusivitas, dan harmonisasi sosial. Kabupaten Konawe Utara diharapkan menjadi tempat yang nyaman, aman, dan kondusif bagi semua warga tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ataupun status sosial. "Rumah bersama" mencerminkan semangat gotong royong, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta rasa kepemilikan bersama terhadap daerah.

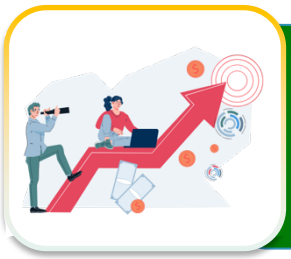

Semakin Maju

Bagian ini menandakan adanya kemajuan berkelanjutan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Kata "semakin" menunjukkan progres atau perbaikan terus-menerus dari kondisi sebelumnya. "Maju" mencerminkan pembangunan yang adaptif terhadap teknologi, inovatif, dan berorientasi pada daya saing daerah.

Sejahtera

Kesejahteraan menjadi tujuan akhir dari pembangunan daerah. Ini mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, jaminan layanan dasar, dan pemerataan hasil pembangunan. "Sejahtera" tidak hanya dalam arti ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk menciptakan Konawe Utara yang inklusif, harmonis, progresif, dan berkeadilan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, visi ini menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Konawe Utara. Adapun indikator makro untuk mengukur ketercapaian Visi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030

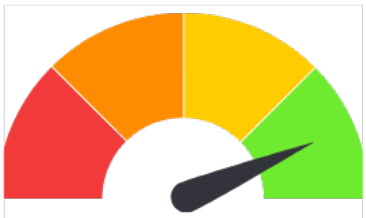		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.74	6.25	6.6	6.72	6.79	6.85	6.98
	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	77.302	68.2	87.183	92.124	97.064	102.005	106.945
	Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota	Persen	3.01	3.72	4.43	5.14	5.85	6.56	7.28
	Tingkat Kemiskinan	Persen	13.17	13.72	12.50	11.35	10.18	9.44	8.69
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.76	2.21	2.1	1.9	1.7	1.55	1.4
	Rasio Gini	Indeks	0.376	0.285	0.28	0.276	0.273	0.268	0.265
	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72.71	72.65	73	73.16	73.76	74.59	75.1
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	30.45	32.88	32.91	33.56	34.79	35.65	36.57
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	79.97	62.72	79.99	80.79	81.24	81.62	82.35

B. Misi

Perumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029. Berdasarkan visi "*Kabupaten Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera*", maka dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Maksud pelaksanaan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan produktif.*

   Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat melalui beasiswa dan bantuan pendidikan, Peningkatan kualitas pendidikan dengan mengimplementasikan program pembelajaran inovatif yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi serta akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan meraih potensinya sepenuhnya. Selanjutnya pembangunan pusat layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan fasilitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Membangun fondasi akses terhadap sumberdaya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentan.

2. *Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas.*

   Upaya mewujudkan konektivitas wilayah, maka langkah utama yaitu pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan efisien, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas lokal dan regional. Ini mencakup peningkatan jaringan jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat dan

kelancaran distribusi barang. Selanjutnya penyediaan sarana prasarana kawasan permukiman yang berkualitas mencakup upaya peningkatan lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman yang nyaman dan layak huni untuk seluruh masyarakat. Pemastian akses terhadap listrik, telekomunikasi, sumber daya air, pelayanan sarana air bersih, persampahan, air limbah dan drainase seluruh wilayah kabupaten.

3. *Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing.*
   Kolaborasi peningkatan investasi menjadi prioritas, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Investasi yang strategis diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah. Selanjutnya menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset. Arah pembangunan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up), dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional dan nasional. Penciptaan perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor- sektor yang memiliki potensi besar meliputi, pertambangan hulu, sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, serta industri hilir berbasis teknologi.

4. *Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif;*
   Langkah - langkah mencakup penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan kecepatan, dan memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan publik.

5. *Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana;*
   Menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan serta penentuan strategi mitigasi bencana perlu diperkuat dengan infrastruktur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.

6. *Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial*
   Kabupaten Konawe Utara harus mampu mengembangkan kebudayaan daerah sebagai landasan dalam memperkuat identitas masyarakat, membangun ketahanan sosial, serta mendorong kesejahteraan berbasis nilai-nilai lokal. Melalui pelestarian warisan budaya, pemberdayaan komunitas seni, integrasi budaya dalam pendidikan, serta pemanfaatan potensi budaya dalam ekonomi kreatif dan pariwisata, diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkarakter, toleran, dan bangga terhadap jati diri daerahnya. Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan, tetapi sebagai kekuatan strategis dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3.2
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 terhadap
Misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045,
Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

1. Transformasi Sosial dan Sumber Daya Manusia Unggul 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi 6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	• Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas • Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. • Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi Biru.	1. Mewujudkan Masyarakat yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya	1. Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif;
2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	• Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.	2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektifitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, Maritim serta Dunia Usaha	2. Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas;
2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah 8. Kesinambungan Pembangunan antar Periode	• Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru • Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi • Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri • Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. • Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektifitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, Maritim serta Dunia Usaha	3. Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing;

3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif 6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	• Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. • Asta Cita 1. Memperkokoh ideologi pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.	3. Menguatkan Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan berintegritas yang berpegangan teguh pada Nilai-nilai budaya kearifan lokal dan religius	4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif;
2. Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	• Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri • Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru • Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektifitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, Maritim serta Dunia Usaha	5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi 8. Kesinambungan Pembangunan antar Periode	• Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	3. Menguatkan Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan berintegritas yang berpegangan teguh pada Nilai-nilai budaya kearifan lokal dan religius	6. Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial

Sumber : Bapperida Konawe Utara Tahun 2025

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan arah strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan misi pembangunan daerah. Tujuan menggambarkan dampak (impact) keberhasilan pembangunan yang diperoleh melalui pencapaian berbagai program perangkat daerah terkait, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, realistis, dan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam paradigma perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menekankan pada capaian kinerja, baik pada tingkat dampak, hasil (outcome), maupun keluaran (output) dari suatu kegiatan, program, dan kebijakan. Oleh karena itu, tujuan RPJMD dirumuskan berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sekaligus menjawab isu-isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah.

Untuk menjaga keselarasan pembangunan, tujuan yang telah dirumuskan dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang tidak hanya menjadi instrumen pencapaian visi dan misi kepala daerah, tetapi juga memastikan konsistensi dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2045 serta keterkaitannya dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025–2029. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran ini sekaligus menjadi jembatan integrasi antara pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah juga diselaraskan hingga ke perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan. Tujuan dan sasaran daerah menjadi landasan perumusan Renstra Perangkat Daerah dalam periode lima tahun, sehingga arah kebijakan pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan arsitektur pembangunan daerah secara keseluruhan. Arsitektur tersebut dirancang mulai dari Visi Kepala Daerah, kemudian dijabarkan ke dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, hingga Kegiatan, yang secara menyeluruh membentuk sistem kinerja pembangunan daerah.

Dengan kerangka yang terstruktur ini, RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 mampu menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, konsisten, dan berkesinambungan, serta menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional. Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 pada masing-masing misi pembangunan daerah dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi : "KONAwe Utara sebagai Rumah BerSAma yang semakin Maju dan SejahteRA"										
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif	Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.23	3.39	3.45	3.65	3.78	3.85	
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.65	73	73.16	73.76	74.59	75.10	
		Sasaran 1.1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	70.50	71.09	71.21	71.47	71.73	71.95	
			Prevalensi Stunting	5	4.80	4.52	4.27	3.91	3.67	
		Sasaran 1.2 : Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	13.72	12.50	11.35	10.18	9.44	8,69	
		Sasaran 1.3. Meningkatnya derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	0.697	0.705	0.711	0.718	0.723	0.798	
		Sasaran 1.4 : Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56.98	57.63	58.28	58.93	59.58	60.23	
		Sasaran 1.5 : Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.21	2.10	1.9	1.7	1.55	1.40	
		Sasaran 1.6 : Terwujudnya pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61.75	61.9	62.35	63.12	63.98	64.31	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.51	0.49	0.45	0.42	0.39	0.37	
Misi 2: Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan	Tujuan 2: Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilann		Indeks Konektivitas Wilayah	0.05	0.18	0.25	0.35	0.42	0.55	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas		Sasaran 2.1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Indeks Infrastruktur Dasar	5.2	10.25	14.35	19.55	25.19	30.45	
Misi 3: Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing	Tujuan 3: Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.25	6.60	6.72	6.79	6.85	6.98	
			PDRB Perkapita	68.200	87.183	92.124	97.064	102.005	106.945	
			Rasio Gini (indeks)	0.285	0.280	0.276	0.273	0.268	0.265	
		Sasaran 3.1: Meningkatnya daya saing Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1.50	1.70	1.93	2.37	2.41	2.97	
		Sasaran 3.2 : Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	Indeks Ekonomi Biru Daerah	49,72	51,66	53,60	55,54	57,48	59,42	
		Sasaran 3.3 : Terwujudnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77	77.21	77.98	78.35	78.96	79.61	
		Sasaran 3.4: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Rasio PDB Pariwisata	8.75	8.90	8.95	9.10	9.15	9.35	
		Sasaran 3.5 : Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Desa Membangun	0.6986	0.7032	0.7078	0.7124	0.717	0.7216	
		Sasaran 3.6 : Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.05	0.0727	0.0740	0.0745	0.079	0.082	
			Inklusi Keuangan	2.13	2.2	2.28	2.35	2.42	2.46	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sasaran 3.7 : Meningkatnya Realisasi investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	23.14	25.89	28.64	31.39	34.14	36.89	
Misi 4: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif	Tujuan 4 : Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	68.95	69.5	70.98	71.55	72.13	72.98	
		Sasaran 5 : Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional	Indeks RB General	62.35	63,50	66.19	68.20	70.23	72.19	
Misi 5: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	32.88	32.91	33.56	34.79	35.65	36.57	
		Sasaran 5.1 : Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	156.16	156.10	156.03	155.97	155.63	155.17	
		Sasaran 5.2 : Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.72	79.99	80.79	81.24	81.62	82.35	
Misi 6: Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial	Tujuan 6 : Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53.37	53.49	53.54	54.92	55.02	55.45	
		Sasaran 6.1 : Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	Indeks Ketahanan Budaya Daerah	50	55.39	59.17	64.33	69.31	75	

Sumber : Bapperida Kab. Konawe Utara, 2025

Untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah, sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi tetapi secara langsung menjadi prioritas perangkat daerah. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara pada tahun 2030. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 3.4 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif					
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD); Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH); Prevalensi Stunting	Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%); Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas terakreditasi Paripurna (%).	Dinas Kesehatan
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persentase PPKS Mandiri (%); Capaian SPM Bidang Sosial (%)	Dinas Sosial
		Meningkatnya derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun); Harapan Lama Sekolah (tahun); Capaian SPM Pendidikan (%); Persentase Sekolah terakreditasi minimal B (%); Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%); Persentase Peningkatan prestasi olahraga (%).	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.	Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
		Terwujudnya pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk (TFR); Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Pembangunan Gender; Indeks Pemberdayaan Gender; Nilai Kab/Kota Layak Anak (Nilai).	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Misi 2 : Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilann	Indeks Konektivitas Wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI); Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan; Rasio konektivitas simpul transportasi Kabupaten/Kota (Rasio).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 3 : Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing					
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya daya saing Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persentase peningkatan kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%);Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%);	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PDRB Perkapita	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	Indeks Ekonomi Biru	Nilai Tukar Nelayan (NTN); Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Dinas Perikanan
		Terwujudnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan terhadap total kebutuhan masyarakat (%);Persentase peningkatan produksi sektor perkebunan (%);Persentase peningkatan produksi sektor pertanian (%); Persentase peningkatan produksi sektor peternakan (%).	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Rasio PDB Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang); Proporsi PDB Ekonomi Kreatif. Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif (%);Persentase desa transmigrasi yang terintegrasi dalam program pembangunan lintas sektor.	Dinas Pariwisata
		Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Desa Membangun	Persentase status desa Membangun;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persentase kenaikan pendapatan daerah.	Badan Pendapatan Daerah
			Indeks Akses Keuangan Daerah	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB; Persentase Koperasi Sehat (%);Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil.	Dinas Koperasi & UMKM
		Meningkatnya Realisasi investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target dalam RPJMD yang ditetapkan (%)	Dinas Penanaman Modal & PTSP
Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional	Indeks RB General	Opini Laporan Keuangan (opini); Maturitas SPIP (Indeks); Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD; Indeks Kualitas Kebijakan; Indeks Reformai Hukum; Indeks Tata Kelola Pengadaan; Indeks Pelayanan Publik; Indeks Berakhlak; Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD); Indeks Pembangunan Statistik; Indeks Inovasi Daerah; Indeks Merit Sistem; Indeks Pemerintahan Digital/Indeks SPBE; Tingkat Digitalisasi Arsip.	Sekretariat Daerah
Misi 5 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana					
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Jumlah desa tanggap bencana (Desa); Persentase layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%);Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 6 : Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Identitas dan Ketahanan Sosial					
Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	Indeks Ketahanan Budaya Daerah	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan (%);Persentase kewaspadaan nasional didaerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (%);Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten (%)	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Sumber : Bapperida Kab. Konawe Utara, 2025

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif		
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pembangunan RSUD yang modern sebagai pusat layanan rujukan serta peningkatan fasilitas kesehatan paripurna di seluruh kecamatan untuk menjamin layanan yang merata dan berkualitas; penambahan tenaga medis, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan; perluasan cakupan jaminan kesehatan agar seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan perlindungan layanan yang terjangkau dan berkelanjutan; penguatan promosi kesehatan dan upaya preventif dilakukan melalui edukasi masyarakat dan deteksi dini guna mendorong perilaku hidup sehat secara menyeluruh.
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, Peningkatan efektivitas bantuan sosial agar tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi darurat atau bencana, mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial untuk memperkuat ketepatan intervensi, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian kelompok rentan dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan, Percepatan pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif
	Meningkatnya derajat pendidikan	perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan Program Beasiswa Konasara yang mencakup tidak hanya biaya SPP/UKT, tetapi juga kebutuhan pendukung studi bagi seluruh mahasiswa daerah. Transformasi pembelajaran dilakukan dengan penerapan smart classroom di pendidikan dasar dan menengah, pengembangan kurikulum inovatif, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif. Peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan, pemberian tunjangan, dan fasilitas penunjang seperti laptop. Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk laboratorium dan lingkungan sekolah, dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas dan membentuk generasi unggul, kreatif, serta berdaya saing tinggi.
	Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	Pengembangan kapasitas sumber daya pemuda yang berkarakter, kreatif, dan kompetitif melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi; mendorong tumbuhnya wirausaha muda berbasis potensi lokal; memperluas partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah melalui organisasi dan kegiatan kepemudaan; serta meningkatkan pembinaan prestasi pemuda di bidang olahraga, seni, budaya, dan inovasi secara terarah dan berkelanjutan.

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	Menurunnya Angka Pengangguran	Peningkatan akses dan kualitas pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri lokal, pengembangan wirausaha baru dan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan, serta perluasan kesempatan kerja melalui investasi daerah, proyek padat karya, dan sektor unggulan berbasis potensi wilayah. Penguatan sinergi antara lembaga pelatihan, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja; penyediaan layanan informasi pasar kerja yang akurat, digital, dan mudah diakses; serta pemberdayaan kelompok rentan dan pencari kerja pemula melalui program pelatihan kerja, inkubasi wirausaha, dan pendampingan berkelanjutan
	Terwujudnya pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	Peningkatan kapasitas keluarga dalam mengelola ketahanan keluarga, pengasuhan anak, serta perencanaan kehidupan berkeluarga melalui program Bina Keluarga (remaja, lansia, dan balita), serta penguatan program generasi berencana (Genre); mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi melalui penguatan regulasi, layanan rujukan, dan edukasi publik; percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (KK, KTP, akta kelahiran, akta perkawinan/perceraian) sebagai dasar perlindungan hukum dan akses layanan publik, termasuk data terintegrasi untuk intervensi program keluarga dan gender.
Misi 2 : Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas		
Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, dan penyeberangan secara terintegrasi dengan fokus pada peningkatan kualitas jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi umum untuk memperkuat konektivitas wilayah, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat; penataan dan pengembangan Ibukota Wanggudu sebagai kawasan perkotaan yang nyaman, modern, dan mendukung pusat pelayanan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
		Mendorong peningkatan penyediaan dan kualitas sarana prasarana dasar permukiman, seperti akses air bersih, sanitasi layak, sistem drainase, dan pengelolaan persampahan. Penataan kawasan permukiman dilakukan agar tercipta lingkungan yang layak huni, aman, sehat, dan berwawasan lingkungan.
Misi 3 : Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing;		
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya daya saing Produktivitas Ekonomi	Mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, Peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku industri kecil dan menengah (IKM), Pengembangan kawasan industri dan sentra industri terpadu, Meningkatkan kemitraan antara UMKM/IKM dan industri besar serta dunia usaha lainnya, Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam proses produksi dan pemasaran produk industri pengolahan, serta Fasilitasi promosi, akses pasar, dan penguatan branding produk unggulan daerah.
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan, penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan, serta pengembangan industri berbasis kelautan seperti ekowisata bahari, rumput laut, dan biofarmakologi laut; Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir melalui pelatihan dan dukungan pembiayaan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam produksi kelautan, serta penataan ruang laut yang adaptif terhadap perubahan iklim;

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terwujudnya Kemandirian Pangan	Peningkatan kapasitas produksi pangan lokal melalui penguatan petani dan kelompok tani, optimalisasi lahan pertanian, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian yang berkelanjutan. Dukungan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana produksi, seperti irigasi, alat mesin pertanian (alsintan), benih unggul, serta pengembangan kelembagaan ekonomi petani, menjadi prioritas, penguatan cadangan pangan daerah, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan diversifikasi pangan lokal, serta penguatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian.
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi unggulan, Pengembangan *sport tourism*, peningkatan kunjungan wisatawan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan infrastruktur, promosi, dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.
	Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	transformasi kawasan perdesaan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan, melalui penguatan infrastruktur dasar desa, pengembangan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDes dan koperasi desa, serta penguatan peran desa dalam inovasi dan pengelolaan potensi wisata berbasis kearifan lokal. Dukungan diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi sumber daya alam dan budaya melalui pelatihan, pendampingan, serta digitalisasi layanan desa. Pemberian dana dusun sebesar Rp100 juta per dusun per tahun difokuskan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dalam desa, serta memperkuat partisipasi aktif seluruh warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa secara transparan, adil, dan kolaboratif.
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Memperkuat fondasi ekonomi daerah serta Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, pengendalian inflasi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, efisiensi belanja daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang stabil untuk menjaga keseimbangan dan ketahanan ekonomi daerah menghadapi dinamika nasional dan global.
	Meningkatnya Realisasi investasi Daerah	meningkatkan realisasi investasi daerah melalui penyusunan peta potensi investasi yang jelas dan prospektif, memperkuat promosi dan kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan, penguatan ekosistem investasi yang kondusif, pengembangan kawasan industri dan sentra ekonomi strategis, serta membangun kemitraan dengan investor swasta dan BUMN untuk mendorong masuknya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara; Dukungan percepatan pengembangan Kawasan industri pertambangan pada Proyek Strategis Nasional di Konawe Utara
Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif		
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional	mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan melayani melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Upaya difokuskan pada penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, penyederhanaan dan penataan kelembagaan yang efisien, serta penguatan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran. Pengawasan internal ditingkatkan berbasis risiko, didukung dengan penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan transformasi pelayanan publik yang berbasis digital. Percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan budaya kerja berintegritas dan inovatif, serta mendorong pengelolaan keuangan, aset, data statistik, dan arsip secara transparan, digital, dan akuntabel.
Misi 5 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana		

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatkan kapasitas individu, komunitas, dan pemerintah daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana serta perubahan iklim, memperkuat sistem peringatan dini dan respons tanggap darurat, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, Penguatan infrastruktur mitigasi bencana melalui pembangunan bendungan dan kolam regulasi berbasis pariwisata serta mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat dan wilayah yang tangguh menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim;
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya alam, penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan dalam seluruh sektor pembangunan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan tangguh menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
Misi 6 : Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial		
Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fondasi identitas daerah dan Ketahanan Sosial. Pendekatan dilakukan melalui pelestarian warisan budaya, penguatan kelembagaan dan komunitas budaya, integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan dan pembangunan karakter, serta pemberdayaan ekonomi berbasis budaya melalui sektor kreatif dan pariwisata budaya; Revitalisasi bahasa, adat, dan tradisi lokal, penguatan regulasi dan kelembagaan kebudayaan daerah, serta penyediaan sistem informasi kebudayaan yang mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara, 2025.

3.2.1. Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030

Periode pembangunan 2025–2029 menjadi tahap krusial bagi Kabupaten Konawe Utara untuk memperkuat fondasi pembangunan, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pentahapan pembangunan ini dirancang agar selaras dengan visi RPJMD, memanfaatkan momentum pertumbuhan pascapandemi, serta mengantisipasi tantangan global seperti perubahan iklim, dinamika pasar komoditas, dan transformasi digital.

Strategi pentahapan difokuskan pada enam isu strategis utama, yaitu: peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; penguatan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman; pengembangan daya saing ekonomi daerah; perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana; serta pembangunan kebudayaan dan ketahanan sosial. Dengan pendekatan bertahap, terukur, dan terintegrasi, diharapkan seluruh sektor dapat berkembang secara seimbang dan saling mendukung, sehingga pada akhir periode RPJMD 2025–2029 mampu mencapai visi Konawe Utara sebagai Rumah Bersama yang semakin Maju dan Sejahtera.

- Tahap 1 – Konsolidasi dan Fondasi (2026)

Pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi layanan publik dan perencanaan strategis, dimulai dengan penyelesaian pembangunan fisik awal RSUD modern dan rehabilitasi fasilitas kesehatan primer. Program beasiswa Konasara diperluas, disertai implementasi awal *smart classroom* di sekolah-sekolah percontohan. Infrastruktur dasar seperti transportasi, sarana air bersih, dan sanitasi dibangun di wilayah prioritas. Pada saat yang sama, dilakukan pemetaan potensi industri, pangan, kelautan, dan pariwisata untuk penyusunan *masterplan* sektoral, pemetaan potensi desa dengan penyaluran dana dusun pertama, serta pemetaan risiko bencana, potensi kebudayaan, dan baseline reformasi birokrasi.

- Tahap 2 – Peningkatan Kapasitas & Akselerasi (2027)

Tahap ini menekankan percepatan peningkatan kapasitas pelayanan publik dan ekonomi. RSUD mulai beroperasi penuh dengan layanan spesialis dasar dan sistem digitalisasi layanan kesehatan. *Smart classroom* diperluas ke seluruh kecamatan, guru mendapatkan pelatihan lanjutan, dan laboratorium sekolah direvitalisasi. Sarana transportasi, pelabuhan, dan sistem pengelolaan persampahan diperkuat. Pelatihan vokasi, pengembangan wirausaha muda, dan pemberdayaan UMKM/IKM dilaksanakan berbasis potensi lokal. Kawasan pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, dan sentra pengolahan hasil laut mulai dikembangkan. Sektor pariwisata juga diperkuat melalui pelatihan pelaku wisata, pembangunan fasilitas destinasi, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir tahap awal.

- Tahap 3 – Integrasi & Ekspansi (2028)

Layanan kesehatan diintegrasikan dengan sistem digital dan cakupan *Universal Health Coverage* ditingkatkan. Sektor pendidikan diperkuat dengan sinergi bersama industri dan perguruan tinggi. Transportasi dikembangkan melalui integrasi jaringan antar moda dan perluasan trayek. Sektor ekonomi diperluas dengan hilirisasi produk perikanan dan pertanian, pembangunan rumah produksi, serta pemberdayaan Desa Wisata dan *sport tourism* melalui promosi berskala nasional. Pembangunan *youth center*, taman kreatif, dan program inovasi desa dijalankan, bersamaan dengan kelanjutan pembangunan bendungan multifungsi dan kolam regulasi berbasis wisata.

- Tahap 4 – Pemantapan Kualitas & Standarisasi (2029)

Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas dan standarisasi layanan publik serta produk daerah. Kapasitas laboratorium, layanan penunjang medis, dan logistik kesehatan ditingkatkan. Teknologi pembelajaran dioptimalkan di semua jenjang, dan program vokasi diperkuat. Infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan distandarisasi sesuai ketentuan nasional. Produk unggulan daerah memperoleh sertifikasi mutu dan penguatan *branding*. Layanan destinasi wisata ditingkatkan kualitasnya dengan sertifikasi pelaku usaha, sementara kelembagaan inovasi desa diperkuat melalui kolaborasi klaster ekonomi lokal. Kebijakan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim mulai diintegrasikan ke seluruh sektor pembangunan.

- Tahap 5 – Konsolidasi Hasil & Keberlanjutan (2030)

Seluruh capaian pembangunan dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Hasil pembangunan konektivitas, perekonomian, dan tata kelola pemerintahan dikonsolidasikan. Jejaring antar desa inovasi dan kemitraan investasi jangka panjang dikembangkan, diikuti pemantapan pariwisata alam, desa wisata, dan *sport tourism*. *Roadmap* pembangunan 2031–2035 difinalisasi untuk semua sektor strategis. Identitas budaya daerah diperkuat melalui sistem informasi kebudayaan digital, sementara kelembagaan dan pembiayaan lintas sektor diperkuat demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.2.2. Pengembangan Wilayah

A. Arah Kebijakan Kewilayahan pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045

Berdasarkan arahan potensi wilayah dan sistem pusat permukiman di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diterjemahkan arah pengembangan dan pusat pertumbuhan yang dapat menjadi pedoman dalam merumusakan kebijakan kewilayahan maupun kebijakan sektoral. Arah pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah menjadi acuan dalam menentukan pengembangan kawasan secara terintegrasi khususnya dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan yaitu:

1. Kawasan Industri Pertambangan, meliputi :
   - Koridor Barat, meliputi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara;
   - Koridor Timur, meliputi Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara;
   - Koridor Selatan, meliputi Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan;
   - Pulau Buton, meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton Selatan.
2. Kawasan Industri Terpadu Kendari (Kota Kendari);
3. Kawasan Sistem Agropolitan Sultra (Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan); dan
4. Kawasan Sistem Minapolitan, meliputi:
   - Buton (Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau);
   - Muna (Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat).
5. Kawasan Pesisir Kendari dan sekitarnya di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Kawasan pariwisata terdapat di Kabupaten Wakatobi yang didukung koridor pariwisata pendukung Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Kendari dan sekitarnya serta Baubau dan sekitarnya.

Berdasarkan Arah Kebijakan Kewilayahan pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, Kabupaten Konawe Utara diarahkan menjadi salah satu Kawasan Industri Pertambangan Koridor Timur, bersama dengan Kabupaten Konawe. Adapun tujuan pengembangan Kawasan Industri Pertambangan yaitu untuk Mengembangan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri berbasis potensi sumber daya alam pada sektor pertambangan, dengan arah pengembangan sebagai berikut :

a. Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang (smelter) yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan;
b. Pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan;
c. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan
d. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung yang ada di sekitar kawasan industri pertambangan.

Gambar 3.1. Peta Arah Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

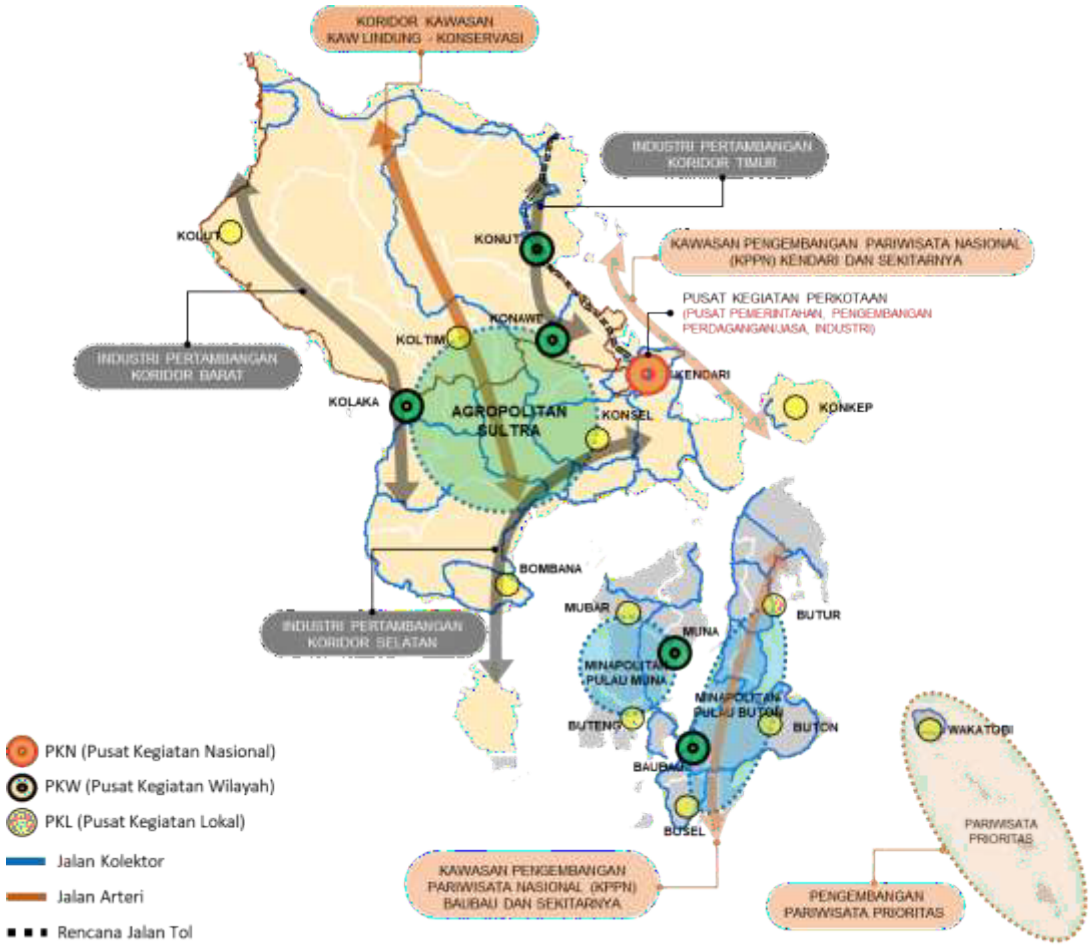

Sumber: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045

B. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada RPJMN 2025-2029

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang setidaknya terdapat 4 pembagian kawasan di Sulawesi Tenggara, yaitu:

1) Kawasan Pertumbuhan (A)
   - Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi (A.1)
   - Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe (A.2)
   - Kawasan Industri Pengelolaan Hasil Tambang Konawe (A.3)
   - Kawasan Industri Pengelolaan Hasil Tambang Kolaka (A.4)

2) Kawasan Komoditas Unggulan (B)
   - Kawasan Perkebunan Kakao Kolaka Utara (B.1)
   - Kawasan Perkebunan Kakao Kolaka Timur (B.2)
   - Kawasan Perikanan Tangkap Kota Kendari (B.3)
   - Kawasan Perikanan Tangkap Kota Baubau (B.4)
   - Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Buton (B.5)

- Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Muna (B.6)
- Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Bombana (B.7)
- Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Kolaka (B.8)
- Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Muna Barat (B.9)

3) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (C)
   - Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Bombana (C.1)
   - Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka Timur (C.2)
   - Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Selatan (C.3)
   - Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe (C.4)

4) Kawasan Afirmasi (D)
   - Kawasan Transmigrasi Asinua, Kabupaten Konawe (D.1)
   - Kawasan Transmigrasi Anawua, Kabupaten Kolaka (D.2)
   - Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kabupaten Muna (D.3)

Pada RPJMN Tahun 2025-2025, juga terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, antara lain:
1) Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
2) Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
3) Kawasan Industri ASPIRE Stargate
4) Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara

Gambar 3.2. Arah Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

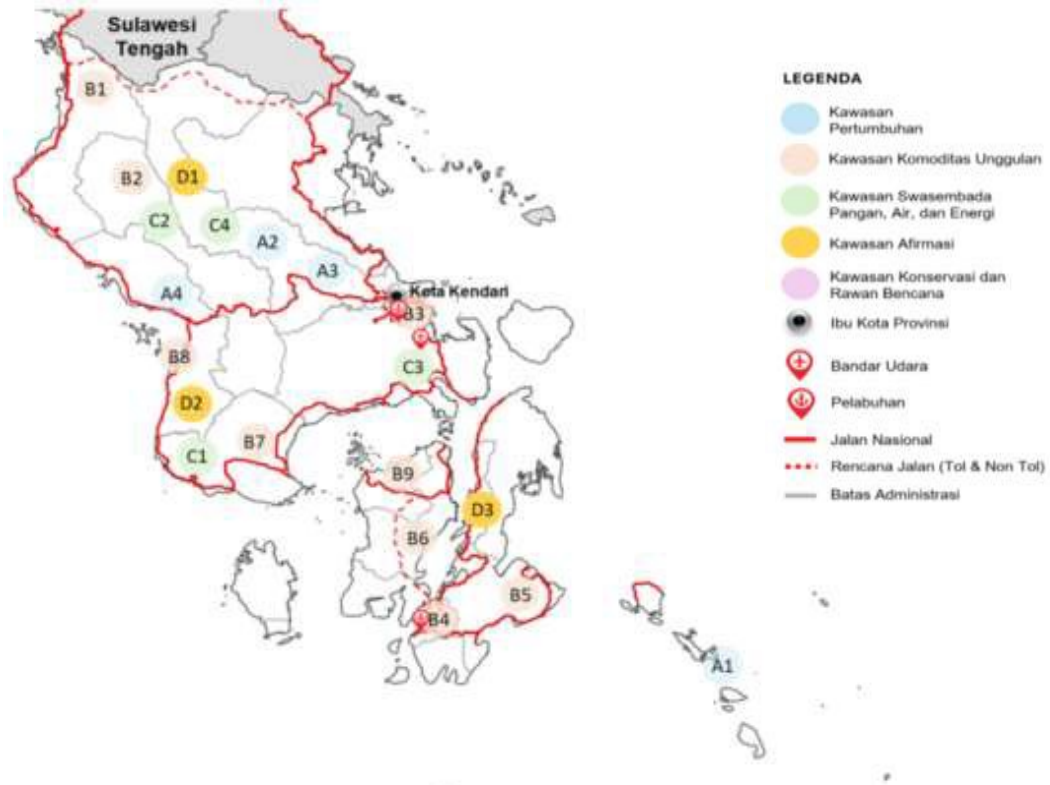

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Pada RPJMN 2025–2029, Kabupaten Konawe Utara ditetapkan sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan keberadaan dua kawasan industri utama di Kecamatan Langgikima, yaitu Kawasan Industri ASPIRE Stargate dan Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara. Kedua kawasan ini berfungsi sebagai pusat hilirisasi mineral dan pengembangan industri berbasis teknologi hijau, yang sejalan dengan agenda nasional transisi energi serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Kehadiran PSN tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Konawe Utara melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

C. Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Konawe Utara dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Kabupaten Konawe Utara merupakan bagian dari wilayah daratan strategis Sulawesi Tenggara yang diarahkan sebagai Kawasan Industri Pertambangan, yang didukung dengan kawasan pertambangan wilayah sekitarnya. Peran ini tidak hanya menempatkan Konawe Utara sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga sebagai wilayah yang harus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Gambar 3.3. Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

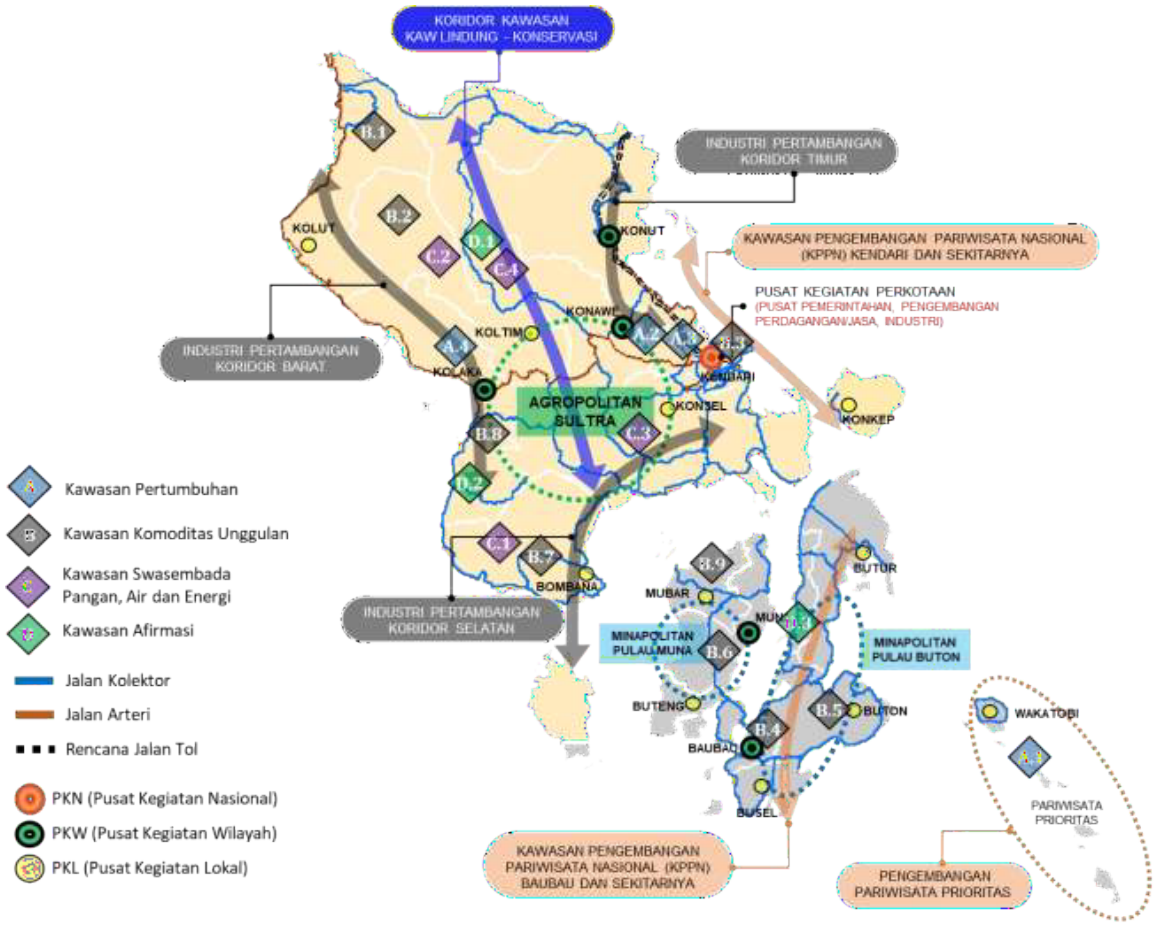

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029, Highlight Indikasi Intervensi yang dilaksanakan antara lain melalui :

a. Pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan: Jalan Shortcut Kawasan Industri Konawe dan Jembatan Tabanggele-Pebunooha
b. Pembangunan industri Stainless Steel: monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian dalam negeri.
c. Pengembangan industri nikel Sulfat: monitoring dan evaluasi perkembangan Industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi.
d. Fasilitasi dalam rangka peningkatan investasi: Pembangunan Industri Battery Precursor berbasic NMC (Nikel- Mangan-Kobalt) serta Pengembangan Industri Katoda berbasil Nikel
e. Penguatan struktur industri dalam negeri: Pengembangan Industri Battery Pack berbasis NMC
f. Tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi: rekomendasi keprospekan sumber daya mineral.
g. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen peta jalan dekarbonisasi industri nikel nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional.
h. Harmonisasi kebijakan industri nikel: kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel.
i. Peningkatan penerapan standarisasi di industri nikel: standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produk.
j. Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia: fasilitasi pendampingan SMK yang link and match dengan industri, pelatihan vokasi industri upskilling dan reskilling, serta asessor lisensi dan asessor kompetensi.
k. Ketersediaan bahan baku industri logam dasar yang berkualitas dan kompetitif: neraca penyediaan dan permintaan besi baja, baja paduan, dan produk turunannya nasional.
l. Kepastian pasokan dan harga energi untuk industri logam dasar: evaluasi pemanfaatan HGBT di industri logam dasar.
m. Peningkatan utilitas kapasitas terpasang industri besi-baja: fasilitasi industri logam dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN.
n. Pengembangan Industri Special Steel: fasilitasi Industri Special Steel dalam rangka peningkatan investasi.
o. Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) di Industri Logam Dasar: fasilitasi investasi untuk Industri Pemotongan Scrap Logam.
p. Optimalisasi penerapan standarisasi di Industri Logam Dasar: penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam.
q. Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat: Pembangunan jalan akses KI Konawe; Peningkatan dan preservasi jalan akses KI Pomalaa (Kolaka), KI di Konawe Utara, kawasan pendukung industri dan kawasan pertambangan termasuk akses jalan yang menghubungkan KI dengan kawasan perkotaan di sekitarnya di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana (akses ke Kota Kendari)
r. Pengembangan Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industrial Park dan Kawasan Industri Virtue Dragon Nickel Industry.
s. Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI prioritas.
t. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus yang memperhatikan keberlanjutan wilayah pesisir sebagai pendukung industri pertambangan yang terintegrasi dengan jaringan jalan.

u. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku, pengelolaan persampahan, dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan.

D. Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

Perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah sekaligus menangkap peluang strategis, baik di tingkat regional maupun nasional. Sebagai bagian dari wilayah daratan strategis Sulawesi Tenggara, Konawe Utara memiliki peran vital dalam mendukung pengembangan kawasan industri, sektor pertanian, dan pariwisata. Posisi strategis ini menjadikan Konawe Utara sebagai simpul pertumbuhan ekonomi yang terhubung dengan pusat-pusat ekonomi regional.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, serta karakteristik sosial-ekonomi di setiap kecamatan. Dengan pendekatan tersebut, strategi pembangunan tidak dibuat seragam, melainkan disusun berdasarkan klasterisasi potensi, agar setiap kecamatan dapat berkembang sesuai dengan keunggulan dan peran strategisnya masing-masing.

Kecamatan yang memiliki basis industri dan pertambangan diarahkan untuk menjadi pusat hilirisasi mineral serta pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan. Sementara itu, kecamatan dengan fungsi pemerintahan dan jasa dikembangkan sebagai pusat pelayanan publik, perdagangan, dan jasa modern yang mampu menggerakkan dinamika ekonomi wilayah.

Di sisi lain, kecamatan dengan kekuatan pada sektor pertanian dan perkebunan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pusat agroindustri, serta menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi pariwisata bahari dan alam diarahkan sebagai destinasi ekowisata unggulan yang ramah lingkungan, berbasis masyarakat, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Dengan pendekatan kewilayahan tersebut, Klasterisasi Pembangunan Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Klaster Industri dan Pertambangan (Kecamatan: Langgikima, Molawe dan Motui)
   - Kebijakan:
     Menjadikan Konawe Utara sebagai simpul hilirisasi mineral strategis dan penggerak industri berbasis sumber daya alam, sejalan dengan penetapan tiga Kawasan Industri Strategis dalam RPJMN 2025–2029.
   - Highlight Intervensi:
     1) Penguatan Kawasan Industri ASPIRE Stargate dan Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara sebagai pusat energi bersih dan hilirisasi mineral.
     2) Peningkatan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan energi untuk mendukung kegiatan industri.
     3) Penerapan green industry untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.
     4) Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasi dan link-and-match dengan kebutuhan industri.
2. Klaster Pemerintahan, Jasa, dan Layanan Publik (Kecamatan: Asera dan Lasolo)
   - Kebijakan:
     Mengembangkan Asera sebagai pusat pemerintahan, jasa, dan layanan publik, serta memperkuat peran Lasolo sebagai simpul konektivitas dan pusat perdagangan regional.

- Highlight Intervensi:
  1) Penguatan pusat pemerintahan modern di Asera dengan infrastruktur layanan publik berbasis digital.
  2) Peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial sebagai pusat pelayanan masyarakat.
  3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terkoneksi dengan daerah hinterland.
  4) Pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

3. Klaster Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (Kecamatan: Wiwirano, Andowia, Oheo, Landawe, Lembo, Sawa
   - Kebijakan:
     Memperkuat basis ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat sebagai pilar ketahanan pangan dan sumber pertumbuhan inklusif.
   - Highlight Intervensi:
     1) Modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan digitalisasi sistem produksi.
     2) Pengembangan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kakao, dan kelapa.
     3) Peningkatan jaringan irigasi, akses air bersih, serta infrastruktur pertanian.
     4) Fasilitasi akses pasar, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan petani.
     5) Pengembangan kawasan perikanan darat dan usaha kecil berbasis pangan lokal.

4. Klaster Pariwisata Bahari dan Ekowisata (Kecamatan: Lasolo Kepulauan dan Wawolesea)
   - Kebijakan:
     Mendorong pariwisata bahari dan ekowisata pesisir sebagai sektor unggulan baru yang mendukung diversifikasi ekonomi daerah.
   - Highlight Intervensi:
     1) Pengembangan destinasi wisata unggulan di pulau-pulau kecil dan pesisir.
     2) Penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata: dermaga wisata, transportasi laut, homestay, dan sanitasi lingkungan.
     3) Promosi pariwisata berbasis digital dan jejaring promosi terpadu dengan pusat-pusat wisata Sulawesi Tenggara.
     4) Peningkatan keterampilan SDM pariwisata lokal melalui pelatihan hospitality dan ekonomi kreatif.
     5) Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Dengan klasterisasi ini, pembangunan wilayah Kabupaten Konawe Utara akan lebih terarah, adaptif, dan berbasis potensi lokal, sehingga setiap kecamatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi daerah 2025–2029.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah berupa rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya (tematik) namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna pelaksanaan misi pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

No.	Misi	Arah Kebijakan						Ket
		TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)	
1.	Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif	pembangunan tahap awal RSUD modern sebagai pusat layanan rujukan regional; pemetaan kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan paripurna di seluruh kecamatan, serta penyusunan rencana penguatan tenaga kesehatan dan sistem pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.	Penyelesaian struktur fisik RSUD dan rehabilitasi fasilitas kesehatan primer yang belum memenuhi standar; Pengadaan alat medis esensial dan peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis di Puskesmas; Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui subsidi APBD bagi warga kurang mampu, serta edukasi kesehatan mulai digalakkan secara masif di masyarakat.	Pengoperasian penuh RSUD dengan layanan spesialis dasar, peningkatan efektivitas sistem rujukan antar fasilitas, dan pemantapan pelayanan kesehatan ibu-anak serta penyakit tidak menular; Digitalisasi sistem layanan kesehatan dasar untuk mendukung efisiensi dan pemantauan mutu layanan; Peningkatan promosi kesehatan melalui pendekatan komunitas dan lintas sektor.	Integrasi layanan kesehatan digital di RSUD dan Puskesmas, termasuk penerapan rekam medis elektronik dan sistem antrian digital; Penguatan kualitas SDM Kesehatan melalui pelatihan lanjutan; Peningkatan cakupan jaminan kesehatan, mempertahankan capaian *universal health coverage* (UHC), perluasan akses layanan bagi kelompok rentan di daerah terpencil.	Peningkatan kapasitas laboratorium, layanan penunjang medis, dan logistik kesehatan; Penguatan Sistem rujukan RSUD untuk layanan spesialis, dan kebijakan kesehatan diintegrasikan dengan sektor pendidikan, sosial, dan lingkungan guna mendorong pencegahan penyakit serta perilaku hidup sehat.	Konsolidasi dan evaluasi menyeluruh seluruh sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang telah dibangun; RSUD, Puskesmas, serta sistem jaminan kesehatan ditata sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi; tercapainya layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat menuju visi daerah yang sehat, produktif, dan berdaya saing.	
		Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak; Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain	Peningkatan cakupan dan kualitas program bantuan sosial serta memastikan penyaluran tepat sasaran berbasis DTKS terbaru dan sistem digital terintegrasi. Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain	Penguatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial serta pengembangan skema perlindungan sosial darurat menghadapi bencana atau krisis ekonomi serta Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain.	Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha produktif, serta Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain	Integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi daerah secara lintas sektor untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kemandirian keluarga miskin.	Evaluasi menyeluruh dan pemantapan keberlanjutan sistem perlindungan sosial adaptif yang responsif terhadap risiko sosial, ekonomi, dan bencana sebagai fondasi pengurangan kemiskinan berkelanjutan.	
		Perluasan Program Beasiswa Konasara	Implementasi smart classroom di sekolah	Perluasan penerapan smart classroom ke	Integrasi sistem pembelajaran digital	Optimalisasi pemanfaatan teknologi	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian beasiswa,	

No.	Misi	Arah Kebijakan						Ket
		TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)	
		dengan mencakup biaya SPP/UKT dan kebutuhan pendukung seperti biaya asrama dan uang saku; Pemetaan kebutuhan smart classroom dan infrastruktur sekolah. Pelatihan dasar bagi guru terkait penggunaan teknologi pembelajaran; serta Rehabilitasi ringan sarana pendidikan di daerah prioritas.	percontohan dasar dan menengah; Pengembangan kurikulum inovatif berbasis digital dan kearifan lokal; Pelatihan lanjutan guru untuk pembelajaran tematik dan teknologi digital; serta Peningkatan bantuan fasilitas belajar bagi mahasiswa penerima beasiswa.	sekolah-sekolah di wilayah kecamatan. Peningkatan insentif dan pemberian sarana kerja guru (laptop, proyektor, akses internet); Percepatan pembangunan dan revitalisasi laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi.	dengan platform pemantauan capaian siswa dan kinerja guru; Penguatan program pelatihan berkelanjutan bagi guru (inovasi pembelajaran dan manajemen kelas digital); Penambahan sarana smart class di sekolah-sekolah; pengembangan kelas unggulan.	pembelajaran secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan; Pengembangan program vokasi pada tingkat menengah yang relevan dengan potensi daerah; Penguatan sinergi pendidikan dengan dunia industri dan perguruan tinggi.	teknologi pembelajaran, dan mutu guru; Konsolidasi seluruh kebijakan pendidikan berbasis teknologi, insentif tenaga pendidik, dan penguatan infrastruktur sebagai kebijakan permanen; Penguatan daya saing pendidikan daerah melalui sistem pembelajaran adaptif, merata, dan berbasis digital.	
		Penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda melalui pelatihan dasar kepemudaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara.	Pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis potensi lokal dengan pelatihan usaha, akses permodalan, dan pendampingan UMKM pemuda.	Pembinaan prestasi pemuda melalui kompetisi dan penghargaan di bidang olahraga, seni, budaya, dan teknologi inovatif.	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa dan lingkungan melalui program pemuda pelopor, karang taruna, dan kegiatan sosial.	Penguatan organisasi dan jaringan kepemudaan melalui fasilitasi kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan forum komunikasi pemuda.	Penyediaan ruang ekspresi, kreativitas, dan inovasi melalui pembangunan *youth center*, taman kreatif, dan fasilitas digital pemuda.	
		Pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan potensi wirausaha lokal, serta penyusunan roadmap pelatihan vokasi dan pengembangan UMKM, perencanaan pelatihan kerja berbasis permintaan pasar, menyusun data dasar UMKM dan rencana inkubasi wirausaha pemula.	Pelatihan kerja berbasis kompetensi dan program pemagangan industri, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha mikro, Pendampingan usaha dan fasilitasi akses pembiayaan awal mulai diberikan kepada peserta pelatihan dan wirausaha baru.	Penguatan Sinergi antara lembaga pelatihan, dunia usaha, koperasi, dan pemerintah daerah melalui forum kolaborasi tenaga kerja dan UMKM; perluasan jangkauan bursa kerja digital, pengembangan model inkubasi bisnis serta promosi UMKM untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.	Penguatan program padat karya dan wirausaha produktif di desa, dengan integrasi antara pelatihan kerja dan pengembangan unit usaha berbasis komunitas. Peningkatan akses pembiayaan melalui kemitraan perbankan, Pengembangan sistem monitoring lulusan pelatihan dan dampaknya terhadap pengurangan pengangguran.	Peningkatan kualitas dan skala program, termasuk pelatihan lanjutan, sertifikasi kompetensi, digitalisasi pemasaran UMKM, dan pembentukan koperasi tenaga kerja; Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pelatihan dan wirausaha dilakukan sebagai dasar penyesuaian kebijakan.	Konsolidasi hasil dan penguatan kelembagaan pelatihan serta UMKM; Penyusunan roadmap kolaboratif ketenagakerjaan dan kewirausahaan 2031–2035, serta pengembangan model program berkelanjutan bagi kelompok rentan, perempuan, dan generasi muda.	

No.	Misi	Arah Kebijakan						Ket
		TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)	
		Pemetaan dan identifikasi keluarga sasaran program Bina Keluarga serta membentuk kelompok Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia di tingkat desa/kelurahan; Pemetaan kondisi dan kebutuhan perempuan serta anak sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan yang responsif gender; Pendataan dan pemetaan kelompok masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap di seluruh wilayah.	Pelatihan kader Bina Keluarga dan fasilitator Genre untuk meningkatkan kapasitas pendampingan keluarga dan remaja di wilayah binaan; Pembentukan dan penguatan kelompok perempuan serta pelatihan keterampilan ekonomi berbasis komunitas; Pelaksanaan layanan jemput bola untuk perekaman KTP dan penerbitan dokumen kependudukan, terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan.	Peningkatan akses informasi, edukasi, dan konseling keluarga terkait pengasuhan anak, kesehatan reproduksi remaja, dan perencanaan keluarga melalui media dan layanan berbasis komunitas; Peningkatan kapasitas layanan pengaduan dan rujukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelatihan bagi petugas layanan; Integrasi layanan pencatatan sipil dengan pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.	Integrasi kegiatan Bina Keluarga dan Genre dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial di tingkat desa serta memperkuat dukungan lintas sektor; Penerbitan dan harmonisasi regulasi daerah yang melindungi perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan; Pemanfaatan teknologi dan sistem digital untuk mempercepat pencatatan dan validasi data kependudukan secara real-time.	Peningkatan partisipasi aktif keluarga, remaja, dan komunitas dalam kegiatan ketahanan keluarga, bina remaja, dan promosi keluarga sehat dan produktif. Penguatan kampanye dan edukasi publik tentang kesetaraan gender, peran perempuan, serta pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat; Pengembangan sistem data kependudukan terintegrasi untuk mendukung intervensi program keluarga, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender.	Evaluasi menyeluruh dan penguatan kelembagaan Bina Keluarga dan Genre sebagai program strategis berkelanjutan dalam pembangunan keluarga berkualitas; Evaluasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta integrasi ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan; Evaluasi efektivitas pelayanan administrasi kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik dan perlindungan hukum warga.	
2.	Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas	Penyusunan rencana induk transportasi daerah, pemetaan infrastruktur strategis darat dan laut, serta identifikasi kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi umum. Penguatan kelembagaan dan regulasi pendukung terintegrasi; Melanjutkan pengembangan dan penataan Ibukota Wanggudu menjadi Kawasan perkotaan yang nyaman dan modern	Pembangunan fisik awal berupa peningkatan kualitas jalan kabupaten prioritas, pembangunan dermaga dan tambatan perahu di wilayah pesisir, serta pengadaan sarana transportasi umum lokal. Fasilitas pendukung seperti halte, rambu lalu lintas, dan terminal kecil mulai dibangun untuk mendukung layanan transportasi dasar; Melanjutkan pengembangan dan penataan Ibukota Wanggudu	Mendorong integrasi antar moda dan perluasan jaringan konektivitas ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Trayek transportasi umum diperluas, sementara pemanfaatan teknologi informasi transportasi mulai diterapkan guna meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengawasan; Melanjutkan pengembangan dan penataan Ibukota Wanggudu	Peningkatan kualitas dan standardisasi infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan agar sesuai standar teknis nasional. Infrastruktur transportasi dikaitkan secara strategis dengan pengembangan kawasan industri, pertanian, dan pariwisata, serta memperhatikan aspek tata ruang dan keberlanjutan lingkungan; Melanjutkan pengembangan dan penataan Ibukota Wanggudu	Pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun, penguatan manajemen trayek dan armada transportasi umum, serta peningkatan peran pelabuhan dan jaringan jalan dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat secara efisien; Melanjutkan penataan kawasan perkantoran, permukiman, dan fasilitas umum pendukung layanan pemerintahan dan sosial.	Evaluasi capaian konektivitas wilayah dan kualitas layanan transportasi secara menyeluruh. Pemerintah merumuskan rencana lanjutan berbasis hasil dan kebutuhan, serta menyiapkan arah pembangunan infrastruktur transportasi untuk RPJMD periode 2031–2035 secara lebih strategis dan berkelanjutan.	

No.	Misi	Arah Kebijakan						Ket
		TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)	
		Pemetaan kondisi eksisting sarana prasarana permukiman, termasuk akses air bersih, sanitasi, drainase, dan sistem persampahan. Penyusunan rencana induk permukiman, kajian kebutuhan teknis, dan identifikasi kawasan prioritas dilakukan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di wilayah permukiman padat dan rentan, serta pengembangan sistem drainase sederhana di kawasan rawan genangan. Penataan awal kawasan permukiman berbasis lingkungan dimulai pada beberapa lokasi pilot dengan pendekatan padat karya dan partisipatif.	Pembangunan MCK komunal, sistem pengelolaan air limbah domestik, dan drainase kawasan. Pemerintah daerah mulai memperkuat sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat serta pengadaan alat pengangkut sampah di desa-desa strategis.	Integrasi infrastruktur permukiman dengan rencana tata ruang dan pengembangan kawasan permukiman baru. Penataan permukiman kumuh ditingkatkan dengan dukungan fasilitas sosial, penghijauan, dan jalur evakuasi bencana untuk mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan sehat.	Peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur dasar dilakukan melalui pemeliharaan rutin, penguatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan permukiman, serta penyusunan sistem pemantauan kualitas air, sanitasi, dan drainase secara terpadu	Evaluasi dan penguatan model pengelolaan permukiman terpadu yang sudah berjalan, sekaligus perluasan praktik baik ke seluruh kecamatan. Pemerintah menyiapkan roadmap penataan kawasan permukiman berkelanjutan jangka panjang dengan dukungan kebijakan lintas sektor.	
3.	Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing;	Melakukan pemetaan potensi industri pengolahan unggulan berbasis sumber daya lokal dan menyusun roadmap pengembangan industri kecil dan menengah (IKM); mengidentifikasi sentra IKM yang memiliki peluang hilirisasi.	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku IKM di sektor pengolahan; fasilitasi peralatan sederhana, akses bahan baku, dan akses pembiayaan usaha mikro dan kecil.	Mengembangkan kawasan/sentra industri kecil berbasis komoditas unggulan, memulai pembangunan infrastruktur pendukung industri	Memperkuat kemitraan antara IKM dan industri menengah/besar melalui skema off-taker dan koperasi produksi; mulai mendorong digitalisasi proses produksi dan pemasaran IKM pengolahan.	Mendorong sertifikasi produk dan standardisasi mutu untuk memperluas akses pasar; mengintensifkan promosi produk pengolahan unggulan daerah melalui pameran, marketplace, dan kolaborasi antar daerah.	Mengevaluasi kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB; menyusun strategi lanjutan 2031–2035 dengan fokus pada peningkatan nilai tambah, ekspor, dan integrasi rantai pasok industri daerah.	
		Pemetaan potensi sumber daya laut dan pesisir, pendataan nelayan dan pelaku usaha perikanan, Pengembangan kluster ikan nila salin untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan tangkap, serta penyusunan rencana aksi ekonomi biru daerah yang selaras	Pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya ikan mengenai alat tangkap ramah lingkungan, teknik budidaya laut berkelanjutan, Pengembangan kluster ikan nila salin untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan	Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perikanan seperti tambatan perahu, tempat pelelangan ikan (TPI), dan cold storage; serta penguatan kelembagaan koperasi nelayan dan kemitraan usaha perikanan untuk memperluas akses produksi dan pemasaran.	Hilirisasi produk perikanan dan budidaya laut melalui pelatihan pengolahan, sertifikasi mutu, serta pengembangan sentra pengolahan hasil laut yang bernilai tambah dan siap dipasarkan ke luar daerah.	Mendorong digitalisasi layanan melalui sistem data kelautan dan nelayan, serta penerapan teknologi bersih dan inovasi alat tangkap modern, Penguatan pengawasan kawasan pesisir dan perlindungan sumber daya ikan	konsolidasi hasil, evaluasi capaian penerapan ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan, serta penyusunan roadmap kelautan berkelanjutan jangka panjang, menjaga keseimbangan antara produktivitas dan konservasi.	

No.	Misi	Arah Kebijakan						Ket
		TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)	
		dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.	tangkap serta percontohan kawasan budidaya berbasis komunitas dan konservasi ekosistem pesisir.					
		Pemetaan potensi lahan pangan, identifikasi komoditas strategis, dan penyusunan roadmap kemandirian pangan daerah. Program ini mencakup pendataan petani dan kelembagaan tani, serta perencanaan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, lumbung pangan, dan distribusi benih lokal. Penguatan data dukung Program Nasional "percetakan Sawah"	Penguatan produksi melalui penyediaan benih/bibit unggul, bantuan alsintan, serta pelatihan teknis budidaya berkelanjutan kepada petani; penguatan cadangan pangan daerah dan intervensi awal pengendalian harga pangan pokok di tingkat lokal. Melaksanakan dukungan Teknis Program Nasional "percetakan Sawah"	Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi. Diversifikasi pangan lokal diperkuat melalui pengembangan komoditas non-beras (seperti jagung, umbi, sagu, hortikultura), serta promosi konsumsi pangan lokal yang bergizi dan terjangkau. Akselerasi Percetakan Sawah secara intensif.	Penguatan hilirisasi produk pertanian dan sistem distribusi hasil tani yang efisien, termasuk pengembangan rumah produksi, pengolahan hasil, dan digitalisasi pasar tani. Kerja sama antar kelompok tani dan koperasi diperluas untuk memperkuat daya saing produk lokal. Akselerasi Percetakan Sawah secara intensif.	Peningkatan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui program Kebun Pekarangan, pemanfaatan lahan tidur. Cadangan pangan strategis dan sistem informasi harga serta stok pangan daerah dioptimalkan.	Konsolidasi hasil, evaluasi capaian, serta menyusun strategi lanjutan berbasis data ketahanan pangan wilayah. Penerapan model kemandirian pangan berkelanjutan di seluruh kecamatan dimantapkan, disertai peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kestabilan pasokan dan konsumsi pangan lokal.	
		Menetapkan arah pembangunan pariwisata melalui pemetaan potensi wisata alam, Desa Wisata, dan lokasi *sport tourism*, penyusunan masterplan destinasi unggulan termasuk rencana pembangunan sirkuit balap motor, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi berbasis alam dan event.	Memulai pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar menuju kawasan wisata alam prioritas, Desa Wisata, dan lokasi *sport tourism*, serta infrastruktur teknis sirkuit sebagai langkah awal menarik minat wisatawan dan investor.	Mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi alam, Desa Wisata, dan lokasi *sport tourism* melalui pelatihan pelaku wisata, penguatan UMKM, dan keterlibatan komunitas dalam mengelola atraksi wisata berbasis alam dan olahraga.	Mengintensifkan promosi dan pemasaran destinasi wisata alam, Desa Wisata, dan *sport tourism* secara terpadu melalui media digital, event otomotif dan budaya skala besar, serta kolaborasi promosi dengan pelaku industri pariwisata dan komunitas pecinta alam serta otomotif.	Meningkatkan kualitas layanan destinasi wisata melalui standar pelayanan profesional, sertifikasi pelaku usaha wisata, pengembangan narasi branding kawasan wisata alam dan sirkuit balap motor sebagai daya tarik ganda Konawe Utara.	Melakukan konsolidasi dan evaluasi pembangunan pariwisata secara menyeluruh, menyusun roadmap pengembangan jangka panjang wisata alam, Desa Wisata, dan lokasi sport tourism, serta memperkuat tata kelola, kemitraan, dan skema pembiayaan berkelanjutan.	

No.	Misi	Arah Kebijakan						Ket
		TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)	
		Melakukan pemetaan potensi lokal dan infrastruktur dasar di seluruh desa dan dusun, serta mengidentifikasi kebutuhan dan peluang inovasi berbasis desa. Disusun pedoman teknis pemanfaatan dana dusun Rp100 juta/dusun/tahun yang mendorong partisipasi warga, serta penguatan tata kelola pembangunan dusun secara transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Penerapan alokasi dana dusun secara menyeluruh untuk pembangunan infrastruktur dasar, sarana ekonomi produktif, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Desa-desa didorong untuk mengembangkan solusi inovatif sederhana dalam pengelolaan air bersih, pertanian terpadu, pengolahan hasil panen, atau digitalisasi layanan dasar desa.	Pembinaan dan fasilitasi desa inovasi, yaitu desa yang mampu mengembangkan model tata kelola, pelayanan publik, dan ekonomi lokal berbasis kreativitas dan teknologi tepat guna. Dana dusun diarahkan juga untuk memicu ide dan eksperimen sosial-ekonomi warga, seperti bank sampah digital, koperasi digital, atau dashboard produksi pertanian dusun.	Penguatan kelembagaan inovasi desa dengan membentuk tim inovasi desa/dusun, pelatihan kader inovasi, dan sinergi dengan lembaga pendidikan atau mitra riset. Didorong replikasi inovasi sederhana antar desa, serta penyusunan dokumen praktik baik dan rencana pengembangan desa inovasi berkelanjutan.	Pengembangan jejaring antar desa inovasi dan kolaborasi klaster ekonomi desa berbasis hasil inovasi lokal seperti pengolahan komoditas unggulan, sistem irigasi inovatif, atau layanan publik berbasis teknologi sederhana. Dana dusun digunakan untuk memperkuat rantai pasok lokal, digitalisasi kelembagaan ekonomi, dan program pengembangan wirausaha muda desa.	Evaluasi keberhasilan program dana dusun dan desa inovasi, serta menyusun kebijakan replikasi model desa inovatif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Disusun roadmap 2031–2035 untuk perluasan desa inovasi dan penguatan dukungan kelembagaan, teknologi, dan pembiayaan desa berbasis hasil evaluasi.	
		Menyusun kebijakan penguatan fondasi ekonomi makro daerah dan pemetaan potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).	Meningkatkan PAD melalui optimalisasi retribusi dan pajak daerah serta memperkuat efisiensi belanja daerah untuk mendukung pembangunan prioritas.	Mengendalikan inflasi daerah dengan memperkuat ketahanan pangan, distribusi logistik, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.	Memperkuat koordinasi kebijakan fiskal daerah dengan sektor terkait untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.	Mengembangkan instrumen kebijakan ekonomi daerah untuk meningkatkan ketahanan menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.	Melakukan evaluasi dan pemantapan kebijakan stabilitas ekonomi makro daerah untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.	

No.	Misi	Arah Kebijakan						Ket
		TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)	
		Pengembangan dan Penyusunan peta potensi investasi daerah secara sektoral dan wilayah (spasial) yang terintegrasi dengan tata ruang dan rencana pengembangan kawasan industri pertambangan PSN. Selain itu, dilakukan identifikasi hambatan investasi dan pembentukan tim percepatan investasi daerah.	Promosi investasi aktif melalui forum peluang usaha (investment forum), penyediaan profil peluang investasi digital, serta memperluas kerja sama promosi dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan mitra strategis. Di saat yang sama, mulai penataan kawasan potensial investasi di sekitar wilayah PSN.	Penyederhanaan prosedur perizinan dan meningkatkan pelayanan melalui optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) serta integrasi dengan sistem pelayanan daerah. Dibentuk layanan investasi terintegrasi satu pintu dengan pendekatan cepat, transparan, dan berbasis data.	Pembangunan dan penguatam ekosistem investasi yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur penunjang, jaminan kepastian hukum, ketersediaan lahan investasi, dan pembentukan forum komunikasi pemerintah-investor. Regulasi daerah mulai diarahkan mendukung investasi hijau dan berkelanjutan.	Mendorong pengembangan kawasan industri dan sentra ekonomi strategis, terutama yang terhubung dengan koridor PSN, Promosi klaster industri unggulan lokal diperkuat.	Mengonsolidasikan kemitraan jangka panjang antara pemerintah daerah, investor swasta, dan BUMN untuk menciptakan investasi yang inklusif, berdaya saing tinggi, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Evaluasi efektivitas dukungan daerah terhadap percepatan kawasan industri PSN dilakukan untuk penguatan arah kebijakan ke depan.	
4.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif	Transformasi layanan publik difokuskan pada pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas layanan digital. Sistem SPBE diperluas cakupannya dengan mengintegrasikan layanan antar-OPD. Pengelolaan aset, data, dan arsip ditingkatkan melalui platform digital dan penguatan SDM teknis.	Pemetaan baseline reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah, menyusun roadmap reformasi birokrasi daerah, dan memperkuat komitmen pimpinan OPD terhadap pelaksanaan RB. Penguatan awal dilakukan pada sistem merit, pembentukan tim RB internal, serta identifikasi area perubahan dan unit kerja prioritas.	Mendorong implementasi sistem merit secara menyeluruh, penataan kelembagaan agar lebih ramping dan adaptif, serta penguatan mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Sistem e-Kinerja mulai diintegrasikan dengan dokumen perencanaan dan pengawasan internal mulai difokuskan pada pendekatan berbasis risiko.	Mengoptimalkan manajemen kinerja organisasi dan individu, memperkuat akuntabilitas kinerja melalui evaluasi berbasis hasil, serta memperluas penerapan digitalisasi administrasi pemerintahan. Penilaian mandiri RB dilaksanakan secara berkala dan mulai diterapkan pengukuran efektivitas budaya kerja melalui survei internal.	Peningkatan mutu zona integritas dan persiapan penilaian WBK/WBBM bagi perangkat daerah prioritas. Evaluasi lintas sektor dilakukan untuk mengukur capaian kinerja RB, dan penguatan inovasi birokrasi mulai difokuskan pada replikasi praktik baik dan pengelolaan inovasi berbasis data.	Melakukan konsolidasi seluruh capaian reformasi birokrasi, menyusun evaluasi akhir pelaksanaan RB 2025–2030, serta merancang roadmap RB lanjutan. Fokus diarahkan pada birokrasi yang digital, partisipatif, dan kolaboratif, dengan mengintegrasikan aspek SPBE, budaya kerja profesional, dan pengelolaan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.	
5.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana	Pemetaan risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim serta menyusun kebijakan dan rencana aksi pengurangan risiko bencana daerah; Identifikasi lokasi rawan banjir dan kekeringan serta studi kelayakan pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur, dan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan; pembangunan infrastruktur pengendali banjir tahap	Pengembangan dan Penguatan sistem peringatan dini bencana di wilayah rawan bencana; Lanjutan pembangunan bendungan multifungsi sebagai pengendali banjir, sumber air baku,	Integrasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang; Pengembangan aksesibilitas dan sarana pendukung di	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung resiliensi ekosistem dan masyarakat terhadap perubahan iklim; Melakukan evaluasi dan pemantapan	Evaluasi dan pemantapan pelaksanaan kebijakan ketangguhan bencana dan perubahan iklim untuk mewujudkan daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.	

No.	Misi	Arah Kebijakan						Ket
		TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)	
		bendungan dan kolam regulasi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata air.	awal, seperti kolam regulasi dan saluran drainase terpadu di lokasi prioritas berdasarkan kajian risiko bencana.	dan potensi destinasi wisata alam.	sekitar bendungan dan kolam regulasi; kolaborasi lintas sektor untuk mengelola kawasan bendungan secara terpadu antara fungsi mitigasi, konservasi, dan pariwisata.	infrastruktur bendungan dan kolam regulasi sebagai bagian dari sistem ketahanan bencana daerah yang sekaligus menjadi daya tarik wisata air berkelanjutan.		
		Pemetaan kondisi kualitas lingkungan hidup, lahan kritis, dan risiko perubahan iklim serta menyusun kebijakan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta program konservasi sumber daya alam untuk mendukung kualitas lingkungan dan ketahanan ekosistem.	Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di semua sektor melalui pembangunan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan.	Integrasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang.	Evaluasi dan pemantapan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup berkualitas dan tangguh untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.	
6.	Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial	Pemetaan dan pendataan objek pemajuan kebudayaan daerah (OPKD), serta identifikasi komunitas, pelaku budaya, dan lembaga kebudayaan; Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah sebagai dasar arah kebijakan dan intervensi jangka panjang. Fondasi ini memperjelas peran pelaku budaya lokal dalam ketahanan budaya; Peningkatan peran lembaga kebudayaan dan rumah ibadah; Apresiasi untuk Pembina kebudayaan dan keagamaan.	Pelaksanaan program pelindungan dan pelestarian warisan budaya daerah dimulai, termasuk revitalisasi situs budaya, dokumentasi tradisi dan bahasa lokal, serta penguatan komunitas budaya. Diberikan insentif dan penghargaan kepada penggiat budaya aktif, guna mendorong regenerasi dan partisipasi lebih luas dari masyarakat; Pemetaan lembaga kebudayaan dan rumah ibadah aktif serta identifikasi kebutuhan dukungan dan pembinaan.	integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan dan pembangunan karakter, melalui kurikulum muatan lokal, pelatihan guru budaya, serta program edukasi kebudayaan bagi pelajar dan pemuda. Diperkuat kapasitas dan peran lembaga kebudayaan daerah dalam pembinaan komunitas seni dan warisan budaya; Pemberian fasilitasi kegiatan budaya dan keagamaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lokal.	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, pelatihan usaha budaya, dan fasilitasi promosi produk unggulan. Lembaga budaya didorong menjadi mitra aktif dalam penciptaan pasar budaya lokal dan festival kultural daerah; Pengembangan program sinergi antar-lembaga budaya dan keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan toleransi.	inergi lintas OPD dan antar komunitas budaya diperluas melalui kolaborasi festival budaya, forum komunikasi pelaku budaya, dan jejaring antar-daerah. Apresiasi dan insentif lebih ditingkatkan kepada penggiat budaya yang berkontribusi besar terhadap pelestarian dan inovasi kebudayaan lokal.	Konsolidasi dan evaluasi pencapaian ketahanan budaya daerah. Sistem informasi kebudayaan dikembangkan secara digital, dan disusun roadmap lanjutan untuk penguatan identitas budaya yang adaptif, inklusif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Lembaga kebudayaan daerah diperkuat sebagai aktor utama dalam kebijakan kebudayaan jangka panjang.	

Sumber : Bapperida Kabupaten Konawe Utara, 2025

3.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

A. Program Prioritas Daerah

Program Prioritas Daerah dipahami sebagai program strategis yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai instrumen utama dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029. Program prioritas ini disusun melalui teknik cascading kinerja daerah, yaitu proses penurunan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional, terukur, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Program Prioritas Daerah bukan hanya sekadar daftar kegiatan, melainkan merupakan hasil perumusan strategis yang mencerminkan konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan arah pembangunan nasional, provinsi, serta visi kepala daerah. Program-program ini dipilih secara selektif untuk memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan, serta menjawab isu-isu strategis daerah.

Lebih lanjut, penyusunan Program Prioritas Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 senantiasa memperhatikan keterkaitan dan penyelarasan dengan 17 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan 8 PHTC (Prioritas Hasil Terbaik Cepat) yang ditetapkan sebagai agenda pembangunan strategis daerah. Hal ini bertujuan agar setiap program prioritas tidak berjalan secara parsial, tetapi terintegrasi dalam kerangka pembangunan daerah yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, setiap Program Prioritas Daerah yang diturunkan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD akan sekaligus menjadi instrumen nyata dalam mendukung capaian 17 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan penguatan 8 PHTC. Dengan demikian, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat diwujudkan secara sistematis, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Adapun Program Prioritas RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VISI : "KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA"							
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)		
					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup (UHH)		
					Prevalensi Stunting (%)		
			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan serta Gizi Masyarakat		Capaian SPM Bidang Kesehatan		
				Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup (Rasio)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Persentase persalinan di Fasyankes (%)		
					Persentase ANC (Kunjungan ibu hamil) 6 Kali (%)		
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)		
					Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita (%)		
					Persentase Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD 90 Tablet) (%)		
					Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (%)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Lansia Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)		
					Insidensi HIV per 100.000 Penduduk (Rasio)		
					Jumlah Desa/Kelurahan dengan 5 pilar STBM (Desa/Kelurahan)		
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
					Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di RS Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Kesehatan (%)		
					Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas yang Memenuhi Standar Kesehatan (%)		
					Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial (%)		
					Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (%)		
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar (9 Nakes) (unit)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Rasio Dokter Spesialis per 1.000 penduduk (Rasio)		
				Tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat (%)	Program Sediaan Farmasi, Alat	Dinas Kesehatan

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Cakupan Apotek dan Toko Obat yang memiliki izin (%)	Kesehatan dan Makanan Minuman	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		
					Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas terakreditasi Paripurna (%)		
				Meningkatnya akreditas pelayanan kesehatan	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna (Kategori)	Program Akreditas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Jumlah RSUD Tipe D yang ditingkatkan jadi Tipe C (Unit)		
					Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna (unit)		
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Tingkat Kemiskinan (%)		
			Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS Mandiri (%)		
					Capaian SPM Bidang Sosial (%)		
				Meningkatnya cakupan Pemberdayaan Sosial	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Meningkanya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase WNI migran korban kekerasan yang memperoleh layanan sesuai prosedur (Pesen)	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Meningkatnya cakupan penangananan korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Meningkatnya derajat pendidikan			Indeks Pendidikan		
			Meningkatnya akses dan Mutu Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		
					Harapan Lama Sekolah (tahun)		
					Capaian SPM Pendidikan (%)		
					Persentase Sekolah terakreditasi minimal B (%)		
				Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		
					Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)		
					Kemampuan Literasi		
					SD		
					SMP (%)		
					Kemampuan Numerasi		
					SD		
					SMP (%)		
					Iklim Keamanan		
					SD		
					SMP (%)		
					Iklim Kebhinekaan		
					SD		
					SMP (%)		
					Iklim inklusivitas		
					SD		
					SMP (%)		
				Meningkatnya kapasitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
			Meningkatnya Pembangunan Pemuda		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)		
				Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya Prestasi Olahraga		Peningkatan prestasi olahraga (%)		
				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Predikat Daerah dalam Kejuaraan Tingkat Provinsi (Peringkat)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat daerah yang dilaksanakan per tahun	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Menurunnya Angka Pengangguran			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja,		
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Kuantitas serta Kualitas Pelatihan dan	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (%)	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Produktivitas Tenaga Kerja			
				Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Program Hubungan Industrial	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Terwujudnya pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender		
					Nilai Kab/Kota Layak Anak (Nilai)		
				Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
				Tercapainya upaya Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
				Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga (%)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentse pengelolaan data gender dan anak (%)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
				Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
				Meningkatnya cakupan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
			Meningkatnya Pengendalian Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
				Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)		
				Meningkatnya cakupan dan kualitas Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (%)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik (%)	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%) Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%) Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%) Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan (PD)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Terselenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Misi 2 : Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan				Indeks Konektivitas Wilayah		
		Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan			Indeks Infrastruktur Dasar		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun (%)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses terhadap prasarana dasar permukiman (%)	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (Rasio)	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan prioritas yang telah ditata melalui penataan bangunan, ruang terbuka, dan elemen pendukung kawasan sesuai fungsi ruang dan karakter wilayah (%)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknik/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Rasio)		
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum (%)	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Sekretariat Daerah

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Rasio)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan Berkelanjutan		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		
				Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)		
				Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak huni	Berkurangnya jumlah unit RTLH (%)	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam proses sertifikasi dan registrasi (%)	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya layanan transportasi yang yang aman, nyaman dan terjangkau		Rasio konektivitas simpul transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)		
				Menurunnya kecelakaan lalulitas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Pelayaran yang berfungsi Baik	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik (%)	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
				Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Penerbangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional penerbangan yang dibangun, diperbaiki, atau ditingkatkan (unit/tahun)	Program Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan
Misi 3 : Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing	Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi				Pertumbuhan Ekonomi (%)		
					PDRB Perkapita (Rp.Juta/Kapita/Tahun)		
					Gini Rasio		
		Meningkatnya daya saing Produktivitas Ekonomi			Rasio PDRB Industri Pengolahan		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya daya saing industri		Persentase peningkatan kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		
				Meningkatnya Industri Pengolahan dan eksport industri	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Juta)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Cakupan Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IUI dan IUKI efektif (%)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah aplikasi atau fitur pendukung sistem informasi industri yang dikembangkan atau dioptimalkan (aplikasi)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti (%)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		
				Meningkatnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik (%)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor kabupaten (%)	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi (%)	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah			Indeks Ekonomi Biru		
			Meningkatnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan		Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
					Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)		
				Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
				Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
				Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina (%)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Meningkatnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Terwujudnya Kemandirian Pangan			Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya ketersediaan Pangan		Persentase ketersediaan pangan terhadap total kebutuhan masyarakat (%)		
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan (%)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersedian Pangan (%)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Produktivitas Perkebunan		Persentase peningkatan produksi sektor perkebunan (%)		
				Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Kg/Ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
					Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Kg/Ha)		
					Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton)		
					Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton)		
					Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit (Ton)		
				Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana perkebunan yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan di daerah (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kerugian hasil produksi perkebunan akibat bencana dan gangguan OPT/OPH (%)	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
				Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
			Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Peternakan		Persentase peningkatan produksi sektor pertanian (%)		
					Persentase peningkatan produksi sektor peternakan (%)		
				Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
					Jumlah Produksi Padi (Ton)		
					Jumlah Produksi Kedelai (Ton)		
					Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) (Ton)		
					Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Kg)		
					Jumlah Produksi Telur (Kg)		
				Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
				Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan (%)	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
				Meningkatnya Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian yang memperoleh perizinan berusaha secara legal dan sesuai ketentuan (%)	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
				Meningkatnya SDM Kelompok Tani	Persentase peningkatan adopsi teknologi baru dan praktik pertanian oleh petani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah			Rasio PDB Pariwisata		
			Meningkatnya daya saing pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)		
				Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap (Hari)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Periwisata
				Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (%)	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Periwisata
					Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)		
			Meningkatnya daya saing Ekonomi Kreatif		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif		
				Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Nilai Tambah ekonomi kreatif (Rp. Juta)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	Dinas Periwisata

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Hak Kekayaan Intelektual	
				Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan (%)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Periwisata
		Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Indeks Desa Membangun		
			Meningkatnya kemandirian desa		Persentase status desa Membangun		
				Meningkatnya Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa (%)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya kualitas BUMDes		Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif (%)		
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase penerapan keuangan desa berbasis digital (%) Cakupan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Terbentuk dan Aktif	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Sinergitas Transmigrasi dalam Pembangunan Desa		Persentase desa transmigrasi yang terintegrasi dalam program pembangunan lintas sektor		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan diperencanaan daerah kawasan transmigasi (%)	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (%)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Mandiri	Persentase warga transmigrasi yang mandiri (%)	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
					Indeks Akses Keuangan Daerah		
			Meningkatnya pendapatan daerah		Persentase kenaikan pendapatan daerah (%)		
				Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks ETPD (Indeks)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Volume Usaha Koperasi Sehat		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB		
					Persentase Koperasi Sehat (%)		
				Meningkatnya Cakupan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diproses sesuai standar waktu dan prosedur (%)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UMKM

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Kozperasi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa secara berkala sesuai standar pengawasan koperasi (%)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Kozperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya Koperasi Sehat	Rasio Peningkatan koperasi sehat (%)	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan (%)	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya Koperasi yang beradan Hukum	Persentase koperasi yang memperoleh status badan hukum dan aktif secara operasional (%)	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha		Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil		
				Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Proporsi jumlah UKM (%)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya Realisasi investasi Daerah			Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB		
			Meningkatnya Iklim yang mendukung Penanaman Modal		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target dalam RPJMD yang ditetapkan (%)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Perentase peningkatan investasi (%)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal (Rp. Milyar)	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
				Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Laporan)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Meningkatnya Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Rekap Data LKPM (Laporan)	Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif	Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional			Indeks RB General		
			Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan (opini)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan yang dialokasikan melalui TKD (%)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)		
				Meningkatnya tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)		
					Persentase Penurunan SILPA (%)		
				Meningkatnya Tata Kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase Laporan Keungan Tepat Waktu		
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir (%)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah		Maturitas SPIP (Indeks)		
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK (%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
				Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
					Persentase Perangkat Daerah Yang Telah ditetapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM		
			Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		
				Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan	Persentase Produk legislatif yang terealisasi menjadi PERDA (%)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Reformai Hukum Indeks Tata Kelola Pengadaan Indeks Pelayanan Publik, Indeks Berakhlak Indeks Zakat Nasional		
				Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan	Persentase peningkatan perumusan kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam (%)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan perumusan kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat (%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)		
				Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan	Persentase Sinergitas Perencanaan (%) Persentase Tingkat Partisipatif Perencaanan (%)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Evaluasi Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan (%)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan (%)		
			Meningkatnya Pembangunan Statistik daerah		Indeks Pembangunan Statistik		
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
			Meningkatnya riset dan inovasi daerah		Indeks Inovasi Daerah		
				Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan. (%)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Rasio perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah layak (rasio)	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya profesionalitas dan kompetensi ASN		Indeks Merit Sistem		
				Meningkatnya Kesesuaian	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi (%)	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penempatan Kepegawaian Daerah	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (%)		Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional (%)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital/Indeks SPBE		
				Meningkatnya Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Indeks)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip		Tingkat Digitalisasi Arsip		
				Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelematan arsip (%)	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Elektronik di lingkup Pemerintahan Daerah (Kategori)	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Misi 5 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Indeks Risiko Bencana (IRB)		
			Meningkatnya Ketahanan bencana		Jumlah desa tanggap bencana (Desa)		
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan bencana (%)	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)		
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana (%)		
			Meningkatnya upaya Pencegahan, Penanggulangan, Waktu tanggap Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)		
				Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Waktu tanggap (*Respon Time*) penanganan kebakaran		
			Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Lahan		
				Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Terakui (%)	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional (%)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				Meluasnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH (%)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya instensitas Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase aduan LH yang diselesaikan (%)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas (%)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu lingkungan (%)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan taman kehati kabupaten (%)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3 (%)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak		
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional (%)	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 6 : Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial	Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
		Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah			Indeks Ketahanan Budaya Daerah		
			Meningkatnya Cakupan Pengembangan Kebudayaan		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan (%)		
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Indeks Peran Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya Kesenian Tradisional	Persentase lembaga adat daerah yang dibina (%)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya Pembinaan Sejarah	Persentase peningkatan kegiatan pelestarian dan diseminasi sejarah lokal yang diakses atau diikuti oleh masyarakat (%)	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase kewaspadaan nasional didaerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (%)		
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Impact	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya (%)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten (%)		
				Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum (%)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Bapperida Kab. Konawe Utara, 2025

B. Program Unggulan Daerah

Pada sub bagian sebelumnya, Program Prioritas Daerah telah dirumuskan sebagai instrumen strategis yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029. Program ini dirumuskan melalui proses cascading kinerja, yang menurunkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam langkah-langkah operasional yang dapat diukur, sehingga menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara efektif.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah daerah, Program Prioritas Daerah memiliki keterkaitan erat dengan Program Unggulan Daerah. Program Unggulan Daerah adalah program pembangunan yang memiliki nilai strategis, berdaya ungkit tinggi, dan memberikan dampak langsung serta nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Dengan demikian, Program Prioritas Daerah menjadi instrumen utama yang mengarahkan pelaksanaan Program Unggulan agar lebih fokus, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Melalui keterkaitan ini, setiap Program Prioritas Daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi capaian indikator RPJMD, tetapi juga diposisikan sebagai penopang keberhasilan Program Unggulan Daerah.

Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 terdiri dari 11 Program Unggulan, dimulai dari aspek pembangunan sumberdaya manusia, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hingga pada pemerataan partisipasi pembangunan hingga ke dusun. Program ini merupakan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, janji kampanye, hingga upaya peningkatan keberhasilan program sebelumnya melalui inovasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun program unggulan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 antara lain disajikan dalam Gambar 3.4 berikut.

Gambar 3.4. Program Unggulan Kabupaten Konawe Utara
tahun 2025-2029

Program Unggulan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 memiliki manfaat strategis dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sekaligus memperkuat konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Program unggulan ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan pembangunan, serta penciptaan lapangan kerja, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing.

Lebih jauh, program unggulan berfungsi sebagai instrumen penguat Program Prioritas Daerah, yang diturunkan melalui cascading kinerja dari visi hingga outcome, serta diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan 8 PHTC (Prioritas Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial). Dengan demikian, setiap program unggulan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan menopang pencapaian target kinerja daerah secara lebih terukur. Selain itu, program unggulan mendorong sinergi multipihak, baik antara pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat, untuk menghadirkan kolaborasi yang produktif, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, keberadaan program unggulan ini akan memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Konawe Utara berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan nasional serta Sustainable Development Goals (SDGs).

Selain program prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga mendukung Program Strategis Nasional (ProSN), meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan koperasi, dan kemudahan perizinan.

Gambar 3.5. Program Strategis Nasional (ProSN)

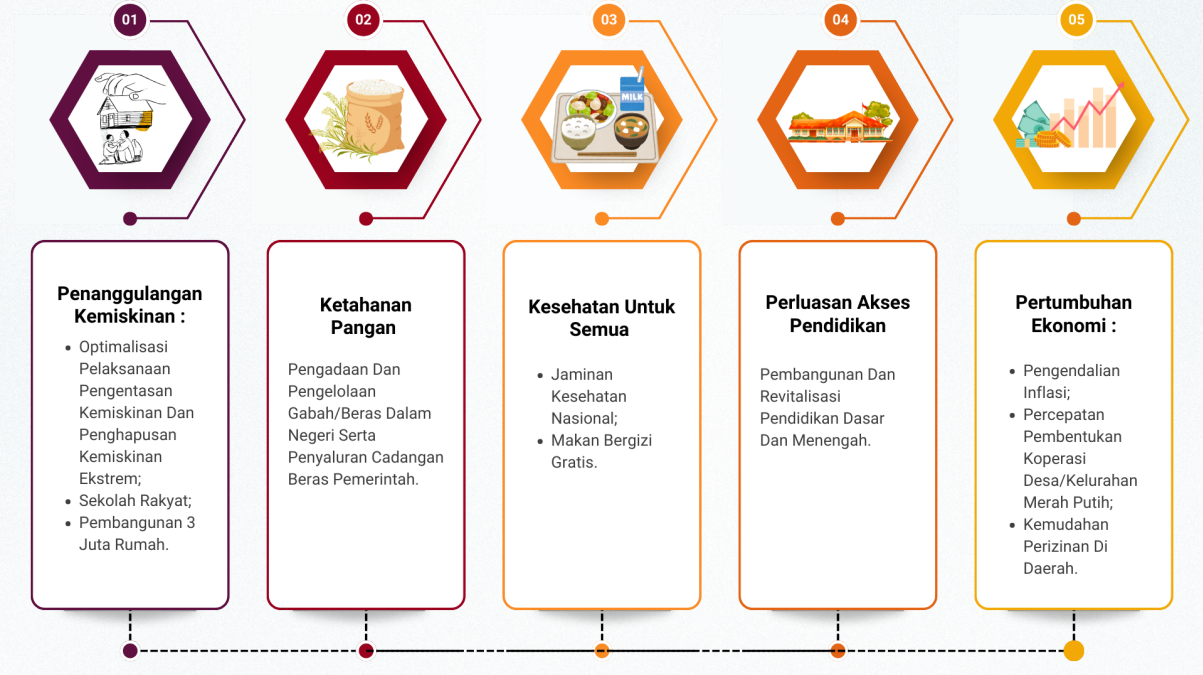

Kabupaten Konawe Utara telah memastikan bahwa Program Prioritas Daerah selaras dengan kebutuhan dukungan terhadap 13 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang ditetapkan di Sulawesi Tenggara. Penyelarasan ini penting agar setiap program dapat berjalan beriringan dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi, sekaligus memperkuat sinergi dalam hal perencanaan, implementasi, dan pendanaan.

Tabel 3.8
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029
terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	RPJMN	RPJMD Prov.Sultra (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)	RPJMD Konawe Utara (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)
1	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	• Program Perikanan Budidaya • Peluncuran Roadmap Blue Economy*	• Program Perikanan Budidaya • Pengembangan perkebunan sawit, perikanan, dan industri pengolahan berbasis teknologi*
2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	• Program Perikanan Tangkap • Peluncuran Roadmap Blue Ecomony*	• Program Perikanan Tangkap • Pengembangan perkebunan sawit, perikanan, dan industri pengolahan berbasis teknologi*
3	Pengembangan Pangan Hewani	• Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Pelatihan Penyelia Dan Juru Sembelih*	• Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	RPJMN	RPJMD Prov.Sultra (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)	RPJMD Konawe Utara (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Gerakan Pangan Murah* • Penanaman Seribu Bibit Tanaman* • Bantuan Benih Dan Pupuk*	• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Pengembangan Pertanian Modern Technopark* • Pengembangan perkebunan sawit, perikanan, dan industri pengolahan berbasis teknologi*
5	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Laris (Layanan Ambulans Darat Dan Laut Gratis)* • Pembangunan Tiga Rs Daerah Di Kabupaten ButonTengah, KONAWE UTARA Kepulauan Dan Kolaka Timur*	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Peningkatan Fasilitas Kesehatan melalui pembangunan RSUD yang • modern serta peningkatan fasilitas kesehatan paripurna di seluruh kecamatan* • Memaksimalkan pelayanan kesehatan*
6	Penurunan kematian ibu dan anak	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Sultra Health Service Untuk Mempekuat Perlindungan Asuransi Kesehatan Masyarakat*	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Memaksimalkan pelayanan kesehatan* • Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk seluruh masyarakat.
7	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Laris (Layanan Ambulans Darat Dan Laut Gratis)*	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional • Program Pengelolaan Persampahan	• Program Pengelolaan Persampahan
9	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Peningkatan Pembangunan Sarana Sanitasi • Dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak*
10	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	• Program Kawasan Permukiman • Program Pengembangan Perumahan • Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Kolaka Timur* • Jama'ah (Jalan Mulus Antar Wilayah)*	• Program Kawasan Permukiman • Program Pengembangan Perumahan • Peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak*

No.	RPJMN	RPJMD Prov.Sultra (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)	RPJMD Konawe Utara (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)
11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	• Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pengembangan Kebudayaan	• Program Pengembangan Kebudayaan • Apresiasi untuk Pembina Kebudayaan dan Keagamaan*
12	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	• Program Pengelolaan Pendidikan • Penggaris (Perlengkapan Dan Seragam Sekolah Gratis)* • Pemberian Beasiswa Berprestasi*	• Program Pengelolaan Pendidikan • Melanjutkan Program Beasiswa Konasara dengan memperluas cakupan beasiswa pendidikan tinggi bagi seluruh*
13	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	• Program Pendidik Dan Tenaga Pendidik • Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II* • Sertifikasi Kelembagaan Dan Pengembangan Kompetensi*	• Program Pendidik Dan Tenaga Pendidik

Keterangan:
* = Program Unggulan Kepala Daerah

Dengan demikian, sinergi antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RPJMD Kabupaten Konawe Utara menjadi kunci utama agar 13 KPU tersebut dapat terlaksana secara efektif. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan di Konawe Utara lebih terarah, berdaya guna, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

C. Cascading Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan dengan menerapkan prinsip cascading kinerja, yakni penurunan secara sistematis dan terukur dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program, kegiatan, dan subkegiatan.

Cascading kinerja dimaksudkan agar setiap perangkat daerah memiliki arah yang jelas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada indikator kinerjanya masing-masing, tetapi juga memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Cascading kinerja bukan hanya sebatas mekanisme teknis, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu arah, selaras dengan visi-misi Kepala Daerah, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah yang lebih terukur, efektif, dan akuntabel.

Gambar 3.6. Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029

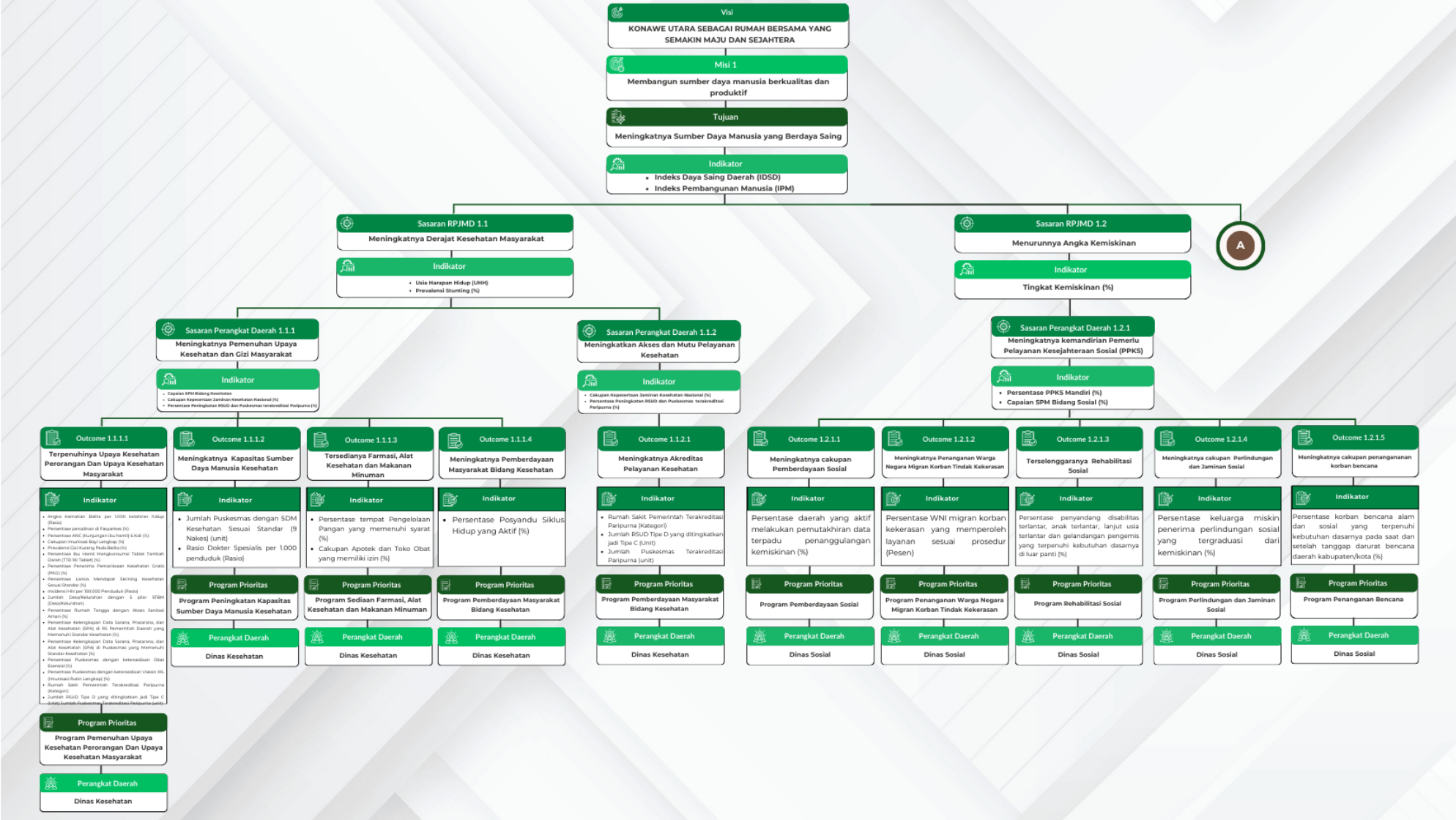

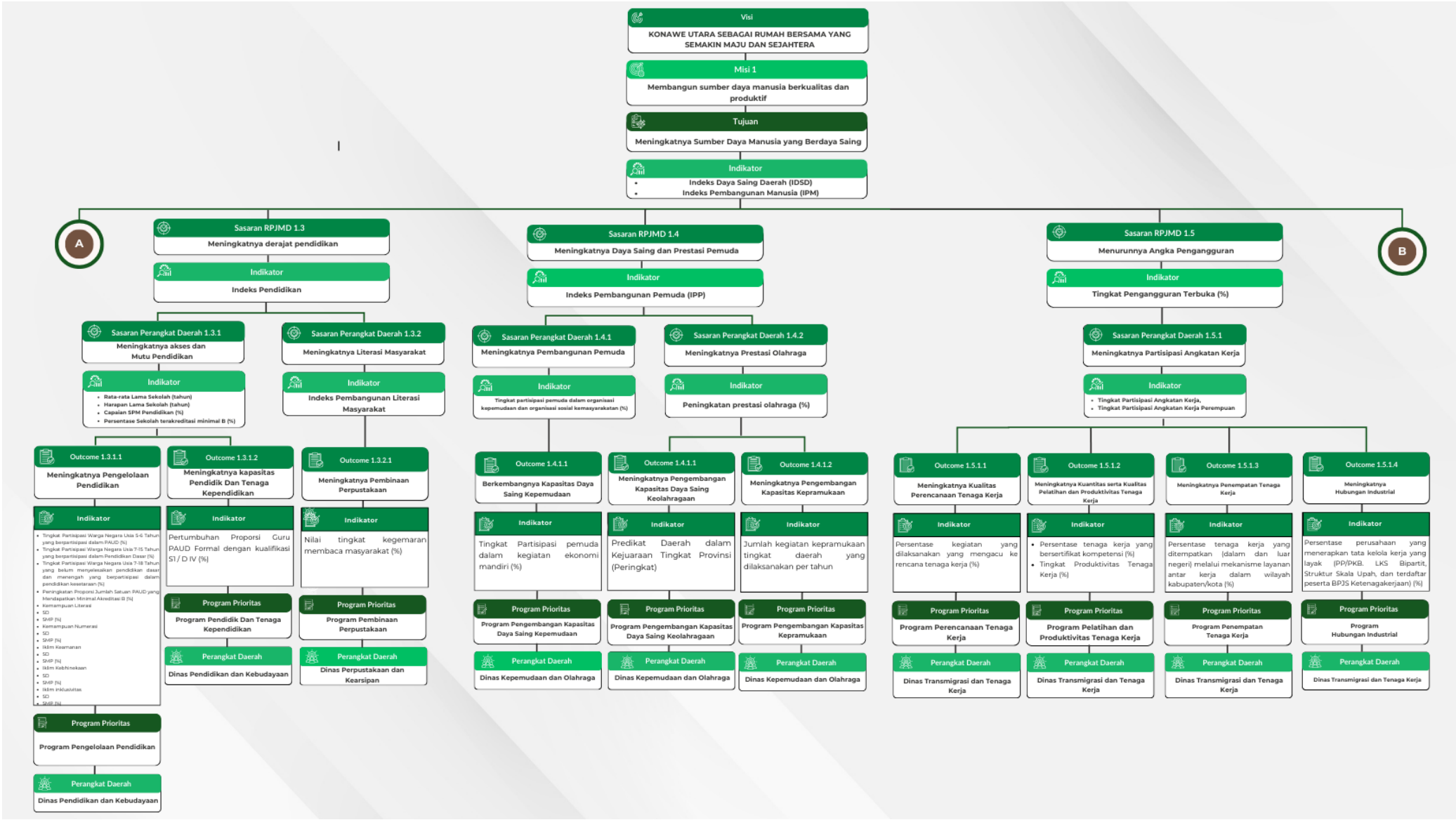
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 1
Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif
Tujuan
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
Indikator
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
A
Sasaran RPJMD 1.3
Meningkatnya derajat pendidikan
Indikator
Indeks Pendidikan
Sasaran Perangkat Daerah 1.3.1
Meningkatnya akses dan Mutu Pendidikan
Indikator
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Capaian SPM Pendidikan (%)
Persentase Sekolah terakreditasi minimal B (%)
Outcome 1.3.1.1
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Indikator
Program Prioritas
Program Pengelolaan Pendidikan
Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Outcome 1.3.1.2
Meningkatnya kapasitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Indikator
Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV (%)
Program Prioritas
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran Perangkat Daerah 1.3.2
Meningkatnya Literasi Masyarakat
Indikator
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Outcome 1.3.2.1
Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan
Indikator
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)
Program Prioritas
Program Pembinaan Perpustakaan
Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran RPJMD 1.4
Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda
Indikator
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Sasaran Perangkat Daerah 1.4.1
Meningkatnya Pembangunan Pemuda
Indikator
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)
Outcome 1.4.1.1
Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Indikator
Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Perangkat Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome 1.4.1.1
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Indikator
Predikat Daerah dalam Kejuaraan Tingkat Provinsi (Peringkat)
Program Prioritas
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Perangkat Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran Perangkat Daerah 1.4.2
Meningkatnya Prestasi Olahraga
Indikator
Peningkatan prestasi olahraga (%)
Outcome 1.4.1.2
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Indikator
Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat daerah yang dilaksanakan per tahun
Program Prioritas
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Perangkat Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran RPJMD 1.5
Menurunnya Angka Pengangguran
Indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
B
Sasaran Perangkat Daerah 1.5.1
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Indikator
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja,
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Outcome 1.5.1.1
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja
Indikator
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)
Program Prioritas
Program Perencanaan Tenaga Kerja
Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Outcome 1.5.1.2
Meningkatnya Kuantitas serta Kualitas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator
Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (%)
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)
Program Prioritas
Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Outcome 1.5.1.3
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
Indikator
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)
Program Prioritas
Program Penempatan Tenaga Kerja
Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Outcome 1.5.1.4
Meningkatnya Hubungan Industrial
Indikator
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)
Program Prioritas
Program Hubungan Industrial
Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

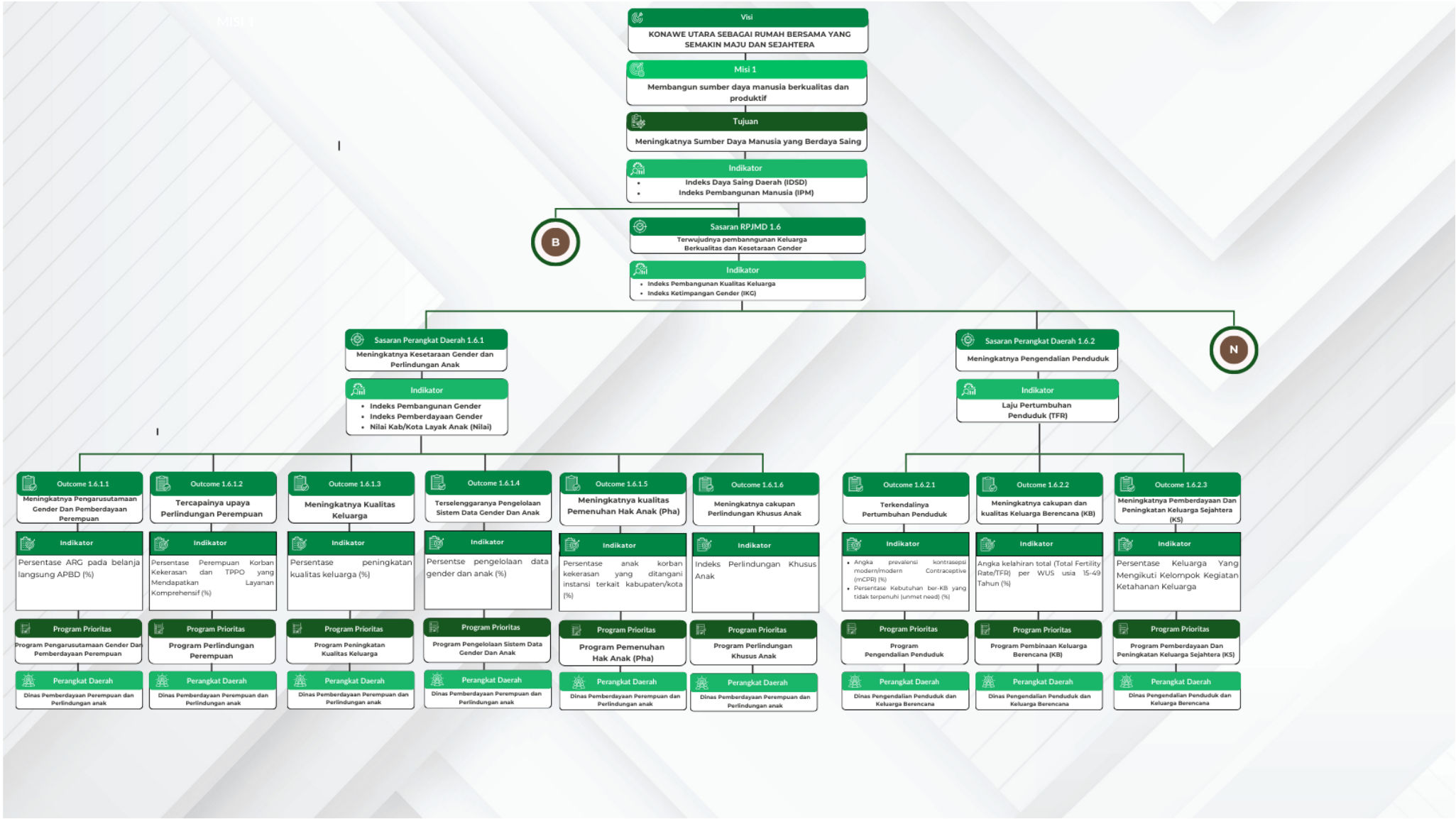
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 1
Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif
Tujuan
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
Indikator
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
B
Sasaran RPJMD 1.6
Terwujudnya pembanngunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender
Indikator
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Sasaran Perangkat Daerah 1.6.1
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
Indikator
Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender
Nilai Kab/Kota Layak Anak (Nilai)
Sasaran Perangkat Daerah 1.6.2
Meningkatnya Pengendalian Penduduk
Indikator
Laju Pertumbuhan Penduduk (TFR)
N
Outcome 1.6.1.1
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)
Program Prioritas
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Outcome 1.6.1.2
Tercapainya upaya Perlindungan Perempuan
Indikator
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)
Program Prioritas
Program Perlindungan Perempuan
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Outcome 1.6.1.3
Meningkatnya Kualitas Keluarga
Indikator
Persentase peningkatan kualitas keluarga (%)
Program Prioritas
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Outcome 1.6.1.4
Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Indikator
Persentse pengelolaan data gender dan anak (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Outcome 1.6.1.5
Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak (Pha)
Indikator
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)
Program Prioritas
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Outcome 1.6.1.6
Meningkatnya cakupan Perlindungan Khusus Anak
Indikator
Indeks Perlindungan Khusus Anak
Program Prioritas
Program Perlindungan Khusus Anak
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Outcome 1.6.2.1
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Indikator
Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%)
Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)
Program Prioritas
Program Pengendalian Penduduk
Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome 1.6.2.2
Meningkatnya cakupan dan kualitas Keluarga Berencana (KB)
Indikator
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (%)
Program Prioritas
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome 1.6.2.3
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Indikator
Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga
Program Prioritas
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MISI 1

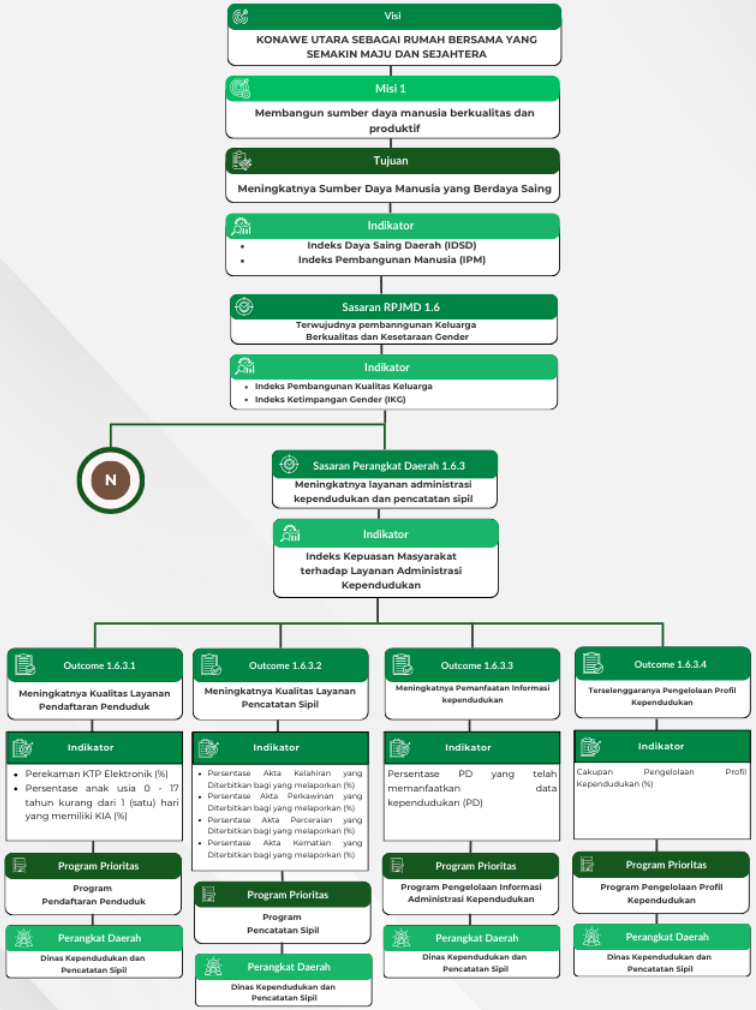
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 1
Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif
Tujuan
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
Indikator
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran RPJMD 1.6
Terwujudnya pembanngunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender
Indikator
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
N
Sasaran Perangkat Daerah 1.6.3
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
Outcome 1.6.3.1
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk
Outcome 1.6.3.2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil
Outcome 1.6.3.3
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan
Outcome 1.6.3.4
Terselenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan
Indikator
Perekaman KTP Elektronik (%)
Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)
Indikator
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)
Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)
Indikator
Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan (PD)
Indikator
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)
Program Prioritas
Program Pendaftaran Penduduk
Program Prioritas
Program Pencatatan Sipil
Program Prioritas
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program Prioritas
Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

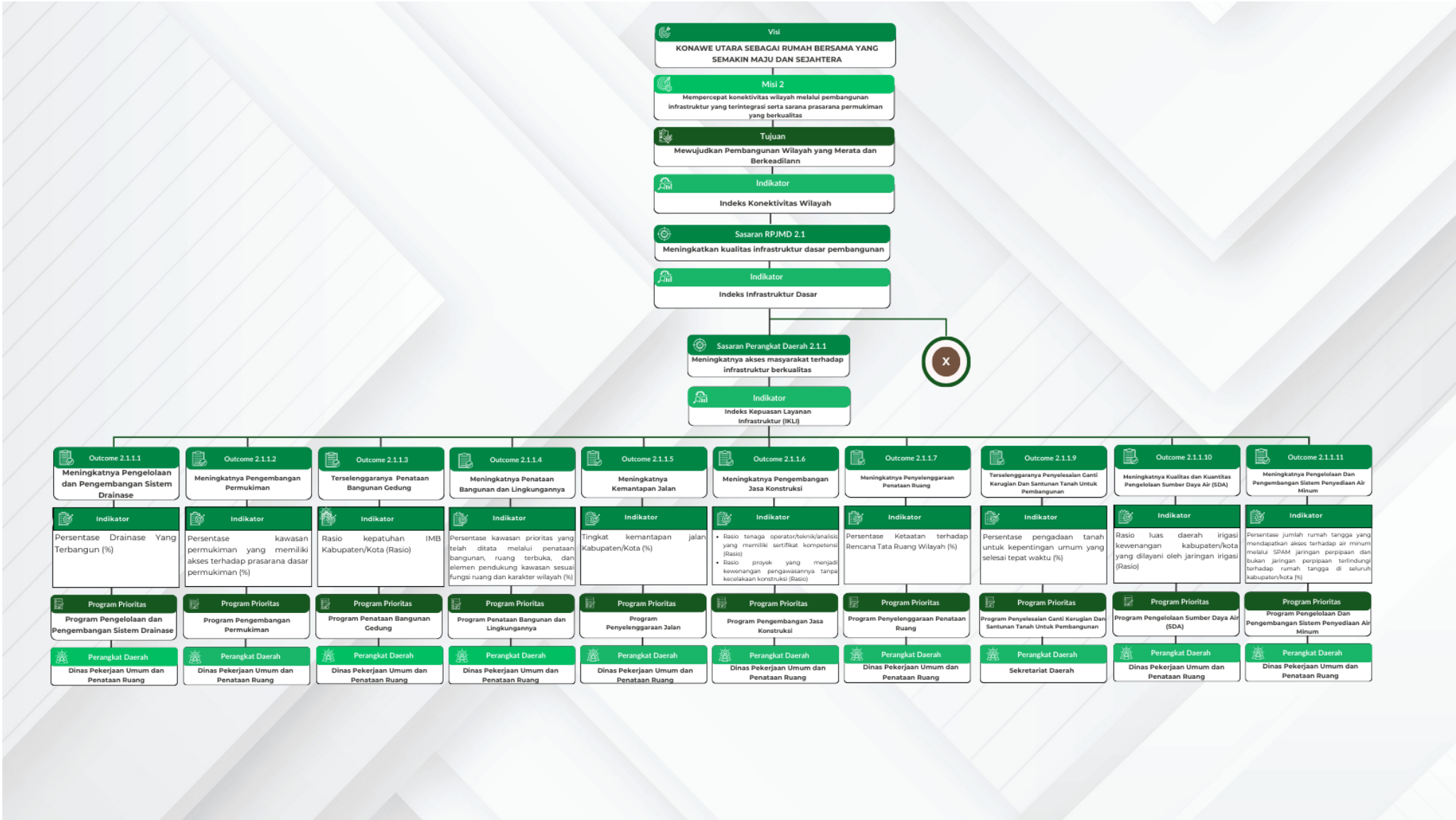
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 2
Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas
Tujuan
Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilann
Indikator
Indeks Konektivitas Wilayah
Sasaran RPJMD 2.1
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan
Indikator
Indeks Infrastruktur Dasar
Sasaran Perangkat Daerah 2.1.1
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
X
Indikator
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Outcome 2.1.1.1
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Indikator
Persentase Drainase Yang Terbangun (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 2.1.1.2
Meningkatnya Pengembangan Permukiman
Indikator
Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses terhadap prasarana dasar permukiman (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Permukiman
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 2.1.1.3
Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung
Indikator
Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (Rasio)
Program Prioritas
Program Penataan Bangunan Gedung
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 2.1.1.4
Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Indikator
Persentase kawasan prioritas yang telah ditata melalui penataan bangunan, ruang terbuka, dan elemen pendukung kawasan sesuai fungsi ruang dan karakter wilayah (%)
Program Prioritas
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 2.1.1.5
Meningkatnya Kemantapan Jalan
Indikator
Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota (%)
Program Prioritas
Program Penyelenggaraan Jalan
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 2.1.1.6
Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi
Indikator
Rasio tenaga operator/teknik/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Rasio)
Program Prioritas
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 2.1.1.7
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang
Indikator
Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%)
Program Prioritas
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 2.1.1.9
Terselenggaranya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Indikator
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)
Program Prioritas
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah
Outcome 2.1.1.10
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Indikator
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Rasio)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 2.1.1.11
Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Indikator
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

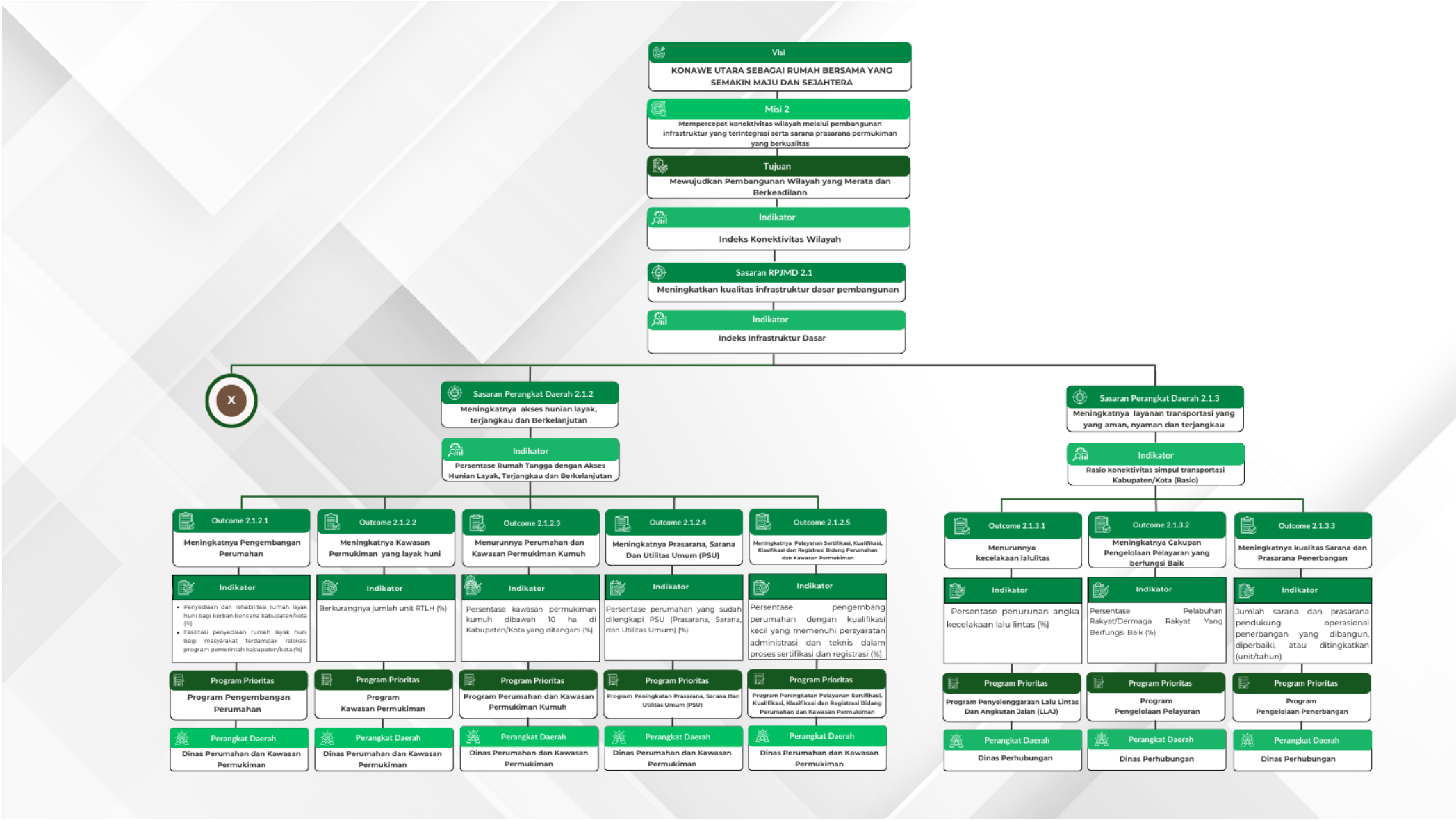
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 2
Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas
Tujuan
Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilann
Indikator
Indeks Konektivitas Wilayah
Sasaran RPJMD 2.1
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan
Indikator
Indeks Infrastruktur Dasar
X
Sasaran Perangkat Daerah 2.1.2
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan Berkelanjutan
Indikator
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Outcome 2.1.2.1
Meningkatnya Pengembangan Perumahan
Indikator
• Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)
• Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Perumahan
Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Outcome 2.1.2.2
Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak huni
Indikator
Berkurangnya jumlah unit RTLH (%)
Program Prioritas
Program Kawasan Permukiman
Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Outcome 2.1.2.3
Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Indikator
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%)
Program Prioritas
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Outcome 2.1.2.4
Meningkatnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Indikator
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)
Program Prioritas
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Outcome 2.1.2.5
Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Indikator
Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam proses sertifikasi dan registrasi (%)
Program Prioritas
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran Perangkat Daerah 2.1.3
Meningkatnya layanan transportasi yang yang aman, nyaman dan terjangkau
Indikator
Rasio konektivitas simpul transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)
Outcome 2.1.3.1
Menurunnya kecelakaan lalulitas
Indikator
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)
Program Prioritas
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan
Outcome 2.1.3.2
Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Pelayaran yang berfungsi Baik
Indikator
Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Pelayaran
Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan
Outcome 2.1.3.3
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Penerbangan
Indikator
Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional penerbangan yang dibangun, diperbaiki, atau ditingkatkan (unit/tahun)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Penerbangan
Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan

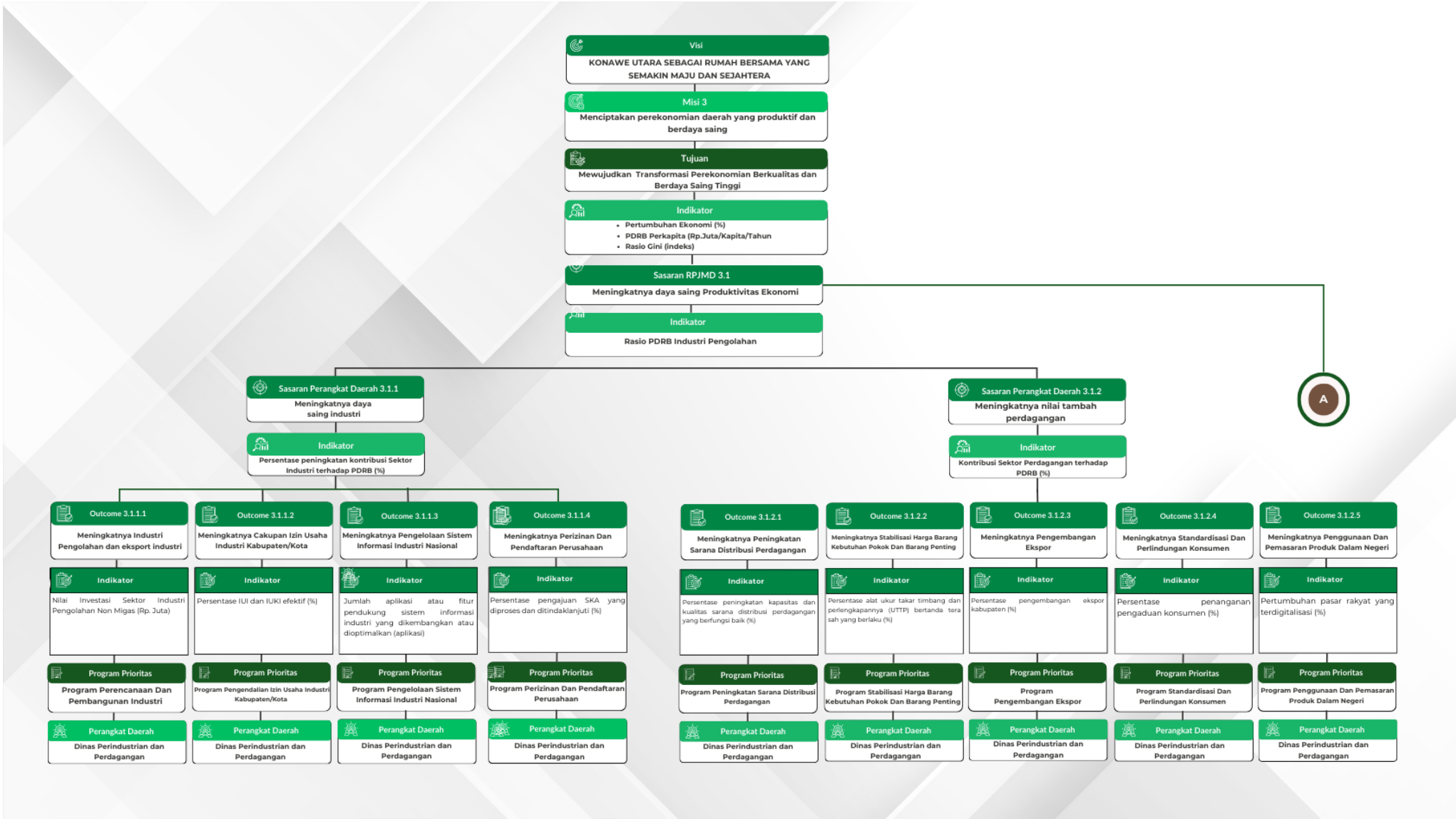
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 3
Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing
Tujuan
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%)
PDRB Perkapita (Rp.Juta/Kapita/Tahun
Rasio Gini (indeks)
Sasaran RPJMD 3.1
Meningkatnya daya saing Produktivitas Ekonomi
Indikator
Rasio PDRB Industri Pengolahan
A
Sasaran Perangkat Daerah 3.1.1
Meningkatnya daya saing industri
Indikator
Persentase peningkatan kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)
Outcome 3.1.1.1
Meningkatnya Industri Pengolahan dan eksport industri
Indikator
Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Juta)
Program Prioritas
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 3.1.1.2
Meningkatnya Cakupan Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Indikator
Persentase IUI dan IUKI efektif (%)
Program Prioritas
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 3.1.1.3
Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator
Jumlah aplikasi atau fitur pendukung sistem informasi industri yang dikembangkan atau dioptimalkan (aplikasi)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 3.1.1.4
Meningkatnya Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Indikator
Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti (%)
Program Prioritas
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran Perangkat Daerah 3.1.2
Meningkatnya nilai tambah perdagangan
Indikator
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
Outcome 3.1.2.1
Meningkatnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Indikator
Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik (%)
Program Prioritas
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 3.1.2.2
Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Indikator
Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)
Program Prioritas
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 3.1.2.3
Meningkatnya Pengembangan Ekspor
Indikator
Persentase pengembangan ekspor kabupaten (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Ekspor
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 3.1.2.4
Meningkatnya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Indikator
Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)
Program Prioritas
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 3.1.2.5
Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Indikator
Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi (%)
Program Prioritas
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

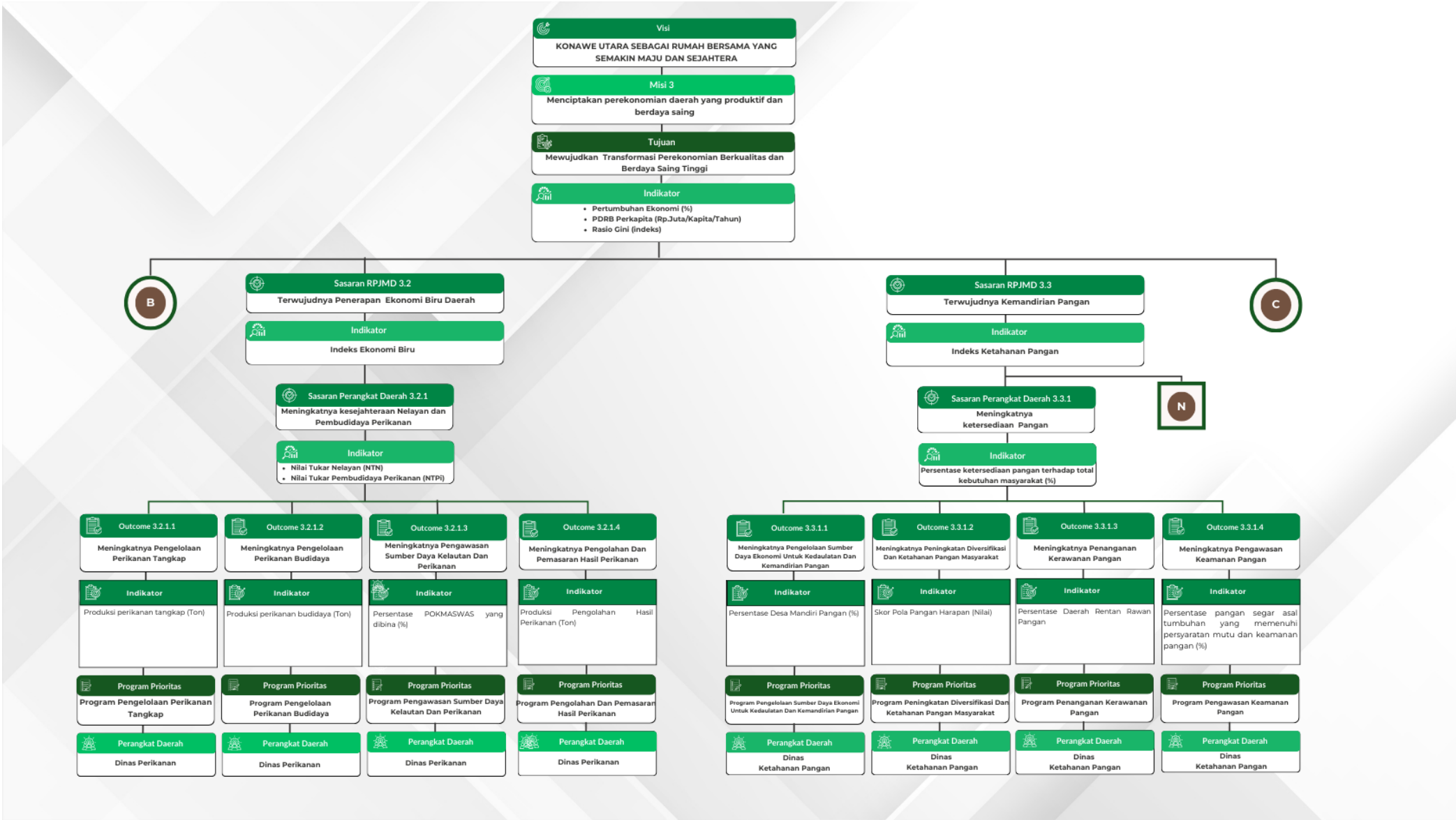
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 3
Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing
Tujuan
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%)
PDRB Perkapita (Rp.Juta/Kapita/Tahun)
Rasio Gini (indeks)
B
Sasaran RPJMD 3.2
Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah
Indikator
Indeks Ekonomi Biru
Sasaran Perangkat Daerah 3.2.1
Meningkatnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan
Indikator
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)
Outcome 3.2.1.1
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap
Outcome 3.2.1.2
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya
Outcome 3.2.1.3
Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Outcome 3.2.1.4
Meningkatnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Indikator
Produksi perikanan tangkap (Ton)
Indikator
Produksi perikanan budidaya (Ton)
Indikator
Persentase POKMASWAS yang dibina (%)
Indikator
Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Prioritas
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Prioritas
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Program Prioritas
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Perangkat Daerah
Dinas Perikanan
Perangkat Daerah
Dinas Perikanan
Perangkat Daerah
Dinas Perikanan
Perangkat Daerah
Dinas Perikanan
Sasaran RPJMD 3.3
Terwujudnya Kemandirian Pangan
Indikator
Indeks Ketahanan Pangan
C
Sasaran Perangkat Daerah 3.3.1
Meningkatnya ketersediaan Pangan
N
Indikator
Persentase ketersediaan pangan terhadap total kebutuhan masyarakat (%)
Outcome 3.3.1.1
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Outcome 3.3.1.2
Meningkatnya Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Outcome 3.3.1.3
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan
Outcome 3.3.1.4
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan
Indikator
Persentase Desa Mandiri Pangan (%)
Indikator
Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)
Indikator
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Indikator
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Program Prioritas
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Prioritas
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program Prioritas
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan
Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan
Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan
Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan

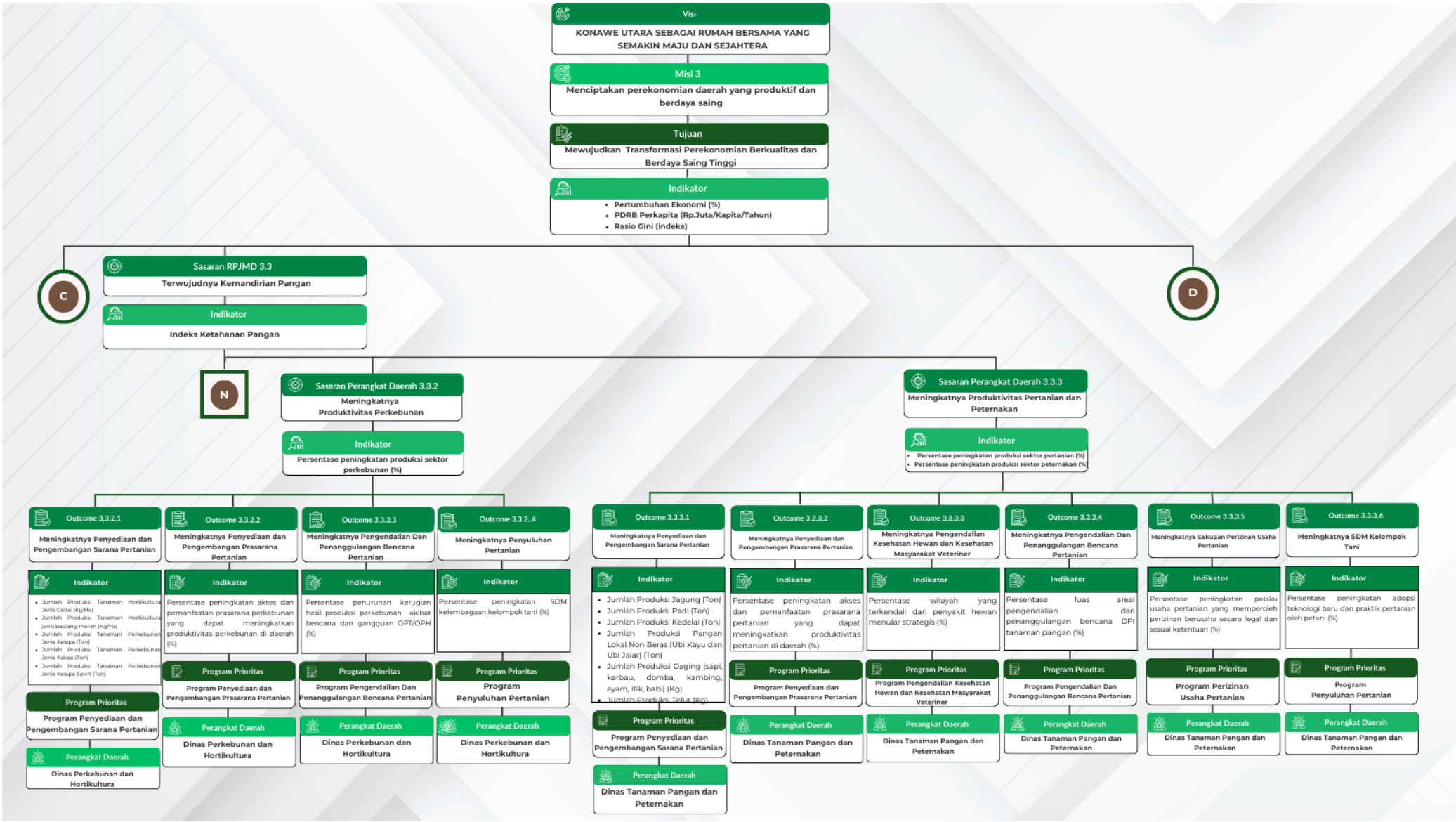
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 3
Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing
Tujuan
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%)
PDRB Perkapita (Rp.Juta/Kapita/Tahun)
Rasio Gini (indeks)
C
Sasaran RPJMD 3.3
Terwujudnya Kemandirian Pangan
Indikator
Indeks Ketahanan Pangan
D
N
Sasaran Perangkat Daerah 3.3.2
Meningkatnya Produktivitas Perkebunan
Indikator
Persentase peningkatan produksi sektor perkebunan (%)
Outcome 3.3.2.1
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Indikator
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Kg/Ha)
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Kg/Ha)
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton)
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton)
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit (Ton)
Program Prioritas
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Outcome 3.3.2.2
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Indikator
Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana perkebunan yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan di daerah (%)
Program Prioritas
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Outcome 3.3.2.3
Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Indikator
Persentase penurunan kerugian hasil produksi perkebunan akibat bencana dan gangguan OPT/OPH (%)
Program Prioritas
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Outcome 3.3.2..4
Meningkatnya Penyuluhan Pertanian
Indikator
Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani (%)
Program Prioritas
Program Penyuluhan Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Sasaran Perangkat Daerah 3.3.3
Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Peternakan
Indikator
Persentase peningkatan produksi sektor pertanian (%)
Persentase peningkatan produksi sektor peternakan (%)
Outcome 3.3.3.1
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Indikator
Jumlah Produksi Jagung (Ton)
Jumlah Produksi Padi (Ton)
Jumlah Produksi Kedelai (Ton)
Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) (Ton)
Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Kg)
Jumlah Produksi Telur (Kg)
Program Prioritas
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Outcome 3.3.3.2
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Indikator
Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah (%)
Program Prioritas
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Outcome 3.3.3.3
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Indikator
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)
Program Prioritas
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Perangkat Daerah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Outcome 3.3.3.4
Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Indikator
Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan (%)
Program Prioritas
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Outcome 3.3.3.5
Meningkatnya Cakupan Perizinan Usaha Pertanian
Indikator
Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian yang memperoleh perizinan berusaha secara legal dan sesuai ketentuan (%)
Program Prioritas
Program Perizinan Usaha Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Outcome 3.3.3.6
Meningkatnya SDM Kelompok Tani
Indikator
Persentase peningkatan adopsi teknologi baru dan praktik pertanian oleh petani (%)
Program Prioritas
Program Penyuluhan Pertanian
Perangkat Daerah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

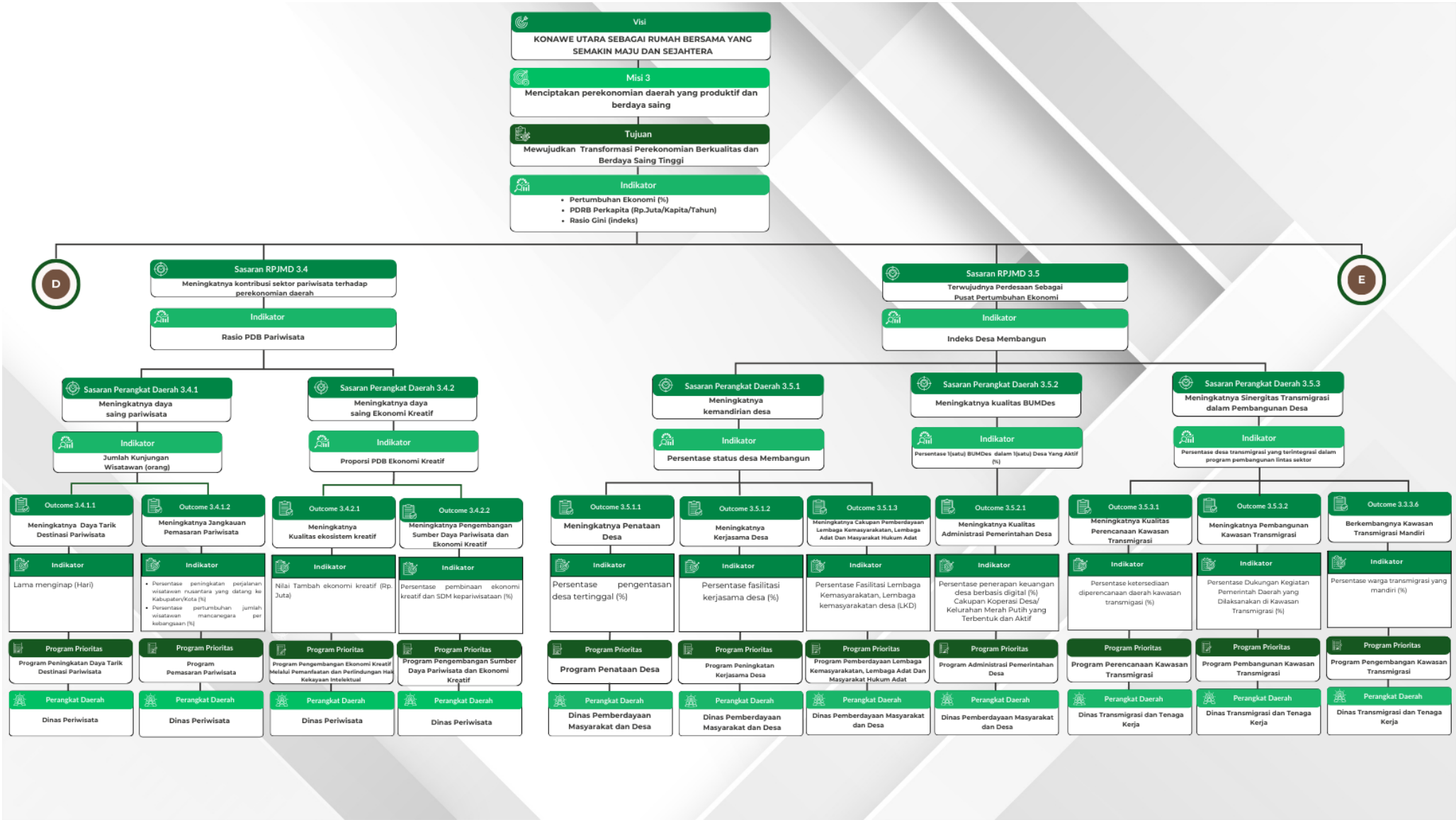
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 3
Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing
Tujuan
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%)
PDRB Perkapita (Rp.Juta/Kapita/Tahun)
Rasio Gini (indeks)
D
Sasaran RPJMD 3.4
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah
Indikator
Rasio PDB Pariwisata
Sasaran Perangkat Daerah 3.4.1
Meningkatnya daya saing pariwisata
Indikator
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
Outcome 3.4.1.1
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Indikator
Lama menginap (Hari)
Program Prioritas
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Perangkat Daerah
Dinas Periwisata
Outcome 3.4.1.2
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata
Indikator
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (%)
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)
Program Prioritas
Program Pemasaran Pariwisata
Perangkat Daerah
Dinas Periwisata
Sasaran Perangkat Daerah 3.4.2
Meningkatnya daya saing Ekonomi Kreatif
Indikator
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
Outcome 3.4.2.1
Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif
Indikator
Nilai Tambah ekonomi kreatif (Rp. Juta)
Program Prioritas
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Perangkat Daerah
Dinas Periwisata
Outcome 3.4.2.2
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator
Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Perangkat Daerah
Dinas Periwisata
Sasaran RPJMD 3.5
Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Indikator
Indeks Desa Membangun
Sasaran Perangkat Daerah 3.5.1
Meningkatnya kemandirian desa
Indikator
Persentase status desa Membangun
Outcome 3.5.1.1
Meningkatnya Penataan Desa
Indikator
Persentase pengentasan desa tertinggal (%)
Program Prioritas
Program Penataan Desa
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcome 3.5.1.2
Meningkatnya Kerjasama Desa
Indikator
Persentase fasilitasi kerjasama desa (%)
Program Prioritas
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcome 3.5.1.3
Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Indikator
Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan desa (LKD)
Program Prioritas
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran Perangkat Daerah 3.5.2
Meningkatnya kualitas BUMDes
Indikator
Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif (%)
Outcome 3.5.2.1
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa
Indikator
Persentase penerapan keuangan desa berbasis digital (%) Cakupan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Terbentuk dan Aktif
Program Prioritas
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran Perangkat Daerah 3.5.3
Meningkatnya Sinergitas Transmigrasi dalam Pembangunan Desa
Indikator
Persentase desa transmigrasi yang terintegrasi dalam program pembangunan lintas sektor
Outcome 3.5.3.1
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Indikator
Persentase ketersediaan diperencanaan daerah kawasan transmigasi (%)
Program Prioritas
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Outcome 3.5.3.2
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Indikator
Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (%)
Program Prioritas
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Outcome 3.3.3.6
Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Mandiri
Indikator
Persentase warga transmigrasi yang mandiri (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Perangkat Daerah
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
E

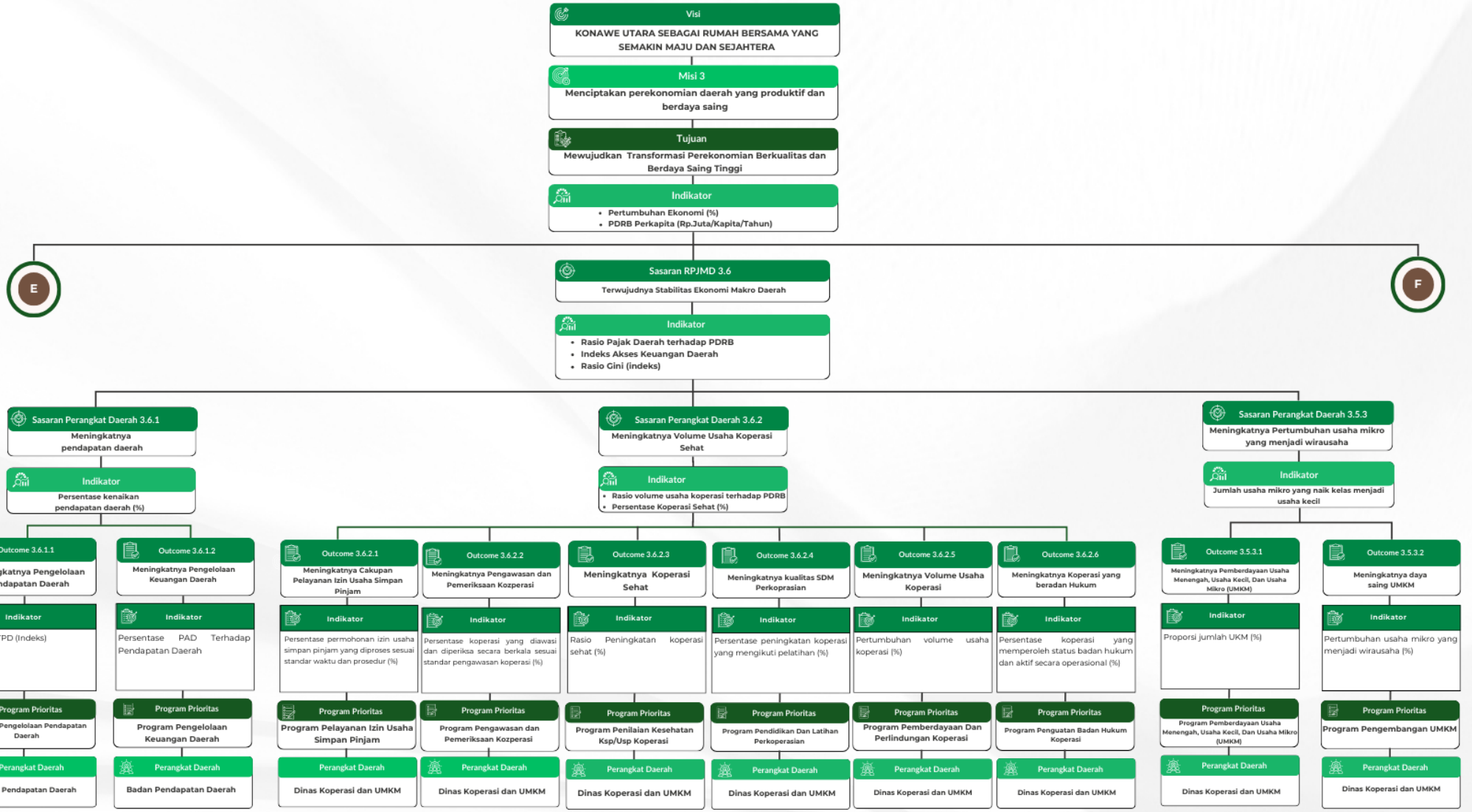
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 3
Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing
Tujuan
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%)
PDRB Perkapita (Rp.Juta/Kapita/Tahun)
E
Sasaran RPJMD 3.6
Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Indikator
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Indeks Akses Keuangan Daerah
Rasio Gini (indeks)
F
Sasaran Perangkat Daerah 3.6.1
Meningkatnya pendapatan daerah
Indikator
Persentase kenaikan pendapatan daerah (%)
Outcome 3.6.1.1
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator
Indeks ETPD (Indeks)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Outcome 3.6.1.2
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Program Prioritas
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Sasaran Perangkat Daerah 3.6.2
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi Sehat
Indikator
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
Persentase Koperasi Sehat (%)
Outcome 3.6.2.1
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Indikator
Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diproses sesuai standar waktu dan prosedur (%)
Program Prioritas
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM
Outcome 3.6.2.2
Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Kozperasi
Indikator
Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa secara berkala sesuai standar pengawasan koperasi (%)
Program Prioritas
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Kozperasi
Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM
Outcome 3.6.2.3
Meningkatnya Koperasi Sehat
Indikator
Rasio Peningkatan koperasi sehat (%)
Program Prioritas
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM
Outcome 3.6.2.4
Meningkatnya kualitas SDM Perkoprasian
Indikator
Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan (%)
Program Prioritas
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM
Outcome 3.6.2.5
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi
Indikator
Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)
Program Prioritas
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM
Outcome 3.6.2.6
Meningkatnya Koperasi yang beradan Hukum
Indikator
Persentase koperasi yang memperoleh status badan hukum dan aktif secara operasional (%)
Program Prioritas
Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM
Sasaran Perangkat Daerah 3.5.3
Meningkatnya Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha
Indikator
Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil
Outcome 3.5.3.1
Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Indikator
Proporsi jumlah UKM (%)
Program Prioritas
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM
Outcome 3.5.3.2
Meningkatnya daya saing UMKM
Indikator
Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan UMKM
Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM

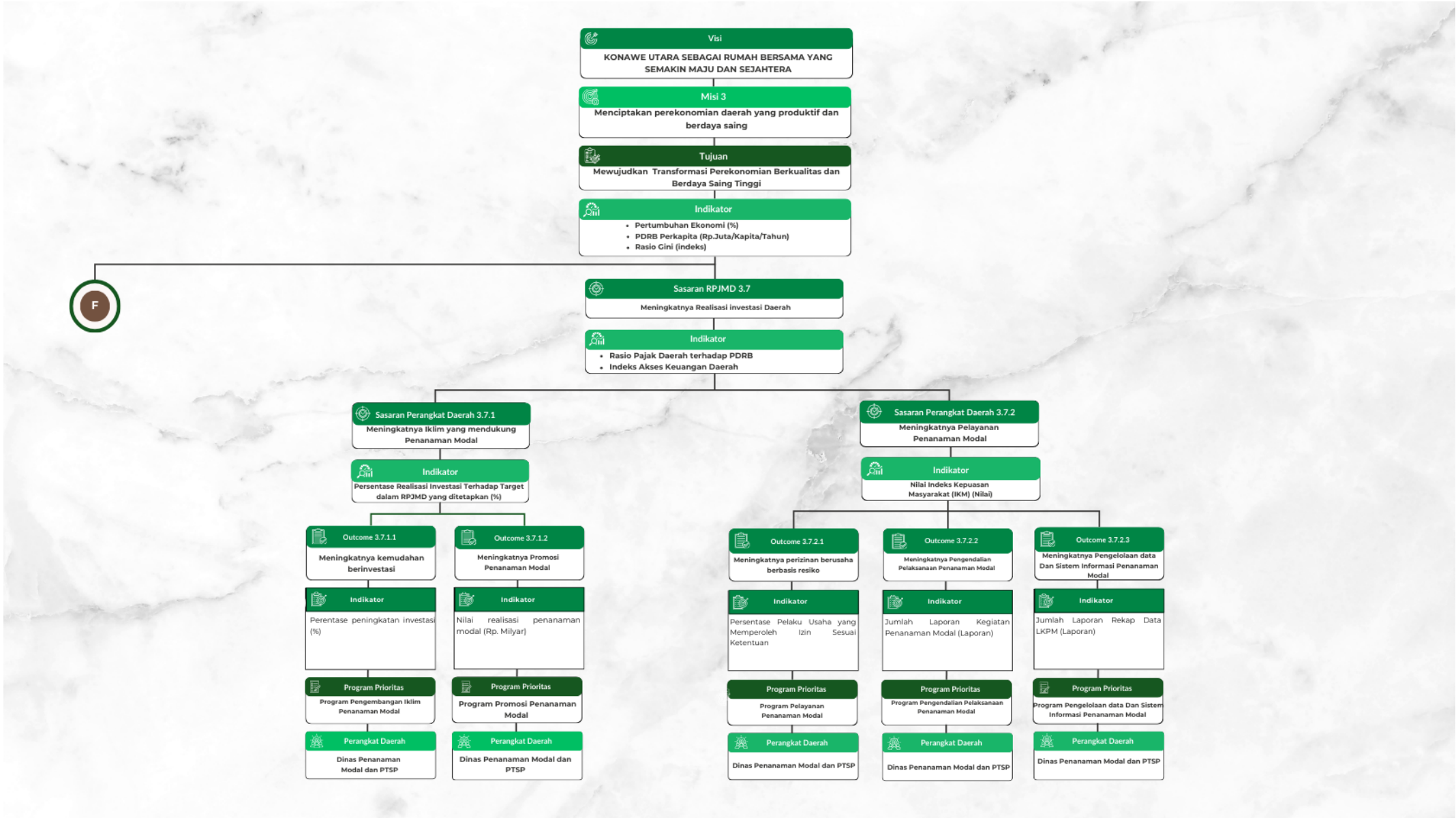
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 3
Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing
Tujuan
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%)
PDRB Perkapita (Rp.Juta/Kapita/Tahun)
Rasio Gini (indeks)
F
Sasaran RPJMD 3.7
Meningkatnya Realisasi investasi Daerah
Indikator
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Indeks Akses Keuangan Daerah
Sasaran Perangkat Daerah 3.7.1
Meningkatnya Iklim yang mendukung Penanaman Modal
Indikator
Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target dalam RPJMD yang ditetapkan (%)
Outcome 3.7.1.1
Meningkatnya kemudahan berinvestasi
Indikator
Perentase peningkatan investasi (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Outcome 3.7.1.2
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal
Indikator
Nilai realisasi penanaman modal (Rp. Milyar)
Program Prioritas
Program Promosi Penanaman Modal
Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sasaran Perangkat Daerah 3.7.2
Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal
Indikator
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)
Outcome 3.7.2.1
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko
Indikator
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Program Prioritas
Program Pelayanan Penanaman Modal
Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Outcome 3.7.2.2
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator
Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Laporan)
Program Prioritas
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Outcome 3.7.2.3
Meningkatnya Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator
Jumlah Laporan Rekap Data LKPM (Laporan)
Program Prioritas
Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

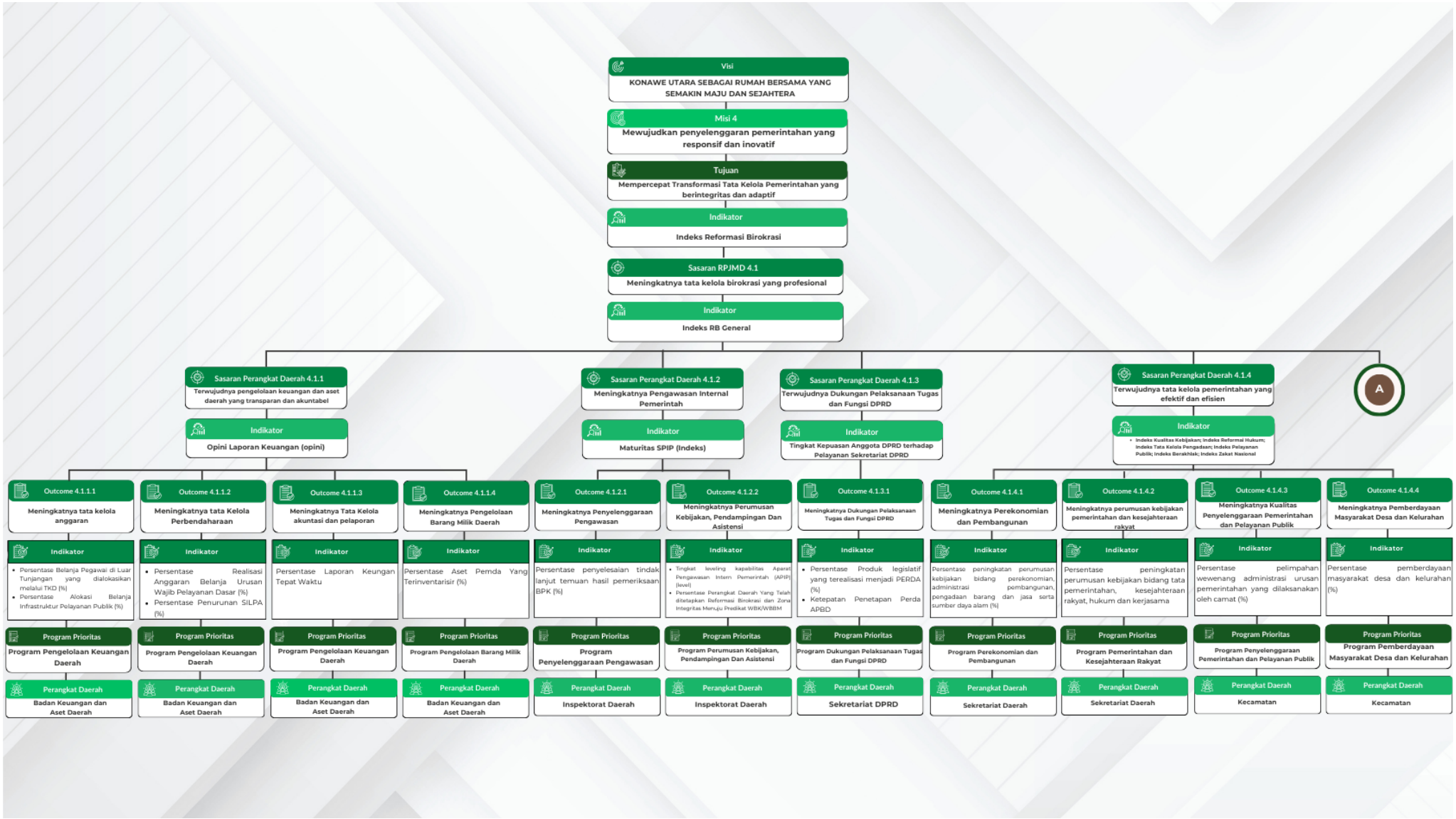
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 4
Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang responsif dan inovatif
Tujuan
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
Indikator
Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD 4.1
Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional
Indikator
Indeks RB General
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.1
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
Indikator
Opini Laporan Keuangan (opini)
Outcome 4.1.1.1
Meningkatnya tata kelola anggaran
Indikator
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan yang dialokasikan melalui TKD (%)
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome 4.1.1.2
Meningkatnya tata Kelola Perbendaharaan
Indikator
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)
Persentase Penurunan SILPA (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome 4.1.1.3
Meningkatnya Tata Kelola akuntasi dan pelaporan
Indikator
Persentase Laporan Keungan Tepat Waktu
Program Prioritas
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome 4.1.1.4
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator
Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.2
Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator
Maturitas SPIP (Indeks)
Outcome 4.1.2.1
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan
Indikator
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK (%)
Program Prioritas
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah
Outcome 4.1.2.2
Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Indikator
Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah ditetapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM
Program Prioritas
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.3
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Indikator
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
Outcome 4.1.3.1
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Indikator
Persentase Produk legislatif yang terealisasi menjadi PERDA (%)
Ketepatan Penetapan Perda APBD
Program Prioritas
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Indikator
Indeks Kualitas Kebijakan; Indeks Reformasi Hukum; Indeks Tata Kelola Pengadaan; Indeks Pelayanan Publik; Indeks Berakhlak; Indeks Zakat Nasional
A
Outcome 4.1.4.1
Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan
Indikator
Persentase peningkatan perumusan kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam (%)
Program Prioritas
Program Perekonomian dan Pembangunan
Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah
Outcome 4.1.4.2
Meningkatnya perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Indikator
Persentase peningkatan perumusan kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama
Program Prioritas
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah
Outcome 4.1.4.3
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikator
Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat (%)
Program Prioritas
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Perangkat Daerah
Kecamatan
Outcome 4.1.4.4
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)
Program Prioritas
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Perangkat Daerah
Kecamatan

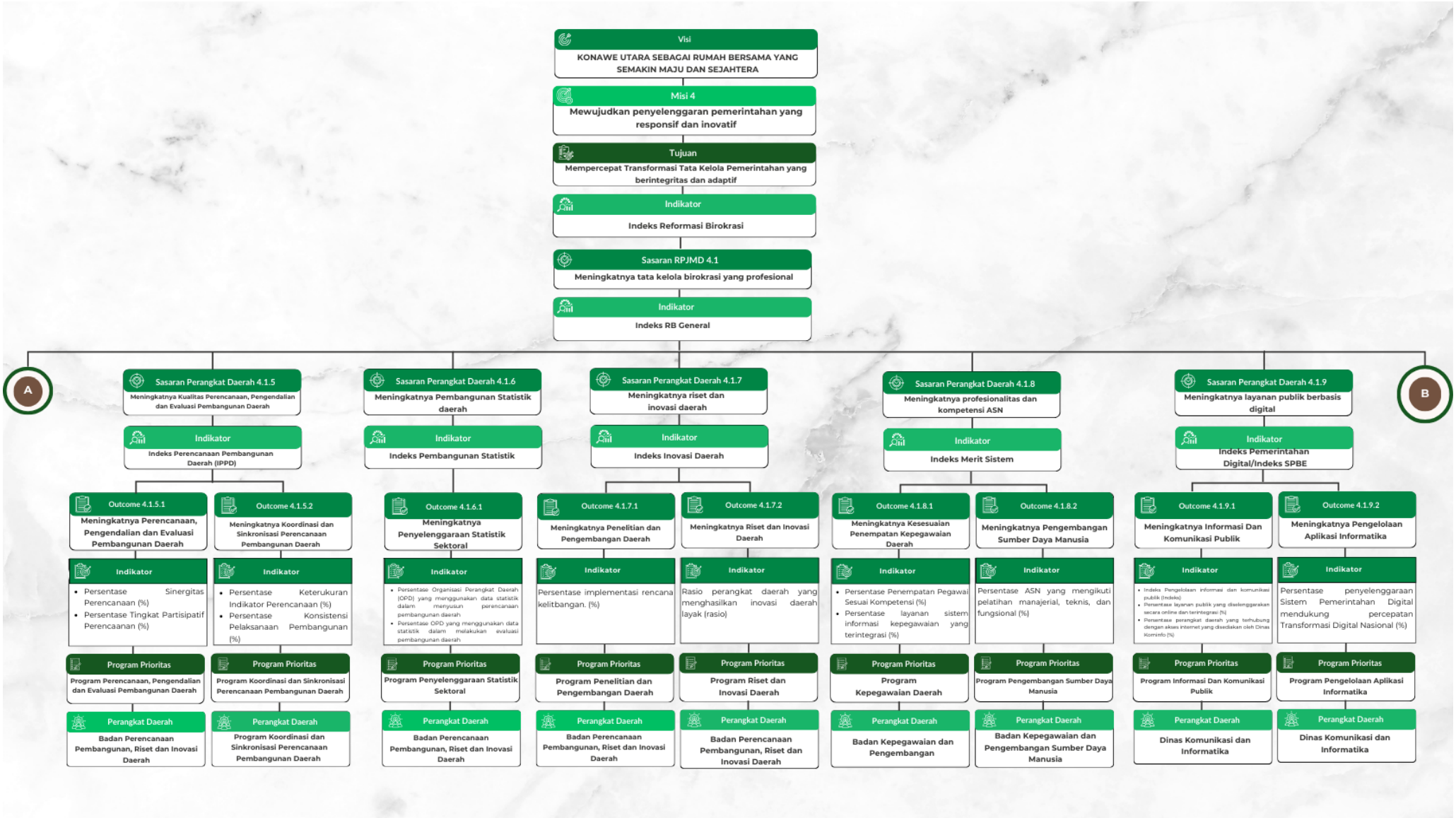
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 4
Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang responsif dan inovatif
Tujuan
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
Indikator
Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD 4.1
Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional
Indikator
Indeks RB General
A
B
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Indikator
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
Outcome 4.1.5.1
Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Indikator
Persentase Sinergitas Perencanaan (%)
Persentase Tingkat Partisipatif Perencaanan (%)
Program Prioritas
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome 4.1.5.2
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator
Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan (%)
Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan (%)
Program Prioritas
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.6
Meningkatnya Pembangunan Statistik daerah
Indikator
Indeks Pembangunan Statistik
Outcome 4.1.6.1
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Indikator
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Program Prioritas
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.7
Meningkatnya riset dan inovasi daerah
Indikator
Indeks Inovasi Daerah
Outcome 4.1.7.1
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah
Indikator
Persentase implementasi rencana kelitbangan. (%)
Program Prioritas
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome 4.1.7.2
Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah
Indikator
Rasio perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah layak (rasio)
Program Prioritas
Program Riset dan Inovasi Daerah
Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.8
Meningkatnya profesionalitas dan kompetensi ASN
Indikator
Indeks Merit Sistem
Outcome 4.1.8.1
Meningkatnya Kesesuaian Penempatan Kepegawaian Daerah
Indikator
Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi (%)
Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (%)
Program Prioritas
Program Kepegawaian Daerah
Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Outcome 4.1.8.2
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia
Indikator
Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.9
Meningkatnya layanan publik berbasis digital
Indikator
Indeks Pemerintahan Digital/Indeks SPBE
Outcome 4.1.9.1
Meningkatnya Informasi Dan Komunikasi Publik
Indikator
Indeks Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Indeks)
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)
Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)
Program Prioritas
Program Informasi Dan Komunikasi Publik
Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika
Outcome 4.1.9.2
Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika
Indikator
Persentase penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Digital mendukung percepatan Transformasi Digital Nasional (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika

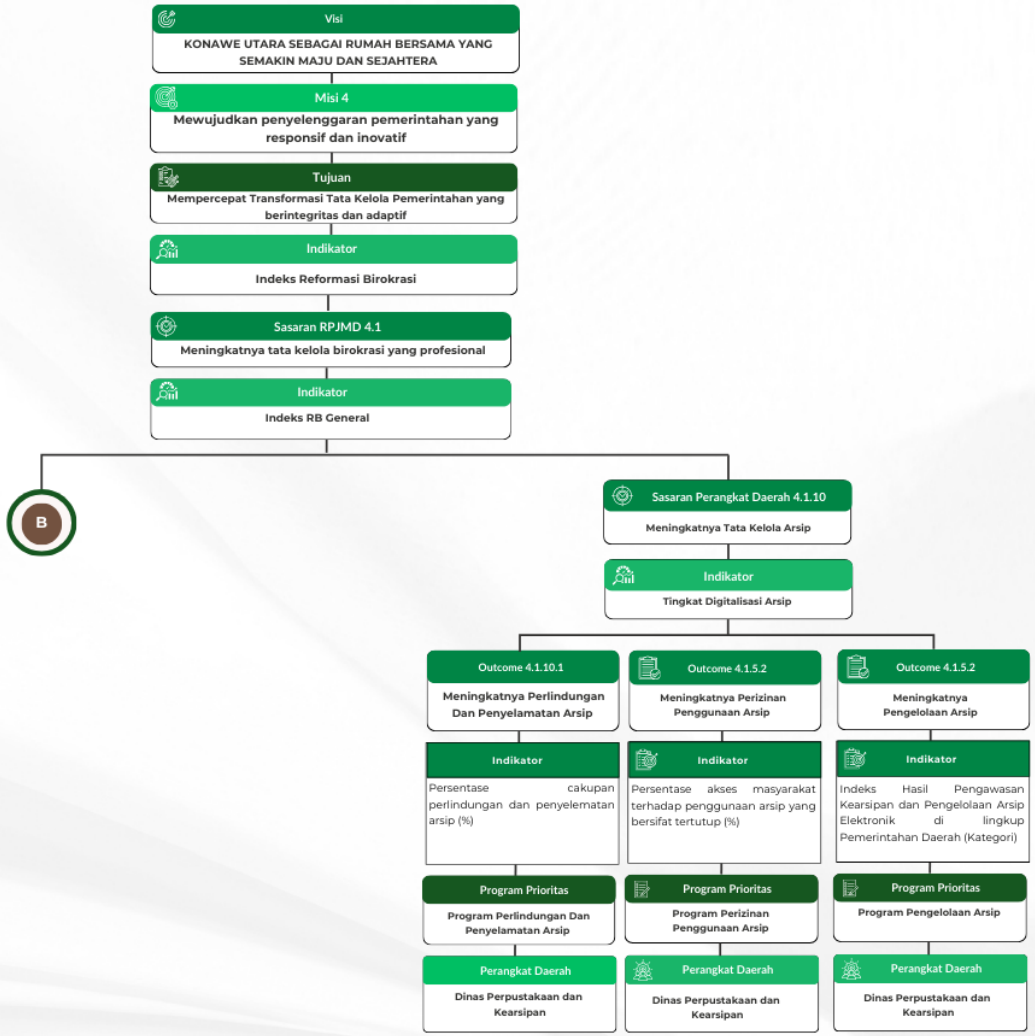
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 4
Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang responsif dan inovatif
Tujuan
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
Indikator
Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD 4.1
Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional
Indikator
Indeks RB General
B
Sasaran Perangkat Daerah 4.1.10
Meningkatnya Tata Kelola Arsip
Indikator
Tingkat Digitalisasi Arsip
Outcome 4.1.10.1
Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
Outcome 4.1.5.2
Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip
Outcome 4.1.5.2
Meningkatnya Pengelolaan Arsip
Indikator
Persentase cakupan perlindungan dan penyelematan arsip (%)
Indikator
Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)
Indikator
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Elektronik di lingkup Pemerintahan Daerah (Kategori)
Program Prioritas
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
Program Prioritas
Program Perizinan Penggunaan Arsip
Program Prioritas
Program Pengelolaan Arsip
Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

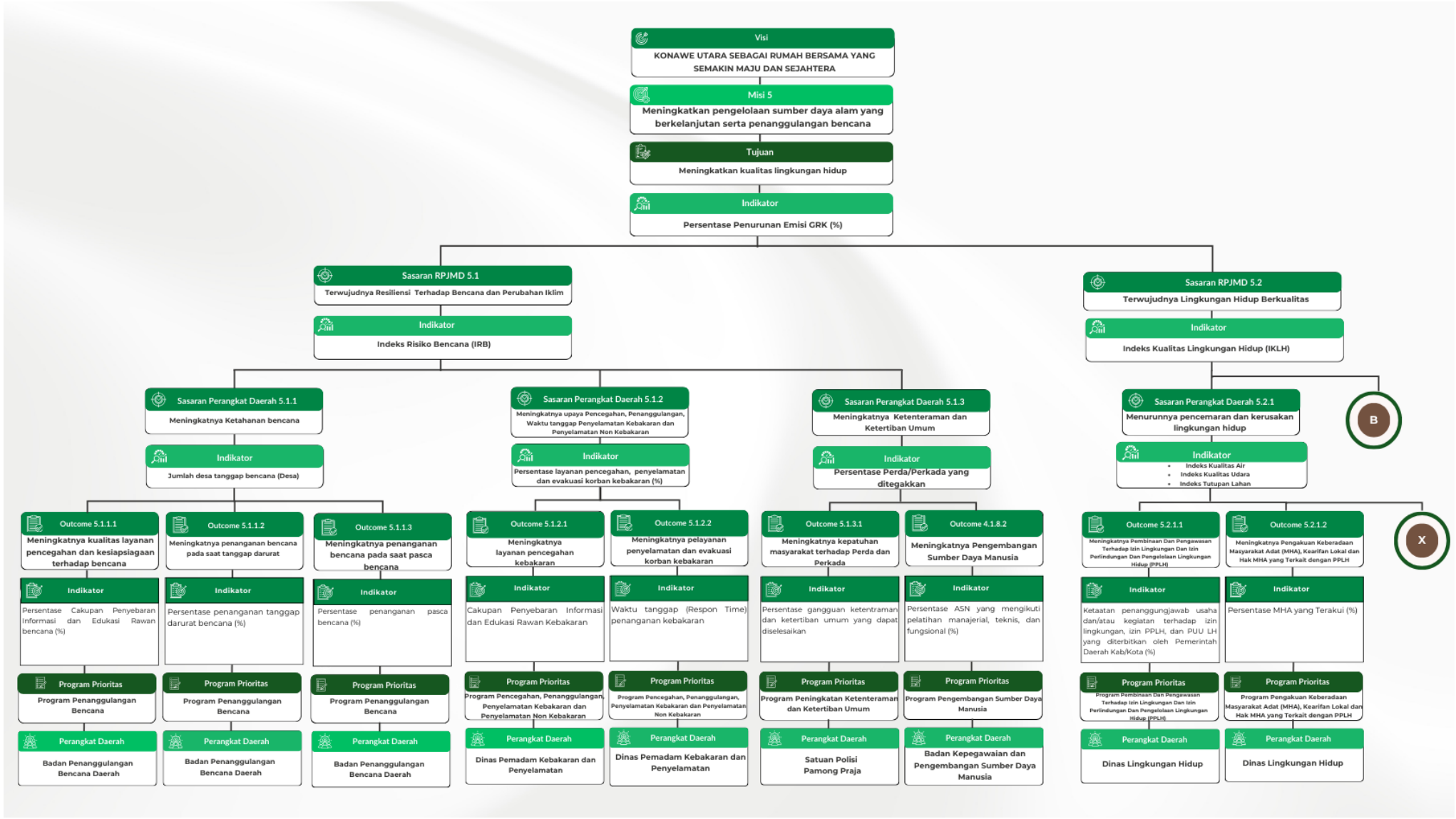
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 5
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana
Tujuan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indikator
Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
Sasaran RPJMD 5.1
Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Indikator
Indeks Risiko Bencana (IRB)
Sasaran RPJMD 5.2
Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas
Indikator
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sasaran Perangkat Daerah 5.1.1
Meningkatnya Ketahanan bencana
Indikator
Jumlah desa tanggap bencana (Desa)
Sasaran Perangkat Daerah 5.1.2
Meningkatnya upaya Pencegahan, Penanggulangan, Waktu tanggap Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Indikator
Persentase layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)
Sasaran Perangkat Daerah 5.1.3
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator
Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan
Sasaran Perangkat Daerah 5.2.1
Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Indikator
Indeks Kualitas Air
Indeks Kualitas Udara
Indeks Tutupan Lahan
B
Outcome 5.1.1.1
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Outcome 5.1.1.2
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat
Outcome 5.1.1.3
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana
Outcome 5.1.2.1
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran
Outcome 5.1.2.2
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Outcome 5.1.3.1
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
Outcome 4.1.8.2
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome 5.2.1.1
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Outcome 5.2.1.2
Meningkatnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
X
Indikator
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan bencana (%)
Indikator
Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)
Indikator
Persentase penanganan pasca bencana (%)
Indikator
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
Indikator
Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran
Indikator
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Indikator
Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional (%)
Indikator
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)
Indikator
Persentase MHA yang Terakui (%)
Program Prioritas
Program Penanggulangan Bencana
Program Prioritas
Program Penanggulangan Bencana
Program Prioritas
Program Penanggulangan Bencana
Program Prioritas
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program Prioritas
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program Prioritas
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program Prioritas
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Prioritas
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program Prioritas
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup

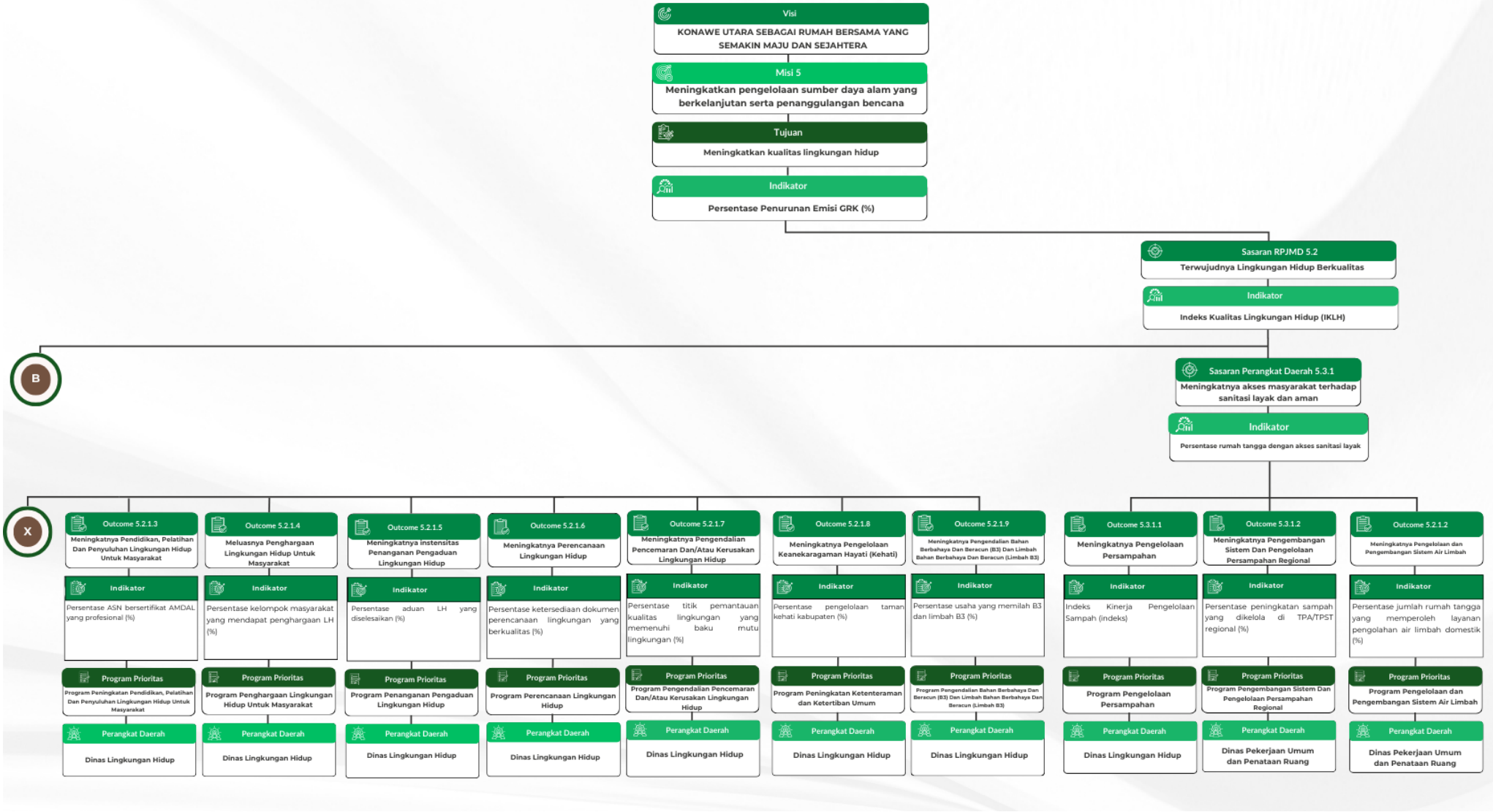
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 5
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana
Tujuan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indikator
Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
Sasaran RPJMD 5.2
Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas
Indikator
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
B
Sasaran Perangkat Daerah 5.3.1
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman
Indikator
Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
X
Outcome 5.2.1.3
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Indikator
Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional (%)
Program Prioritas
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 5.2.1.4
Meluasnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Indikator
Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH (%)
Program Prioritas
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 5.2.1.5
Meningkatnya instensitas Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Indikator
Persentase aduan LH yang diselesaikan (%)
Program Prioritas
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 5.2.1.6
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup
Indikator
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas (%)
Program Prioritas
Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 5.2.1.7
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator
Persentase titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu lingkungan (%)
Program Prioritas
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 5.2.1.8
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Indikator
Persentase pengelolaan taman kehati kabupaten (%)
Program Prioritas
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 5.2.1.9
Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Indikator
Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3 (%)
Program Prioritas
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 5.3.1.1
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Indikator
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)
Program Prioritas
Program Pengelolaan Persampahan
Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 5.3.1.2
Meningkatnya Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Indikator
Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Outcome 5.2.1.2
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Indikator
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)
Program Prioritas
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

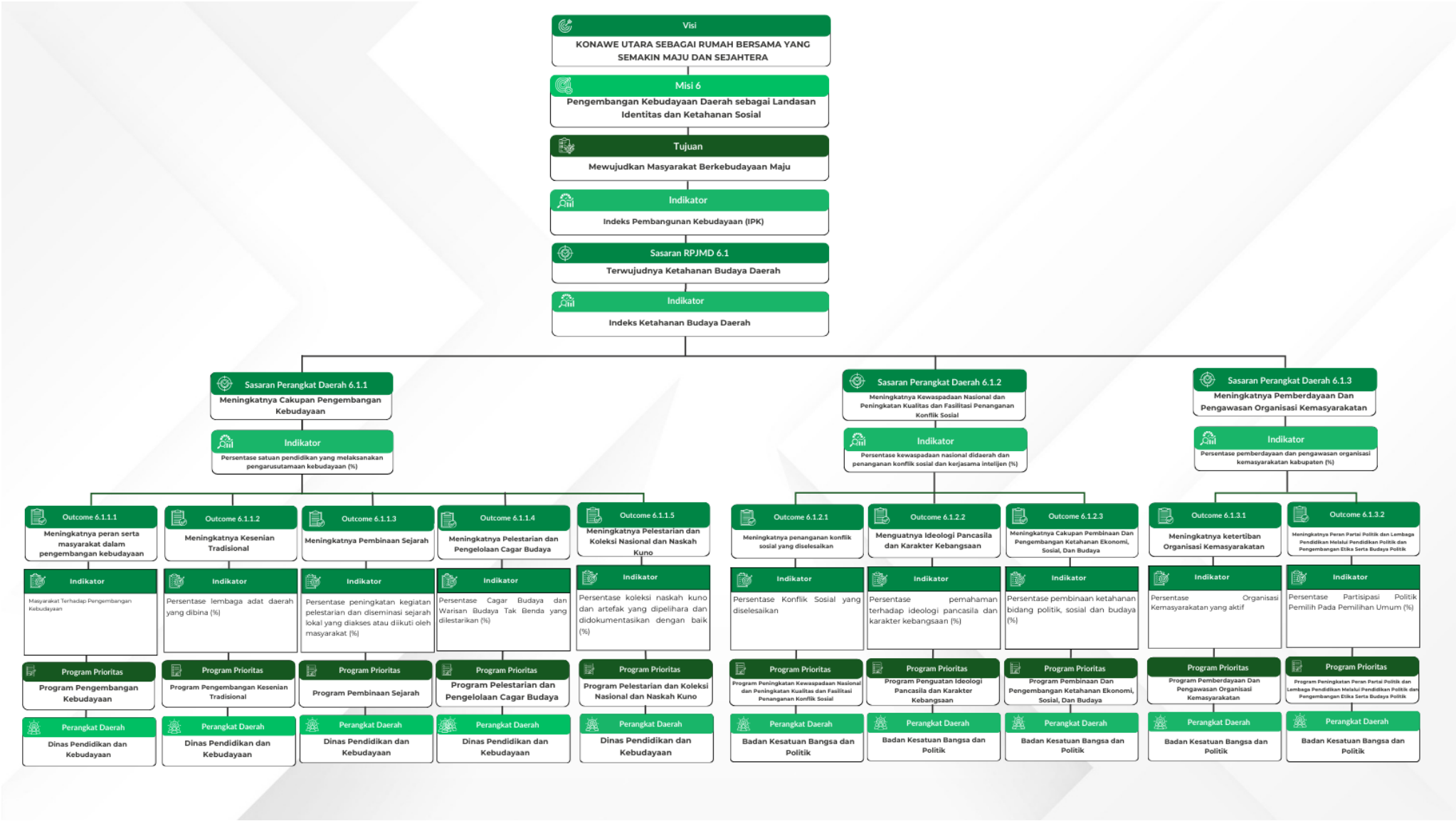
Visi
KONAWE UTARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA
Misi 6
Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial
Tujuan
Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju
Indikator
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Sasaran RPJMD 6.1
Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah
Indikator
Indeks Ketahanan Budaya Daerah
Sasaran Perangkat Daerah 6.1.1
Meningkatnya Cakupan Pengembangan Kebudayaan
Indikator
Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan (%)
Outcome 6.1.1.1
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
Indikator
Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan
Program Prioritas
Program Pengembangan Kebudayaan
Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Outcome 6.1.1.2
Meningkatnya Kesenian Tradisional
Indikator
Persentase lembaga adat daerah yang dibina (%)
Program Prioritas
Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Outcome 6.1.1.3
Meningkatnya Pembinaan Sejarah
Indikator
Persentase peningkatan kegiatan pelestarian dan diseminasi sejarah lokal yang diakses atau diikuti oleh masyarakat (%)
Program Prioritas
Program Pembinaan Sejarah
Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Outcome 6.1.1.4
Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Indikator
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)
Program Prioritas
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Outcome 6.1.1.5
Meningkatnya Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Indikator
Persentase koleksi naskah kuno dan artefak yang dipelihara dan didokumentasikan dengan baik (%)
Program Prioritas
Program Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran Perangkat Daerah 6.1.2
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Indikator
Persentase kewaspadaan nasional didaerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (%)
Outcome 6.1.2.1
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan
Indikator
Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan
Program Prioritas
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcome 6.1.2.2
Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Indikator
Persentase pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)
Program Prioritas
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcome 6.1.2.3
Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Indikator
Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya (%)
Program Prioritas
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran Perangkat Daerah 6.1.3
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Indikator
Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten (%)
Outcome 6.1.3.1
Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan
Indikator
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif
Program Prioritas
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcome 6.1.3.2
Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Indikator
Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum (%)
Program Prioritas
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

4.1.1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan,
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6. Program Akreditas Pelayanan Kesehatan

4.1.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Pengembangan Permukiman
8. Program Penataan Bangunan Gedung

9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan Lainnya
10. Program Penyelenggaraan Jalan
11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4.1.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Progra Pengembangan Perumahan
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

4.1.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Penanggulangan Bencana
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

4.1.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial

4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Perlindungan Khusus Anak

4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4.1.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

4.1.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Program Pengelolaan Persampahan

4.1.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4.1.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

4.1.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

4.1.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran
4. Program Pengelolaan Penerbangan

4.1.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4.1.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

4.1.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

4.1.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

4.1.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4.1.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

4.1.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

4.1.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Pengelolaan Arsip
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

4.1.3 Urusan Pilihan
4.1.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.1.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.1.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

4.1.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

4.1.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4.1.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

4.1.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.1.4.1 Sekretariat Daerah
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

4.1.4.2 Sekretariat DPRD
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

4.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
4.1.5.1 Perencanaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.1.5.2 Keuangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.1.5.3 Kepegawaian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Program Riset Dan Inovasi Daerah

4.1.6 Pengawasan
4.1.6.1 Inspektorat
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

4.1.7 Unsur Kewilayahan
4.1.7.1 Kecamatan Administrasi
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4.1.8 Unsur Pemerintahan Umum
4.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tabel 4.1.
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2030

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
TOTAL PAGU INDIKATIF						1.577.542.421.184		1.672.824.028.286		1.723.195.649.135		1.784.958.767.013		1.850.693.306.710		1.948.099.051.134	
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					688.257.371.010		755.575.926.607		778.587.604.405		812.169.980.942		848.878.357.056		888.890.394.335	
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					284.531.237.977		339.738.009.583		350.274.549.871		371.007.534.772		394.481.037.501		420.861.155.193	
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					284.531.237.977		339.738.009.583		350.274.549.871		371.007.534.772		394.481.037.501		420.861.155.193	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	231.009.172.335	100	284.141.281.972	100	292.665.520.431	100	301.445.486.044	100	310.488.850.625	100	319.803.516.144	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	95,10	53.022.065.642	100	54.612.727.612	100	56.251.109.440	100	67.501.331.328	100	81.001.597.593	100	97.201.917.112	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	99,69		100		100		100		100		100,00		

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	62,88		69,37		75,86		76,62		77,38		78,15		
				Kemampan Literasi SD	Persen	51,68		54,18		56,68		59,18		61,68		64,18		
				Kemampan Literasi SMP	Persen	65,27		66,37		67,47		68,57		69,67		70,77		
				Kemampuan Numerasi SD	Persen	48,36		51,26		54,16		57,06		59,96		62,86		
				Kemampuan Numerasi SMP	Persen	61,24		62,74		64,24		65,74		67,24		68,74		
				Iklim Keamanan SD	Persen	75,44		76,34		77,24		78,14		79,04		79,94		
				Iklim Keamanan SMP	Persen	73,58		75,08		76,58		78,08		79,58		81,08		
				Iklim Kebhinekaan SD	Persen	70,55		71,55		72,55		73,55		74,55		75,55		
				Iklim Kebhinekaan SMP	Persen	74,06		75,06		76,06		77,06		78,06		79,06		
				Iklim Inklusivitas SD	Persen	59,3		61,8		64,3		66,8		69,3		71,80		
				Iklim Inklusivitas SMP	Persen	62,51		64,91		67,31		69,71		72,11		74,51		
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Persen 53,78	Persen	60,07		71,49		86,72		100		100		100		

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3	Program Pengembangan Kurikulum	Terselenggaranya Pengembangan Kurikulum	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendiidkan	Persen	30	200.000.000	35	246.000.000	40	302.580.000	45	372.173.400	48	457.773.282	50	563.061.137	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kapasitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persen	62,82	200.000.000	63,57	615.000.000	64,32	879.450.000	65,07	1.407.120.000	65,82	2.110.680.000	67,00	2.743.884.000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Terkendalinya Perizinan Pendidikan	Persentase pengendalian perizinan PAUD	Persen	75	100.000.000	78	123.000.000	80	175.890.000	82	281.424.000	85	422.136.000	88	548.776.800	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					167.792.968.566		172.826.757.623		178.011.560.352		183.351.907.163		188.852.464.378		194.518.038.309	
1.02.01		Dinas Kesehatan					167.792.968.566		172.826.757.623		178.011.560.352		183.351.907.163		188.852.464.378		194.518.038.309	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	60.437.625.768	100	62.250.754.541	100	64.118.277.177	100	66.041.825.492	100	68.023.080.257	100	70.063.772.665	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	rasio	5	100.875.018.574	4	103.901.269.132	4	107.018.307.206	4	110.228.856.422	3	113.535.722.114	3	116.941.793.778	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, UPTD Puskesmas
				Persentase persalinan di Fasyankes	Persen	80		84		87		92		94		95		
				Persentase ANC (Kunjungan ibu hamil) 6 Kali	Persen	71		76		80		85		88		90		

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	82		84		85		87		89		90		
				Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita	Persen	4		4		4		3		3		2		
				Persentase Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD 90 Tablet)	Persen	72		78		83		86		89		91		
				Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Persen	36		40		49		56		63		70		
				Persentase Lansia Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	96		96		97		97		98		98		
				Insidensi HIV per 100.000 Penduduk	Rasio	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Desa/Kelurahan dengan 5 pilar STBM	Desa/ Kelurahan	2		11		20		40		59		70		
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	30		36		42		50		55		60		

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di RS Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Kesehatan	Persen	60		74		79		83		87		90		
				Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas yang Memenuhi Standar Kesehatan	Persen	44		59		68		75		82		90		
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial	Persen	92		94		96		98		100		100		
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persen	100		100		100		100		100		100		
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar (9 Nakes)	Unit	6	4.251.877.586	10	4.379.433.914	14	4.510.816.931	17	4.646.141.439	20	4.785.525.682	22	4.929.091.453	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
				Rasio Dokter Spesialis per 1.000 penduduk	Rasio	0,10		0,12		0,15		0,18		0,20		0,24		

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat	Persen	59,50	139.009.500	64	143.179.785	69	147.475.179	74	151.899.434	79	156.456.417	86	161.150.109	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
			Cakupan Apotek dan Toko Obat yang memiliki izin	Persen	100		100		100		100		100		100		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persen	75,00	1.826.937.138	80,19	1.881.745.252	84,91	1.938.197.610	90,20	1.996.343.538	96,29	2.056.233.844	100	2.117.920.860	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
6	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akreditas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna	Kategori	Paripurna	262.500.000	Paripurna	270.375.000	Paripurna	278.486.250	Paripurna	286.840.838	Paripurna	295.446.063	Paripurna	304.309.445	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
			Jumlah RSUD Tipe D yang ditingkatkan jadi Tipe C	Unit	0		0		1		1		1		1		
			Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Unit	7		7		7		9		22		22		
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					176.192.756.742		181.478.539.444		186.922.895.628		192.530.582.497		198.306.499.971		204.255.694.971	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					176.192.756.742		181.478.539.444		186.922.895.628		192.530.582.497		198.306.499.971		204.255.694.971	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	5.979.190.454	100	6.158.566.167	100	6.343.323.152	100	6.533.622.847	100	6.729.631.532	100	6.931.520.478	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	31,86	16.590.305.550	33,74	17.088.014.717	36,10	17.600.655.158	38,24	18.128.674.813	39,41	18.672.535.057	40,41	19.232.711.109	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	74,32	31.936.800.000	79,68	32.894.904.000	84,27	33.881.751.120	89,77	34.898.203.654	92,39	35.945.149.763	95,69	37.023.504.256	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	Persen	8,5	577.500.000	14,12	594.825.000	18,2	612.669.750	25,39	631.049.843	29,22	649.981.338	35,26	669.480.778	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	66	13.531.026.600	68	13.936.957.398	73	14.355.066.120	75	14.785.718.104	78	15.229.289.647	80	15.686.168.336	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun	Persen	47,2	4.419.996.000	49,1	4.552.595.880	49,78	4.689.173.756	50,10	4.829.848.969	51,3	4.974.744.438	51,89	5.123.986.771	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	7	Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses terhadap prasarana dasar permukiman	Persen	1,5	2.625.000.000	3,45	2.703.750.000	7,89	2.784.862.500	12,50	2.868.408.375	20,54	2.954.460.626	25,48	3.043.094.445	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Rasio	100	38.885.501.393	100	40.052.066.434	100	41.253.628.427	100	42.491.237.280	100	43.765.974.399	100	45.078.953.630	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan prioritas yang telah ditata melalui penataan bangunan, ruang terbuka, dan elemen pendukung kawasan sesuai fungsi ruang dan karakter wilayah	Persen	0,5	52.500.000	0,98	54.075.000	1,5	55.697.250	1,81	57.368.168	2,1	59.089.213	2,5	60.861.889	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	Persen	15,96	60.611.821.746	16,94	62.430.176.398	18,34	64.303.081.690	21,37	66.232.174.141	24,59	68.219.139.365	26,91	70.265.713.546	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknik/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	13,36	157.500.000	24,09	162.225.000	29,14	167.091.750	32,87	172.104.503	34,31	177.267.638	35,00	182.585.667	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	2,37		5,12		8,00		11,65		12,99		14,00		
	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Persen	82,96	825.615.000	83,15	850.383.450	83,45	875.894.954	83,66	902.171.802	83,7	929.236.956	84	957.114.065	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					10.742.862.576		11.065.148.454		11.397.102.907		11.739.015.995		12.091.186.474		12.453.922.069	
1.04.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					10.742.862.576		11.065.148.454		11.397.102.907		11.739.015.995		12.091.186.474		12.453.922.069	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.495.493.840	100	2.570.358.655	100	2.647.469.415	100	2.726.893.497	100	2.808.700.302	100	2.892.961.311	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	2	14.807.100	2,67	15.251.313	2,98	15.708.852	2,98	16.180.118	3,34	16.665.522	4	17.165.487	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0		0,50		1,23		2,00		2,68		3,00		

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak huni	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	6,34	325.691.205	21,19	335.461.941	47,45	345.525.799	63,79	355.891.573	70,65	366.568.321	82,99	377.565.370	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	47,49	1.412.250.000	53,07	1.454.617.500	59,11	1.498.256.025	65,23	1.543.203.706	71,22	1.589.499.817	76,09	1.637.184.811	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	34,07	6.232.120.431	38,65	6.419.084.044	39,99	6.611.656.566	42,87	6.810.006.263	45,02	7.014.306.451	48,79	7.224.735.644	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam proses sertifikasi dan registrasi	Persen	0,00	262.500.000	0,50	270.375.000	0,75	278.486.250	0,90	286.840.838	1,20	295.446.063	1,50	304.309.445	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					41.550.317.996		42.796.827.536		44.080.732.362		45.403.154.333		46.765.248.963		48.168.206.432	
1.05.01		Satuan Polisi Pamong Praja					3.149.754.045		3.244.246.666		3.341.574.066		3.441.821.288		3.545.075.927		3.651.428.205	

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.465.775.645	100	2.539.748.914	100	2.615.941.382	100	2.694.419.623	100	2.775.252.212	100	2.858.509.778	Satuan Polisi Pamong Praja
	2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	683.978.400	100	704.497.752	100	725.632.685	100	747.401.665	100	769.823.715	100	792.918.427	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					3.529.289.314		3.635.167.993		3.744.223.033		3.856.549.724		3.972.246.216		4.091.413.602	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.694.062.876	100	2.774.884.763	100	2.858.131.306	100	2.943.875.245	100	3.032.191.502	100	3.123.157.247	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya upaya Pencegahan, Penanggulangan, Waktu tanggap Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	100	835.226.438	100	860.283.231	100	886.091.728	100	912.674.479	100	940.054.714	100	968.256.355	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	Persen	75,30		76,50		78,35		79,96		82,31		85,23		
1.05.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					34.871.274.638		35.917.412.877		36.994.935.263		38.104.783.321		39.247.926.820		40.425.364.625	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.475.911.813	100	2.550.189.167	100	2.626.694.842	100	2.705.495.687	100	2.786.660.558	100	2.870.260.374	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	32.395.362.825	100	33.367.223.710	100	34.368.240.421	100	35.399.287.634	100	36.461.266.263	100	37.555.104.251	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100		100		100		100		100		100		
			Persentase penanganan pasca bencana (%)	Persen	100		100		100		100		100				
1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					7.447.227.151		7.670.643.966		7.900.763.285		8.137.786.183		8.381.919.769		8.633.377.362	
1.06.01	Dinas Sosial					7.447.227.151		7.670.643.966		7.900.763.285		8.137.786.183		8.381.919.769		8.633.377.362	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.859.737.094	100	2.945.529.207	100	3.033.895.083	100	3.124.911.935	100	3.218.659.293	100	3.315.219.072	Dinas Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya cakupan Pemberdayaan Sosial	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persen	64,31	3.091.043.393	64,89	3.183.774.694	65,21	3.279.287.935	65,59	3.377.666.573	65,98	3.478.996.570	66,23	3.583.366.467	Dinas Sosial
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkanya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase WNI migran korban kekerasan yang memperoleh layanan sesuai prosedur	Pesen	100	52.500.000	100	54.075.000	100	55.697.250	100	57.368.168	100	59.089.213	100	60.861.889	Dinas Sosial

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
4	Program Rehabilitasi Sosial	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	292.490.363	100	301.265.073	100,00	310.303.026	100	319.612.116	100	329.200.480	100,00	339.076.494	Dinas Sosial
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	0,76	22.121.820	0,95	22.785.475	1,21	23.469.039	1,53	24.173.110	1,89	24.898.303	2,21	25.645.252	Dinas Sosial
6	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan penangananan korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	98,5	1.129.334.483	98,67	1.163.214.517	98,87	1.198.110.952	98,93	1.234.054.281	98,99	1.271.075.909	99,02	1.309.208.187	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					114.676.062.091		118.958.843.954		122.370.109.273		125.883.712.551		129.502.723.927		160.727.064.301	
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					7.156.150.760		7.370.835.283		7.591.960.341		7.819.719.151		8.054.310.726		8.295.940.048	
2.1.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					7.156.150.760		7.370.835.283		7.591.960.341		7.819.719.151		8.054.310.726		8.295.940.048	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	4.856.350.880	100	5.002.041.406	100	5.152.102.648	100	5.306.665.728	100	5.465.865.700	100	5.629.841.671	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, UPT Balai Latihan Kerja

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	65,37	210.000.000	67,91	216.300.000	68,91	222.789.000	69,35	229.472.670	69,59	236.356.850	69,89	243.447.556	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kuantitas serta Kualitas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	0,6	62.445.600	0,65	64.318.968	0,72	66.248.537	0,75	68.235.993	1	70.283.073	1,23	72.391.565	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, UPT Balai Latihan Kerja
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	74,5		75,9		77,9		78,1		79,5		80,21	
	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	61,12	505.132.950	61,6	520.286.939	62,21	535.895.547	62,75	551.972.413	63,21	568.531.585	65,20	585.587.533	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	5	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	58,79	1.522.221.330	59,31	1.567.887.970	59,87	1.614.924.609	60,23	1.663.372.347	60,5	1.713.273.518	61	1.764.671.723	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						5.920.718.019		6.098.339.560		6.281.289.747		6.469.728.439		6.663.820.292		6.863.734.901	

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2.02.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					5.920.718.019		6.098.339.560		6.281.289.747		6.469.728.439		6.663.820.292		6.863.734.901	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.778.046.544	100	3.891.387.941	100	4.008.129.579	100	4.128.373.466	100	4.252.224.670	100	4.379.791.410	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	7,50	395.832.255	8,20	407.707.223	8,60	419.938.439	9,23	432.536.593	9,50	445.512.690	9,92	458.878.071	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	3	Program Perlindungan Perempuan	Tercapainya upaya Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	799.009.995	100	822.980.295	100	847.669.704	100	873.099.795	100	899.292.789	100	926.271.572	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	89.282.025	100	91.960.486	100	94.719.300	100	97.560.879	100	100.487.706	100	103.502.337	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentse pengelolaan data gender dan anak	Persen	100	52.500.000	100	54.075.000	100	55.697.250	100	57.368.168	100	59.089.213	100	60.861.889	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100	303.370.200	100	312.471.306	100	321.845.445	100	331.500.809	100	341.445.833	100	351.689.208	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya cakupan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	10	502.677.000	15,35	517.757.310	20,14	533.290.029	24,55	549.288.730	28,17	565.767.392	35,50	582.740.414	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2.3		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					5.948.103.381		6.126.546.483		6.310.342.877		6.499.653.163		6.694.642.758		6.895.482.041	
2.03.01		Dinas Ketahanan Pangan					5.948.103.381		6.126.546.483		6.310.342.877		6.499.653.163		6.694.642.758		6.895.482.041	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.839.592.381	100	3.954.780.153	100	4.073.423.557	100	4.195.626.264	100	4.321.495.052	100	4.451.139.904	Dinas Ketahanan Pangan
	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan	Persen	12,78	911.443.590	12,89	938.786.897	13,01	966.950.504	13,19	995.959.019	13,25	1.025.837.790	13,45	1.056.612.924	Dinas Ketahanan Pangan
	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	Persen	43,25	541.777.635	47,50	558.030.964	49,56	574.771.893	53,45	592.015.050	55,23	609.775.501	60,00	628.068.766	Dinas Ketahanan Pangan
	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan di Kabupaten	Persen	0	624.373.155	0	643.104.350	0	662.397.480	0	682.269.405	0	702.737.487	100	723.819.611	Dinas Ketahanan Pangan
	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	42,35	30.916.620	42,68	31.844.119	43,10	32.799.442	43,76	33.783.425	44,50	34.796.928	45,10	35.840.836	Dinas Ketahanan Pangan

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					2.261.575.000		2.329.422.250		2.399.304.918		2.471.284.065		2.545.422.587		2.621.785.265	
4.01.01	Sekretariat Daerah					2.261.575.000		2.329.422.250		2.399.304.918		2.471.284.065		2.545.422.587		2.621.785.265	
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persen	100	1.000.000.000	100	1.030.000.000	100	1.060.900.000	100	1.092.727.000	100	1.125.508.810	100	1.159.274.074	Sekretariat Daerah
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terselenggaranya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	1.261.575.000	100	1.299.422.250	100	1.338.404.918	100	1.378.557.065	100	1.419.913.777	100	1.462.511.190	Sekretariat Daerah
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					13.790.080.075		14.203.782.478		14.629.895.952		15.068.792.831		15.520.856.615		15.986.482.314	
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup					13.790.080.075		14.203.782.478		14.629.895.952		15.068.792.831		15.520.856.615		15.986.482.314	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.826.159.257	100	3.940.944.035	100	4.059.172.356	100	4.180.947.526	100	4.306.375.952	100	4.435.567.231	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persen	100	26.092.185	100	26.874.951	100	27.681.199	100	28.511.635	100	29.366.984	100	30.247.994	Dinas Lingkungan Hidup

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu lingkungan	Persen	55	1.005.155.445	60	1.035.310.108	65	1.066.369.412	75	1.098.360.494	80	1.131.311.309	85	1.165.250.648	Dinas Lingkungan Hidup
	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan taman kehati kabupaten	Persen	10,00	8.472.717.329	25,00	8.726.898.848	35,00	8.988.705.814	40,00	9.258.366.988	45,00	9.536.117.998	50,00	9.822.201.538	Dinas Lingkungan Hidup
	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3	%	65	41.788.425	75	43.042.078	78	44.333.340	81	45.663.340	84	47.033.240	85	48.444.238	Dinas Lingkungan Hidup
	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	61,5	28.833.735	62,7	29.698.747	63,7	30.589.709	64,5	31.507.401	65,9	32.452.623	66,78	33.426.201	Dinas Lingkungan Hidup
	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Terakui	%	100	10.887.135	100	11.213.749	100	11.550.162	100	11.896.666	100	12.253.566	100	12.621.173	Dinas Lingkungan Hidup

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional	%	100	13.820.520	100	14.235.136	100	14.662.190	100	15.102.055	100	15.555.117	100	16.021.771	Dinas Lingkungan Hidup
	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meluasnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH	%	35	31.500.000	41	32.445.000	49	33.418.350	54	34.420.901	59	35.453.528	69	36.517.133	Dinas Lingkungan Hidup
	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya instensitas Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase aduan LH yang diselesaikan	%	100	42.687.540	100	43.968.166	100	45.287.211	100	46.645.828	100	48.045.202	100	49.486.558	Dinas Lingkungan Hidup
	11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	indeks	1,50	290.438.505	1,80	299.151.660	2,10	308.126.210	2,50	317.369.996	2,95	326.891.096	3,50	336.697.829	Dinas Lingkungan Hidup
2.6		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					4.076.233.408		4.198.520.410		4.324.476.022		4.454.210.303		4.587.836.612		4.725.471.710	
2.06.01		Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil					4.076.233.408		4.198.520.410		4.324.476.022		4.454.210.303		4.587.836.612		4.725.471.710	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.616.867.123	100	3.725.373.136	100	3.837.134.331	100	3.952.248.360	100	4.070.815.811	100	4.192.940.286	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
	2	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Administrasi	Perekaman KTP Elektronik	Persen	96,75	170.622.060	98,1	175.740.722	99,45	181.012.943	100	186.443.332	100	192.036.632	100	197.797.731	Dinas Kependudukan

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Pendaftaran Penduduk dan KIA	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	98,25		98,65		99,1		99,56		100		100		& Pencatatan Sipil
	3	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya cakupan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	Persen	100	83.086.500	100	85.579.095	100	88.146.468	100	90.790.862	100	93.514.588	100	96.320.025	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	Persen	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	Persen	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	Persen	100		100		100		100		100		100		
	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Persen	100	140.943.495	100	145.171.800	100	149.526.954	100	154.012.762	100	158.633.145	100	163.392.140	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	64.714.230	100	66.655.657	100	68.655.327	100	70.714.986	100	72.836.436	100	75.021.529	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2.7		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					6.625.945.732		6.824.724.104		7.029.465.827		7.240.349.802		7.457.560.296		35.178.045.761	
2.07.01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					6.625.945.732		6.824.724.104		7.029.465.827		7.240.349.802		7.457.560.296		7.681.287.105	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.952.091.092	100	4.070.653.825	100	4.192.773.439	100	4.318.556.643	100	4.448.113.342	100	4.581.556.742	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
	2	Program Penataan Desa	Meningkatnya Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	persen	98,74	628.203.114	99,37	647.049.207	100	666.460.684	100	686.454.504	100	707.048.139	100	728.259.583	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Persen	100	50.000.000	100	51.500.000	100	53.045.000	100	54.636.350	100	56.275.441	100	57.963.704	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase penerapan keuangan desa berbasis digital	Desa	100	788.090.836	100	811.733.561	100	836.085.568	100	861.168.135	100	887.003.179	100	913.613.274	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan desa (LKD	%	100	1.207.560.690	100	1.243.787.511	100	1.281.101.136	100	1.319.534.170	100	1.359.120.195	100	1.399.893.801	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
2.8		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					12.205.459.718		12.571.623.509		12.948.772.214		13.337.235.381		13.737.352.442		14.149.473.015	
2.08.01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					12.205.459.718		12.571.623.509		12.948.772.214		13.337.235.381		13.737.352.442		14.149.473.015	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	5.017.587.572	100	5.168.115.199	100	5.323.158.655	100	5.482.853.414	100	5.647.339.017	100	5.816.759.187	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
	2	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	56,40	787.838.573	58,20	811.473.730	60,10	835.817.942	61,90	860.892.480	62,90	886.719.254	63,80	913.320.832	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,60		11,35		10,90		10,60		10,30		10,08		
	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya cakupan dan kualitas Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rasio	5,10	3.870.202.424	4,20	3.986.308.496	4,01	4.105.897.751	3,70	4.229.074.684	3,10	4.355.946.924	2,80	4.486.625.332	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	44,40	2.529.831.150	48,50	2.605.726.085	52,10	2.683.897.867	56,90	2.764.414.803	60,90	2.847.347.247	64,80	2.932.767.665	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
2.9		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					6.909.532.349		8.116.818.319		8.360.322.869		8.611.132.555		8.869.466.532		9.135.550.528	
2.09.01		Dinas Perhubungan					6.909.532.349		8.116.818.319		8.360.322.869		8.611.132.555		8.869.466.532		9.135.550.528	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.292.052.399	100	3.390.813.971	100	3.492.538.390	100	3.597.314.542	100	3.705.233.978	100	3.816.390.997	Dinas Perhubungan
	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Menurunnya kecelakaan lalulitas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Persen	15,79	144.178.335	23,99	148.503.685	27,30	152.958.796	29,56	157.547.559	32,21	162.273.986	35,60	167.142.206	Dinas Perhubungan

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Pelayaran yang berfungsi Baik	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik	%	100,00	3.473.301.615	100,00	3.577.500.663	100	3.684.825.683	100	3.795.370.454	100	3.909.231.567	100	4.026.508.514	Dinas Perhubungan
4	Program Pengelolaan Penerbangan	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Penerbangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional penerbangan yang dibangun, diperbaiki, atau ditingkatkan	Unit	0,00	-	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	1	1.060.900.000	1	1.092.727.000	1	1.125.508.810	Dinas Perhubungan
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					5.523.773.726		5.689.486.938		5.860.171.546		6.035.976.692		6.217.055.993		6.403.567.673	
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika					5.523.773.726		5.689.486.938		5.860.171.546		6.035.976.692		6.217.055.993		6.403.567.673	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.379.194.086	100	3.480.569.909	100	3.584.987.006	100	3.692.536.616	100	3.803.312.715	100	3.917.412.096	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks	75,65	1.887.957.120	75,89	1.944.595.834	76,39	2.002.933.709	76,81	2.063.021.720	77,97	2.124.912.371	78,69	2.188.659.743	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	96,5	256.622.520	97,12	264.321.196	97,89	272.250.831	98,11	280.418.356	98,43	288.830.907	98,60	297.495.834	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	91,5		91,75		92,12		92,54		92,76		93		
2.11		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					6.083.895.101		6.266.411.954		6.454.404.313		6.648.036.442		6.847.477.535		7.052.901.861	
2.11.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					6.083.895.101		6.266.411.954		6.454.404.313		6.648.036.442		6.847.477.535		7.052.901.861	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.887.500.296	100	4.004.125.305	100	4.124.249.064	100	4.247.976.536	100	4.375.415.832	100	4.506.678.307	Dinas Koperasi & UMKM
	2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diproses sesuai standar waktu dan prosedur	Persen	100	26.250.000	100	27.037.500	100	27.848.625	100	28.684.084	100	29.544.606	100	30.430.944	Dinas Koperasi & UMKM
	3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa secara berkala sesuai standar pengawasan koperasi	Persen	42	23.298.450	42,3	23.997.404	42,6	24.717.326	42,9	25.458.845	43,2	26.222.611	43,50	27.009.289	Dinas Koperasi & UMKM

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase koperasi sehat	Persen	64	134.284.500	65	138.313.035	67	142.462.426	69	146.736.299	71	151.138.388	75	155.672.539	Dinas Koperasi & UMKM
	5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen	15,2	1.831.417.875	15,5	1.886.360.411	15,8	1.942.951.224	16,1	2.001.239.760	16,4	2.061.276.953	16,70	2.123.115.262	Dinas Koperasi & UMKM
	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	2,18	52.747.590	2,48	54.330.018	2,78	55.959.918	3,08	57.638.716	3,38	59.367.877	3,68	61.148.914	Dinas Koperasi & UMKM
	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Proporsi jumlah UKM	Persen	23	48.396.390	23,7	49.848.282	24,4	51.343.730	25,1	52.884.042	25,8	54.470.563	26,50	56.104.680	Dinas Koperasi & UMKM
	8	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,5	50.000.000	1,00	51.500.000	1,50	53.045.000	2,00	54.636.350	2,50	56.275.441	3,00	57.963.704	Dinas Koperasi & UMKM
	9	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang beradan Hukum	Persentase koperasi yang memperoleh status badan hukum dan aktif secara operasional	Persen	65%	30.000.000	65,17	30.900.000	65,67	31.827.000	66,17	32.781.810	67,17	33.765.264	69,35	34.778.222	Dinas Koperasi & UMKM
2.12		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					2.915.439.236		3.002.902.413		3.092.989.485		3.185.779.170		3.281.352.545		3.379.793.121	
2.12.01		Dinas Penanaman Modal dan PTSP					2.915.439.236		3.002.902.413		3.092.989.485		3.185.779.170		3.281.352.545		3.379.793.121	

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.409.057.101	100	2.481.328.814	100	2.555.768.678	100	2.632.441.739	100	2.711.414.991	100	2.792.757.440	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Iklim yang mendukung Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	22,17	23.996.175	24,12	24.716.060	26,54	25.457.542	29,46	26.221.268	32,83	27.007.906	36,85	27.818.144	Dinas Penanaman Modal & PTSP
3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. Milyar	1260	81.021.780	1376	83.452.433	1417	85.956.006	1460	88.534.687	1504	91.190.727	1549,00	93.926.449	Dinas Penanaman Modal & PTSP
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100	233.308.950	100	240.308.219	100	247.517.465	100	254.942.989	100	262.591.279	100	270.469.017	Dinas Penanaman Modal & PTSP
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan	850 LKPM	66.584.070	904 LKPM	68.581.592	981 LKPM	70.639.040	1066 LKPM	72.758.211	1154 LKPM	74.940.957	1244 LKPM	77.189.186	Dinas Penanaman Modal & PTSP
6	Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Rekap Data LKPM	Laporan	4	101.471.160	4	104.515.295	4	107.650.754	4	110.880.276	4	114.206.685	4	117.632.885	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					27.471.054.556		28.137.686.193		28.824.316.779		29.531.546.282		30.259.992.670		31.010.292.451	
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga					27.471.054.556		28.137.686.193		28.824.316.779		29.531.546.282		30.259.992.670		31.010.292.451	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.102.575.740	100	3.195.653.012	100	3.291.522.602	100	3.390.268.281	100	3.491.976.329	100	3.596.735.619	Dinas Kepemudaan & Olahraga

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	5	5.250.000.000	10	5.250.000.000	15	5.250.000.000	20	5.250.000.000	25	5.250.000.000	30,00	5.250.000.000	Dinas Kepemudaan & Olahraga
	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Predikat Daerah dalam Kejuaraan Tingkat Provinsi (Peringkat)	Peringkat	2	19.118.478.816	2	19.692.033.181	1	20.282.794.176	1	20.891.278.001	1	21.518.016.341	1	22.163.556.832	Dinas Kepemudaan & Olahraga
	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat daerah yang dilaksanakan per tahun	Kegiatan	1	100.000.000	1	103.000.000	2	106.090.000	3	109.272.700	4	112.550.881	4	115.927.407	Dinas Kepemudaan & Olahraga
2.14		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					570.695.790		587.816.664		605.451.164		623.614.699		642.323.139		661.592.834	
5.01.2		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					570.695.790		587.816.664		605.451.164		623.614.699		642.323.139		661.592.834	
	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	570.695.790	100	587.816.664	100	605.451.164	100	623.614.699	100	642.323.139	100	661.592.834	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100		100		100		100		100		100		
2.16		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					4.065.065.625		4.187.017.594		4.312.628.122		4.442.006.965		4.575.267.174		4.712.525.189	
1.01.01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					4.065.065.625		4.187.017.594		4.312.628.122		4.442.006.965		4.575.267.174		4.712.525.189	
	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Cakupan Pengembangan Kebudayaan	Indeks Peran Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	10	3.150.065.625	25	3.244.567.594	35	3.341.904.622	55	3.442.161.760	65	3.545.426.613	73	3.651.789.411	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Kesenian Tradisional	Persentase lembaga adat daerah yang dibina	Persen	100	105.000.000	100	108.150.000	100	111.394.500	100	114.736.335	100	118.178.425	100	121.723.778	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	3	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya Pembinaan Sejarah	Persentase peningkatan kegiatan pelestarian dan diseminasi sejarah lokal yang diakses atau diikuti oleh masyarakat	Persen	5,70	600.000.000	10,90	618.000.000	19,25	636.540.000	25,10	655.636.200	29,52	675.305.286	33,45	695.564.445	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	68,15	210.000.000	68,25	216.300.000	68,5	222.789.000	68,62	229.472.670	68,77	236.356.850	69,10	243.447.556	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2.17		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					2.934.719.643		3.022.761.233		3.113.444.070		3.206.847.392		3.303.052.814		3.402.144.398	
2.17.01		Dinas Perpustakaan					2.934.719.643		3.022.761.233		3.113.444.070		3.206.847.392		3.303.052.814		3.402.144.398	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.509.335.873	100	2.584.615.950	100	2.662.154.428	100	2.742.019.061	100	2.824.279.633	100	2.909.008.022	Dinas Perpustakaan
	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	68,23	425.383.770	68,54	438.145.283	68,96	451.289.642	69,20	464.828.331	69,42	478.773.181	69,66	493.136.376	Dinas Perpustakaan
	3	Program Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno dan artefak yang dipelihara dan didokumentasikan dengan baik	Persen	5,35	52.500.000	7,98	54.075.000	10,45	55.697.250	12,39	57.368.168	15,19	59.089.213	17,99	60.861.889	Dinas Perpustakaan
2.18		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					217.619.972		224.148.571		230.873.028		237.799.219		244.933.195		252.281.191	
2.17.01		Dinas Perpustakaan					217.619.972		224.148.571		230.873.028		237.799.219		244.933.195		252.281.191	
	1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Elektronik di lingkup Pemerintahan Daerah	Kategori	D/Sangat Kurang	180.869.972	C/Kurang	186.296.071	CC/Cukup	191.884.953	B/Baik	197.641.502	B/Baik	203.570.747	BB/Sangat Baik	209.677.869	Dinas Perpustakaan

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelematan arsip	persen	100	36.750.000	100	37.852.500	100	38.988.075	100	40.157.717	100	41.362.449	78,03	42.603.322	Dinas Perpustakaan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					83.478.563.705		85.982.920.616		88.562.408.234		91.219.280.481		93.955.858.896		96.774.534.662	
3.1		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					11.680.156.625		12.030.561.323		12.391.478.163		12.763.222.508		13.146.119.183		13.540.502.759	
3.01.01		Dinas Perikanan					11.680.156.625		12.030.561.323		12.391.478.163		12.763.222.508		13.146.119.183		13.540.502.759	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.919.761.290	100	4.037.354.128	100	4.158.474.752	100	4.283.228.995	100	4.411.725.864	100	4.544.077.640	Dinas Perikanan
	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	15.516	2.105.042.205	15.568	2.168.193.471	15.621	2.233.239.275	15.673	2.300.236.454	15.726	2.369.243.547	15.779	2.440.320.854	Dinas Perikanan
	3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	9.884	5.419.941.450	9.909	5.582.539.694	9.934	5.750.015.884	9.959	5.922.516.361	9.984	6.100.191.852	10.009	6.283.197.607	Dinas Perikanan
	4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina	persen	55	52.279.500	59	53.847.885	63	55.463.322	65	57.127.221	69	58.841.038	75	60.606.269	Dinas Perikanan
	5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	1472	183.132.180	1483	188.626.145	1493	194.284.930	1504	200.113.478	1515	206.116.882	1.526	212.300.388	Dinas Perikanan

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.2		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					5.936.798.988		6.114.902.957		6.298.350.046		6.487.300.547		6.681.919.564		6.882.377.151	
3.02.01		Dinas Pariwisata					5.936.798.988		6.114.902.957		6.298.350.046		6.487.300.547		6.681.919.564		6.882.377.151	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.227.710.998	100	3.324.542.328	100	3.424.278.597	100	3.527.006.955	100	3.632.817.164	100	3.741.801.679	Dinas Pariwisata
	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap	Hari	2	58.594.410	2	60.352.242	3	62.162.810	3	64.027.694	3	65.948.525	4	67.926.980	Dinas Pariwisata
	3	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	18,50	2.261.142.240	20,34	2.328.976.507	22,50	2.398.845.802	25,10	2.470.811.176	28,10	2.544.935.512	30,15	2.621.283.577	Dinas Pariwisata
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	9,20		9,60		10,00		10,42		10,81		11,50		
	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai Tambah ekonomi kreatif	Rp. Juta	170,2	204.600.375	170,4	210.738.386	170,6	217.060.538	170,8	223.572.354	171	230.279.525	171,50	237.187.910	Dinas Pariwisata

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan	persen	70	184.750.965	75	190.293.494	80	196.002.299	85	201.882.368	90	207.938.839	95	214.177.004	Dinas Pariwisata
3.3		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					53.002.771.387		54.592.854.528		56.230.640.164		57.917.559.369		59.655.086.150		61.444.738.735	
3.03.01		Dinas Perkebunan dan Hortikultura					20.896.311.252		21.523.200.589		22.168.896.607		22.833.963.505		23.518.982.410		24.224.551.882	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.362.727.930	100	3.463.609.768	100	3.567.518.061	100	3.674.543.603	100	3.784.779.911	100	3.898.323.309	Dinas Perkebunan & Hortikultura
	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kg/Ha	4.807	14.302.282.098	5.288	14.731.350.561	5.816	15.173.291.078	6.398	15.628.489.810	7.038	16.097.344.505	7.742	16.580.264.840	Dinas Perkebunan & Hortikultura
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Kg/Ha	1.553		1.708		1.879		2.066		2.273		2.500		
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2.020		2.222		2.444		2.688		2.957		3.253		
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	293		322		354		389		428		471		

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit	Ton	218.266		251.006		301.208		376.510		489.462		660.774		
	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana perkebunan yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan di daerah	Persen	59	525.000.000	63	540.750.000	69	556.972.500	74	573.681.675	79	590.892.125	82	608.618.889	Dinas Perkebunan & Hortikultura
	4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kerugian hasil produksi perkebunan akibat bencana dan gangguan OPT/OPH	persen	25	2.372.176.924	30	2.443.342.232	35	2.516.642.499	42	2.592.141.774	45	2.669.906.027	49	2.750.003.208	Dinas Perkebunan & Hortikultura
	5	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	Persen	100	334.124.299	100	344.148.028	100	354.472.469	100	365.106.643	100	376.059.842	100	387.341.637	Dinas Perkebunan & Hortikultura
3.03.02		Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan					32.106.460.135		33.069.653.939		34.061.743.557		35.083.595.864		36.136.103.740		37.220.186.852	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	persen	100	7.425.659.783	100	7.648.429.577	100	7.877.882.464	100	8.114.218.938	100	8.357.645.506	100	8.608.374.871	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Jagung	Ton	4.600	5.606.191.607	4.820	5.774.377.356	5.020	5.947.608.676	5.220	6.126.036.937	5.421	6.309.818.045	5.620	6.499.112.586	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
				Jumlah Produksi Padi	Ton	7.500		8.100		8.600		9.100		9.600		10.100		
				Jumlah Produksi Kedelai	Ton	36		40		44		48		53		58		
				Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	695		765		841		925		1.018		1.120		
				Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Kg	208.023		222.000		236.650		252.270		268.970		286.860		
				Jumlah Produksi Telur	Kg	90.619		94.822		99.287		103.981		108.918		113.997		
	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan akses dan pemanfaatan prasarana pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah	Persen	81,00	18.557.637.000	82,00	19.114.366.110	83,00	19.687.797.093	84,00	20.278.431.006	85,00	20.886.783.936	86,00	21.513.387.454	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	81	55.125.000	82	56.778.750	83	58.482.113	84	60.236.576	85	62.043.673	86	63.904.983	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	Persen	11	108.318.000	13	111.567.540	16	114.914.566	19	118.362.003	22	121.912.863	25	125.570.249	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian yang memperoleh perizinan berusaha secara legal dan sesuai ketentuan	Persen	100	105.000.000	100	108.150.000	100	111.394.500	100	114.736.335	100	118.178.425	100	121.723.778	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
	7	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM Kelompok Tani	Persentase peningkatan adopsi teknologi baru dan praktik pertanian oleh petani	Persen	45	248.528.744	48	255.984.607	52	263.664.145	56	271.574.069	60	279.721.291	64	288.112.930	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
3.4		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					4.010.619.531		4.130.938.117		4.254.866.260		4.382.512.248		4.513.987.615		4.649.407.244	
3.04.01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan					4.010.619.531		4.130.938.117		4.254.866.260		4.382.512.248		4.513.987.615		4.649.407.244	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.085.616.228	100	3.178.184.715	100	3.273.530.256	100	3.371.736.164	100	3.472.888.249	100	3.577.074.896	Dinas Perindustrian & Perdagangan

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	persen	2,1	21.000.000	2,9	21.630.000	3,8	22.278.900	4,5	22.947.267	5,1	23.635.685	6	24.344.756	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik	Persen	100,00	253.332.058	100,00	260.932.019	100,00	268.759.980	100,00	276.822.779	100,00	285.127.463	100	293.681.287	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	85	381.559.290	92	393.006.069	95	404.796.251	98	416.940.138	100	429.448.342	100	442.331.793	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	5	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor kabupaten	Persen	1,50	105.000.000	2,70	108.150.000	3,50	111.394.500	4,50	114.736.335	5,00	118.178.425	6,50	121.723.778	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	25	76.125.105	45	78.408.858	65	80.761.124	80	83.183.958	95	85.679.476	100,00	88.249.861	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	Persen	0	87.986.850	10	90.626.456	12,35	93.345.249	14,51	96.145.607	17,89	99.029.975	21	102.000.874	Dinas Perindustrian & Perdagangan

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3.5		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					133.092.960		137.085.749		141.198.321		145.434.271		149.797.299		154.291.218	
3.04.01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan					133.092.960		137.085.749		141.198.321		145.434.271		149.797.299		154.291.218	
	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Industri Pengolahan dan eksport industri	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Rp. Juta	48,35	122.193.960	55,61	125.859.779	60,5	129.635.572	67,8	133.524.639	83,5	137.530.379	95	141.656.290	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya Cakupan Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IUI dan IUKI efektif	%	55	10.899.000	59	11.225.970	62,3	11.562.749	64,5	11.909.632	66,72	12.266.921	69	12.634.928	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah aplikasi atau fitur pendukung sistem informasi industri yang dikembangkan atau dioptimalkan	aplikasi	0	25.000.000	1	25.750.000	1	26.522.500	1	27.318.175	1	28.137.720	1	28.981.852	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.5		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					8.715.124.215		8.976.577.941		9.245.875.280		9.523.251.538		9.808.949.084		10.103.217.557	
2.1.01		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					8.715.124.215		8.976.577.941		9.245.875.280		9.523.251.538		9.808.949.084		10.103.217.557	

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan diperencanaan daerah kawasan transmigasi	persen	100	1.784.960.415	100	1.838.509.227	100	1.893.664.504	100	1.950.474.439	100	2.008.988.673	100	2.069.258.333	Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persen	80,31	367.500.000	80,59	378.525.000	80,72	389.880.750	80,89	401.577.173	80,99	413.624.488	81	426.033.222	Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Mandiri	Persentase warga transmigrasi yang mandiri	persen	100	6.562.663.800	100	6.759.543.714	100	6.962.330.025	100	7.171.199.926	100	7.386.335.924	100	7.607.926.002	Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					167.844.853.941		172.880.199.560		178.066.605.546		183.408.603.713		188.910.861.824		194.578.187.679	
4.1	Sekretariat Daerah					130.265.507.438		134.173.472.661		138.198.676.841		142.344.637.146		146.614.976.260		151.013.425.548	
4.01.01	Sekretariat Daerah					130.265.507.438		134.173.472.661		138.198.676.841		142.344.637.146		146.614.976.260		151.013.425.548	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	106.133.198.901	100	109.317.194.868	100	112.596.710.715	100	115.974.612.036	100	119.453.850.397	100	123.037.465.909	Sekretariat Daerah

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan perumusan kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Persen	68,6	23.023.207.732	72,31	23.713.903.964	76,99	24.425.321.083	80,12	25.158.080.716	84,12	25.912.823.137	87,25	26.690.207.831	Sekretariat Daerah
	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan	Persentase peningkatan perumusan kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam	Persen	30	1.109.100.804	35	1.142.373.828	40	1.176.645.043	45	1.211.944.394	50	1.248.302.726	55	1.285.751.808	Sekretariat Daerah
4.2		Sekretariat DPRD					37.579.346.504		38.706.726.899		39.867.928.706		41.063.966.567		42.295.885.564		43.564.762.131	
4.02.01		Sekretariat DPRD					37.579.346.504		38.706.726.899		39.867.928.706		41.063.966.567		42.295.885.564		43.564.762.131	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	28.415.205.749	100	29.267.661.921	100	30.145.691.779	100	31.050.062.532	100	31.981.564.408	100	32.941.011.340	Sekretariat DPRD
	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Produk legislatif yang terealisasi menjadi PERDA	Persen	50	9.164.140.755	55	9.439.064.978	60	9.722.236.927	65	10.013.904.035	70	10.314.321.156	75,00	10.623.750.791	Sekretariat DPRD

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Ketepatan Penetapan Perda APBD	Status	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					477.218.082.961		491.534.625.450		506.280.664.214		521.469.084.140		537.113.156.664		553.226.551.364	
5.1		Perencanaan					9.814.086.793		10.108.509.397		10.411.764.679		10.724.117.619		11.045.841.148		11.377.216.382	
5.01.01		Badan Perencanaan Pembanguna, Riset dan Inovasi Daerah					9.814.086.793		10.108.509.397		10.411.764.679		10.724.117.619		11.045.841.148		11.377.216.382	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	5.072.059.573	100	5.224.221.361	100	5.380.948.001	100	5.542.376.441	100	5.708.647.735	100	5.879.907.167	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan	Persen	98,35	2.128.602.315	98,68	2.192.460.384	98,79	2.258.234.196	98,85	2.325.981.222	98,92	2.395.760.659	98,99	2.467.633.478	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Persentase Tingkat Partisipatif Perencaanan	Persen	24,45		24,67		24,71		25,09		25,39		25,52		
	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	Persen	100	2.613.424.905	100	2.691.827.652	100	2.772.582.482	100	2.855.759.956	100	2.941.432.755	100,00	3.029.675.737	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100		100		100		100		100		100,00		

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
5.2		Keuangan					457.734.433.175		471.466.466.171		485.610.460.156		500.178.773.960		515.184.137.179		530.639.661.294	
5.02.01		Badan Keuangan dan Aset Daerah					453.259.786.211		466.857.579.798		480.863.307.192		495.289.206.407		510.147.882.600		525.452.319.078	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	193.904.407.271	100	199.721.539.490	100	205.713.185.674	100	211.884.581.244	100	218.241.118.682	100	224.788.352.242	Badan Keuangan & Aset Daerah
	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan yang dialokasikan melalui TKD	Persen	WTP	254.254.268.625	WTP	261.881.896.684	WTP	269.738.353.584	WTP	277.830.504.192	WTP	286.165.419.318	WTP	294.750.381.897	Badan Keuangan & Aset Daerah
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	37,5		38,5		39,5		40		40,5		41,5		
			Meningkatnya tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	47,5		47,55		47,6		47,65		47,7		47,75		
				Persentase Penurunan SILPA	Persen	8,5		7,88		6,79		5,81		6,43		5,44		
	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir	Persen	100	5.101.110.315	100	5.254.143.624	100	5.411.767.933	100	5.574.120.971	100	5.741.344.600	100	5.913.584.938	Badan Keuangan & Aset Daerah
5.02.02		Badan Pendapatan Daerah					4.474.646.964		4.608.886.373		4.747.152.964		4.889.567.553		5.036.254.579		5.187.342.217	

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	persen	100	4.163.006.964	100	4.287.897.173	100	4.416.534.088	100	4.549.030.111	100	4.685.501.014	100	4.826.066.044	Badan Pendapatan Daerah
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	1,83	105.000.000	1,86	108.150.000	1,89	111.394.500	1,92	114.736.335	1,95	118.178.425	1,98	121.723.778	Badan Pendapatan Daerah
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks ETPD	persen	93	206.640.000	93,2	212.839.200	93,5	219.224.376	93,8	225.801.107	94,2	232.575.140	95	239.552.395	Badan Pendapatan Daerah
5.3	Kepegawaian					7.677.848.443		7.908.183.896		8.145.429.413		8.389.792.295		8.641.486.064		8.900.730.646	
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					7.677.848.443		7.908.183.896		8.145.429.413		8.389.792.295		8.641.486.064		8.900.730.646	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.147.501.133	100	3.241.926.167	100	3.339.183.952	100	3.439.359.471	100	3.542.540.255	100	3.648.816.463	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kesesuaian Penempatan Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	Persen	85,56	4.530.347.309	86,69	4.666.257.729	87,53	4.806.245.460	88,70	4.950.432.824	89,00	5.098.945.809	90,05	5.251.914.183	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
				Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Persen	91,58		92,35		93,02		93,70		94,30		95,50		
5.4		Pendidikan dan Pelatihan					1.050.000.000		1.081.500.000		1.113.945.000		1.147.363.350		1.181.784.251		1.217.237.778	
5.03.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					1.050.000.000		1.081.500.000		1.113.945.000		1.147.363.350		1.181.784.251		1.217.237.778	
	1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional	Persen	100	1.050.000.000	100	1.081.500.000	100	1.113.945.000	100	1.147.363.350	100	1.181.784.251	100,00	1.217.237.778	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.5		Penelitian dan Pengembangan					941.714.550		969.965.987		999.064.966		1.029.036.915		1.059.908.023		1.091.705.263	
5.01.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					941.714.550		969.965.987		999.064.966		1.029.036.915		1.059.908.023		1.091.705.263	

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	55	941.714.550	60	969.965.987	65	999.064.966	69	1.029.036.915	74	1.059.908.023	79	1.091.705.263	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Rasio perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah layak	Rasio	21	250.000.000	39	257.500.000	50	265.225.000	78	273.181.750	87	281.377.203	100	289.818.519	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					7.801.615.456		8.035.663.920		8.276.733.837		8.525.035.852		8.780.786.928		9.044.210.536	
6.01	Pengawasan					7.801.615.456		8.035.663.920		8.276.733.837		8.525.035.852		8.780.786.928		9.044.210.536	
6.01.01	Inspektorat					7.801.615.456		8.035.663.920		8.276.733.837		8.525.035.852		8.780.786.928		9.044.210.536	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.829.582.657	100	3.944.470.137	100	4.062.804.241	100	4.184.688.368	100	4.310.229.019	100	4.439.535.890	Inspektorat
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Persen	100	2.824.682.805	100	2.909.423.289	100	2.996.705.988	100	3.086.607.167	100	3.179.205.382	100,00	3.274.581.544	Inspektorat

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	1.147.349.994	3	1.181.770.494	3	1.217.223.609	3	1.253.740.317	3	1.291.352.526	3	1.330.093.102	Inspektorat
				Persentase Perangkat Daerah Yang Telah ditetapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM	Persen	38,89		47,22		55,56		69,44		97,22		100		
7		URUSAN KEWILAYAHAN					38.265.872.020		39.855.848.180		41.051.523.626		42.283.069.334		43.551.561.414		44.858.108.257	
7.01		Kecamatan dan Kelurahan					38.265.872.020		39.855.848.180		41.051.523.626		42.283.069.334		43.551.561.414		44.858.108.257	
7.01.01		Kecamatan dan Kelurahan					38.265.872.020		39.855.848.180		41.051.523.626		42.283.069.334		43.551.561.414		44.858.108.257	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	35.015.872.020	100	36.066.348.180	100	37.148.338.626	100	38.262.788.784	100	39.410.672.448	100	40.592.992.621	Kecamatan dan Kelurahan
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	Persen	100	650.000.000	100	669.500.000	100	689.585.000	100	710.272.550	100	731.580.727	100,00	753.528.148	Kecamatan dan Kelurahan

NO.	Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyaraka desa dan kelurahan	Persen	100	2.600.000.000	100	3.120.000.000	100	3.213.600.000	100	3.310.008.000	100	3.409.308.240	100,00	3.511.587.487	Kecamatan dan Kelurahan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					5.459.175.073		5.622.950.325		5.791.638.835		5.965.388.000		6.144.349.640		6.328.680.129	
8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					5.459.175.073		5.622.950.325		5.791.638.835		5.965.388.000		6.144.349.640		6.328.680.129	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.349.384.065	100	2.419.865.587	100	2.492.461.554	100	2.567.235.401	100	2.644.252.463	100	2.723.580.037	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	46	1.184.051.085	54	1.219.572.618	62	1.256.159.796	69	1.293.844.590	77	1.332.659.928	85,00	1.372.639.725	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum	persen	93,18	742.446.518	93,18	764.719.914	93,18	787.661.511	93,18	811.291.356	95,45	835.630.097	95,45	860.699.000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	25	52.500.000	30	54.075.000	35	55.697.250	40	57.368.168	45	59.089.213	50	60.861.889	Badan Kesatuan Bangsa & Politik

NO.		Urusan/OPD/ Program	Outcome	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya	persen	100	263.394.600	100	271.296.438	100	279.435.331	100	287.818.391	100	296.452.943	100	305.346.531	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	867.398.805	100	893.420.769	100	920.223.392	100	947.830.094	100	976.264.997	100	1.005.552.947	Badan Kesatuan Bangsa & Politik

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel 4.2, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 – 2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,23	3,39	3,45	3,65	3,78	3,85	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,65	73	73,16	73,76	74,59	75,10	
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,50	71,09	71,21	71,47	71,73	71,95	
4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	5	4,80	4,52	4,27	3,91	3,67	
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,72	12,50	11,35	10,18	9,44	8,69	
6	Indeks Pendidikan	Indeks	0,697	0,705	0,711	0,718	0,723	0,798	
7	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,98	57,63	58,28	58,93	59,58	60,23	
8	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	2,21	2,10	1,90	1,70	1,55	1,40	
9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	61,75	61,9	62,35	63,12	63,98	64,31	
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,51	0,49	0,45	0,42	0,39	0,37	

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	0,05	0,18	0,25	0,35	0,42	0,55	
12	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	5,2	10,25	14,35	19,55	25,19	30,45	
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,25	6,6	6,72	6,79	6,85	6,98	
14	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	68,200	87,183	92,124	97,064	102,005	106,945	
15	Rasio Gini	Indeks	0,285	0,280	0,276	0,273	0,268	0,265	
16	Rasio PDB Industri Pengolahan	Rasio	1,50	1,59	1,65	1,72	2,41	2,97	
17	Indeks Ekonomi Biru Daerah	Indeks	49,72	51,66	53,6	55,54	57,48	59,42	
18	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77	77,21	77,98	78,35	78,96	79,61	
19	Rasio PDB Pariwisata	Rasio	8,75	8,90	8,95	9,10	9,15	9,35	
20	Indeks Desa Membangun	indeks	0,6986	0,7032	0,7078	0,7124	0,717	0,7216	
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,05	0,0727	0,0740	0,0745	0,0790	0,0820	

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Inklusi Keuangan	Persen	2,13	2,2	2,28	2,35	2,42	2,46	
23	Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	Persen	23,14	25,89	28,64	31,39	34,14	36,89	
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,95	69,5	70,98	71,55	72,13	72,98	
25	Indeks RB General	Indeks	62,35	63,5	66,19	68,2	70,23	72,19	
26	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	32,88	32,91	33,56	34,79	35,65	36,57	
27	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	156,16	156,10	156,03	155,97	155,63	155,17	Cap
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,72	79,99	80,79	81,24	81,62	82,35	
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	53,37	53,49	53,54	54,92	55,02	55,45	
30	Indeks Ketahanan Budaya	Indeks	50	55,39	59,17	64,33	69,31	75	

Tabel 4.3 Penetapan Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2025 – 2030

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	32,88	32,91	33,56	34,79	35,65	36,57	Merupakan Indikator Visi Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	Kumulatif	Persen	9,73	10,19	10,65	11,11	11,58	12,03	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	Tahunan	Persen	16,69	17,85	19	20,16	21,31	22,46	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
2	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,531	0,532	0,532	0,534	0,534	0,535	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Kualitas Lingkungan Hidup								
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	62,72	79,99	80,79	81,24	81,62	82,35	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	4,50	4,80	5,20	5,40	5,90	6,10	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	c) Pengelolaan Sampah								
	- Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	4,74	4,92	5,21	5,69	5,87	6,10	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	31,28	31,56	32,23	33,41	34,45	35,07	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									Utara Tahun 2025 - 2045
4	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan								
	a) Ketahanan Energi								
	- Konsumsi listrik per kapita	Kwh	1605	1654	1751	1799	1878	2135	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	- Intensitas energi primer	SBM/Rp Milyar	189	189	189	189	189	189	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	b) Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77	77,21	77,43	77,65	77,81	77,99	
	c) Ketahanan Air								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	- Kapasitas air baku	m3/detik	0,47	0,51	0,72	0,89	1,03	1,22	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	- Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persen	31,77	33,45	35,79	38,91	42,67	45,97	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
5	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	156,16	156,10	156,03	155,97	155,63	155,17	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,86	3,93	3,97	4,13	4,19	4,29	
7	Rasio Penduduk	Rasio	105,50	105,13	104,56	104,11	103,85	103,69	
8	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	16,75	17,25	17,56	18,17	18,56	19,07	
B.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,72	12,50	11,35	10,18	9,44	8,69	Merupakan Indikator Visi dan IUP Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta	68,200	87,183	92,124	97,064	102,005	106,945	Merupakan Indikator Visi Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Rasio	1,50	1,70	1,93	2,37	2,41	2,97	Merupakan Indikator Visi Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
4	Rasio Gini	Indeks	0,285	0,280	0,276	0,273	0,268	0,265	Merupakan Indikator Visi Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
5	Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota	Persen	3,72	4,43	5,14	5,85	6,56	7	Merupakan Indikator Visi Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,65	73	73,16	73,76	74,59	75,10	Merupakan Indikator Visi Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,50	71,09	71,21	71,47	71,73	71,95	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
8	Kesehatan Ibu dan Anak :								
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Rasio	0	0	0	0	0	0	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	5	4,80	4,52	4,27	3,91	3,67	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
9	Penanganan Tuberkulosis								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	97	98,50	99,87	100	100	100	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	100	100	100	100	100	100	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	94	99,93	100	100	100	100	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
11	Hasil Pembelajaran								
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	i) Literasi membaca	Persen	9,09	9,51	10,36	11,98	12,98	14,39	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	ii) Numerasi	Persen	0,00	0,50	1,23	2,70	3,55	5,34	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
	i) Literasi membaca	Persen	21,32	23,67	25,68	27,98	29,31	30,50	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ii) Numerasi	Persen	14,38	15,79	17,15	19,01	20,51	21,93	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	9,15	9,85	9,92	9,99	10,04	10,17	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	d. Harapan lama sekolah	Tahun	13,30	13,33	13,33	13,34	13,34	13,34	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
12	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persen	60,35	60,41	60,43	60,46	60,49	60,51	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Persen	60,35	60,36	60,38	60,39	60,41	60,43	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
14	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi	Persen	60	63,47	66,57	69,37	70,52	72,59	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
15	Persentase penyandang disabilitas bekerja di Sektor formal	Persen	15	17,27	18,17	20,05	21,97	22,53	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	53,37	53,49	53,54	54,92	55,02	55,45	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	79,9	79,96	80,91	81,45	81,92	82,73	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	61,75	61,9	62,35	63,12	63,98	64,31	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
19	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,51	0,49	0,45	0,42	0,39	0,37	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
20	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,25	6,6	6,72	6,79	6,85	6,98	
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,21	2,10	1,90	1,70	1,55	1,40	
22	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	83,41	83,91	84,27	84,98	85,32	87,82	
23	Indeks Pembangunan Gender	Angka	8	87,63	87,98	88,21	88,56	88,71	
24	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,23	3,39	3,45	3,65	3,78	3,85	Merupakan Indikator Visi Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
2	Indeks Ekonomi Biru Daerah	Indeks	49,72	51,66	53,6	55,54	57,48	59,42	Merupakan Indikator Visi Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	1,50	1,70	1,93	2,37	2,41	2,97	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
4	Pengembangan Pariwisata								
	a) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,35	10,52	10,78	10,92	11,29	11,89	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b) Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang)	Orang	120.000	180.000	200.000	220.000	250.000	280.000	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
5	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Persen	0	0,5	0,85	1,15	1,41	1,59	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
6	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD								
	a) Proporsi Jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	Persen	11,55	11,63	11,97	12,10	12,29	12,35	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	b) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten	Persen	1,09	1,17	1,21	1,25	1,30	1,32	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c) Rasio kewirausahaan daerah	Rasio	3,32	3,45	3,51	3,69	3,89	4,12	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Rasio	1,04	1,07	1,08	1,10	1,19	1,25	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	e) Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	2,83	2,85	2,86	2,88	2,89	2,93	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78,56	79,21	79,54	79,76	79,91	80,20	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	55,15	56,37	56,95	57,29	57,74	58,1	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Inovasi Daerah	indeks	18,32	18,5	18,97	19,3	19,5	20,50	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
10	Tingkat Penerapana Ekonomi Hijau								
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	indeks	80,8	80,95	81,03	81,35	81,59	81,75	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	15,92	16,35	17,29	17,95	18,09	18,40	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	5,92	6,13	6,31	6,57	6,89	7,01	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Koefisien Variasi harga antarwilayah tingkat Kabupaten	Persen	7,91	7,85	7,81	7,65	7,53	7,21	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	36,4	36,12	35,27	35,09	34,95	34,86	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
14	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	59,7	59,75	60,15	60,42	60,69	60,81	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
15	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan								
	a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	64,9	65,3	65,7	66,12	66,56	67,35	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									Utara Tahun 2025 - 2045
	b) Status desa membangun	Persen	0,680	0,7173	0,7253	0,7391	0,7417	0,7518	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
16	Tingkat Inflasi	Persen	2,5	2,48	2,41	2,36	2,32	2,25	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,05	0,0727	0,074	0,0745	0,079	0,082	
18	Angka Ketergantungan	Persen	50,91	52,15	53,95	55,08	56,83	58,19	
D.	ASPEK LAYANAN UMUM								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat maturitas SPIP	Indeks	3,041	3,052	3,071	3,082	3,091	3,102	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,5	2,93	3,07	3,11	3,19	3,25	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,99	3,01	3,17	3,28	3,32	3,47	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
4	Indeks Integritas Daerah (Nilai SPI - Survey Penilaian Integritas)	Indeks	68	69,73	71,89	72,99	74,01	75,36	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	Indeks	84	84,95	85,23	85,69	86,02	86,91	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
6	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persen	70,08	70,97	71,56	72,19	73,23	73,98	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
7	Indeks Demokrasi Nasional	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
8	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan								
	a) Total dana pihak ketiga/PDRB	Persen	21,4	22,45	23,59	25,93	26,96	28,61	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b) Aset dana pensiun/PDRB	Persen	0,18	0,18	0,19	0,21	0,21	0,23	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	c) Nilai transaksi saham per provinsi berupa nilai rata-rata tahunan		302,98	305,4	310,59	329,79	331,29	343,91	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
	d) Total kredit/PDRB	Persen	22,5	22,5	23,45	24,59	25,91	27,13	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
9	Inklusi Keuangan	Persen	2,13	2,2	2,28	2,35	2,42	2,46	
10	Jumlah kerjasama daerah	PKS	5	5	6	6	7	8	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									Utara Tahun 2025 - 2045
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	90	90,29	90,45	91,29	92,3	93,70	Merupakan Indikator Utama Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2025 - 2045
12	Nilai SAKIP	Angka	66,97	67,41	67,98	68,57	69,21	70,14	
13	Indeks Merit Sistem	Angka	135	145	159	167	176	188	
14	Indeks Pengelolaaan Keuangan Daerah	Indeks	59,05	59,55	60,05	60,55	61,35	61,5	
15	Indeks berAkhlak	Indeks	66,5	67,53	69,1	70,52	72,31	73,49	
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	60,15	60,95	61,35	61,85	62,15	62,55	
18	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	50	59	63	68	72	75	
19	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,61	2,63	2,65	2,68	2,71	2,75	
20	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	67,12	68,21	69,43	69,99	70,2	70,67	
21	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
E	INDIKATOR KINERJA KUNCI								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	PENDIDIKAN								
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	95,10	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	99,69	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	62,88	69,37	75,86	76,62	77,38	78,15	
4	Kemampan Literasi								
	SD	Persen	51,68	54,18	56,68	59,18	61,68	64,18	
	SMP	Persen	65,27	66,37	67,47	68,57	69,67	70,77	
5	Kemampuan Numerasi								
	SD	Persen	48,36	51,26	54,16	57,06	59,96	62,86	
	SMP	Persen	61,24	62,74	64,24	65,74	67,24	68,74	
6	Iklim Keamanan								
	SD	Persen	75,44	76,34	77,24	78,14	79,04	79,94	
	SMP	Persen	73,58	75,08	76,58	78,08	79,58	81,08	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Iklim Kebhinekaan								
	SD	Persen	70,55	71,55	72,55	73,55	74,55	75,55	
	SMP	Persen	74,06	75,06	76,06	77,06	78,06	79,06	
8	Iklim Inklusivitas								
	SD	Persen	59,3	61,8	64,3	66,8	69,3	71,80	
	SMP	Persen	62,51	64,91	67,31	69,71	72,11	75	
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persen	62,82	63,57	64,32	65,07	65,82	67	
10	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	60,07	71,49	86,72	100	100	100	
1.02	KESEHATAN								
1	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	rasio	4,6	4,3	3,97	3,59	3,23	3,00	
2	Persentase persalinan di Fasyankes	Persen	80,1	84,12	87,32	91,67	93,54	95,00	
3	Persentase ANC (Kunjungan ibu hamil) 6 Kali	Persen	70,51	76,19	80,13	84,51	88,19	90,00	
4	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	82	83,91	85,1	87	88,82	90,00	
5	Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita	Persen	4,4	4,1	3,7	3,2	2,6	1,90	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD 90 Tablet)	Persen	72,35	78,19	83,46	86,19	88,9	91,00	
7	Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Persen	36	40	49	56	63	70,00	
8	Persentase Lansia Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	95,6	96,1	96,65	97,23	97,61	98,00	
9	Insidensi HIV per 100.000 Penduduk	Rasio	0	0	0	0	0	0	
10	Jumlah Desa/Kelurahan dengan 5 pilar STBM	Desa/ Kelurahan	2	11	20	40	59	70	
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	30	36,1	42,19	49,51	55,17	60,00	
12	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persen	75	80,19	84,91	90,2	96,29	100,00	
13	Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di RS Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Kesehatan	Persen	60,13	74,1	79,1	83,19	87,15	90,00	
14	Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas yang Memenuhi Standar Kesehatan	Persen	44,1	59,16	67,91	75,23	82,22	90,00	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna	Kategori	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
16	Jumlah RSUD Tipe D yang ditingkatkan jadi Tipe C	Unit	0	0	1	1	1	1	
17	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Unit	7	7	7	9	22	22	
18	Jumlah Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar (9 Nakes)	Unit	6	10	14	17	20	22,00	
19	Rasio Dokter Spesialis per 1.000 penduduk	Rasio	0,1	0,12	0,152	0,179	0,20	0,24	
20	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial	Persen	92	94	96	98	100	100	
21	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persen	100	100	100	100	100	100,00	
22	Persentase tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat	Persen	59,5	64	69	74	79	86,00	
23	Cakupan Apotek dan Toko Obat yang memiliki izin	Persen	100	100	100	100	100	100,00	
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Rasio	70,52	71,98	73,01	73,98	74,50	75,31	
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Rasio	56,10	56,91	57,51	58,11	58,69	59,21	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	31,86	33,74	36,10	38,24	39,41	40,41	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	74,32	79,68	84,27	89,77	92,39	95,69	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	65,45	67,13	70,08	72,44	73,92	75,65	
6	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Rasio	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	15,96	16,94	18,34	21,37	24,59	26,91	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	7,95	8,17	8,23	8,41	8,59	8,72	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	100	100	100	100	
1.04	PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0,00	0,50	1,23	2,00	2,68	3,00	
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	0,55	1,45	1,98	2,50	3,95	5,10	
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	0,50	3,51	10,31	15,92	22,19	29,30	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	34,07	38,65	39,99	42,87	45,02	48,79	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	2,35	3,50	6,17	7,34	8,94	9,50	
3	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/Non Kebakaran	Persen	72	74	76	78	80	82	
6	Persentase Waktu Tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Persen	75,30	76,50	78,35	79,96	82,31	85,23	
1.06	SOSIAL								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	8,69	9,25	9,30	12,70	15,50	15,45	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	98,50	98,67	98,87	98,93	98,99	99,02	
3	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persen	59,41	70,59	76,47	88,24	94,12	100	
4	Persentase keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	7,35	7,68	8,04	8,44	8,88	9,37	
2	UNSUR PEMERINTAHAN BUKAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.01	TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	65,37	67,91	68,91	69,35	69,59	69,89	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	0,60	0,65	0,72	0,75	1,00	1,23	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	74,50	75,90	77,90	78,10	79,50	80,21	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	58,79	59,31	59,87	60,23	60,50	61,21	
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	61,12	61,60	62,21	62,75	63,21	65,20	
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	1,00	1,02	1,05	1,07	1,09	2,20	
2	Pesentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 kelahiran hidup)	Persen	100	100	100	100	100	100	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	615,00	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	
2.03	PANGAN								
1	Persentase ketersediaan pangan	Persen	43,25	47,50	49,56	53,45	55,23	60,00	
2.04	PERTANAHAN								
1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.05	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	15,50	17,35	19,25	22,39	25,55	28,50	
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,69	57,91	58,45	58,71	59,35	59,92	
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,91	95,35	95,61	95,92	96,21	96,87	
4	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	94,79	94,89	95,21	95,64	95,88	96,17	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	61,50	62,70	63,70	64,50	65,90	66,78	
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	96,75	98,10	99,45	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	98,25	98,65	99,10	99,56	100,00	100,00	
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,35	98,98	99,50	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.05	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	98,74	99,37	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	45,28	50,00	48,43	50,31	52,20	53,46	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.06	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rasio	5,10	4,20	4,01	3,70	3,10	2,80	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	56,4	58,2	60,10	61,90	62,90	63,80	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,6	11,35	10,90	10,60	10,3	10,08	
2.07	PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	3,00	3,00	3,25	3,40	3,65	3,87	
2	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Persen	55	57	60	65	66	68	
2.08	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks	76	78	80	86	100	100	
2	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	70	76	82	90	100	100	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.09	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Proporsi jumlah UKM	Persen	23,00	23,70	24,40	25,10	25,80	26,50	
2	Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	
3	Persentase Koperasi Sehat	Persen	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	
2.10	PENANAMAN MODAL								
1	Nilai realisasi Investasi Daerah	Rp.	1.260.897.698.728	1.376.269.838.161	1.514.584.956.896	1.681.189.302.155	1.873.685.477.252	2.102.837.211.120	
2.11	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	5	10	15	20	25	30	
2	Predikat Daerah dalam kejuaraan tingkat Provinsi	Predikat	2	23	25	27	30	35	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.12	STATISTIK								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.13	KEBUDAYAAN								
1	Persentase terlestarinya Cagar Budaya daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.14	PERPUSTAKAAN								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	68,23	68,54	68,96	69,20	69,42	69,66	
2.15	KEARSIPAN								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Elektronik di lingkup Pemerintahan Daerah	Kategori	D/Sangat Kurang	C/Kurang	CC/Cukup	B/Baik	B/Baik	BB/Sangat Baik	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	URUSAN PILIHAN								
3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	15.516	15.568	15.621	15.673	15.726	15.779	
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	9.884	9.909	9.934	9.959	9.984	10.009	
3	Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton							
3.2	PARIWISATA								
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	18,50	20,34	22,50	25,10	28,10	30,15	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	9,20	9,60	10,00	10,42	10,81	11,50	
3	Lama menginap	Hari	2	2	3	3	3	4	
3.3	PERTANIAN								
1	Jumlah Produksi Jagung	Ton	4.600	4.820	5.020	5.220	5.421	5.620	
2	Jumlah Produksi Padi	Ton	7.500	8.100	8.600	9.100	9.600	10.100	
3	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	36,30	39,90	43,90	48,30	53,10	58,40	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	695,20	764,70	841,20	925,30	1.017,80	1.119,60	
5	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kg/Ha	4.807	5.288	5.816	6.398	7.038	7.742	
6	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Kg/Ha	1.553	1.708	1.879	2.066	2.273	2.500	
7	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2.020	2.222	2.444	2.688	2.957	3.253	
8	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	293	322	354	389	428	471	
9	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit	Ton	218.266	251.006	301.208	376.510	489.462	660.774	
10	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, itik, babi, ayam)	Kg	208.023	222.000	236.650	252.270	268.970	286.860	
11	Jumlah Produksi Telur	Kg	90.619	94.822	99.287	103.981	108.918	113.997	
3.4	PERDAGANGAN								
1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	25	45	65	80	95	100	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	85	92	95	98	100	100	
3.5	PERINDUSTRIAN								
1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Rp. Juta	48,35	55,61	60,50	67,80	83,50	95,00	
3.6	TRANSMIGRASI								
1	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persen	80,31	80,59	80,72	80,89	80,99	81,19	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.1	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Persentase peningkatan perumusan kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Persen	68,60	72,31	76,99	80,12	84,12	87,25	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase peningkatan perumusan kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam	Persen	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	
4.2	SEKRETARIAT DPRD								
1	Persentase Produk legislatif yang terealisasi menjadi PERDA	Persen	50	55	60	65	70	75	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.1	PERENCANAAN								
1	Persentase Sinergitas Perencanaan	Persen	98,35	98,68	98,79	98,85	98,92	98,99	
2	Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Tingkat Partisipatif Perencaanan	Persen	24,45	24,67	24,71	25,09	25,39	25,52	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.2	KEUANGAN								
1	Opini Laporan Keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir	Persen	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,30	
3	Indeks ETPD (Elektronivikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	Skor	57,10	59,83	61,95	63,45	65,99	68,91	
5.3	KEPEGAWAIAN								
1	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	Persen	85,56	86,69	87,53	88,70	89,00	90,05	
2	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	Persen	91,58	92,35	93,02	93,70	94,30	95,50	
5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional	Persen	100	100	100	100	100	100	
5.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Rasio perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah layak	Persen	21%	39%	50%	78%	87%	100	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.1	PENGAWASAN								
1	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	
2	Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Persen	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah ditetapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM	Persen	38,89	47,22	55,56	69,44	97,22	100,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.1	KECAMATAN								
1	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	46	54	62	69	77	85	
2	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan	Persen	15	15	23	31	38	46	
3	Persentase kewaspadaan nasional didaerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persen	46	46	54	62	69	77	

Sumber : Tim Penyusun, 2025

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, sekaligus acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) lima tahunan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai dokumen utama yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2025–2029 menjadi visi dan misi pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dilantik hingga akhir masa jabatan. Untuk mewujudkan visi daerah: *"Konawe Utara sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera"*, ditetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang wajib dilaksanakan selama periode 2025–2029 dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sumber pendanaan lainnya.

Kaidah pelaksanaan pembangunan daerah meliputi: a) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan, serta b) Keterhubungan dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran diperlukan untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran. Perencanaan yang berkualitas menjadi kunci bagi pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Oleh karena itu, perlu dijaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan pendanaan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan berbasis data, khususnya dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Partisipasi aktif semua pihak menjadi syarat utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.1.2 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045, RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025–2029, serta RTRW Kabupaten Konawe Utara. Dokumen ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan sinkronisasi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keselarasan tersebut meliputi: Periodesasi; Strategi dan Arah Kebijakan; Indikator Kinerja Utama Daerah yang selaras dengan indikator pembangunan nasional; Program Perangkat Daerah yang mendukung prioritas pembangunan provinsi dan nasional. RPJMD Kabupaten Konawe Utara juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD setiap tahun, serta menjadi pedoman bagi desa dan kecamatan dalam menyusun rencana pembangunan yang sinergis dengan arah kebijakan daerah.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan, pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan data yang akurat. Pengendalian dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan.

5.2.1. Pengendalian Perencanaan

Dilakukan untuk memastikan konsistensi dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, hingga Renja PD. Aspek pengendalian perencanaan mencakup: Konsistensi tujuan, sasaran, indikator, dan program pembangunan; Penetapan prioritas pembangunan daerah dengan indikator yang terukur; Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan penyusunan rencana mitigasi.

5.2.2 Pengendalian Pelaksanaan

Dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan. Pengendalian ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap: Prioritas pembangunan daerah; Mitigasi risiko pencapaian tujuan pembangunan; Evaluasi capaian sasaran prioritas, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, serta indikator kinerja program.

Untuk memperkuat efektivitas pengendalian, diperlukan dukungan regulasi yang mengatur pemantauan, evaluasi, manajemen risiko, dan manajemen kinerja pembangunan daerah. Regulasi ini dievaluasi secara berkala agar selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengendalian pelaksanaan dan evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi Peraturan Daerah tentang RPJMD

   Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara berkewajiban untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat sebagai bentuk sosialisasi, transparansi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

2. Pelaksanaan Program oleh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

   Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

3. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

   Setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029. Renstra tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

4. Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

   Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah berkewajiban untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta capaian hasil RPJMD secara berkala dan sistematis.

5. Penerapan Sistem “Kendali Konasara”

   Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah akan dilaksanakan melalui penerapan sistem Kendali Konasara, yakni sistem pengendalian perencanaan dan capaian kinerja yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bernilai strategis, dengan

memperhatikan prinsip-prinsip: Keberlanjutan (*sustainability*), kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan antargenerasi.

6. Pemanfaatan Aplikasi Kendali Konasara Berbasis Cloud

   Dalam implementasinya, Kendali Konasara akan dituangkan dalam bentuk Aplikasi berbasis Cloud yang dapat diakses secara *real-time* oleh Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterbaruan informasi dalam proses pengendalian perencanaan dan pembangunan daerah.

7. Integrasi Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

   Manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini melibatkan proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan, sehingga proses pembangunan dapat dilakukan secara lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan.

5.3. Sinergi Pendanaan Pembangunan

Sinergi sumber pendanaan merupakan salah satu fondasi utama dalam mendorong terwujudnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan merata. Berbagai sumber pembiayaan yang dapat dioptimalkan meliputi: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten; (2) Belanja Kementerian/Lembaga; (3) Transfer ke Daerah dan Dana Desa termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK); (4) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); (5) Pinjaman/Hibah dari Luar Negeri (PHLN); (6) Investasi Swasta; serta sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan setiap sumber pendanaan dilakukan dengan mengacu pada regulasi dan mekanisme yang berlaku, sehingga dapat memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaannya. Kerangka pendanaan ini disusun tidak hanya untuk menjamin keselarasan antarsumber pembiayaan sesuai dengan kewenangan masing-masing, tetapi juga untuk memperkuat integrasi pendanaan yang mendukung prioritas pembangunan daerah.

Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi multipihak yang erat dan berkesinambungan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan lainnya menjadi kunci dalam memperluas jangkauan manfaat pembangunan. Melalui kerjasama yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada hasil, diharapkan setiap rupiah yang digelontorkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah.

5.4. Kesimpulan

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029 bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan kompas pembangunan yang akan menuntun langkah bersama menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Di dalamnya tercermin visi besar untuk menjadikan Konawe Utara sebagai Rumah Bersama, tempat setiap warga merasa memiliki, dilibatkan, dan merasakan manfaat pembangunan.

Keberhasilan RPJMD ini tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan: masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan lainnya. Dengan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta sinergi dalam setiap langkah, cita-cita pembangunan yang tertuang dalam dokumen ini akan menjadi nyata dan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mari bersama-sama kita jadikan RPJMD ini sebagai wujud ikhtiar kolektif untuk menorehkan sejarah baru pembangunan Konawe Utara yang berkelanjutan, inklusif, dan bermartabat. Dengan semangat gotong royong dan doa yang tulus, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan bagi kita semua dalam mewujudkan Konawe Utara sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera.

BUPATI KONAWE UTARA,

ttd.

H. IKBAR, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KONAWE UTARA

ENDI SAMRIN, SH., LLM
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19860715 201101 1 017

PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA

RPJMD 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029

"Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera"

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025

bapperida KONAWE UTARA